



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah karena adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir pada tahun 2022 sehingga tidak ada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan pedoman Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan . . .

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, LSM/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

15. Perencanaan . . .

15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
16. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Prioritas . . .

24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
29. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
30. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
32. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
33. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
34. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
35. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
37. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
38. Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai Sasaran RPD.
39. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

40. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
41. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu kegiatan, Program atau Sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
42. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
43. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu Program.
44. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa Program.
45. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

BAB II

RPD

Pasal 2

RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal . . .

Pasal 3

- (1) RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN;
 - BAB II GAMBARAN UMUM;
 - BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS;
 - BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
 - BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
 - BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - BAB IX PENUTUP.
- (2) Isi beserta uraian RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPD

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan RPD; dan
 - c. hasil RPD.

(4) Pengendalian . . .

- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis dilakukan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 5

Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian Kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Daerah-daerah tersebut kemudian tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah. Jika mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, pada saat belum tersedia RPJMD, maka penyusunan RKPD mengacu pada RPJPD. Akan tetapi, sesuai dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh daerah, RPJP yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD karena penyusunannya belum mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017.

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman

penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Selanjutnya dokumen perencanaan dimaksud akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Lebih lanjut, Inmendagri 70 Tahun 2021 juga mengatur bahwa bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/walikota berakhir pada Tahun 2022, penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, RKP Tahun 2023, RPIMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dan RKPD Provinsi Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Masa jabatan Bupati Pati adalah Tahun 2012-2017 sehingga Kabupaten Pati juga harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati (RPD Kabupaten Pati) Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik dan memanfaatkan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk dari DPRD Kabupaten Pati. Sesuai amanat Inmendagri, RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 harus ditetapkan pada Minggu Kedua Bulan Maret Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Pati.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis penyusunan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah namun dengan dilakukan elaborasi terhadap Inmendagri No. 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Secara rinci dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

- (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal;
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

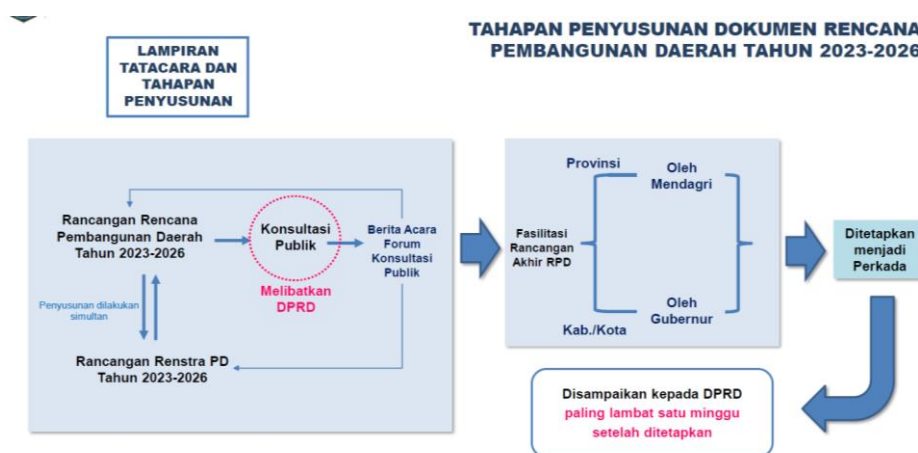
Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, sebagaimana amanat Inmendagri 70 Tahun 2021 berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Sementara itu, keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan menurut Permendagri 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut (dalam hal ini RPJMD digantikan oleh RPD Tahun 2023-2026 dan perlu dilakukan elaborasi dengan ketentuan Inmendagri No. 70 Tahun 2021):

4) Hubungan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah ditopang oleh perencanaan daerah dengan perencanaan perangkat daerah yang terkait erat secara sinergis, oleh karena itu RPD merupakan pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun renstra. Demikian halnya berbagai isu dan permasalahan sektoral yang berasal dari masing-masing perangkat daerah juga menjadi masukan bagi penyusunan RPD. Adanya sinergi antara RPD dengan renstra perangkat daerah pada tahap selanjutnya akan menopang efektivitas pencapaian indikator kinerja daerah yang ditopang oleh capaian kinerja kepala perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya. Berikut adalah alur penyusunan RPD dan kaitannya dengan Renstra PD.



Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan RPD dan Renstra PD

5) Hubungan RPD dengan RKPD

RPD Tahun 2023-2026 merupakan rencana jangka menengah selama 4 (empat) tahun dan dijabarkan setiap tahunnya oleh RKPD. RKPD berpedoman pada tema pembangunan RPD setiap tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

6) Hubungan RPD dengan RTRW

Penyusunan RPD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, yang diwujudkan melalui Kebijakan Penataan Ruang Daerah yang meliputi:

- pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
- pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal;
- pelestarian kawasan lindung;
- pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional;

- e. pengembangan kawasan pesisir;
- f. pemanfaatan potensi pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan;
- g. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengaturan kegiatan industri yang berada diluar kawasan peruntukan industri;
- h. pengembangan kawasan permukiman; dan
- i. pengembangan kawasan strategis.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Pati dan guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pemilu Serentak Tahun 2024.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan;
- b. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RPD yang terdiri dari: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

- BAB II : GAMBARAN UMUM**
Bagian ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari 4 sub-bab yaitu: Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Analisis tersebut terdiri dari 3 sub-bagian yaitu: Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan.
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**
Bab ini menyajikan analisis mengenai butir-butir isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan tiga tahun mendatang. Bagian ini terdiri dari: Permasalahan Pembangunan dan Isu strategis.
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN**
Bagian ini memuat narasi tujuan dan sasaran pembangunan yang disertai dengan indikator tujuan dan sasaran yang jelas, ringkas, mudah dipahami, dan terukur.
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS**
Bab ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai sasaran, dan arah kebijakan dari masing-masing strategi. Program prioritas dirumuskan dari masing-masing strategi. Program prioritas menggambarkan keterpaduan program terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
Bab ini memuat keseluruhan program yang telah dirumuskan, baik program prioritas maupun program perangkat daerah beserta indikator kinerja, target indikator kinerja, dan pagu indikatif pendanaan.
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
Bagian ini menyajikan indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- BAB IX : PENUTUP**
Bab ini memuat pernyataan penutup dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur Laut. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kawasan perkotaan Pati, Juwana, dan Tayu dalam perencanaan struktur ruang Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan berdasarkan pembagian wilayah pengembangan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati masuk dalam Wilayah Pengembangan Wanarakuti yaitu kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara yang berpusat di kawasan Perkotaan Kudus.

Tema pengembangan Kawasan Wanarakuti adalah pembangunan yang mengunggulkan sektor industri pengolahan dan pariwisata terpadu (alam dan budaya) yang didukung oleh sektor agrominapolitan (pertanian dan perikanan) sesuai dengan potensi wilayah. Kabupaten Pati merupakan pusat pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, dan industri. Kegiatan industri dipusatkan di Kecamatan Margorejo-Pati sedangkan kegiatan perikanan dipusatkan di Kecamatan Juwana.



Gambar 2 . 1 Peta Kedudukan Kabupaten Pati dalam Kancah Regional Provinsi Jawa Tengah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi.

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 157.324 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat) hektar atau 1.573,324 km² (Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2020) dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

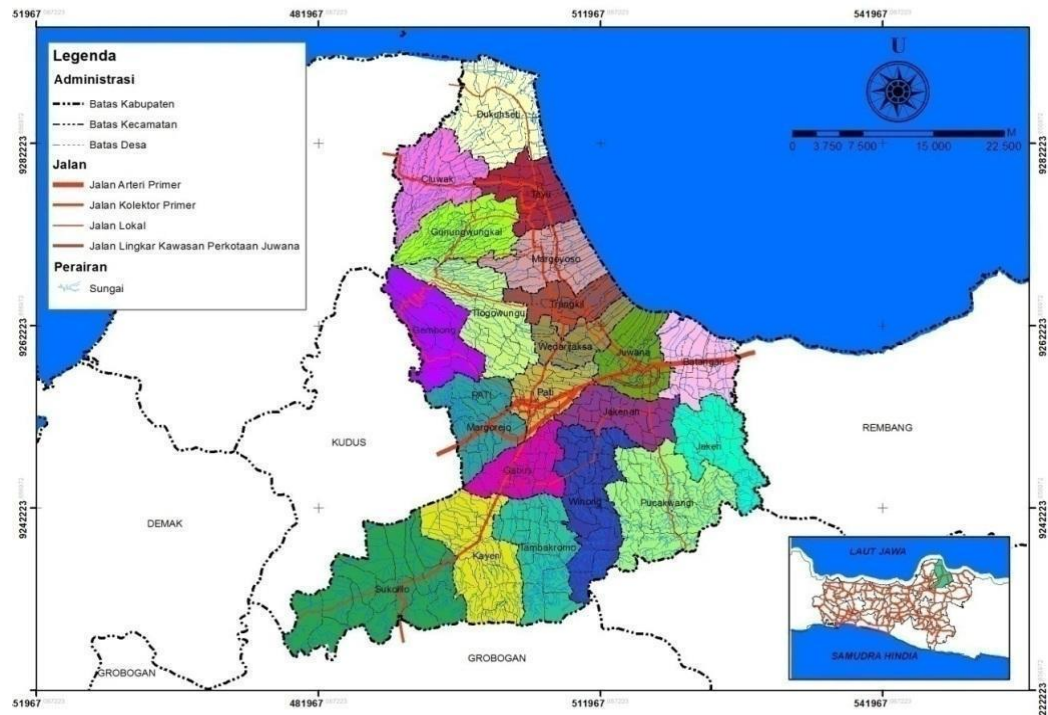
- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara.

Secara administrasi, Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 1.485 RW, dan 7.556 RT.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pati Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Sukolilo	15.874	16	-	86	480
2	Kayen	9.603	17	-	70	434
3	Tambakromo	7.247	18	-	62	343
4	Winong	9.994	30	-	82	471
5	Pucakwangi	12.283	20	-	68	332
6	Jaken	6.852	21	-	83	311
7	Batangan	5.066	18	-	53	274
8	Juwana	5.593	29	-	87	357
9	Jakenan	5.304	23	-	58	341
10	Pati	4.294	29	5	100	570
11	Gabus	5.551	24	-	74	386
12	Margorejo	6.181	18	-	65	328
13	Gembong	6.730	11	-	85	276
14	Tlogowungu	9.446	15	-	71	321
15	Wedarijaksa	4.085	18	-	58	339
16	Trangkil	4.284	16	-	60	374
17	Margoyoso	5.997	22	-	80	333
18	Gunungwungkal	6.180	15	-	45	241
19	Cluwak	6.931	13	-	77	308
20	Tayu	4.759	21	-	75	395
21	Dukuhseti	8.159	12	-	46	345
	Jumlah	150.368	406	5	1.485	7.556

Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka, 2022



Sumber: RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021.

Gambar 2 . 2 Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Kabupaten Pati

2) Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak antara $6^{\circ}25'-7^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan antara $100^{\circ}50'-111^{\circ}15'$ Bujur Timur. Gambaran kekhasan posisi Kabupaten Pati yang berpotensi memberikan keuntungan komparatif yaitu posisi strategis di Jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap.

3) Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu:

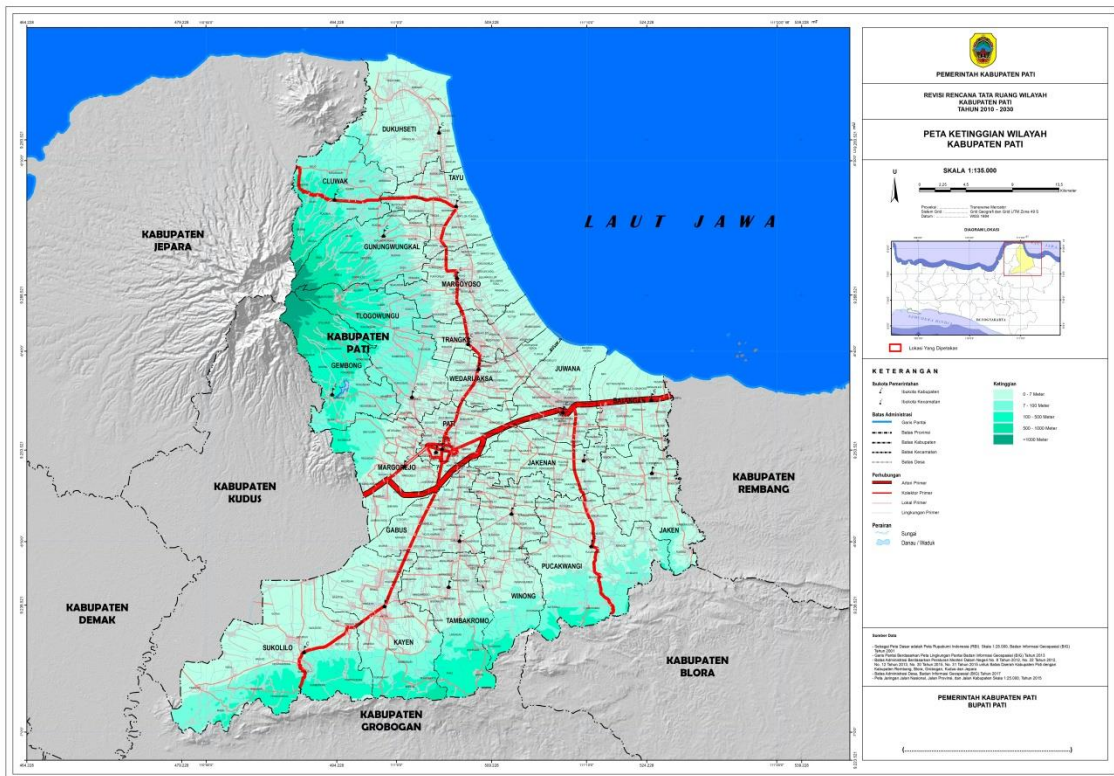
- Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak.
- Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian utara.
- Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

Dilihat ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungwungkal dan Kecamatan Tlogowungu dengan ketinggian > 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), seluas masing-masing 90 ha, 735 ha, 358 ha, dan 238 ha. Untuk ketinggian 100 – 500 mdpl juga terdapat di keempat kecamatan tersebut selain itu juga terdapat di Kecamatan Kayen, Pucakwangi, Sukolilo, dan Tambakromo yang berada di selatan wilayah Kabupaten Pati yang merupakan wilayah pegunungan kapur. Wilayah kecamatan lain rata-rata berada di ketinggian 0 – 7 mdpl.

Tabel 2. 2 Keetinggian dari Permukaan Air Laut Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Luas Berdasar Ketinggian (Hektar)					Total
		0 - 7 Meter	7 - 100 Meter	100 - 500 Meter	500 - 1000 Meter	>1000 Meter	
1	Batangan	5.706	0	0	0	0	5.706
2	Cluwak	347	3.994	2.310	557	90	7.298
3	Dukuhseti	8.678	495	0	0	0	9.173
4	Gabus	5.621	0	0	0	0	5.621
5	Gembong	37	2.072	3.228	1.403	735	7.475
6	Gunungwungkal	1.084	2.610	2.213	836	358	7.101
7	Jaken	6.421	487	0	0	0	6.908
8	Jakenan	5.435	0	0	0	0	5.435
9	Juwana	6.235	0	0	0	0	6.235
10	Kayen	7.118	1.890	1.173	219	0	10.400
11	Margorejo	5.151	1.454	414	0	0	7.019
12	Margoyoso	5.422	895	4	0	0	6.321
13	Pati	4.533	0	0	0	0	4.533
14	Pucakwangi	7.283	4.000	820	0	0	12.103
15	Sukolilo	9.185	3.601	3.502	0	0	16.288
16	Tambakromo	4.484	1.265	2.185	13	0	7.947
17	Tayu	5.096	164	0	0	0	5.260
18	Tlogowungu	1.799	4.014	1.941	733	238	8.725
19	Trangkil	3.949	393	0	0	0	4.342
20	Wedarijaksa	4.341	0	0	0	0	4.341
21	Winong	6.926	1.643	525	0	0	9.094
Total		104.851	28.977	18.315	3.761	1.421	157.325

Sumber : Hasil Olah Peta, 2021



Sumber : Matek Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Kabupaten Pati

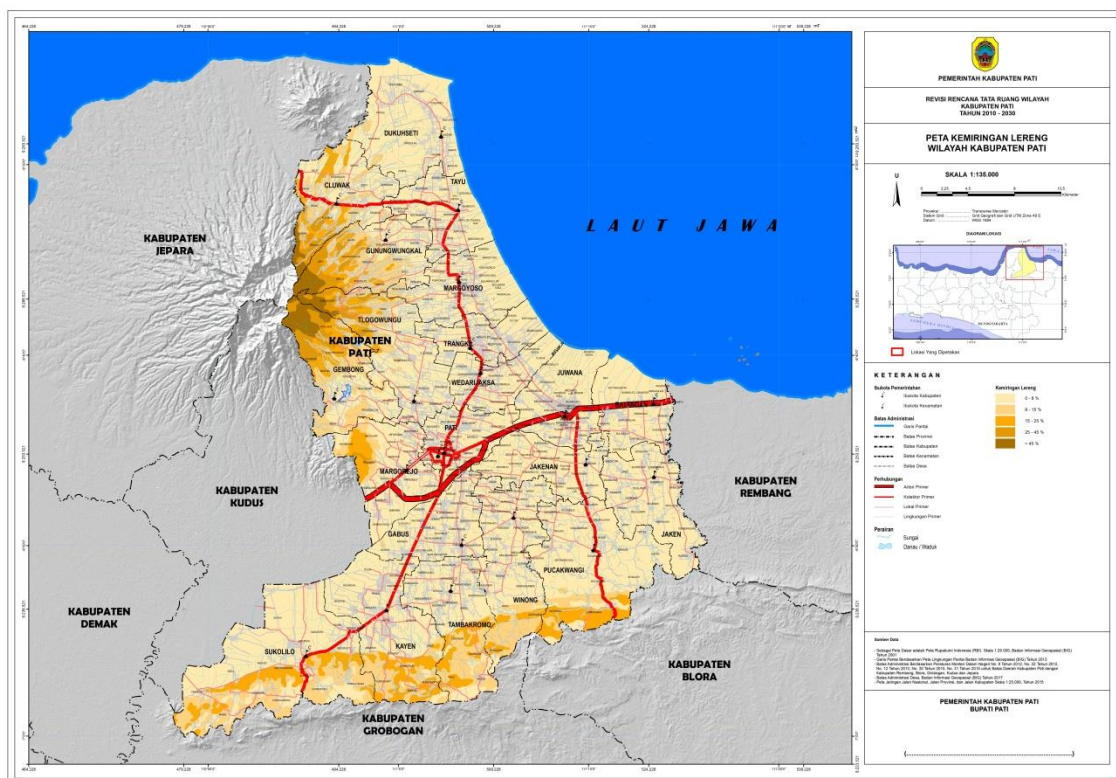
Kabupaten Pati berdasarkan kondisi kemiringannya terbagi menjadi 5 (lima) kategori. Pada umumnya tergolong kemiringan relatif datar (dominan: 0%-8%), seluas kurang lebih 122.527 hektar atau 78% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah dengan kemiringan 8% hingga 15% seluas 18.101 hektar atau 12% dari total keseluruhan, wilayah dengan kemiringan lereng 15% hingga 25% seluas 11.657 hektar atau 7% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati. Wilayah dengan kemiringan lereng yang paling curam atau lebih dari 45% seluas 1.972 hektar atau sekitar 1% dari total luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal dan Tlogowungu.

Tabel 2.3 Kemiringan Lereng Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Luas Berdasar Kemiringan (Hektar)					Total
		0 - 8 %	8 - 15 %	15 - 25 %	25 - 45 %	> 45 %	
1	Batangan	5.706	0	0	0	0	5.706
2	Cluwak	3.489	1.712	1.120	664	313	7.298
3	Dukuhseti	8.893	280	0	0	0	9.173
4	Gabus	5.588	33	0	0	0	5.621
5	Gembong	2.307	2.294	1.094	943	836	7.474
6	Gunungwungkal	2.545	2.115	1.150	813	479	7.102
7	Jaken	6.907	0	0	0	0	6.907
8	Jakenan	5.435	0	0	0	0	5.435
9	Juwana	6.235	0	0	0	0	6.235
10	Kayen	7.228	1.644	1.528	0	0	10.400
11	Margorejo	5.661	599	679	80	0	7.019
12	Margoyoso	6.046	268	6	0	0	6.320
13	Pati	4.533	0	0	0	0	4.533
14	Pucakwangi	9.804	750	1.549	0	0	12.103

No	Kecamatan	Luas Berdasar Kemiringan (Hektar)					Total
		0 - 8 %	8 - 15 %	15 - 25 %	25 - 45 %	> 45 %	
15	Sukolilo	10.503	3.745	2.041	0	0	16.289
16	Tambakromo	5.249	1.664	1.034	0	0	7.947
17	Tayu	5.255	5	0	0	0	5.260
18	Tlogowungu	5.267	1.622	924	568	344	8.725
19	Trangkil	4.342	0	0	0	0	4.342
20	Wedarijaksa	4.341	0	0	0	0	4.341
21	Winong	7.193	1.370	532	0	0	9.095
Total		122.527	18.101	11.657	3.068	1.972	157.325

Sumber : Hasil Olah Peta, 2021



Sumber : Matek Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021

Gambar 2 . 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pati

Berdasarkan kondisi kemiringan tanahnya, arahan pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pati dapat digunakan sebagai berikut:

1. Daerah dengan kemiringan kurang dari 8% (datar) berpotensi untuk pengembangan tanaman lahan basah, pertanian lahan kering dan permukiman yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pati.
2. Kemiringan antara 8-15% (landai), berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman lahan kering yang berada di sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Pati.
3. Kemiringan antara 15-25% (agak curam), berpotensi untuk pembudidayaan tanaman keras (tahunan) baik dengan tanaman produksi maupun sebagai tanaman buffer, kondisi ini terdapat di Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, Kayen, Margorejo, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tlogowungu, dan Winong.
4. Kemiringan antara 25-45% (curam), berpotensi untuk pengembangan tanaman keras (tahunan) baik dengan tanaman produksi maupun sebagai tanaman buffer,

kondisi ini hanya terdapat di beberapa Kecamatan wilayah Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, Margorejo, dan Tlogowungu.

5. Kemiringan lebih dari 45% (sangat curam) berpotensi longsor cukup tinggi dan diarahkan sebagai kawasan lindung, Kawasan ini terdapat di Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, dan Tlogowungu.

4) Geologi

Keadaan geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Pati adalah berupa sesar dan kubah. Daerah ini merupakan bagian dari antiklinorium rembang dengan sumbu antiklin dan siklin yang mempunyai arah barat-timur dan barat laut-tenggara. Struktur sesar normal dengan arah timur laut-barat daya yang mensesar litologi batu gamping pada Formasi Bulu. Struktur Kubah dijumpai di daerah Pati Ayam, merupakan suatu diapir. Diduga terbentuknya kubah ini berkaitan dengan proses tektonika setempat sebelum terjadinya kegiatan Gunung Api Muria.

Secara fisiografi daerah Kabupaten Pati termasuk ke dalam lajur Zona Rembang (Rembang Zone) yang terdiri dari pegunungan lipatan berbentuk antiklinorium yang memanjang mulai dari utara Purwodadi melalui Blora, Jatirogo, Tuban dan berakhir di Pulau Madura. Daerah ini terdiri dari dataran rendah, perbukitan bergelombang dan pegunungan berlereng terjal dengan ketinggian 0 sampai 650 meter. Punggung perbukitan dan pegunungan tersebut umumnya memanjang dengan arah barat – timur.

Berdasarkan morfologinya daerah Pati dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Berikut pembagian wilayah geologi Kabupaten Pati berdasarkan morfologinya:

a) Dataran

Aluvial terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung. Endapan aluvial terdiri dari endapan sungai yang menempati areal dataran rendah berupa persawahan, tegalan dan sepanjang sungai dan pantai yang terdapat di sepanjang pantai. Luas daerah aluvial sebesar 74.763,01 Ha.

b) Perbukitan

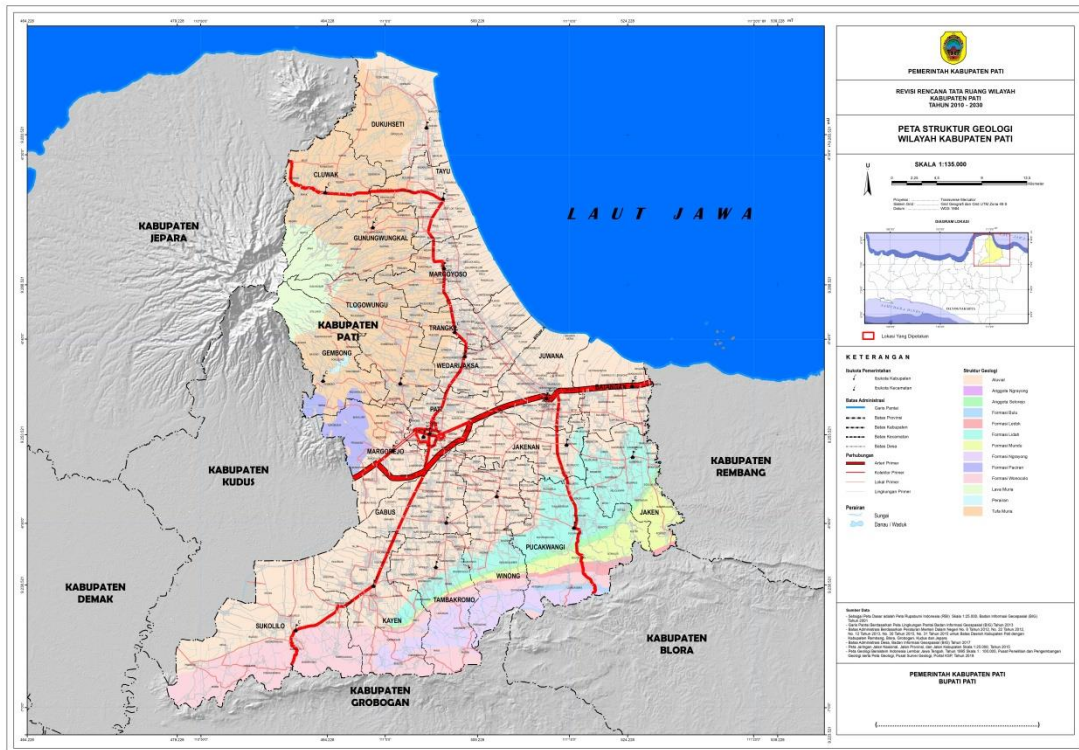
- Formasi Lidah dengan luas 11.619,39 Ha terdiri dari batu lempung abu-abu kehitaman dan batu lempung hitam mengandung sisipan batu pasir bermoluska.
- Anggota Selorejo dengan luas 1.410,05 Ha terdiri perselingan batu gamping dengan batu pasir yang kaya akan fosil rombakan foraminifera plankton. Fosil berfungsi sebagai butiran pasir (kalkarenit). Kalkarenit kadang-kadang mengandung glaukonit. Cangkang foraminifera yang menjadi unsur utama penyusun batuan. Umumnya telah terabrasi dan buram. Dapat dipastikan bahwa fosil tersebut telah mengalami pengendapan ulang (reworked fossil).
- Formasi Mundu dengan luas 4.883,18 Ha terdiri dari napal masif, abu-abu keputihan, kaya akan foraminifera plankton. Fosil diagnostik yang ada di dalamnya antara lain Pulleniatina primalis, P. obliquiloculata, Globorotalia tumida, G. margaritae, G. plessiotumida, G. tosaensis dan Sphaeroidinella dehiscens. Di bagian timur Rembang satuan batuan ini tersebar cukup luas dan menipis ke arah barat. Formasi Mundu terletak selaras di atas Formasi Ledok dan berumur formasi ini adalah Miosen Akhir – Pliosen.
- Formasi Ledok dengan luas 1.286,46 Ha terdiri dari batu lempung abu-abu, napal, batu lanau gampingan dan sisipan tipis batu gamping (kalkarenit) berlapis tipis, kadang-kadang mengandung batu pasir glaukonit. Satuan ini terletak tidak selaras di atas Formasi Wonocolo dengan bagian paling bawah dicirikan oleh pasir glaukonit berwarna hijau, mengandung pecahan cangkang moluska dan fosil foraminifera.

- Formasi Wonocolo dengan luas 13.212,77 Ha terdiri dari batu lempung dengan sisipan tipis batu gamping, bagian bawah dicirikan oleh batu pasir glaukonit. Batu lempung abu-abu umumnya mengandung foraminifera dalam jumlah sedang seperti *G. subquadratus*, *G. mayeri*, *G. fohsi*, *G. menardii*, *Orbulina universa*, *Globigerina druryil*, *Cassigerinella chipolensis*, *A. umbonata*, *A. gaimardii*, *Ammonia equatoriana*, *Bolivina*, *Robulus*, *Quinqueloculina*, *Elphidium*, *Uvigerina spp*, *Pullenia* dan *gyroidina delicata*. Kumpulan foraminifera tersebut menunjukkan bahwa umur relatif formasi ini Miosen tengah dengan lingkungan pengendapan laut dangkal, neritik tepi sampai tengah.
- Formasi Bulu dengan luas 465,09 Ha terdiri dari batu gamping putih abu-abu, pasir kadang-kadang berlapis dan pasir, sering membentuk pelat-pelat (platy) dengan sisipan napal dan batu pasir. Bagian bawah dicirikan oleh banyaknya *Cycloclypeous annulatus* (MARTIN). Sisipan batu pasir berbutiran halus sampai sedang bersifat gampingan dengan kuarsa dan foraminifera sebagai fragmen dalam batuan. Sisipan napal mengandung fosil seperti moluska, bryozoa, glaukoit, pirit, foraminifera dan kadang-kadang sisa tumbuhan berwarna hitam.
- Formasi Ngrayong dengan luas 5.425,63 Ha terdiri dari batu pasir, serpih, batulempung, batu lanau dengan sisipan batu gamping, kadang-kadang terdapat sisipan batu bara dan lignit. Batupasir pada umumnya terdiri dari kuarsa dengan butiran menyudut sampai menyudut tanggung. Serpih seringkali mengandung sisa tumbuhan berwarna hitam (carbonaceous) sedangkan batu lempung kadang-kadang mengandung banyak foram plankton seperti *G. fohsi*, *G. praefohsi*, *G. perpheroacuta*, *G. subquadratus*, *G. diminutus*, *orbulina*, *P. glameraosa curva*.

Tabel 2. 4 Formasi Geologi di Kabupaten Pati

No	Nama Formasi Geologi	Luas (Ha)
1	Aluvial	74.763,01
2	Anggota Ngrayong	3,63
3	Anggota Selorejo	1.410,05
4	Formasi Bulu	465,09
5	Formasi Ledok	1.286,46
6	Formasi Lidah	11.619,39
7	Formasi Mundu	4.883,18
8	Formasi Ngrayong	5.425,63
9	Formasi Paciran	2.517,28
10	Formasi Wonocolo	13.212,77
11	Lava Muria	5.327,55
12	Perairan	228,13
13	Tufa Muria	36.182,65
Jumlah		157.324,82

Sumber: Hasil Olah Peta, 2021



Sumber : Matek Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021

Gambar 2 . 5 Peta Struktur Geologi Kabupaten Pati

Besarnya kandungan mineral yang dimiliki oleh Kabupaten Pati menjadikan Kabupaten Pati berpotensi sebagai kawasan pengembangan kegiatan pertambangan mineral. Namun dalam eksploitasi potensi pertambangan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan. Eksploitasi bahan tambang yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam.

5) Hidrologi

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Di Kabupaten Pati terdapat 93 buah sungai/kali yang tersebar merata di seluruh wilayah. Pada umumnya sungai-sungai di kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun, pada musim kemarau banyak dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.

Ada beberapa sungai yang memiliki sumber mata air, akan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari aliran drainase kota saja. Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati.

Sungai-sungai yang ada di suatu daerah berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan dan penyalur air, sedimen, unsur hara melalui sistem sungai dan mengeluarkannya melalui outlet tunggal. Apabila turun hujan di daerah tersebut, maka air hujan yang turun akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di sekitar daerah yang dituruni hujan. Sistem sungai yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya disebut dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi hal yang harus diperhitungkan mengingat terdapat keterkaitan dalam aspek hidrologis khususnya curah hujan. Berikut pembagian DAS berdasarkan kecamatan di wilayah Kabupaten Pati.

Tabel 2. 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Nama DAS	Luas DAS (Ha)
1	Batangan	DAS Gede	3.284,31
		DAS Jabangbayi	687,36
		DAS Juwana	265,17
		DAS Randugunting	1.468,74
2	Cluwak	DAS Gelis	535,68
		DAS Guno	500,04
		DAS Kelet	119,53
		DAS Lengggi	499,42
		DAS Limar	1.111,06
		DAS Pasokan	2.556,06
		DAS Tayu	1.976,56
3	Dukuhseti	DAS Brakkembang	3.269,78
		DAS Guno	1.247,83
		DAS Lengggi	2.576,89
		DAS Limar	335,94
		DAS Pasokan	1.742,56
4	Gabus	DAS Juwana	5.620,94
5	Gembong	DAS Anyar	791,68
		DAS Gelis	6,24
		DAS Juwana	6.672,47
		DAS Serang	4,30
6	Gunungwungkal	DAS Anyar	1,58
		DAS Gading	822,78
		DAS Gelis	7,41
		DAS Klencer	119,40
		DAS Ngeprak	466,35
		DAS Pakis	1.691,86
		DAS Tayu	3.992,16
7	Jaken	DAS Gede	2.162,37
		DAS Jabangbayi	2.408,36
		DAS Juwana	53,71
		DAS Randugunting	2.282,77
8	Jakenan	DAS Gede	5,49
		DAS Jabangbayi	336,82
		DAS Juwana	5.092,73
9	Juwana	DAS Anyar	1.136,28
		DAS Gede	8,15
		DAS Jabangbayi	133,52
		DAS Juwana	4.957,35
10	Kayen	DAS Juwana	10.345,15
		DAS Serang	54,65
11	Margorejo	DAS Juwana	7.019,13
12	Margoyoso	DAS Gading	320,20
		DAS Kalisat	1.317,06
		DAS Mati	11,01
		DAS Mojosemi	644,27
		DAS Ngeprak	2.333,93
		DAS Suwatu	1.694,39
13	Pati	DAS Anyar	15.053,38
		DAS Juwana	1.235,51
14	Pucakwangi	DAS Gede	1.332,76
		DAS Jabangbayi	401,65
		DAS Juwana	10.354,57
		DAS Randugunting	13,66
15	Sukolilo	DAS Juwana	15.053,38
		DAS Serang	1.235,51
16	Tambakromo	DAS Juwana	7.374,79
		DAS Serang	571,64

No	Kecamatan	Nama DAS	Luas DAS (Ha)
17	Tayu	DAS Gading	375,06
		DAS Guno	135,73
		DAS Kahar	723,87
		DAS Klencer	825,61
		DAS Limar	655,20
		DAS Pakis	795,71
		DAS Tayu	1.748,53
18	Tlogowungu	DAS Anyar	1.464,34
		DAS Gading	13,38
		DAS Juwana	3.975,08
		DAS Kalisat	715,63
		DAS Mati	561,38
		DAS Mojosemi	24,03
		DAS Ngeprak	979,92
		DAS Suwatu	519,04
19	Trangkil	DAS Anyar	80,63
		DAS Mati	3.317,11
		DAS Mojosemi	688,78
		DAS Suwatu	255,69
20	Wedarijaksa	DAS Anyar	3.373,85
		DAS Juwana	474,28
		DAS Mati	492,46
21	Winong	DAS Juwana	8.988,39
		DAS Serang	105,63

Sumber : Hasil Olah Peta, 2021

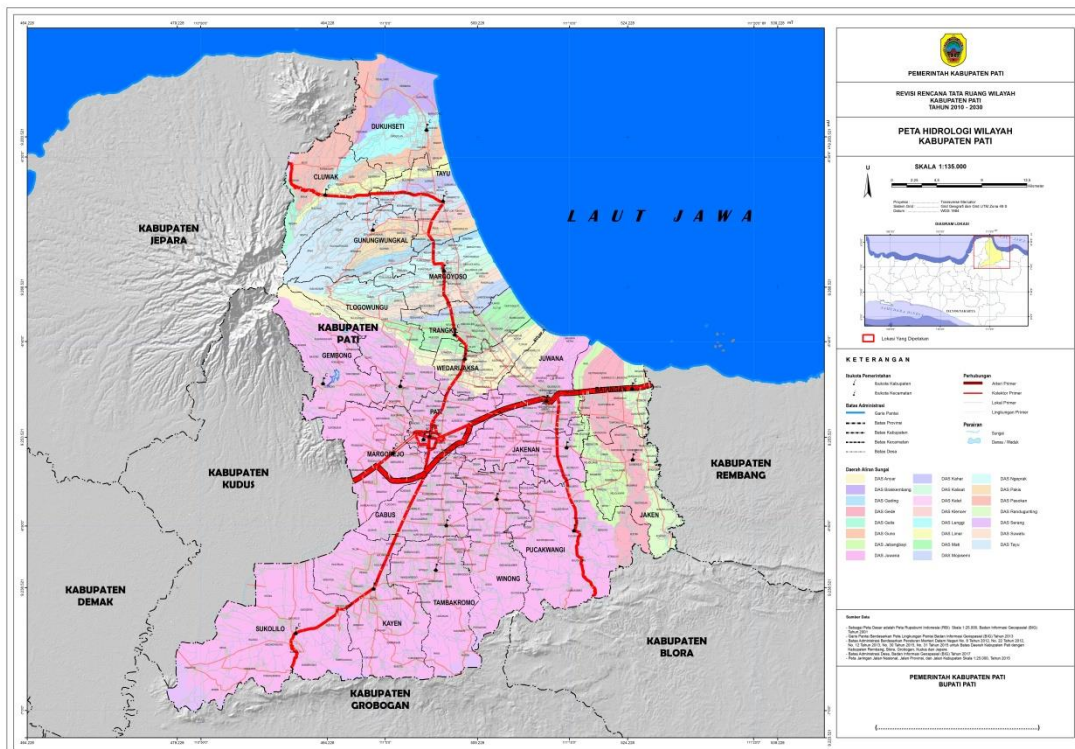
Menurut Sistem Sungai Wilayah Balai PSDA Seluna, sistem sungai di wilayah Kabupaten Pati secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Sistem Kedungombo

Yaitu sistem yang pengaturannya dilakukan dengan pusat operasi pada Waduk Kedungombo ke seluruh sungai yang berkaitan langsung dengan Waduk Kedungombo.

2. Sistem diluar Kedungombo

Yaitu sistem yang pengaturannya dilakukan diluar operasi pada Waduk Kedungombo dan dilaksanakan secara terpisah/tersendiri sehingga tidak tergantung dari Sistem Kedungombo. Sungai-sungai di Kabupaten Pati umumnya berada di luar Sistem Kedungombo sehingga pengelolaan/penanganannya tidak tergantung/tidak terpengaruh Sistem Kedungombo. Namun, dari sejumlah sungai yang ada di Kabupaten Pati, Sungai Juwana merupakan satu-satunya sungai yang masuk dalam Sistem Kedungombo. Sungai ini berawal dari pintu banjir Wilalung dan bermuara di laut Jawa. Penanganan/pemanfaatan sungai Juwana sangat tergantung dari operasi Sistem Kedungombo.



Sumber : Matek Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021

Gambar 2 . 6 Peta Hidrologi Kabupaten Pati

6) Klimatologi

Tahun 2020 merupakan tahun dengan curah hujan tertinggi selama periode lima tahun terakhir dengan temperatur tertinggi 36°C dan terendah 21°C. Rata-rata curah hujan di tahun 2020 sebesar 208,98 mm. Sementara itu, rata-rata curah hujan bulanan Kabupaten Pati selama periode 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

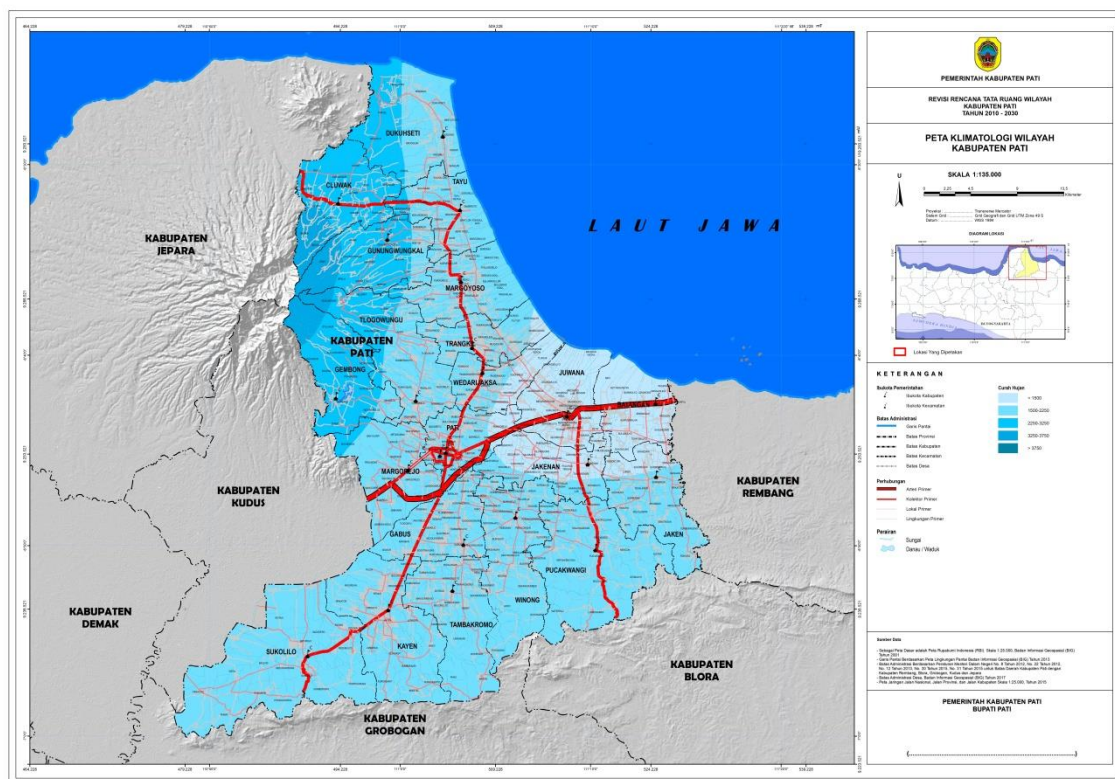
Tabel 2. 6 Rata-Rata Curah Hujan Perbulan (mm) Kabupaten Pati

No.	Bulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	76.06	376.79	298.26	481.26	301.3
2	Februari	175.66	368.63	451.47	124.44	393.2
3	Maret	106.42	263.05	198.58	258.1	231.8
4	April	119.93	183.68	83.89	266.05	291.6
5	Mei	67.23	116.37	54.74	91.86	267.4
6	Juni	75.13	119.79	12.63	1.1	22.1
7	Juli	49.97	34.68	3.11	7.67	71.8
8	Agustus	22.97	7.89	7.58	6.62	56.4
9	September	55.23	40.05	52.05	1.1	90.8
10	Oktober	158.97	191.95	29.16	4.05	160.8
11	Nopember	121.27	237.84	108.63	80.24	240.4
12	Desember	141.45	264.84	229.37	128.26	380.1

Sumber: Kabupaten Pati dalam Angka 2017-2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata curah hujan di Kabupaten Pati selama periode lima tahun menunjukkan fluktuasi. Hal tersebut kemungkinan dipicu oleh perubahan iklim yang terjadi secara global. Rata-rata curah hujan terendah terjadi di tahun 2016 (97,5 mm), sementara curah hujan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 208,9 mm. Tingginya curah hujan di tahun 2020 disebabkan pada tahun tersebut Indonesia mengalami fenomena La nina.

Karena fenomena tersebut, Kabupaten Pati mengalami musim hujan yang relatif panjang dibandingkan tahun 2019. Tahun 2019, peningkatan curah hujan yang menjadi penanda musim penghujan terjadi pada bulan November 2018 dan mulai menurun di bulan Mei 2019. Sementara itu, musim penghujan di tahun 2020 dimulai di Bulan Nopember 2019, mengalami penurunan di Bulan Mei 2020, dan kembali meningkat mulai Bulan Oktober 2020. Selain itu, periode Bulan Juni-September yang merupakan musim kemarau, memiliki curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi garam rakyat.



Sumber : Matek Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021

Gambar 2.7 Peta Klimatologi Kabupaten Pati

7) Penggunaan Lahan

Lahan di Kabupaten Pati digunakan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung.

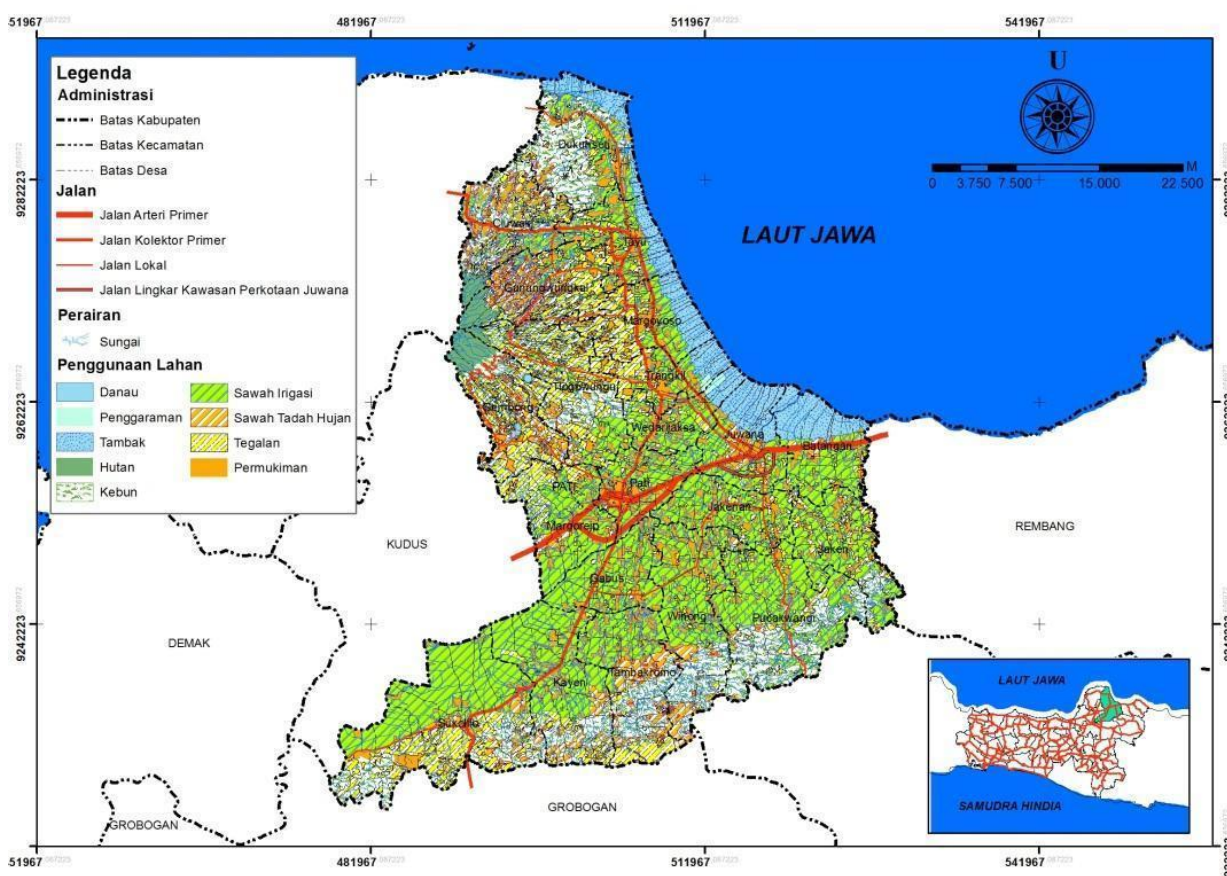
a) Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya di Kabupaten Pati dapat dikategorikan menjadi: peruntukan permukiman, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Peruntukan permukiman tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi tertinggi terdapat di Kecamatan Pati dan Juwana. Peruntukan pertanian untuk persawahan irigasi tersebar di daerah dataran rendah, sedangkan untuk persawahan tadah hujan terdapat di sebagian Kecamatan Tambakromo dan Cluwak, serta tegalan terdapat di sebagian Kecamatan Tlogowungu, Gembong, Margorejo, Trangkil, Margoyoso, dan Gunungwungkal. Peruntukan perkebunan tersebar di sepanjang kawasan Pegunungan Kendeng dan sebagian Kecamatan Dukuhseti. Peruntukan perikanan budidaya tersebar di sepanjang wilayah pantai.

b) Kawasan Lindung

Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung di lereng Gunung Muria yang terdapat di sebagian Kecamatan Tlogowungu, Cluwak, Gembong, dan Gunungwungkal. Kawasan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan resapan air yang melindungi kawasan di bawahnya. Kawasan lindung lainnya adalah Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo yang terdapat di sebagian Kecamatan

Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan pantai di sepanjang kawasan pantai; sempadan sungai di sepanjang sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Pati; sempadan waduk di sekitar Waduk Gunungrowo dan Seloromo di Kecamatan Gembong; dan sempadan mata air di sekitar mata air di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Pati ditampilkan pada peta berikut:

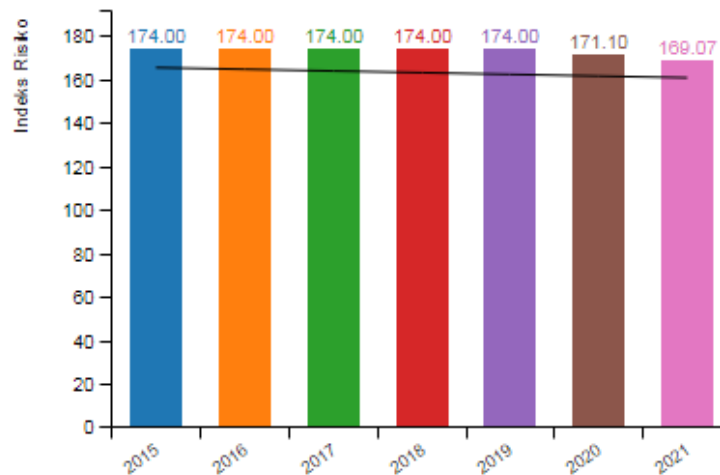


Sumber: RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021

Gambar 2 . 8 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pati

b. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana. Berdasarkan Buku IRBI Tahun 2020, indeks risiko bencana Kabupaten Pati sebesar 171,1 dengan kategori sangat tinggi. Selanjutnya menurut Indeks Risiko per Ancaman, Indeks Risiko Bencana Banjir dengan skor 36 kelas risiko tinggi, Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi (21,6 tinggi), Indeks Risiko Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan (36 tinggi), Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor (12 sedang), Indeks Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi (24 tinggi), dan Indeks Risiko Bencana Cuaca Ekstrim (20,4 tinggi). Sementara itu, sesuai dengan publikasi inarisk.bnpb.go.id, IRBI Kabupaten Pati turun menjadi 169,07 (Tinggi). Berikut adalah data perkembangan IRBI Kabupaten Pati Tahun 2015 sd. 2021.



Sumber: *inarisk.bnpp.go.id*, 2022

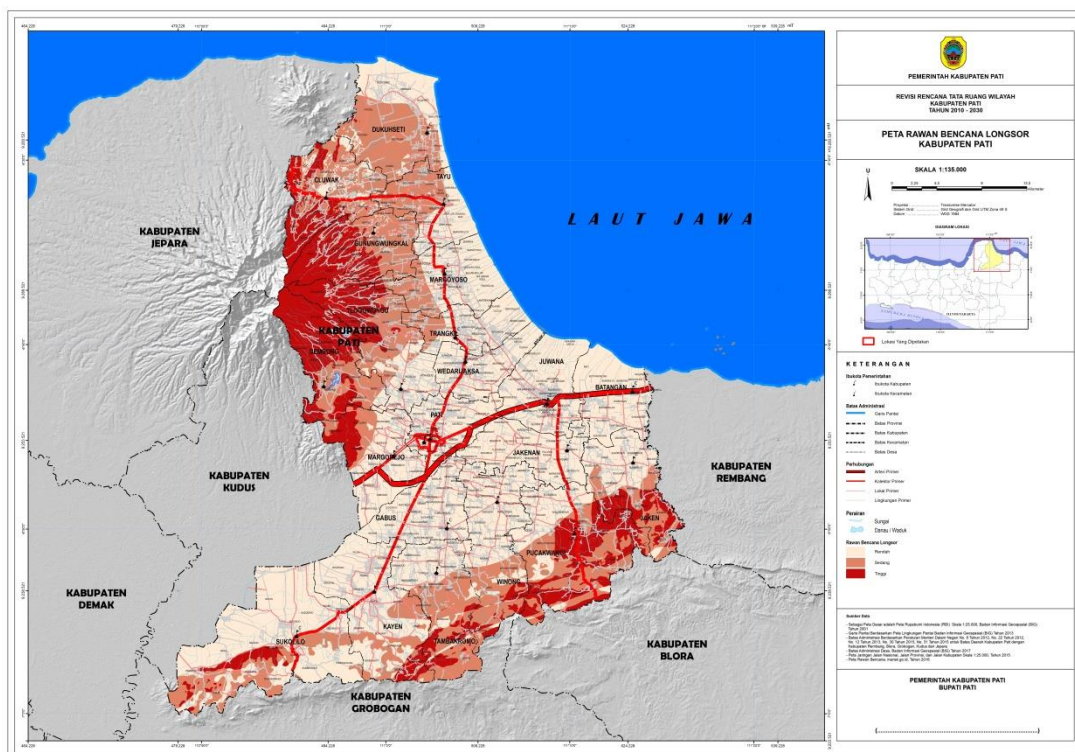
Gambar 2 . 9 Perkembangan IRBI Tahun 2015 sd. 2021

Sedangkan berdasarkan Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Pati 2014, terdapat beberapa potensi bencana di Kabupaten Pati yaitu, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Adapun persebaran potensi bencana berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

1) Gerakan Tanah/Longsor

Gerakan tanah, atau sering disebut tanah longsor, banyak dijumpai di bagian selatan, yaitu di sekitar daerah perbukitan *karst*, dan wilayah barat laut yang merupakan daerah pegunungan dengan kemiringan lereng yang sangat terjal (30 - 70 %) - hampir tegak (>70%) dan sebagian dibentuk oleh tufa dan lahar (Q_{vlm}, Q_{vm}) yang mempunyai sifat kurang padu (agak lepas) sehingga apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan lereng diganggu akan terjadi gerakan tanah.

Ancaman longsor tingkat tinggi di sebelah utara berada di lereng Gunung Muria yaitu di Kecamatan Gunungwungkal, Cluwak, dan Gembong. Ancaman tanah longsor tingkat sedang-tinggi juga terdapat di sebelah selatan terdapat di Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Jaken, dan Pucakwangi. Ancaman longsor sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.



Sumber : Matak Perubahan RTRW Kab. Pati 2010-2030, 2021

Gambar 2 . 10 Peta Rawan Bencana Longsor Kabupaten Pati

2) Banjir

Wilayah yang berpotensi banjir merupakan daerah dataran rendah terutama pada daerah-daerah sekitar aliran sungai Juwana dan sebagian kecil Kecamatan Tayu. Bencana banjir terjadi di Kecamatan Juwana, Pati, Gabus, Kayen, Jakenan, Sukolilo, dan Margorejo. Banjir di daerah ini merupakan kiriman dari sungai-sungai yang berasal dari Gunung Muria maupun dari perbukitan yang berada di wilayah selatan. Pada musim penghujan (November – Maret), sungai-sungai yang masuk ke sungai Juwana sebagian besar airnya keruh (berwarna coklat) dan banyak membawa lumpur maupun tanah sehingga sedimentasi di mulut sungai menjadi tinggi yang pada akhirnya memperluas wilayah banjir. Selain di sekitar aliran sungai Juwana, bencana banjir juga terjadi di sepanjang pesisir Laut Jawa diantaranya di Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, dan Batangan. Daerah rawan bencana banjir sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.

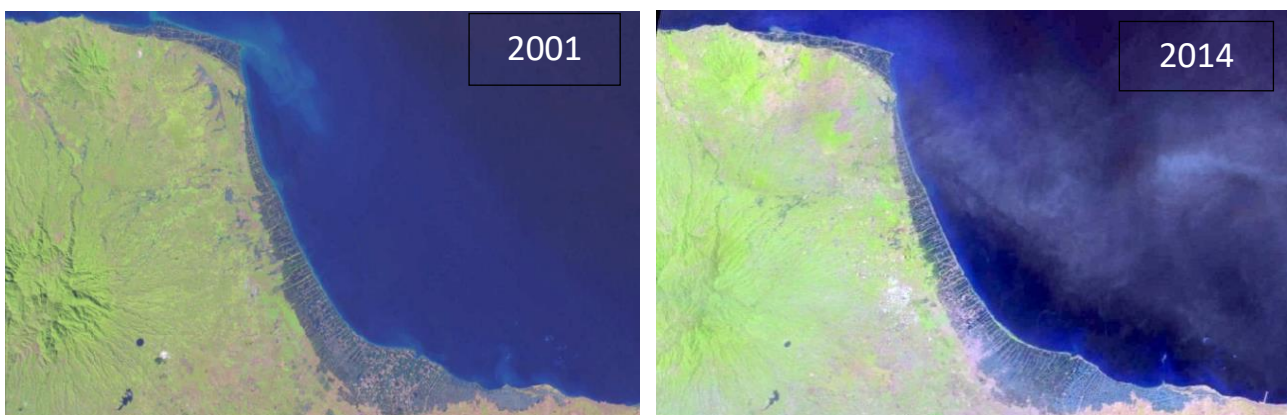
Dari peta risiko bencana kekeringan dapat dilihat bahwa area dengan resiko bencana kekeringan tertinggi terdapat pada beberapa wilayah di sisi selatan, tepatnya di Desa Talun, Desa Slungkep, dan Desa Srikaton di Kecamatan Kayen, Desa Ronggo di Kecamatan Jaken dan Desa Karaban di Kecamatan Gabus.

4) Gelombang pasang

Gelombang pasang dalam hal ini adalah berupa abrasi atau kikisan pantai oleh hantaman gelombang laut terdapat di sekitar daerah Dukuhseti, Tayu, dan Tlogoarum. Kerusakan pantai oleh abrasi ini terlihat dari terkikisnya beberapa bengkok milik masyarakat setempat yang sekarang telah menjadi laut. Begitu pula di daerah Dukuhseti, dermaga pelabuhan laut untuk nelayan dan beberapa perumahan yang berdekatan dengan pantai terancam rusak oleh abrasi. Untuk mengurangi hancurnya harta benda maupun kerusakan lebih jauh maka untuk daerah yang abrasinya cukup kuat perlu di tanami pohon bakau atau dibangun jetty (tembok penahan arus).

Dengan dilewati garis pantai yang panjang, Kabupaten Pati juga beresiko terkena bencana gelombang pasang. Gelombang pasang yang muncul di Kabupaten Pati berdampak pada kejadian alam yang biasa kita sebut abrasi. Abrasi merupakan pengikisan tanah oleh air laut. Abrasi ditemukan terjadi di beberapa desa di sepanjang pantai Kabupaten Pati.

Sumber : BPBD Kabupaten Pati, 2014



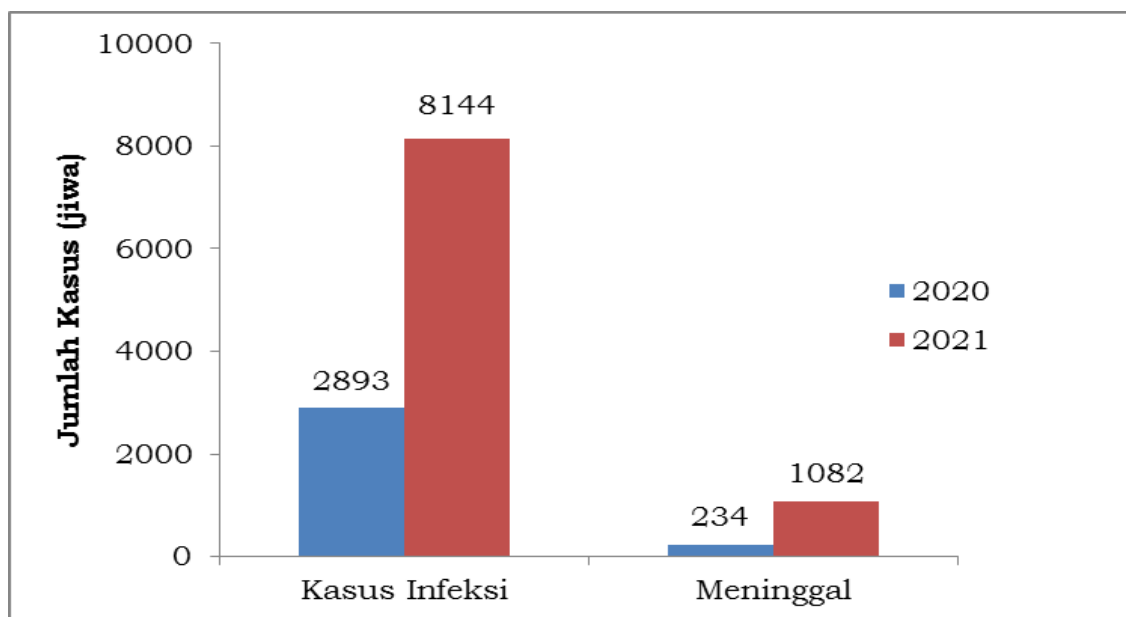
Gambar 2 . 13 Citra Satelit Pantai Kabupaten Pati Tahun 2001 dan 2014

Risiko bencana abrasi tertinggi berada pada sepanjang pesisir utara hingga timur di Kabupaten Pati, yaitu di Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Tayu, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Juwana, dan Kecamatan Batangan. Dalam kurun waktu 13 tahun, abrasi pantai di Kabupaten Pati semakin meluas yaitu paling banyak di Kecamatan Juwana, Batangan, dan Wedarijaksa.

c. Kondisi dan Dampak Pandemi Covid19

Tahun 2020 dan tahun 2021 negara Indonesia mengalami Pandemi Covid-19. Pandemi tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan di berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang dinyatakan sebagai pandemi gelombang pertama, memberikan dampak yang cukup berat utamanya untuk sektor ekonomi. Sementara Pandemi Covid-19 di tahun 2021 atau pandemi gelombang kedua memberikan dampak yang lebih besar pada aspek kesehatan karena jumlah kasus dan kematian yang lebih banyak dibandingkan gelombang

pertama. Perbandingan jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Pati selama periode 2020 dan 2021 ditampilkan pada grafik berikut.



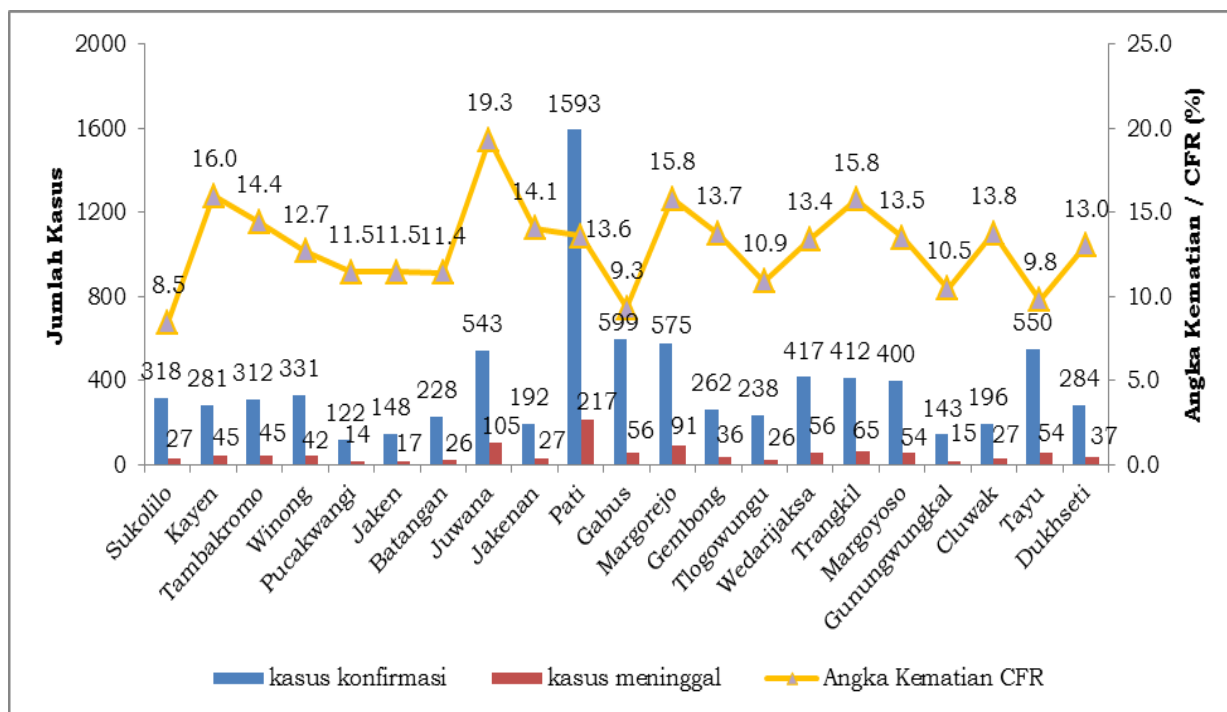
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2022

Gambar 2 . 14 Perkembangan Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Pati

Berdasarkan grafik tersebut dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan pandemi Covid-19 gelombang pertama dengan gelombang kedua, dimana tingkat kefatalan pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2021 lebih parah dibandingkan pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Penghitungan kasus infeksi Covid-19 untuk tahun 2020 dilakukan sejak bulan Maret ketika kasus infeksi Covid-19 ditemukan di Kabupaten Pati. Jumlah kasus infeksi Covid-19 di tahun 2020 berjumlah 2.893 kasus, dimana jumlah kasus infeksi Covid-19 mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada bulan Juli 2020 dan mencapai puncaknya pada bulan Desember 2020 dengan jumlah kasus mencapai sekitar 870 kasus. Peningkatan kasus infeksi Covid-19 selanjutnya diiringi dengan peningkatan kasus kematian akibat Covid-19. Tahun 2020, kematian akibat Covid-19 mulai menunjukkan peningkatan yang cukup berarti di bulan September 2020 dan mencapai puncaknya di bulan Desember dengan jumlah kematian mencapai 87 kasus.

Tahun 2021, Pandemi Covid-19 gelombang kedua terjadi akibat persebaran varian baru virus Corona. Pandemi Covid-19 gelombang kedua memberikan dampak yang lebih parah dibandingkan pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 dengan puncak pandemi terjadi di bulan Juli 2021. Dampak tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19 yang mengalami peningkatan sangat signifikan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021, jumlah kasus infeksi Covid-19 meningkat hingga lebih dari 181% mencapai sekitar 8144 kasus. Selanjutnya, kematian akibat Covid-19 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai lebih dari 360% dengan jumlah kematian sekitar 1.082 kematian. Dampak Pandemi Covid-19 gelombang kedua relatif besar dibandingkan gelombang pertama karena varian baru yang memiliki daya infeksi yang lebih tinggi. Selain itu, ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih lemah juga meningkatkan persebaran varian baru tersebut. Di sisi lain, kapasitas fasilitas kesehatan yang tersedia tidak mampu menampung seluruh kasus infeksi Covid-19 yang membutuhkan penanganan. Sebagai akibatnya, sebagian kasus infeksi Covid-19 menyebabkan kematian.

Infeksi Covid-19 terjadi di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati dengan intensitas yang berbeda. Beberapa kecamatan tercatat memiliki kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19 yang tinggi, namun beberapa wilayah lain memiliki kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19 yang relatif rendah. Persebaran kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Pati tahun 2021 ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2022

Gambar 2 . 15 Persebaran Kasus Positif dan Kematian Akibat Covid-19

Kecamatan dengan jumlah kasus infeksi Covid-19 tertinggi adalah Kecamatan Pati dengan persentase sekitar 19,56% dari total kasus infeksi di Kabupaten Pati tahun 2021. Selain Kecamatan Pati, Kecamatan Gabus, Margorejo, Juwana, dan Wedarijaksa juga merupakan wilayah dengan jumlah kasus infeksi Covid-19 cukup tinggi. Sementara itu, wilayah dengan jumlah kasus terkecil adalah Kecamatan Pucakwangi dengan jumlah kasus sekitar 1,50% dari total kasus infeksi Covid-19. Selain Kecamatan Pucakwangi, wilayah dengan jumlah kasus infeksi Covid-19 yang relatif kecil adalah Gunungwungkal, Jaken, dan Jakenan. Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa kasus infeksi Covid-19 yang cukup tinggi berada di wilayah pusat aktivitas ekonomi atau dekat dengan wilayah tersebut. Sebaliknya, jumlah infeksi Covid-19 yang relatif rendah berada di wilayah perbatasan atau jauh dari pusat aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan jumlah kasus infeksi, wilayah dengan jumlah kematian akibat Covid-19 berada di wilayah dengan jumlah kasus infeksi Covid-19 yang tinggi. Jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi berada di Kecamatan Pati, mencakup sekitar 20% dari total kematian akibat Covid-19 di tahun 2021. Selain Kecamatan Pati, wilayah dengan jumlah kematian yang relatif tinggi, antara lain Kecamatan Juwana, Margorejo, Trangkil, Gabus, dan Wedarijaksa. Sementara itu, jumlah kasus kematian terendah berada di Kecamatan Pucakwangi, mencakup 1,29% dari total kematian akibat Covid-19 Kabupaten Pati tahun 2021. Selain Kecamatan Pucakwangi, wilayah yang juga memiliki jumlah kematian akibat Covid-19 yang relatif kecil adalah Kecamatan Gunungwungkal, Tlogowungu, dan Jaken.

Tingkat keparahan Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari nilai CFR atau Case Fatality Rate (CFR). Nilai CFR menunjukkan tingkat kematian pada kelompok orang

yang terinfeksi. Tahun 2021, tingkat CFR tertinggi di Kabupaten Pati berada di Kecamatan Juwana dengan nilai 19,3 yang artinya setiap 100 orang yang terinfeksi Covid-19, sekitar 19 diantaranya meninggal dunia. Selain Kecamatan Juwana, CFR tertinggi juga berada di Kecamatan Margorejo (15,8), Kayen (16,0), dan Trangkil (15,8). Tahun 2020, CFR tinggi berada di wilayah yang terletak relatif jauh fasilitas kesehatan. Sementara itu, di tahun 2021, CFR tinggi terletak di wilayah dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Selain itu, kecamatan dengan CFR tinggi adalah wilayah dengan jumlah kasus infeksi Covid-19 yang cukup tinggi. Tingginya jumlah kasus infeksi yang terjadi di wilayah tersebut membuat fasilitas kesehatan menjadi *overcapacity*, sehingga sebagian kasus infeksi Covid-19 yang membutuhkan penanganan tidak dapat terlayani.

Salah satu upaya untuk mencegah penularan serta kematian akibat Covid-19 adalah dengan melakukan vaksinasi. Hingga tahun 2022, pemerintah telah melakukan vaksinasi secara luas bahkan untuk vaksin dosis ketiga (*booster*). Capaian vaksinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati hingga Tanggal 15 Februari 2022 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Capaian Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Pati

Kelompok Penerima	target	Dosis 1	Dosis 2	Dosis 3 (booster)
Tenaga Kesehatan	6,278	8,613	8,407	6,763
Petugas Publik	77,818	86,543	77,931	1,570
Lansia	140,488	92,457	61,665	3,826
Masyarakat Rentan & Umum	712,828	487,367	358,944	17,684
Ibu Hamil		360	324	
Anak-anak	112,124	100,686	24,039	
Remaja (12-17 tahun)	115,028	114,044	100,440	29
Disabilitas	3,037	127	119	
Gotong Royong		126	123	
Total	1,167,601	890,323	631,992	29,872

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2022

Hingga 15 Februari 2022, Cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 84,55% dan vaksinasi dosis kedua sebesar 60,01% dari total sasaran baru sebesar 1.052.430 jiwa. Dengan cakupan tersebut, dapat dikatakan upaya vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pati telah berlangsung baik dan diharapkan dapat meminimalisir penularan serta kematian akibat Covid-19.

d. Kondisi Demografi

Selama periode 2018 hingga 2021, penduduk Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Di tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Pati mencapai lebih dari 1,34 juta jiwa. Penduduk Kabupaten Pati tersebar di 21 kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. Persebaran penduduk di Kabupaten Pati di setiap kecamatan selama periode 2018 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Persebaran Penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		2018	2019	2020	2021
1	Sukolilo	86.782	89.104	91.905	92.834
2	Kayen	75.821	77.468	79.566	80.475
3	Tambakromo	55.025	55.681	56.519	57.066

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		2018	2019	2020	2021
4	Winong	63.589	64.136	64.616	65.107
5	Pucakwangi	47.073	47.584	48.389	48.828
6	Jaken	46.480	46.883	46.503	46.792
7	Batangan	44.853	45.252	45.129	45.344
8	Juwana	95.421	96.477	96.542	96.860
9	Jakenan	47.982	48.532	48.294	48.673
10	Pati	109.768	111.611	110.837	111.200
11	Gabus	62.204	62.860	63.249	63.704
12	Margorejo	61.633	62.622	62.951	63.371
13	Gembong	46.513	47.079	47.799	48.209
14	Tlogowungu	53.154	53.671	54.920	55.439
15	Wedarijaksa	63.201	63.888	64.412	64.764
16	Trangkil	62.857	63.468	63.832	64.236
17	Margoyoso	73.233	73.901	74.647	75.251
18	Gunungwungkal	37.577	37.915	38.272	38.659
19	Cluwak	47.047	47.430	47.921	48.282
20	Tayu	69.566	70.068	70.516	71.144
21	Dukuhseti	60.342	60.851	61.817	62.204
	Kab. Pati	1.310.121	1.326.481	1.338.636	1.348.442

Sumber: Disdukcapil Kab. Pati 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa beberapa kecamatan memiliki jumlah penduduk relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pati, yang mencakup sekitar 8,25% dari total penduduk di Kabupaten Pati tahun 2021. Selain Kecamatan Pati. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tinggi adalah Kecamatan Juwana (7,18%), Kecamatan Sukolilo (6,88%) dan Kecamatan Kayen (5,97%). Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Gunungwungkal. Jumlah penduduk di Kecamatan Gunungwungkal hanya mencakup sekitar 2,87% dari total penduduk Kabupaten Pati di tahun 2021. Selain Kecamatan Gunungwungkal, wilayah dengan jumlah penduduk relatif sedikit adalah Kecamatan Batangan (3,36%), Jaken (3,47%), Cluwak (3,58%) dan Gembong (3,58).

Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
1	Sukolilo	2,68	3,14	1,01
2	Kayen	2,17	2,70	1,14
3	Tambakromo	1,19	1,51	0,97
4	Winong	0,86	0,75	0,76
5	Pucakwangi	1,09	1,69	0,91
6	Jaken	0,87	(0,81)	0,62
7	Batangan	0,89	(0,27)	0,48
8	Juwana	1,11	0,07	0,33
9	Jakenan	1,15	(0,49)	0,78
10	Pati	1,68	(0,69)	0,33
11	Gabus	1,05	0,62	0,72
12	Margorejo	1,60	0,53	0,67

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
		2019	2020	2021
13	Gembong	1,22	1,53	0,86
14	Tlogowungu	0,97	2,33	0,95
15	Wedarijaksa	1,09	0,82	0,55
16	Trangkil	0,97	0,57	0,63
17	Margoyoso	0,91	1,01	0,81
18	Gunungwungkal	0,90	0,94	1,01
19	Cluwak	0,81	1,04	0,75
20	Tayu	0,72	0,64	0,89
21	Dukuhseti	0,84	1,59	0,63
	Kab. Pati	1,25	0,92	0,73

Sumber: Disdukcapil Kab. Pati 2021

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati selama periode 2019 hingga 2021 menunjuka tren penurunan. Hal tersebut mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, tren laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati masih relatif lebih rendah. Secara umum, selama tiga tahun terakhir, kecamatan yang terletak di sekitar pegunungan, seperti Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gunungwungkal, dan Tlogowungu memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi, sedangkan Kecamatan di kawasan pesisir atau tengah, seperti Kecamatan Pati, Juwana, Batangan dan Wedarijaksa memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif lebih rendah.

Tahun 2019, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pati memiliki laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati. Kecamatan dengan laju pertumbuhan cukup tinggi antara lain Kecamatan Sukolilo (2,68%), Kayen (2,171%), Kecamatan Pati (1,68%), dan Kecamatan Margorejo (1,60%). Tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tertinggi masih berada di Kecamatan Sukolilo (3,14%). Selain Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen (2,71%) dan Tlogowungu (2,33%) memiliki laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan rata-rata Kabupaten. Sementara itu, beberapa kecamatan menunjukkan laju pertumbuhan penduduk negatif atau pengurangan jumlah penduduk, antara lain Kecamatan Jaken (-0,81%), Pati (-0,69%), Jakenan (-0,49%), dan Batangan (-0,27%). Tahun 2021, sebagian besar kecamatan memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan kabupaten. Wilayah dengan tingkat laju pertumbuhan tertinggi adalah Kecamatan Kayen (1,14%), Sukolilo (1,01%), dan Gunungwungkal (1,01%). Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Pati (0,33%), Juwana (0,33%), dan Batangan (0,48%).

Berdasarkan jenis kelamin, Selama periode 2019 hingga 2021, penduduk perempuan menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 1,30%, relatif tidak berbeda secara nyata dengan laju pertumbuhan penduduk laki-laki (1,20%). Di tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk perempuan melaju dengan pesat menjadi 1,23% atau sekitar dua kali lipat dari laju pertumbuhan penduduk laki-laki yang hanya mencapai 0,60%. Tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk perempuan mengalami penurunan menjadi sejitar 0,79%, dan masih lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,68%. Perbedaan laju pertumbuhan penduduk perempuan dan penduduk laki-laki selanjutnya berdampak pada perubahan rasio penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki. Tahun 2018 hingga 2019, rasio penduduk di Kabupaten Pati

sebesar 1,00, yang dapat diartikan penduduk laki-laki memiliki jumlah yang relatif seimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Namun demikian, sejak tahun 2020, rasio penduduk mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,01, yang artinya jumlah penduduk perempuan cenderung melampaui jumlah penduduk laki-laki. Gambaran perubahan rasio penduduk di Kabupaten Pati dan persebarannya di setiap kecamatan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pati Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Rasio Penduduk Perempuan terhadap Penduduk Laki-laki			
		2018	2019	2020	2021
1	Sukolilo	0.98	0.99	1.00	1.00
2	Kayen	0.99	0.99	1.00	1.00
3	Tambakromo	0.99	1.00	1.01	1.01
4	Winong	1.02	1.02	1.02	1.02
5	Pucakwangi	0.99	0.98	0.99	1.00
6	Jaken	1.03	1.03	1.04	1.04
7	Batangan	0.99	1.00	1.01	1.01
8	Juwana	1.00	1.00	1.00	1.01
9	Jakenan	1.04	1.04	1.04	1.04
10	Pati	1.03	1.02	1.03	1.03
11	Gabus	1.02	1.01	1.02	1.02
12	Margorejo	1.02	1.01	1.02	1.02
13	Gembong	0.98	0.98	0.99	0.99
14	Tlogowungu	0.98	0.99	0.99	0.99
15	Wedarijaksa	0.99	1.00	1.00	1.00
16	Trangkil	1.00	1.00	1.00	1.01
17	Margoyoso	0.98	0.98	0.98	0.98
18	Gunungwungkal	0.98	0.99	1.00	1.00
19	Cluwak	0.98	0.99	1.00	1.00
20	Tayu	1.00	1.00	1.01	1.01
21	Dukuhseti	0.98	0.98	0.99	1.00
	Kab. Pati	1.00	1.00	1.01	1.01

Sumber: Disdukcapil Kab. Pati 2021

Tahun 2019, sebagian besar kecamatan memiliki rasio penduduk kurang dari satu, atau jumlah penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Selanjutnya dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, namun wilayah dengan kesenjangan rasio penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Jakenan (1,04), Kecamatan Jaken (1,03) dan Kecamatan Pati (1,03). Berbeda dengan tahun 2019, sebagian besar kecamatan memiliki rasio penduduk lebih dari satu yang menunjukkan jumlah penduduk perempuan melampaui jumlah penduduk laki-laki. Peningkatan jumlah penduduk perempuan di tahun 2020 dan 2021 menjadikan rasio penduduk sebagian besar kecamatan menunjukkan nilai lebih dari satu, namun hampir seluruh wilayah menunjukkan rasio relatif seimbang. Kesenjangan rasio penduduk paling tinggi terjadi di Kecamatan Jakenan dan Jaken dan rasio masing-masing 1,04.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pati selanjutnya berpengaruh terhadap kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati mengalami tren peningkatan hingga mencapai angka 897 jiwa/km² di tahun 2021. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan masalah, utamanya berkaitan dengan penyediaan

lahan kawasan pemukiman yang layak bagi penduduk. Peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Pati di setiap kecamatan selama periode 2018 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 11 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati Tahun 2018-2021

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
		2018	2019	2020	2021
1	Sukolilo	547	561	579	585
2	Kayen	790	807	829	838
3	Tambakromo	759	768	780	787
4	Winong	636	642	647	651
5	Pucakwangi	383	387	394	398
6	Jaken	678	684	679	683
7	Batangan	885	893	891	895
8	Juwana	1.706	1.725	1.726	1.732
9	Jakenan	905	915	911	918
10	Pati	2.583	2.627	2.609	2.617
11	Gabus	1.121	1.132	1.139	1.148
12	Margorejo	997	1.013	1.018	1.025
13	Gembong	691	700	710	716
14	Tlogowungu	563	568	581	587
15	Wedarijaksa	1.547	1.564	1.577	1.585
16	Trangkil	1.467	1.482	1.490	1.499
17	Margoyoso	1.221	1.232	1.245	1.255
18	Gunungwungkal	608	614	619	626
19	Cluwak	679	684	691	697
20	Tayu	1.462	1.472	1.482	1.495
21	Dukuhseti	740	746	758	762
	Kab. Pati	871	882	890	897

Sumber: Disdukcapil Kab. Pati, 2021

Kecamatan yang merupakan pusat pemerintahan maupun perekonomian cenderung memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pati. Selain Kecamatan Pati, kepadatan penduduk yang cukup tinggi juga ditemukan di Kecamatan Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Tayu, dan Gabus. Sementara itu, kepadatan penduduk rendah berada di kecamatan yang terletak di kawasan pegunungan atau relatif jauh dari pusat pemerintahan atau aktivitas ekonomi, antara lain Kecamatan Pucakwangi, Sukolilo, Tlogowungu, dan Gunungwungkal.

Berdasarkan usia, penduduk Kabupaten Pati dibedakan menjadi kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) dan usia nonproduktif (di bawah 15 tahun dan di 65 tahun ke atas). Rasio penduduk usia nonproduktif terhadap usia produktif menghasilkan rasio ketergantungan. Persebaran penduduk usia produktif, usia nonproduktif, dan rasio ketergantungan di setiap kecamatan ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 12 Rasio Ketergantungan Kabupaten Pati
Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Rasio Ketergantungan			
		2018	2019	2020	2021
1	Sukolilo	38.62	40.08	40.30	39.41
2	Kayen	40.20	41.55	41.22	40.07
3	Tambakromo				
4	Winong	43.30	43.32	42.50	42.09
5	Pucakwangi	39.45	41.02	40.69	40.63
6	Jaken	42.91	44.47	42.62	42.19
7	Batangan	43.30	44.85	42.85	42.48
8	Juwana	41.62	43.27	41.81	40.82
9	Jakenan	44.50	45.76	43.65	43.58
10	Pati	41.06	43.14	41.49	40.80
11	Gabus	40.48	44.05	42.48	41.45
12	Margorejo	39.63	40.93	40.09	39.36
13	Gembong	39.95	41.38	39.60	40.53
14	Tlogowungu	39.35	40.87	40.39	40.14
15	Wedarijaksa	41.41	43.19	42.33	41.57
16	Trangkil	41.95	44.77	42.45	41.91
17	Margoyoso	42.80	45.14	43.81	43.29
18	Gunungwungkal	39.72	41.16	39.89	39.53
19	Cluwak	42.78	44.06	42.53	42.14
20	Tayu	41.95	43.92	42.58	42.36
21	Dukuhseti	42.81	44.75	43.97	43.24
	Kab. Pati				

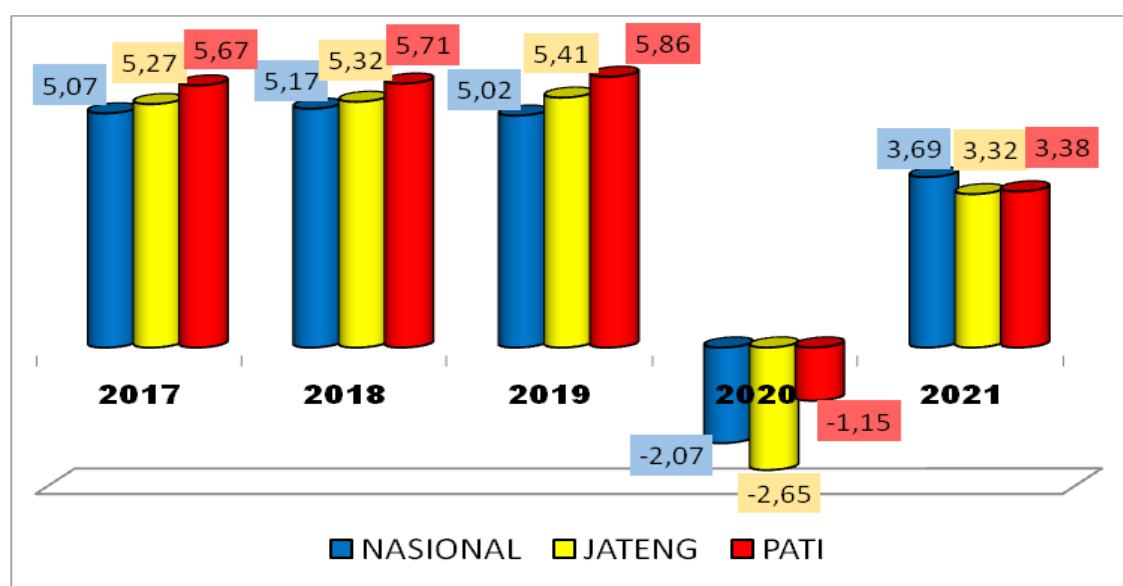
Angka ketergantungan di Kabupaten Pati selama periode 2018 hingga 2021 memiliki nilai lebih dari 40, sehingga dapat dikatakan angka ketergantungan di Kabupaten Pati relatif tinggi. Selama periode 4 tahun terakhir, angka ketergantungan di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi dimana angka ketergantungan tertinggi terjadi di tahun 2019. Angka ketergantungan di tahun 2019 sebesar 43,08, yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif, akan menanggung 43 orang penduduk usia tidak produktif. Usia produktif di Kabupaten Pati didominasi oleh generasi milenial (Y) dengan rentang usia 27-42 tahun dan generasi Z dengan karakter diantaranya memiliki penguasaan terhadap teknologi informasi. Penduduk usia produktif generasi Y mencakup sekitar 31,5% dari total penduduk usia produktif, sementara penduduk usia produktif generasi Z juga memiliki persentase yang cukup tinggi sekitar 20,2%.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Pati memiliki tren angka ketergantungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain selama periode empat tahun, yaitu Kecamatan Jakenan, Dukuhseti, Margoyoso, Batangan, dan Jaken. Di kecamatan-kecamatan tersebut, penduduk usia produktif didominasi oleh penduduk usia 0-14 tahun dengan persentase sekitar 60-70%. Persentase penduduk nonproduktif usia >65 tahun yang cukup tinggi hanya ditemukan di Kecamatan Jaken dan Jaken. Dengan kondisi tersebut, diperkirakan sekitar 10 tahun mendatang, Kabupaten Pati dapat menikmati bonus demografi. Sementara itu, kecamatan yang terletak di wilayah pegunungan seperti Sukolilo, Gunungwungkal, Tlogowungu, dan Gembong cenderung memiliki angka ketergantungan yang relatif rendah. Selain itu, Kecamatan Pucakwangi dan Margorejo juga memiliki angka ketergantungan yang relatif rendah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi COVID-19 Tahun 2020 membawa implikasi atau dampak yang sangat hebat baik secara sosial, ekonomi, maupun kultur masyarakat. Bencana pandemi ini secara ekonomi menyebabkan terjadinya resesi yang ditandai dengan semakin terkontraksinya pertumbuhan ekonomi karena aktivitas produksi maupun konsumsi turun tajam. Penurunan ini sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, dan hal ini bersifat universal guna mencegah penularan virus Covid-19 yang semakin meluas. Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pandemi korona, ekonominya mampu tumbuh rata-rata diatas 5%, bahkan di tahun 2015 tumbuh mencapai 6,01%. Akibat pandemi Tahun 2020, ekonomi Kabupaten Pati terkontraksi menjadi -1,15% dan pertumbuhan minus ini dialami baik di level daerah (provinsi dan kabupaten/kota) maupun nasional bahkan dunia. Kemudian pada tahun 2021, ekonomi mulai tumbuh positif dengan adanya kebijakan pelonggaran PPKM secara bertahap seiring dengan dampak covid-19 yang semakin menurun, khususnya pada semester ke dua 2021, sehingga dapat mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Pada Tahun 2021, ekonomi Kabupaten Pati tumbuh sebesar 3,38%, Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,32% dan Nasional tumbuh sebesar 3,69%. Sebagai perbandingan, berikut grafik pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2017-2021.



Sumber : BPS Kabupaten Pati 2016-2021 (data diolah)

Gambar 2 . 16 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

Grafik 2. 16 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati selalu di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional bahkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 dimana terjadi kontraksi ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pati berada di antara Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Adapun ilustrasi lengkap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 dari sisi produksi (penawaran) menurut lapangan usaha sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 13 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pati

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp (Juta)	Pert. (%)	Rp (Juta)	Pert. (%)	Rp (Juta)	Pert. (%)	Rp (Juta)	Pert. (%)	Rp (Juta)	Pert. (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.700.598,85	2,59	6.885.950,00	2,77	7.156.860,00	3,93	7.314.298,61	2,20	7.299.642,39	-0,20
B	Pertambangan dan Penggalian	506.501,65	9,79	545.439,70	7,69	581.111,46	6,54	585.801,61	0,81	597.702,91	2,03
C	Industri Pengolahan	7.346.145,76	5,01	7.692.522,16	4,72	8.059.797,96	4,77	8.087.205,76	0,34	8.363.456,84	3,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30.372,97	5,95	31.965,68	5,24	33.623,63	5,18	33.668,79	0,13	35.481,47	5,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.373,36	7,07	18.309,40	5,39	19.142,48	4,55	19.569,27	2,23	20.758,01	6,07
F	Konstruksi	2.209.159,70	7,38	2.354.711,32	6,59	2.509.387,99	6,57	2.420.305,77	-3,55	2.661.285,66	9,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.163.372,17	7,24	4.492.270,49	7,90	4.809.525,24	7,06	4.637.470,88	-3,58	4.967.767,17	7,12
H	Transportasi dan Pergudangan	874.475,36	7,04	950.641,27	8,71	1.022.816,79	7,59	716.107,71	-29,99	730.993,99	2,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.025.531,04	7,66	1.114.140,05	8,64	1.222.304,35	9,71	1.158.636,41	-5,21	1.239.374,18	6,97
J	Informasi dan Komunikasi	807.616,10	14,89	912.106,36	12,94	1.026.286,63	12,52	1.136.190,92	10,71	1.192.838,11	4,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	684.675,61	6,46	724.324,97	5,79	750.455,65	3,61	767.671,23	2,29	789.026,06	2,78
L	Real Estate	314.473,53	6,49	330.910,03	5,23	347.698,45	5,07	346.747,15	-0,27	356.210,36	2,73
M,N	Jasa Perusahaan	64.378,22	10,40	70.971,31	10,24	78.572,34	10,71	73.345,67	-6,65	75.497,87	2,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	918.368,04	2,57	931.388,48	1,42	951.583,58	2,17	940.758,94	-1,14	928.903,28	-1,26
P	Jasa Pendidikan	1.140.692,42	8,09	1.243.203,39	8,99	1.341.653,42	7,92	1.338.650,76	-0,22	1.339.826,12	0,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	270.061,99	9,48	296.022,25	9,61	325.210,04	9,86	350.147,03	7,67	350.724,96	0,17
R,S,T,U	Jasa Lainnya	538.651,31	9,83	594.996,87	10,46	649.348,58	9,13	600.896,65	-7,46	609.589,28	1,45
PDRB Total		27.612.448,08	5,67	29.189.873,33	5,71	30.885.378,59	5,81	30.527.473,16	-1,16	31.559.078,68	3,38

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2017-2021

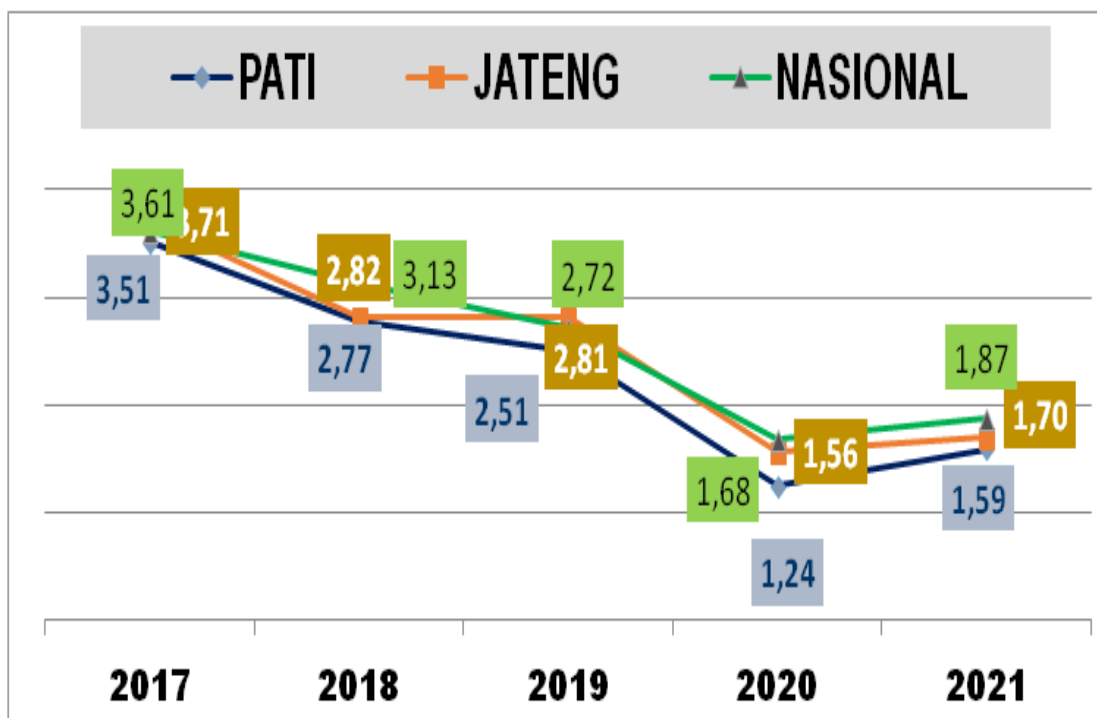
**Tabel 2. 14 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pati
Rp (Juta)**

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.426.492,03	10.024.678,31	10.650.542,32	11.069.993,98	11.177.037,17
B	Pertambangan dan Penggalian	766.656,93	860.215,06	929.604,00	948.506,65	979.427,18
C	Industri Pengolahan	9.910.978,21	10.655.072,47	11.363.768,14	11.668.240,50	12.435.327,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	35.704,49	38.661,46	40.790,78	40.659,44	42.787,43
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	19.300,47	20.399,81	21.624,71	23.124,45	24.835,80
F	Konstruksi	2.860.389,50	3.155.071,07	3.470.356,04	3.355.536,61	3.776.694,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.197.342,52	5.756.644,34	6.296.702,61	6.147.239,15	6.683.901,39
H	Transportasi dan Pergudangan	1.011.986,07	1.104.198,56	1.215.416,07	879.761,67	931.302,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.302.726,10	1.437.952,03	1.605.605,52	1.541.242,23	1.687.372,03
J	Informasi dan Komunikasi	808.113,37	912.398,86	1.037.262,22	1.149.871,70	1.209.298,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	925.445,95	1.014.057,08	1.067.431,08	1.090.820,28	1.173.809,08
L	Real Estate	381.055,96	411.355,08	440.546,23	442.098,38	458.347,84
M,N	Jasa Perusahaan	86.748,04	97.958,78	111.357,34	106.245,43	110.600,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.292.285,27	1.329.283,99	1.378.515,15	1.382.053,21	1.359.326,73
P	Jasa Pendidikan	1.701.266,37	1.893.389,61	2.091.670,16	2.129.873,88	2.182.026,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	369.885,44	411.434,93	461.173,34	509.615,82	514.829,89
R,S,T,U	Jasa Lainnya	694.321,54	778.557,00	857.587,97	803.696,48	823.801,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		36.790.698,26	39.901.328,44	43.039.953,68	43.288.579,86	45.570.727,47

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2017-2021

b. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2017-2021 cenderung menurun. Pola ini sinergi dengan inflasi pada level Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Terjaganya inflasi pada level yang cukup rendah dapat mendukung program pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat lapisan menengah bawah yang sangat rentan terhadap gejolak harga utamanya peningkatan harga yang dipicu oleh harga *volatile foods* seperti sembako dan harga kebutuhan pokok lain yang masuk kategori *non administered price* serta tentunya upaya menekan gejolak harga komoditas *administered price* seperti harga BBM, tarif dasar listrik, tarif angkutan dan seterusnya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Capaian inflasi Kabupaten Pati dari 2017-2021 selalu dibawah target inflasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 (kisaran 3,00%-5,00%), yang berarti bahwa harga-harga yang berlaku di Kabupaten Pati dalam kurun waktu tersebut cenderung stabil/terkendali dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Gambaran secara lengkap perbandingan inflasi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana Grafik berikut.



Sumber: BPS Tahun 2022

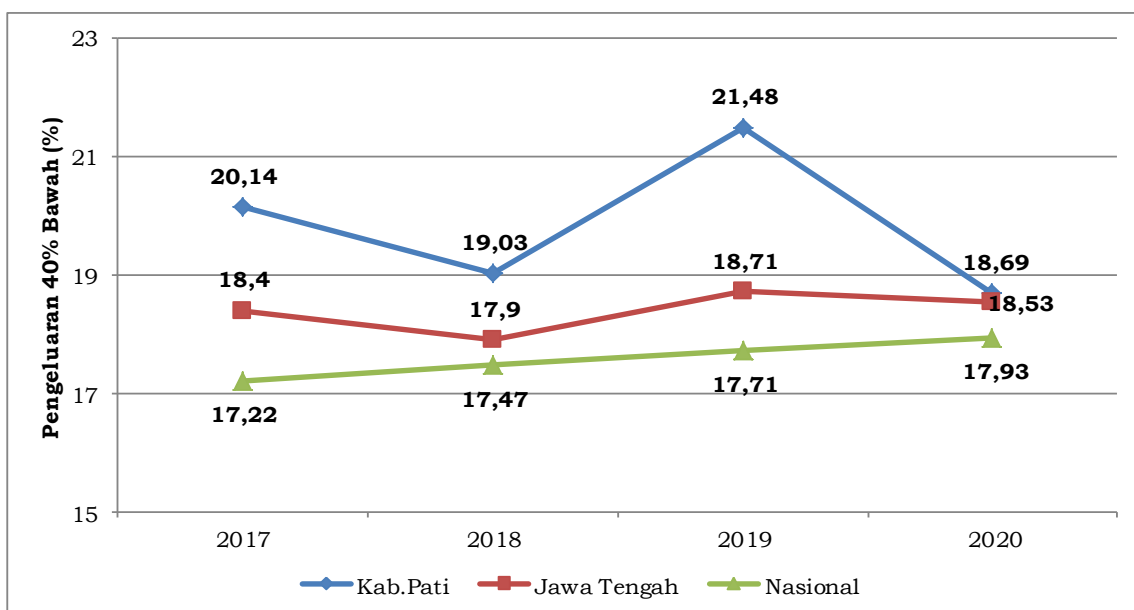
Gambar 2 . 17 Laju Inflasi Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Inflasi di Tahun 2020 merupakan inflasi terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Rendahnya inflasi ini lebih disebabkan karena daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak Pandemi, sehingga berimplikasi pada menurunnya konsumsi (sisi permintaan) terhadap barang dan jasa, dan otomatis hal ini berdampak pada sektor riil (sisi produksi).

c. Kesenjangan

Analisis kesenjangan menurut Bank Dunia dianalisis berdasarkan pengeluaran kelompok pendapatan Berdasarkan Bank Dunia, penduduk terbagi dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu 40% bawah; 40% menengah, dan 20% atas. Sementara itu, analisis kesenjangan didasarkan pada persentase pengeluaran oleh kelompok pendapatan 40% terbawah dengan kategori: <12% ketimpangan tinggi, 12-

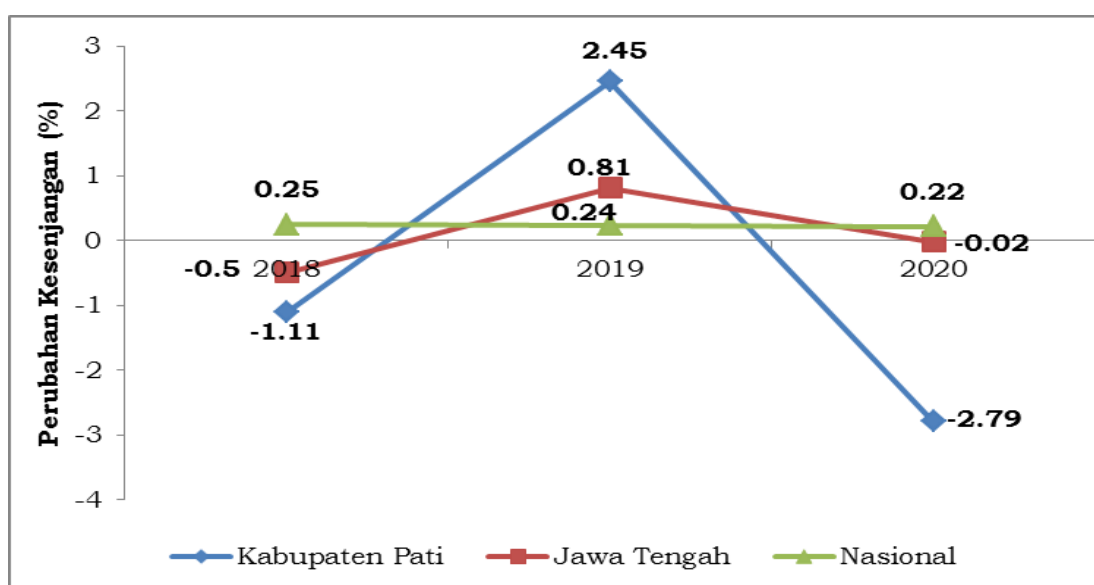
17% ketimpangan menengah, dan > 17% ketimpangan rendah. Gambaran ketimpangan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: BPS Tahun 2021

Gambar 2 . 18 Perbandingan Pengeluaran Kelompok Pendapatan 40% Terbawah

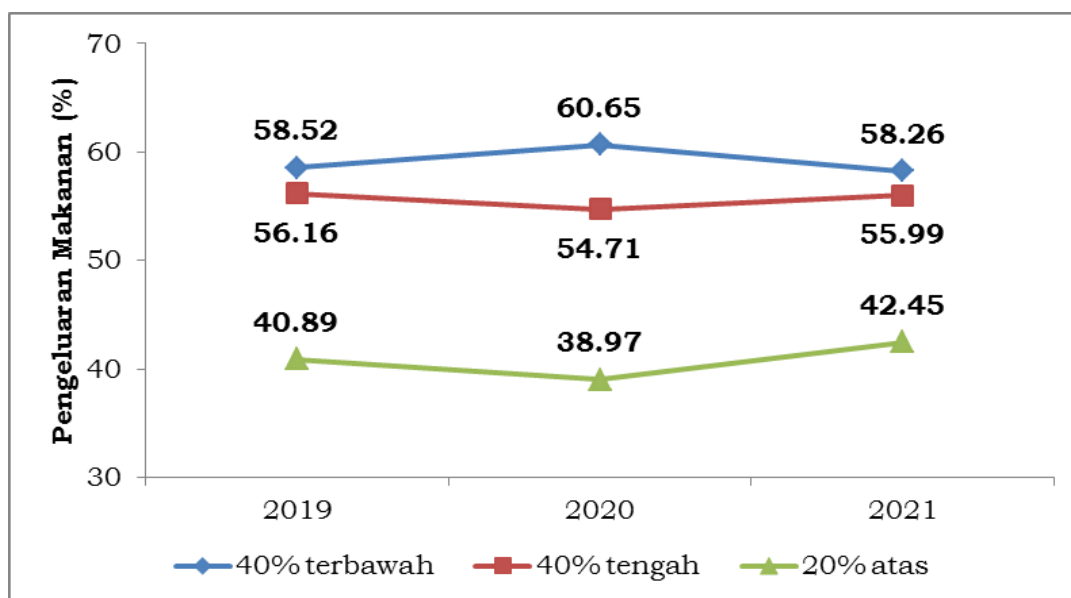
Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat, tingkat kesenjangan di Kabupaten Pati relatif berfluktuasi, dengan nilai yang relatif lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Selama periode 2017-2020, kesenjangan di Kabupaten Pati berada pada kategori rendah. Kesenjangan paling rendah terjadi di tahun 2019, dimana proporsi pengeluaran kelompok pendapatan 40% terbawah sebesar 21,48%. Sementara itu di tahun 2020, terjadi penurunan proporsi pengeluaran kelompok pendapatan 40% terbawah menjadi 18,69%. Penurunan tersebut utamanya disebabkan karena pengeluaran 40% bawah menjadi kelompok yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Walaupun terjadi peningkatan di tahun 2020, kesenjangan Kabupaten Pati masih lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Untuk mengukur keberhasilan Kabupaten Pati dalam mengatasi kesenjangan, perubahan kesenjangan Kabupaten Pati dibandingkan dengan Nasional sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Gambar 2 . 19 Penurunan Pengeluaran Kelompok Pendapatan 40% Terbawah

Kabupaten Pati menunjukkan kinerja yang fluktuatif dalam mengurangi kesenjangan. Tahun 2018, Kinerja Kabupaten Pati dalam mengatasi kesenjangan masih di bawah kinerja Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2019, tingkat pengeluaran kelompok pendapatan 40% terbawah Kabupaten Pati mengalami peningkatan cukup signifikan, sehingga di tahun tersebut lebih tinggi di bandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2020, akibat Pandemi Covid-19, pengeluaran kelompok pendapatan 40% terendah Kabupaten Pati mengalami penurunan yang cukup drastis dan menjadi yang terendah selama periode 2018 hingga 2020. Penurunan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa Pandemi Covid-19 meningkatkan kesenjangan masyarakat. Selain itu, upaya pengaman sosial yang dijalan oleh Pemerintah Kabupaten Pati bagi kelompok miskin belum optimal untuk mengurangi dampak ekonomi pada kelompok tersebut.

Selama periode 2019 hingga 2021, terjadi perubahan persentase pengeluaran makanan dan nonmakanan pada ketiga kelompok pendapatan. Kelompok pendapatan 40% terbawah dan kelompok 40% tengah memiliki persentase pengeluaran makanan lebih tinggi dari 50%, sehingga dapat dinyatakan konsumsi pada kedua kelompok tersebut masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu, persentase pengeluaran nonmakanan pada kelompok pendapatan 20% atas memiliki nilai di bawah 50% yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang sangat baik. Persentase pengeluaran makanan pada kelompok 40% terbawah mencapai persentase tertinggi di tahun 2020 mencapai 60%, sedangkan pada kelompok pendapatan 20% atas, persentase konsumsi makanan mencapai persentas terendah sebesar 38,97%. Gambaran perubahan persentase pengeluaran makanan pada setiap kelompok pendapatan pada periode 2019-2021 ditampilkan pada grafik berikut.



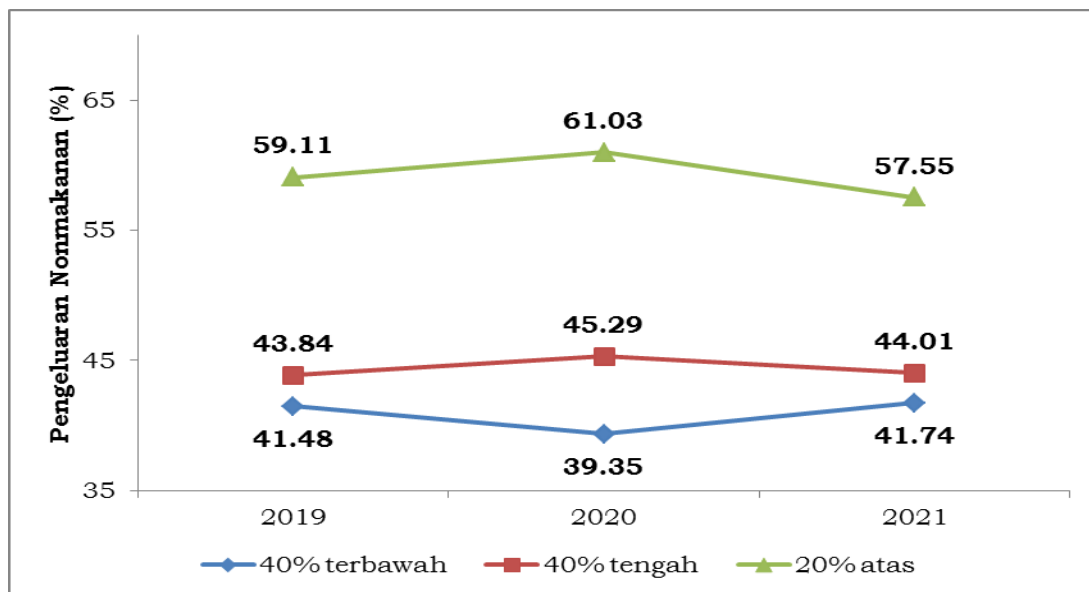
Sumber: BPS Tahun 2022

Gambar 2 . 20 Pengeluaran Makanan Setiap Kelompok Pendapatan

Tahun 2020, pada masa pandemi Covid-19 gelombang pertama, kesenjangan tampak pada pengeluaran makanan pada kelompok pendapatan 40% bawah dengan kelompok pendapatan 20% atas. Pada tahun tersebut kelompok pendapatan 40% bawah mengalami penurunan pengeluaran makanan (-1,45%), sementara kelompok pendapatan 20% atas mengalami peningkatan pengeluaran makanan hingga mencapai 16,14%. Hal tersebut menunjukkan pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kelompok pendapatan 40% bawah. Tahun 2021, pandemi Covid-19 masih berlangsung, namun dampak yang ditimbulkan relatif lebih ringan dibandingkan pandemi Covid-19 gelombang pertama. Di tahun

tersebut, pengeluaran makanan untuk ketiga kelompok pendapatan mengalami peningkatan, namun dengan kesenjangan yang lebih baik.

Selanjutnya analisis pengeluaran juga dilakukan terhadap pengeluaran nonmakanan. Secara umum, selama periode 2019 hingga 2021, pengeluaran nonmakanan di tiga kelompok pendapatan mengalami fluktuasi. Selama periode tersebut, kelompok pengeluaran 20% teratas, memiliki presentase pengeluaran nonmakanan tertinggi dibandingkan dua kelompok pendapatan lainnya.



Sumber: BPS Tahun 2022

Gambar 2 . 21 Pengeluran Makanan Setiap Kelompok Pendapatan Tahun 2019-2021

Pada saat pandemi Covid-19 gelombang I di tahun 2020, kelompok pendapatan 40% tengah dan 20% atas mengalami peningkatan pengeluaran nonmakanan, sedangkan kelompok pendapatan 40% rendah mengalami penurunan pengeluaran. Di Tahun tersebut, pengeluaran kelompok pendapatan 40% terbawah mengalami penurunan mencapai (-9,78%) dari pengeluaran nonmakanan di tahun 2019. Sementara itu, pengeluaran nonmakanan kelompok pendapatan 40% tengah meningkat 7,44% dan kelompok pendapatan 20% teratas meningkat sekitar 25,79%. Kondisi tersebut sejalan dengan analisis pada pengeluaran makanan, dimana Pandemi Covid-19 gelombang pertama memberikan dampak yang lebih besar pada kelompok pendapatan 40% terbawah. Kondisi berbeda terjadi di tahun 2021. Pengeluaran nonmakanan pada kelompok pendapatan 40% tengah dan pendapatan 20% teratas. Di sisi lain, kelompok pendapatan 40% terbawah mengalami peningkatan pengeluaran nonmakanan hingga 21% sehingga persentase pengeluaran nonmakanan untuk kelompok ini meningkat mencapai 41,74%.

Untuk menggambarkan secara lebih terperinci kesenjangan di Kabupaten Pati, pengeluaran setiap kelompok pendapatan dibandingkan dan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 15 Pengeluaran Berdasarkan Kelompok Pendapatan Tahun 2021

No	Kelompok Komoditas	Kelompok Pendapatan					
		40% terbawah	%	40% tengah	%	20% teratas	%
1	Padi-padian	49.522	8.92	59.443	5.57	61.612	2.69
2	Umbi-umbian	2.377	0.43	5.312	0.50	7.734	0.34
3	Ikan/udang/cumi/kerang	33.280	5.99	55.129	5.17	89.077	3.89

No	Kelompok Komoditas	Kelompok Pendapatan					
		40% terbawah	%	40% tengah	%	20% teratas	%
4	Daging	8.355	1.50	19.056	1.79	39.040	1.70
5	Telur dan susu	16.870	3.04	25.975	2.44	39.933	1.74
6	Sayur-sayuran	30.021	5.41	48.446	4.54	63.195	2.76
7	Kacang-kacangan	7.481	1.35	11.857	1.11	13.605	0.59
8	Buah-buahan	12.040	2.17	29.217	2.74	56.748	2.48
9	Minyak dan Kelapa	10.108	1.82	17.128	1.61	20.098	0.88
10	Bahan minuman	12.173	2.19	17.948	1.68	23.436	1.02
11	Bumbu-bumbuan	10.090	1.82	15.237	1.43	23.344	1.02
12	Konsumsi lainnya	7.021	1.26	11.572	1.08	16.792	0.73
13	Makanan dan Minuman Jadi	87.623	15.78	197.848	18.55	403.270	17.59
14	Rokok dan tembakau	36.638	6.60	83.060	7.79	115.068	5.02
	Jumlah makanan	323.599	58.26	597.228	55.99	972.952	42.45
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	123.221	22.19	218.423	20.48	470.973	20.55
16	Aneka Barang dan jasa	57.361	10.33	126.790	11.89	360.408	15.72
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	12.715	2.29	30.689	2.88	56.858	2.48
18	Barang tahan lama	9.884	1.78	38.341	3.59	259.110	11.30
19	Pajak, pungutan dan asuransi	20.512	3.69	39.222	3.68	104.828	4.57
20	Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	8.123	1.46	16.034	1.50	67.128	2.93
	jumlah non makanan	231.816	41.74	469.499	44.01	1.319.305	57.55
	Jumlah pengeluaran	555.415	100.00	1.066.727	100.00	2.292.257	100.00

Sumber: BPS Kab. Pati (2022)

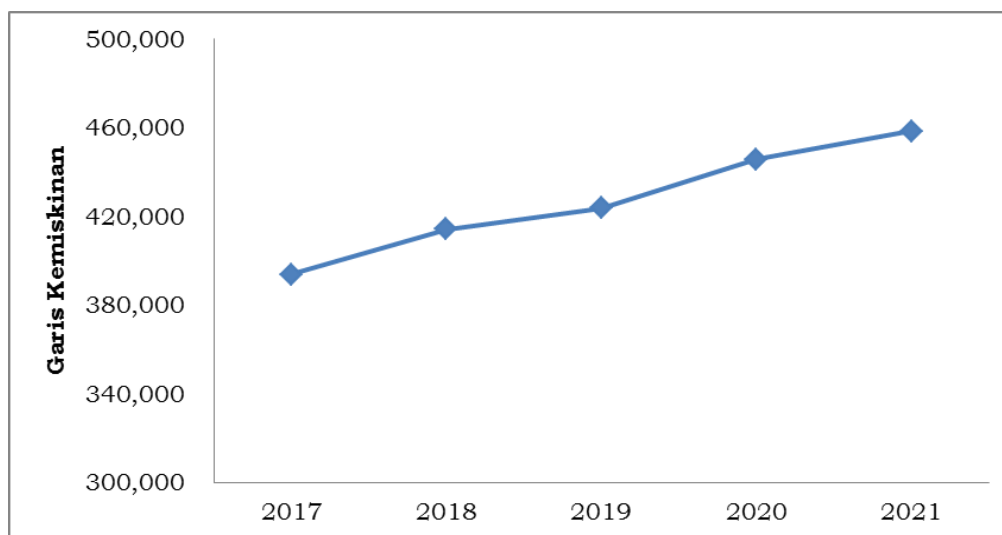
Kondisi perekonomian ketiga kelompok pendapatan di tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan tahun 2021. Di tahun 2020, pengeluaran sebagian komoditas mengalami penurunan, dimana kelompok pendapatan 40% terbawah mengalami penurunan paling signifikan. Tahun 2021, penurunan pengeluaran masih ditemukan di beberapa jenis komoditas. Selain itu, jumlah pengeluaran pada ketiga kelompok pendapatan juga mengalami peningkatan, dimana kelompok pendapatan 40% memiliki peningkatan tertinggi mencapai 14,3%. Berkaitan dengan pengeluaran makanan, persentase pengeluaran tertinggi di ketiga kelompok pendapatan adalah untuk komoditas makanan jadi, dimana kelompok pendapatan 40% tengah memiliki persentase tertinggi. Komoditas lain dengan persentase pengeluaran tinggi adalah rokok dan tembakau, dimana kelompok pendapatan 40% tengah memiliki persentase pengeluaran tertinggi. Pada kelompok pendapatan 40% terendah, pengeluaran untuk padi-padian juga memiliki persentase yang tinggi. Selain itu, pengeluaran untuk daging dan kacang-kacangan mengalami penurunan, namun pengeluaran untuk telur dan susu mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal tersebut mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi protein pada kelompok pendapatan 40% terbawah.

Analisis terhadap pengeluaran nonmakanan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pola yang signifikan pada persentase pengeluaran non makanan. Selama tahun 2019 hingga 2000, persentase pengeluaran non makanan tertinggi pada ketiga kelompok adalah untuk perumahan & fasilitas rumah tangga dan aneka barang dan jasa. Hanya di tahun 2020, terjadi perubahan dimana

persentase pengeluaran barang tahan lama pada kelompok pendapatan 20% teratas melampaui pengeluaran untuk aneka barang dan jasa. Selanjutnya, terdapat perubahan nilai konsumsi beberapa jenis komoditas yang cukup signifikan di ketiga kelompok pendapatan. Di tahun 2020, nilai pengeluaran hampir seluruh komoditas non konsumsi pada kelompok pendapatan 40% terbawah mengalami penurunan, Sebaliknya, peningkatan nilai pengeluaran ditemukan di hampir seluruh komoditas, dimana peningkatan tertinggi terjadi untuk komoditas barang tahan lama. Sementara itu, di tahun 2021, kelompok pendapatan 40% terbawah mulai mengalami pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan nilai pengeluaran di seluruh komoditas nonmakanan. Peningkatan pengeluaran tertinggi terjadi pada komoditas keperluan pesta/kenduru (154%), diikuti oleh komoditas barang tahan lama (36,8%). Sementara itu, penurunan nilai pengeluaran justru terjadi pada kelompok pendapatan 20% tertinggi. Beberapa komoditas mengalami penurunan nilai pengeluaran, antara lain barang tahan lama (-30,68%) dan Keperluan pesta dan kenduri (25,22%)

d. Kemiskinan

Salah satu parameter untuk mengukur kemiskinan adalah Garis Kemiskinan. Selama periode 2017-2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Pati cenderung meningkat sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : Data BPS Kabupaten Pati, 2022 (diolah).

Gambar 2 . 22 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan di Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 4%. Peningkatan garis kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2020 mencapai 5%, sedangkan peningkatan garis kemiskinan terendah terjadi di tahun 2019 sebesar 2%. Peningkatan garis kemiskinan yang cukup tinggi di tahun 2020, terjadi pada periode awal pandemi Covid-19. Peningkatan nilai konsumsi yang cukup tinggi ditemukan pada jenis konsumsi non-makanan. Selanjutnya garis kemiskinan ini digunakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati. Hingga tahun 2019, Kabupaten Pati telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun demikian di tahun 2020 dan tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati mengalami peningkatan utamanya karena Pandemi Covid-19. Gambaran jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati disandingkan dengan jumlah penduduk miskin

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

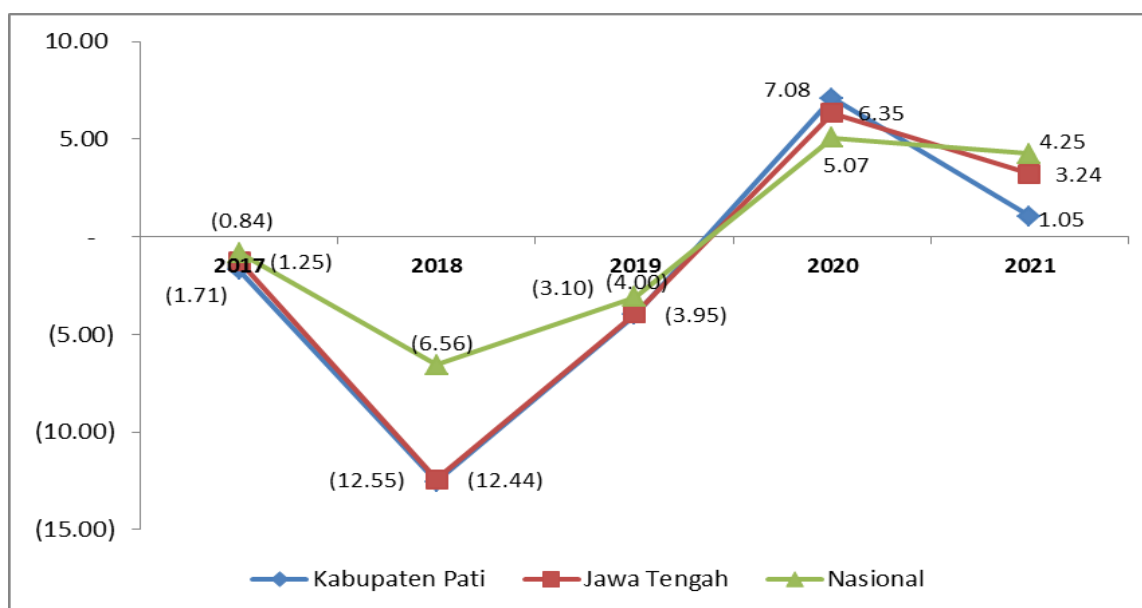
Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional

Tahun	Penduduk Miskin (ribu jiwa)			
	Target RKP	Realisasi Kab. Pati	Jawa Tengah	Nasional
2017	140.61	141.73	4,450.72	27,771.22
2018	131.83	123.94	3,897.20	25,949.80
2019	120.16	118.98	3,743.23	25,144.72
2020	132.89	127.40	3,980.90	26,420.00
2021	132.89	128.74	4,109.75	27,542.77

Sumber: BPS, 2022

Tidak berbeda dengan Kabupaten Pati, peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2020 dan tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19. Rata-rata rasio jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati dengan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah selama periode 2017-2021 adalah 0,032, yang artinya sekitar 3,2% jumlah penduduk miskin Jawa Tengah berasal dari Kabupaten Pati. Rasio tertinggi penduduk miskin Kabupaten Pati terhadap Jawa Tengah terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2020 dengan rasio 0,0320. Sementara itu, rasio terendah terjadi di tahun 2021 dengan rasio sebesar 0,0313.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 memunculkan kebijakan pembatasan wilayah dan aktivitas masyarakat. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat, termasuk kelompok rentan miskin dan hampir miskin. Tahun 2020, peningkatan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati jauh melampaui peningkatan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah dan Kabupaten Pati. Peningkatan jumlah penduduk miskin masih terjadi di tahun 2021, dimana peningkatan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati relatif lebih rendah dibandingkan peningkatan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah dan Nasional. Gambaran perubahab jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: BPS, 2022 (data diolah).

Gambar 2 . 23 Perubahan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017-2021, rata-rata perubahan penduduk miskin di Kabupaten Pati adalah -2,03%, yang berarti penduduk miskin di Kabupaten mengalami penurunan sebesar 2,03% setiap tahunnya. Rata-rata perubahan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati selama periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan rata-rata perubahan jumlah penduduk miskin Jawa Tengah (-1,61%) dan Nasional (-0,24%). Kinerja penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati paling tinggi terjadi di tahun 2018, dimana jumlah penduduk miskin Kabupaten Pati terkoreksi hingga 12,55%. Sementara itu, kinerja penurunan penduduk miskin Kabupaten Pati paling rendah terjadi di tahun 2020, saat terjadi gelombang pertama Pandemi Covid-19. Di tahun tersebut penduduk miskin di Kabupaten Pati mengalami peningkatan cukup tinggi mencapai 7,08%, sementara di Jawa Tengah dan Nasional, peningkatan jumlah penduduk miskin relatif lebih rendah dengan persentase secara berurutan 6,35% dan 4,25%.

1. Proporsi Kemiskinan

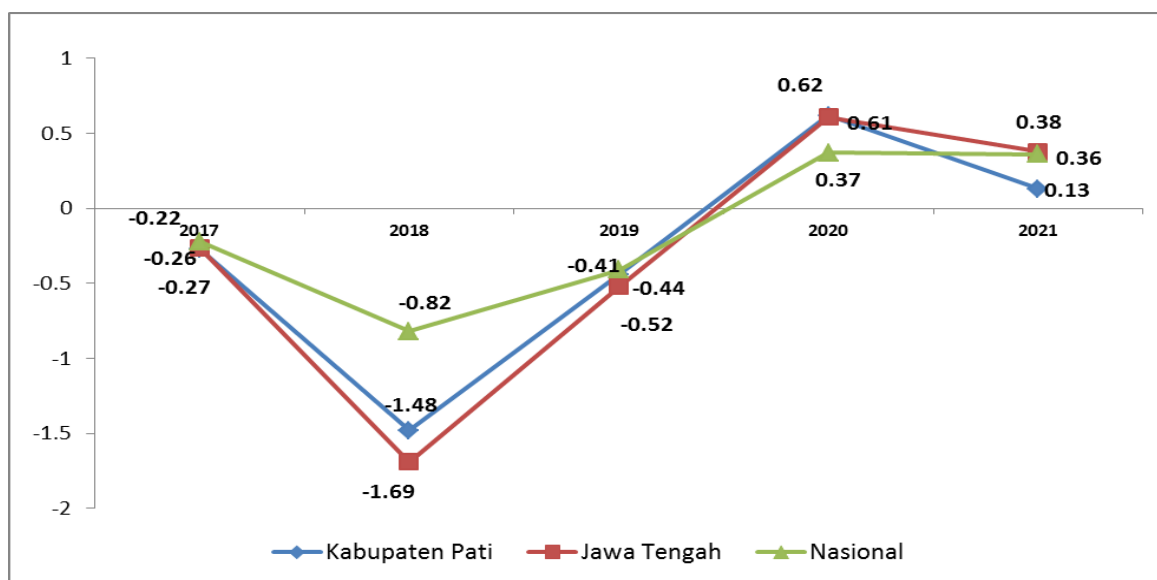
Proporsi kemiskinan atau angka kemiskinan menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Selama periode 2017-2021, Kabupaten Pati pada dasarnya memiliki kinerja yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan angka kemiskinan yang lebih baik dibandingkan target daerah. Selanjutnya selama periode lima tahun tersebut, angka kemiskinan Kabupaten Pati lebih baik dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah, namun masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Nasional. Gambaran angka kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Proporsi Kemiskinan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Nasional
2017	11.38	13.01	10.64
2018	9.9	11.32	9.82
2019	9.46	10.80	9.41
2020	10.08	11.41	9.78
2021	10.21	11.79	10.14

Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan penurunan pada periode 2017 hingga 2019. Bahkan, sejak tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Pati dan Nasional berada pada persentase kurang dari 10%. Namun demikian, akibat Pandemi Covid-19, di tahun 2020 dan 2021, angka kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional kembali meningkat. Tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Pati adalah 10,21%, lebih baik dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah (11,79%), namun masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Nasional (10,14%). Selanjutnya, kinerja penurunan kemiskinan akan dilihat dari tingkat penurunan angka kemiskinan sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Gambar 2 . 24 Perubahan Persentase Kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Periode 2017-2021

Kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi. Secara rata-rata, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja terbaik dengan rata-rata penurunan angka kemiskinan tahunan sebesar -0,30%. Rata-rata penurunan angka kemiskinan tahunan Kabupaten Pati sebesar -0,29%, berada sedikit di bawah kinerja Jawa Tengah, namun masih lebih baik dibanding kinerja penurunan kemiskinan nasional (-0,14%). Lebih lanjut, Kabupaten Pati berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2017 hingga 2019, dimana kinerja penurunan kemiskinan terbaik terjadi di tahun 2018 dengan tingkat penurunan sebesar -1,69%. Bahkan, pada tahun tersebut kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten Pati lebih baik dibandingkan kinerja Jawa Tengah dan Nasional. Namun demikian, di tahun 2020 dan tahun 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Tahun 2020, angka kemiskinan Kabupaten Pati meningkat 0,62%, dimana peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan kemiskinan Jawa Tengah (0,61%) dan Nasional (0,36%). Tahun 2021, peningkatan kemiskinan di Kabupaten Pati masih berlanjut, namun kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Pati meningkat sebesar 0,13% dan lebih baik dibandingkan peningkatan angka kemiskinan Jawa Tengah (0,38%) dan Nasional (0,36%).

2. Kedalaman Kemiskinan (P1)

Kedalaman Kemiskinan menggambarkan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2017 hingga 2021, kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut juga terjadi di Jawa Tengah dan Nasional. Selanjutnya, rata-rata indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati selama periode lima tahun terakhir adalah 1,47, lebih baik dibandingkan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan Jawa Tengah (1,84) dan Nasional (1,67) pada periode yang sama. Gambaran Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

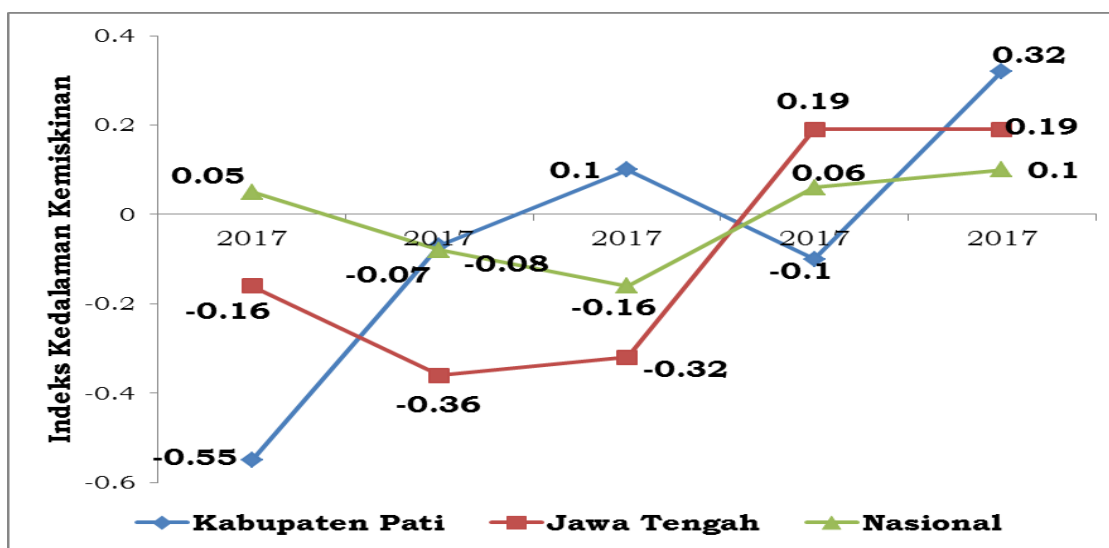
Tabel 2. 18 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan		
	Kab. Pati	Jateng	Nasional
2017	1.44	2.21	1.79
2018	1.37	1.85	1.71
2019	1.47	1.53	1.71
2020	1.37	1.72	1.61
2021	1.69	1.91	1.71

Sumber: BPS, 2022

Selama periode 2017 hingga 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati lebih baik dibandingkan indeks kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional. Kabupaten Pati memiliki indeks kemiskinan terbaik di tahun 2018 dan 2020 dengan nilai 1,37, yang menandakan semakin rendahnya kesenjangan antara pengeluaran kelompok miskin dengan garis kemiskinan. Namun demikian, di tahun 2021, kedalaman kemiskinan Kabupaten mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 1,69. Kondisi tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut hingga di tahun 2021. Penurunan pendapatan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat berdampak kepada penurunan pengeluaran, termasuk kelompok miskin. Kondisi tersebut selanjutnya dapat berdampak terhadap peningkatan jumlah kelompok miskin yang termasuk dalam kelompok sangat miskin, sehingga dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan di periode selanjutnya.

Selanjutnya kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan selama periode 2017 hingga 2021 juga dapat dilihat dari penurunan kedalaman kemiskinan. Perubahan kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Nasional periode 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Gambar 2 . 25 Perubahan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, & Nasional

Selama periode 2017-2021, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan kinerja perbaikan kedalaman kemiskinan yang cenderung fluktuatif. Selama periode tersebut, Kabupaten Pati menunjukkan rata-rata penurunan kedalaman kemiskinan sebesar -0,06, lebih baik dibandingkan rata-rata penurunan kedalaman kemiskinan Nasional (-0,01), namun lebih rendah dibandingkan rata-rata penurunan kedalaman kemiskinan Jawa Tengah (-0,09). Kabupaten Pati

menunjukkan perbaikan kedalaman kemiskinan di tahun 2017, 2018, dan 2020 dengan kinerja penurunan kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2017 (-0,55). Tahun 2020, pada saat Pandemi Covid-19 gelombang pertama, Kabupaten Pati mampu menurunkan kedalam kemiskinan (-0,01), sementara Jawa Tengah dan Nasional justru menunjukkan peningkatan kedalaman kemiskinan. Namun demikian, di tahun 2021, pada saat Pandemi Covid-19 gelombang kedua, Kabupaten pati mengalami kenaikan kedalaman kemiskinan sebesar 0,32, dimana peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan Pandemi Covid-19 gelombang kedua memberikan dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan di Kabupaten Pati. Oleh karenanya diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan ekonomi, khususnya masyarakat miskin.

3. Keparahan Kemiskinan

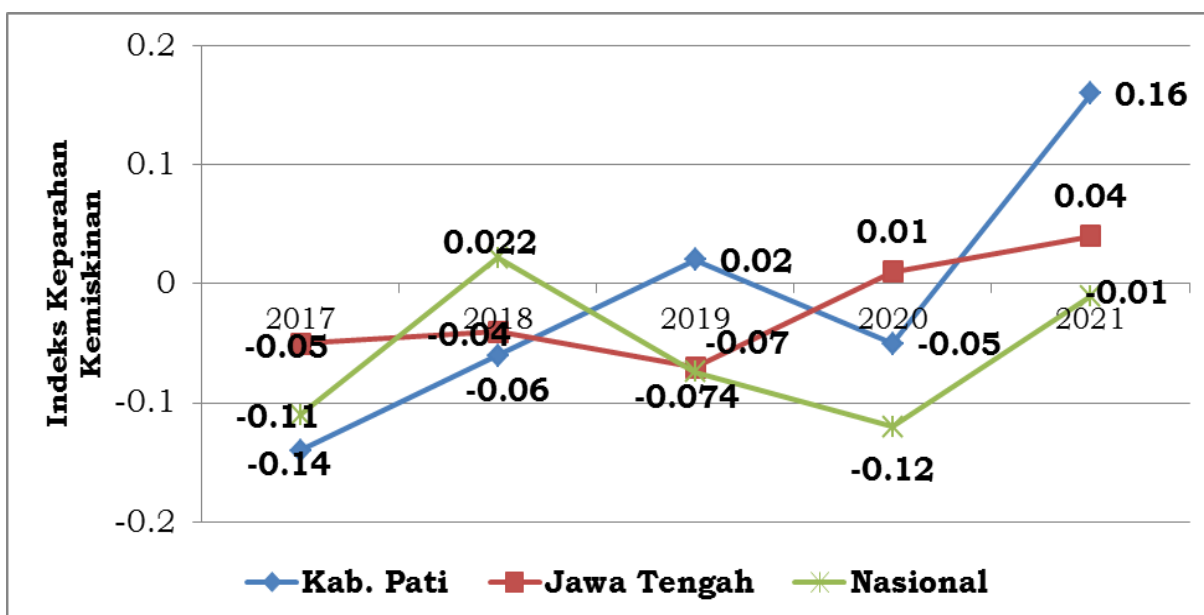
Keparahan kemiskinan menunjukkan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan antarpenduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan menunjukkan kesenjangan yang lebih lebar antarpenduduk miskin. Selama periode 2017-2021, Rata-rata indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pati adalah 0,35, dimana rata-rata tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata indeks keparahan kemiskinan Jawa Tengah (0,46) dan Nasional (0,44) pada periode yang sama. Gambaran indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Periode 2017-2021

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan		
	Realisasi Kab. Pati	Jateng	Nasional
2017	0.35	0.57	0.48
2018	0.29	0.45	0.44
2019	0.31	0.30	0.44
2020	0.26	0.34	0.38
2021	0.42	0.45	0.42

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pati selama periode 2017 hingga 2021 bersifat fluktuatif, dimana kondisi tersebut juga terjadi di Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pati menunjukkan nilai terendah selama lima tahun terakhir, yang dapat diartikan semakin rendahnya kesenjangan pada kelompok miskin. Namun demikian, di tahun 2021, keparahan kemiskinan Kabupaten Pati mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 0,42. Bahkan, nilai indeks keparahan kemiskinan tersebut merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Kesenjangan antar penduduk miskin yang semakin lebar di tahun tersebut merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021. Kondisi ekonomi yang sulit selama masa pandemi meningkatkan jumlah penduduk miskin yang terkategori dalam kelompok sangat miskin sehingga kesenjangan antarpenduduk miskin semakin lebar.



Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2 . 26 Perubahan Keperahan Kemiskinan Kabupaten Pati, Nasional, dan Regional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017 hingga 2021, Kabupaten Pati menunjukkan fluktuasi dalam upaya mengurangi keparahan kemiskinan. Selama periode lima tahun tersebut, rata-rata Kabupaten Pati dapat menurunkan keparahan kemiskinan sebesar -0,014 poin setiap tahunnya, dimana rata-rata penurunan tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata penurunan keparahan kemiskinan Jawa Tengah (-0,022) dan Nasional (-0,058). Kabupaten Pati menunjukkan kinerja terbaik dalam menurunkan keparahan kemiskinan terjadi di tahun 2017 dengan nilai penurunan sebesar -0,14. Sementara yaitu, tahun 2021 menjadi periode dengan kinerja penurunan keparahan kemiskinan yang paling buruk karena keparahan kemiskinan Kabupaten Pati justru mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dan merupakan peningkatan tertinggi selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan antarpenduduk miskin hendaknya menjadi salah satu prioritas permasalahan yang harus diselesaikan.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek Kesehatan terwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Aspek Pendidikan direpresentasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara aspek Ekonomi terwakili oleh Pengeluaran Perkapita.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pati terus mengalami perbaikan selama periode 2017-2021. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Pati telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut

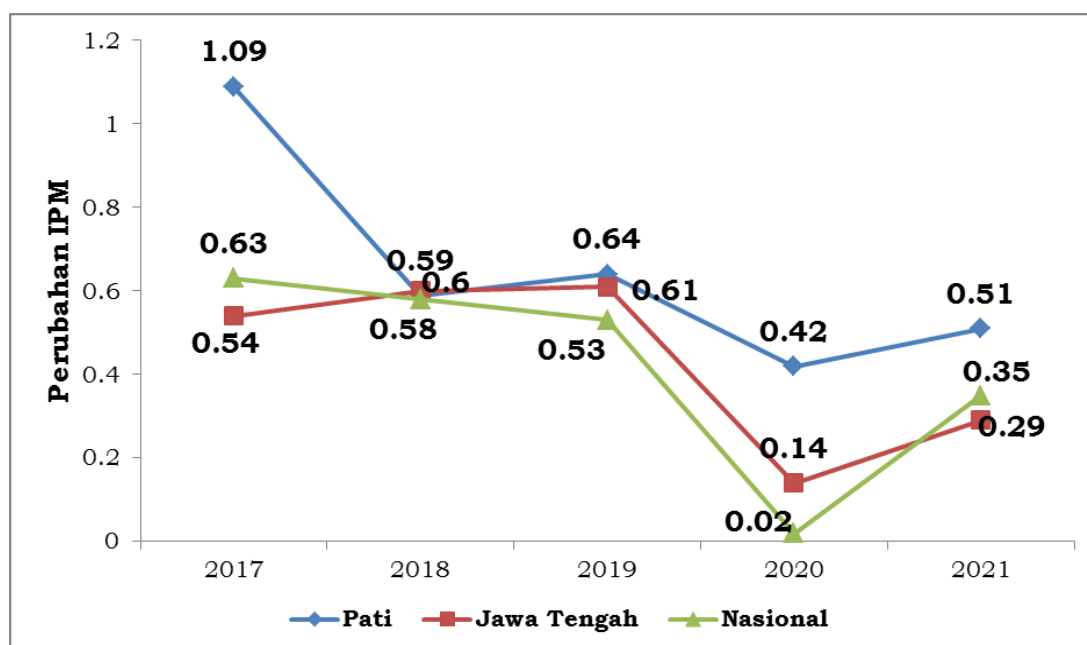
Tabel 2. 20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		Kab. Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	70.12	70.52	70.81
2	2018	70.71	71.12	71.39
3	2019	71.35	71.73	71.92

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		Kab. Pati	Jawa Tengah	Nasional
4	2020	71.77	71.87	71.94
5	2021	72.28	72.16	72.29

Sumber: BPS, 2022

Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pati selalu berada di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Namun demikian di tahun 2021, Kabupaten Pati berhasil meningkatkan kualitas SDM secara signifikan sehingga IPM Kabupaten Pati mampu melampaui rata-rata IPM Jawa Tengah dan hampir menyamai IPM Nasional. Kinerja peningkatan IPM Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : BPS 2022 (diolah)

Gambar 2 . 27 Peningkatan IPM Kabupaten Pati, Jawa Tengah, & Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017-2021, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan tren peningkatan IPM. Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Pati per tahun adalah 0,65 poin, dimana rata-rata peningkatan IPM tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata peningkatan IPM Jawa Tengah (0,44 poin) dan Nasional (0,42 poin). Kinerja peningkatan kualitas manusia di Kabupaten Pati paling tinggi terjadi di tahun 2017 dimana peningkatan IPM mencapai 1,09. Sementara itu, kinerja peningkatan kualitas manusia terendah terjadi di tahun 2020. Pada tahun tersebut IPM Kabupaten hanya mengalami peningkatan sebesar 0,42 poin. Namun demikian, peningkatan IPM tersebut relatif masih lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional.

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator kualitas SDM pada aspek kesehatan. dapat didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Selama periode lima tahun terakhir (2017-2022), Usia Harapan Hidup Kabupaten Pati, Nasional, dan Jawa Tengah terus menunjukkan peningkatan. Gambaran UHH Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

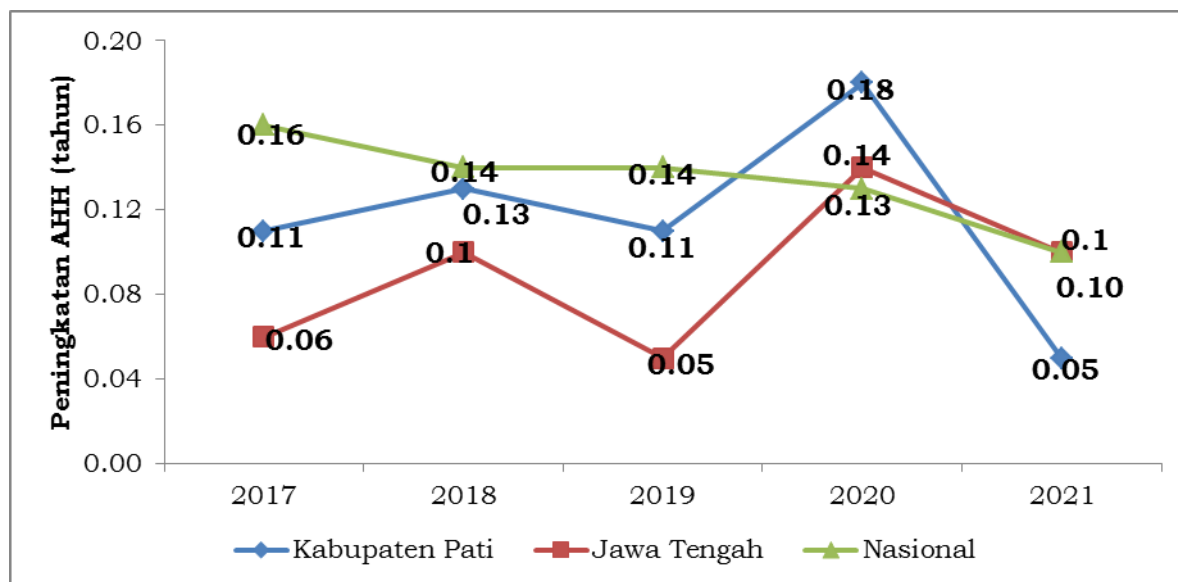
Tabel 2. 21 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Umur Harapan Hidup		
		Kab. Pati	Jateng	Nasional
1	2017	75.80	74.08	71.06
2	2018	75.93	74.18	71.20
3	2019	76.04	74.23	71.34
4	2020	76.22	74.37	71.47
5	2021	76.27	74.47	71.57

Sumber: BPS, 2022

Selama periode lima tahun, UHH Kabupaten Pati relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Hal tersebut menunjukkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati masih lebih baik dibandingkan rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional. Namun demikian, peningkatan UHH juga menjadi tantangan bagi pembangunan manusia, karena berpotensi meningkatkan angka ketergantungan serta pembiayaan di bidang kesehatan akibat kerentanan kelompok usia tua terhadap beberapa masalah kesehatan.

Selanjutnya kinerja perbaikan kualitas manusia Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional pada aspek kesehatan dapat dilihat dari tingkat perubahan UHH, yang ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : Data BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2 . 28 Peningkatan UHH Kabupaten Pati, Jawa Tengah, & Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017-2021, UHH Kabupaten Pati mengalami rata-rata peningkatan 0,12 tahun setiap tahunnya, dimana peningkatan tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata peningkatan UHH Jawa Tengah (0,09 tahun), namun sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan UHH Nasional (0,13 tahun). Kinerja peningkatan UHH Kabupaten Pati tertinggi terjadi di tahun 2020, dimana UHH Kabupaten Pati meningkat hingga 0,18 tahun, bahkan peningkatan UHH Kabupaten Pati mampu melampaui Jawa Tengah dan Nasional. Namun demikian di tahun 2021, peningkatan UHH Kabupaten Pati merupakan yang terendah selama periode lima tahun terakhir, yaitu sebesar 0,05 tahun dan jauh di bawah peningkatan UHH Jawa Tengah dan Nasional. Kurang optimalnya peningkatan derajat kesehatan manusia di tahun tersebut utamanya merupakan dampak

Pandemi Covid-19 gelombang kedua yang membawa dampak di aspek kesehatan yang lebih besar dibandingkan pandemi Covid-19 gelombang pertama.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

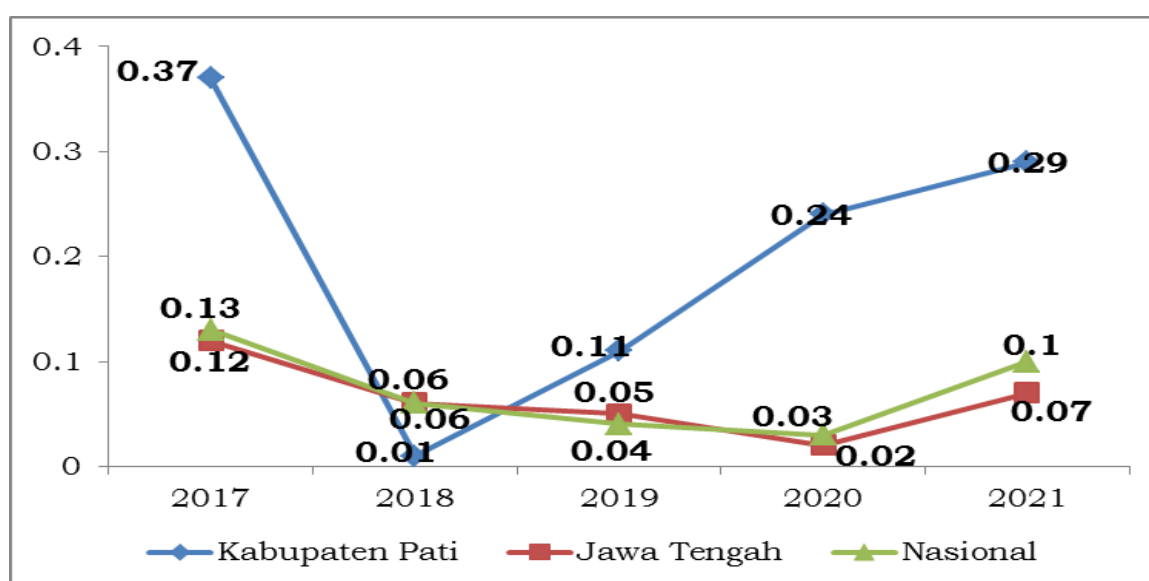
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator kualitas SDM pada aspek pendidikan. HLS dapat diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan selama periode 2017 hingga 2021, begitu juga dengan HLS Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 HLS Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
		Kab.Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	12.29	12.57	12.85
2	2018	12.3	12.63	12.91
3	2019	12.41	12.68	12.95
4	2020	12.65	12.70	12.98
5	2021	12.94	12.77	13.08

Sumber: BPS, 2022

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, HLS Kabupaten Pati masih berada di bawah HLS Jawa Tengah dan Nasional. Namun selanjutnya di tahun 2021, HLS Kabupaten Pati meningkat menjadi 12,95 tahun lebih tinggi dibandingkan HLS Jawa Tengah (12,77) namun masih lebih rendah dibandingkan HLS Nasional. HLS yang semakin baik menjadi indikasi semakin baiknya penyediaan akses pendidikan. Dengan angka tersebut, diharapkan penduduk Pati yang lahir di tahun 2021 mampu menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA/ sederajat bahkan melanjutkan hingga pendidikan tinggi. Selanjutnya, kinerja peningkatan kualitas manusia pada aspek pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari peningkatan HLS sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : Data BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2 . 29 Peningkatan HLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, & Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017-2021, HLS Kabupaten Pati mengalami peningkatan sekitar 0,20 tahun setiap tahunnya. Rata-rata peningkatan HLS tersebut lebih baik dibandingkan rata-rata peningkatan HLS Jawa Tengah (0,06 tahun) dan Nasional (0,07 tahun). Peningkatan HLS Kabupaten Pati tertinggi terjadi di tahun 2017 dengan peningkatan sebesar 0,37 tahun. Sementara itu peningkatan HLS terendah terjadi di tahun 2018 dengan peningkatan hanya sebesar 0,01 tahun. Namun demikian, selanjutnya HLS Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan yang cukup berarti, bahkan lebih tinggi dibandingkan peningkatan HLS Jawa Tengah dan Nasional.

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator kualitas SDM aspek pendidikan lainnya adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. Selama periode 2017 hingga 2021, RLS Kabupaten Pati mengalami tren peningkatan, sebagaimana RLS Jawa Tengah dan Nasional. Gambaran Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Nasional selama periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

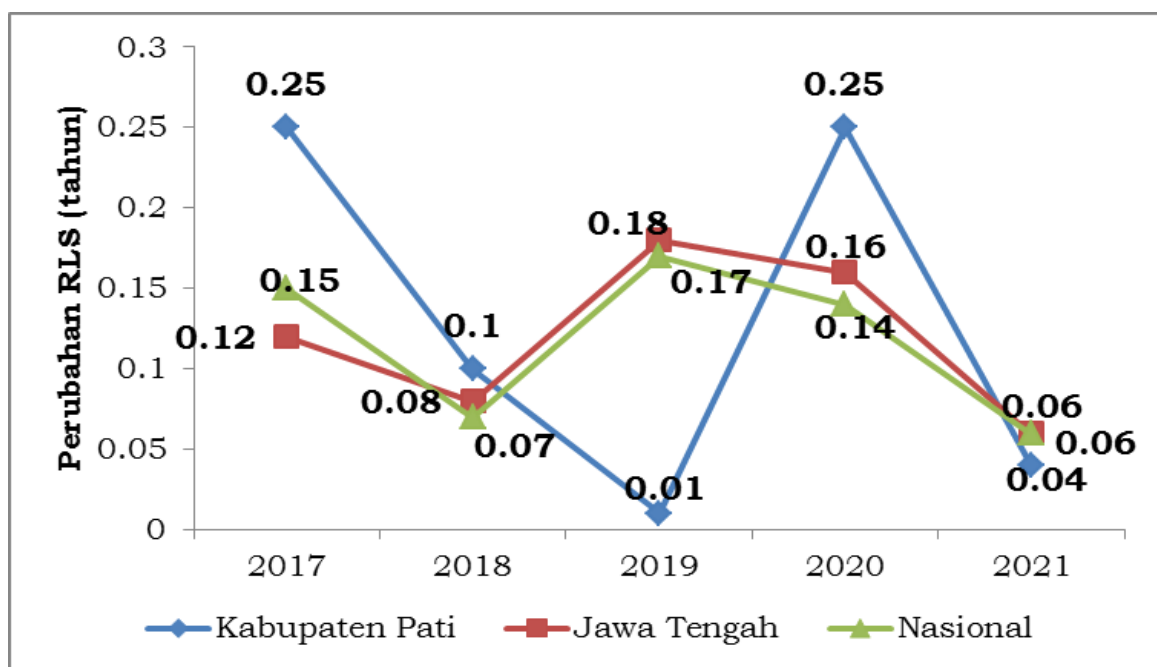
Tabel 2. 23 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah		
		Kab. Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	7.08	7.27	8.10
2	2018	7.18	7.35	8.17
3	2019	7.19	7.53	8.34
4	2020	7.44	7.69	8.48
5	2021	7.48	7.75	8.54

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Hingga tahun 2021, RLS Kabupaten Pati selalu berada lebih rendah dibandingkan RLS Jawa Tengah dan Nasional. Di tahun 2021, RLS Kabupaten Pati masih berada pada kisaran 7 tahun, yang artinya penduduk usia di atas 25 tahun di Kabupaten Pati hanya menyelesaikan pendidikan formal selama 7 tahun atau hanya pada tingkat pendidikan dasar. Masih rendahnya RLS Kabupaten Pati utamanya didominasi oleh penduduk usia tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah bahkan tidak bersekolah. Hal ini lah yang juga membuat upaya peningkatan kepesertaan kesetaraan pendidikan menjadi tidak optimal. Tingkat pendidikan penduduk usia lebih dari 25 tahun didominasi oleh tingkat pendidikan tamat SD atau dengan kata lain dengan lama sekolah 6 tahun.

Selanjutnya, penilaian terhadap kinerja Kabupaten Pati dalam meningkatkan kualitas manusia dari aspek pendidikan dapat dilihat dengan membandingkan peningkatan RLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel grafik berikut.



Sumber : Data BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2 . 30 Peningkatan RLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017-2021, RLS Kabupaten Pati selalu mengalami peningkatan, namun cenderung fluktuatif. Rata-rata peningkatan RLS Kabupaten Pati per tahun selama lima tahun terakhir adalah 0,13 tahun, dimana rata-rata peningkatan RLS tersebut relatif lebih baik dibanding rata-rata peningkatan RLS Jawa Tengah (0,12 tahun) dan Nasional (0,12 tahun). Selama lima tahun terakhir, peningkatan RLS tertinggi terjadi di tahun 2017 dan tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 0,25 tahun. Sementara itu, peningkatan RLS terendah terjadi di tahun 2019, sebesar 0,01 tahun. Tahun 2021, RLS Kabupaten Pati mengalami peningkatan hanya sebesar 0,04 tahun dimana peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan peningkatan RLS Jawa Tengah dan Nasional. Oleh karena itu perlu upaya keras untuk meningkatkan RLS, utamanya melalui kegiatan pendidikan kesetaraan.

4. Pengeluaran Perkapita

Pengukuran kualitas SDM pada aspek ekonomi dilakukan melalui pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita dapat didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota keluarga selama sebulan dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi pengeluaran makanan dan non makanan. Pola pengeluaran merupakan salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan penduduk dimana semakin rendah proporsi untuk pengeluaran makanan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

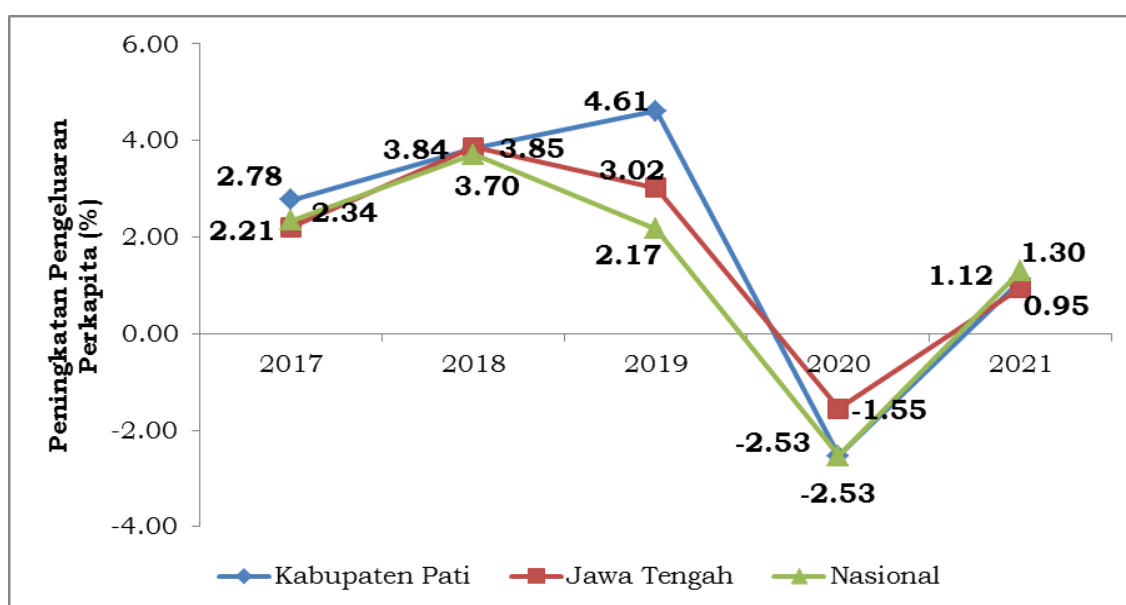
Selama periode 2017-2021, Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pati mengalami fluktuasi dimana penurunan terjadi di tahun 2020. Penurunan tersebut utamanya dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang selanjutnya memengaruhi tingkat pengeluaran. Kondisi yang sama juga terjadi di Jawa Tengah dan Nasional dengan intensitas yang berbeda. Gambaran pengeluaran perkapita Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pengeluaran perkapita (ribu rupiah)		
		Kab. Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	9,813	10,377	10,664
2	2018	10,190	10,777	11,059
3	2019	10,660	11,102	11,299
4	2020	10,390	10,930	11,013
5	2021	10,506	11,034	11,156

Sumber: BPS, 2022

Selama periode 2017 hingga 2019, Kabupaten Pati memiliki tren peningkatan pengeluaran perkapita yang cukup positif. Penurunan pengeluaran perkapita terjadi di tahun 2020 akibat penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak Pandemi Covid-19. Tahun 2021, pengeluaran perkapita kembali menunjukkan peningkatan, namun dengan nilai yang masih lebih rendah dari periode sebelum Pandemi Covid-19. Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat belum pulih sepenuhnya. Oleh karenanya diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, untuk mengukur kinerja Kabupaten Pati, peningkatan pengeluaran perkapita Kabupaten Pati dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : Data BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2 . 31 Peningkatan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pati, JawaTengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional memiliki tren perubahan pengeluaran perkapita yang relatif sama, yaitu fluktuatif. Rata-rata peningkatan pengeluaran perkapita Kabupaten Pati selama periode 2017 hingga 2021 adalah 1,96%, dimana rata-rata peningkatan pengeluaran perkapita tersebut masih lebih baik dibandingkan rata-rata peningkatan pengeluaran perkapita Jawa Tengah (1,7%) dan Nasional (1,4%). Sebelum pandemi Covid-19, peningkatan pengeluaran perkapita Kabupaten Pati selalu lebih baik dibandingkan Jawa Tengah. Sementara itu, di tahun 2020, pengeluaran perkapita Kabupaten Pati mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai -2,53%, sama dengan penurunan pengeluaran perkapita Nasional, namun lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (-1,55%). Selanjutnya di tahun 2021, pengeluaran perkapita Kabupaten Pati mengalami peningkatan sebesar 1,12%, dimana peningkatan tersebut sama dengan peningkatan pengeluaran perkapita

Nasional, namun lebih baik dibandingkan peningkatan pengeluaran perkapita Jawa Tengah (0,95%).

Pengeluaran Perkapita dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran makanan dan nonmakanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari persentase pengeluaran nonmakanan. Semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka pola konsumsi penduduk akan bergeser ke konsumsi nonmakanan. Selama periode 2017 hingga 2021, rasio pengeluaran nonmakanan terhadap pengeluaran makanan tidak berbeda nyata. Hal tersebut dapat diartikan penduduk Kabupaten Pati membelanjakan uang secara seimbang untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan nonmakanan. Persentase pengeluaran nonmakanan di Kabupaten Pati cenderung fluktuatif dan memiliki persentase lebih tinggi dari pengeluaran makanan di tahun 2018 dan 2020. Peningkatan pengeluaran nonmakanan di tahun 2020 utamanya disebabkan oleh penurunan pengeluaran sebagian jenis komoditas makanan dan peningkatan kebutuhan akan barang tahan lama, utamanya perangkat komunikasi yang mendukung kegiatan belajar maupun bekerja secara virtual. Namun demikian, di tahun 2021, pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pati kembali didominasi oleh pengeluaran untuk makanan dengan persentase mencapai 50,84%. Selanjutnya, pengeluaran penduduk berdasarkan komoditas di Kabupaten Pati selama periode 2017 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 25 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pati Per Komoditas Tahun 2017-2021

No	Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran (Rp.)									
		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Padi-padian	51.163	5.75	53.774	5,40	53.022	5,56	50.807	4,89	55.904	5.05
2	Umbi-umbian	3.587	0.40	3.409	0,34	3.282	0,34	3.279	0,32	4.621	0.42
3	Ikan/udang/cumi/kerang	43.576	4.90	45.059	4,52	45.877	4,81	46.662	4,49	53.163	4.80
4	Daging	16.826	1.89	17.853	1,79	19.690	2,07	15.633	1,51	18.764	1.70
5	Telur dan susu	21.911	2.46	24.617	2,47	24.200	2,54	23.514	2,26	25.118	2.27
6	Sayur-sayuran	39.978	4.49	32.804	3,29	29.619	3,11	36.461	3,51	44.015	3.98
7	Kacang-kacangan	12.040	1.35	9.186	0,92	8.979	0,94	9.313	0,90	10.454	0.94
8	Buah-buahan	29.961	3.37	27.908	2,80	23.759	2,49	25.183	2,42	27.839	2.52
9	Minyak dan Kelapa	13.319	1.50	12.259	1,23	11.951	1,25	12.288	1,18	14.910	1.35
10	Bahan minuman	16.128	1.81	15.204	1,53	14.008	1,47	15.266	1,47	16.732	1.51
11	Bumbu-bumbuan	12.161	1.37	10.899	1,09	12.116	1,27	12.705	1,22	14.796	1.34
12	Konsumsi lainnya	9.126	1.03	9.775	0,98	9.973	1,05	8.719	0,84	10.793	0.98
13	Makanan dan Minuman Jadi	141.867	15.94	169.511	17,01	169.367	17,77	186.259	17,93	194.752	17.60
14	Rokok dan tembakau	55.289	6.21	52.696	5,29	58.505	5,87	63.709	6,13	70.868	6.40
	Jumlah Makanan	466.932	52.46	484.954	48,68	484.348	50,82	509.798	49,08	562.729	50.84
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	160.593	0.00	219.505	22,03	212.523	22,30	216.298	20,82	230.757	0.00
16	Aneka Barang dan jasa	112.713	18.04	141.855	14,24	125.907	13,21	130.252	12,54	145.660	20.85
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	24.096	12.66	24.691	2,48	25.490	2,67	27.611	2,66	28.720	13.16
18	Barang tahan lama	62.627	2.71	58.124	5,83	41.907	4,40	91.781	8,84	71.049	2.59
19	Pajak, pungutan dan asuransi	36.868	7.04	35.606	3,57	30.551	3,21	36.936	3,56	44.837	6.42
20	Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	26.253	4.14	31.516	3,16	32.291	3,39	25.983	2,50	23.073	4.05
	Jumlah non makanan	423.150	2.95	511.297	51,32	468.669	47,04	528.861	50,92	544.096	2.08
	Jumlah pengeluaran	890.082	47.54	996.251	100	953.017	100	1.038.659	100	1.106.825	49.16

Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2021

Selama periode 2017 hingga 2021, tidak terdapat perubahan yang cukup berarti pada persentase pengeluaran berdasarkan komoditas. Pengeluaran makanan masih didominasi oleh komoditas makanan jadi, dimana persentasenya menunjukkan tren peningkatan. Persentase tertinggi untuk komoditas makanan dan minuman jadi terjadi di tahun 2019 dengan persentase mencapai 17,90%. Peningkatan pengeluaran untuk komoditas makanan dan minuman jadi kemungkinan menyebabkan penurunan pengeluaran komoditas makanan lain, seperti komoditas padi-padian dan umbi-umbian. Selain makanan jadi, pengeluaran untuk komoditas rokok dan tembakau juga cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan. Di tahun 2021, persentase pengeluaran untuk komoditas rokok dan tembakau mencapai 6,40%, meningkat dibandingkan pengeluaran untuk komoditas tersebut di tahun 2020. Kondisi tersebut patut mendapatkan perhatian karena konsumsi makanan dan minuman jadi yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan jantung serta menurunkan kualitas kesehatan keluarga. Pengeluaran makanan untuk komoditas protein paling tinggi untuk komoditas ikan/udang/cumi/ dan kerang, sementara pengeluaran konsumsi terendah untuk komoditas daging. Kondisi tersebut utamanya ditunjang oleh potensi perikanan Kabupaten Pati yang cukup tinggi sehingga ketersediaan dan harga untuk komoditas perikanan lebih terjangkau.

Sementara itu, pengeluaran nonmakanan selama periode 2017 hingga 2021 dengan persentase tertinggi adalah komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, dengan persentase sekitar 20%. Selain komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga, persentase pengeluaran nonmakanan tertinggi ditemukan pada komoditas aneka barang dan jasa dengan persentase sekitar 12%. Pengeluaran untuk barang tahan lama juga memiliki persentase yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama masa pandemi.

g. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks pembangunan gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG untuk tahun 2021 belum tersedia sehingga analisis terhadap data IPG dilakukan untuk periode 2016 hingga 2020.

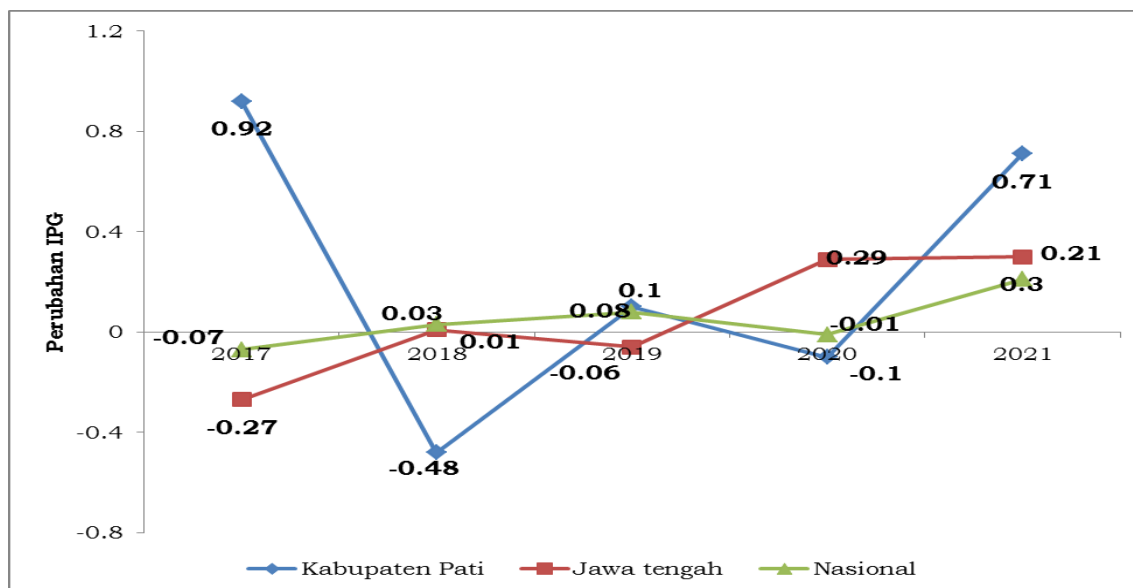
Tabel 2. 26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	91,98	91,94	90,96
2	2018	91,50	91,95	90,99
3	2019	91,60	91,89	91,07
4	2020	91,50	92,18	91,06
5	2021	92,21	92,48	91,27

Sumber: BPS, 2021.

Selama periode 2017-2021, IPG Kabupaten Pati cenderung berfluktuasi, sebagaimana capaian IPG Jawa Tengah dan Nasional. Secara umum, kualitas pembangunan gender di Kabupaten Pati lebih baik dibandingkan pembangunan gender Nasional, namun lebih rendah dibandingkan pembangunan gender Jawa Tengah. Selanjutnya selama periode lima tahun tersebut, capaian IPG tertinggi

Kabupaten Pati terjadi di tahun 2021 dengan nilai IPG sebesar 92,21. Nilai IPG yang semakin tinggi menunjukkan semakin rendahnya kesenjangan kualitas penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Selanjutnya, kinerja peningkatan kualitas pembangunan gender dapat dilihat dari peningkatan IPG Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional sebagai berikut.

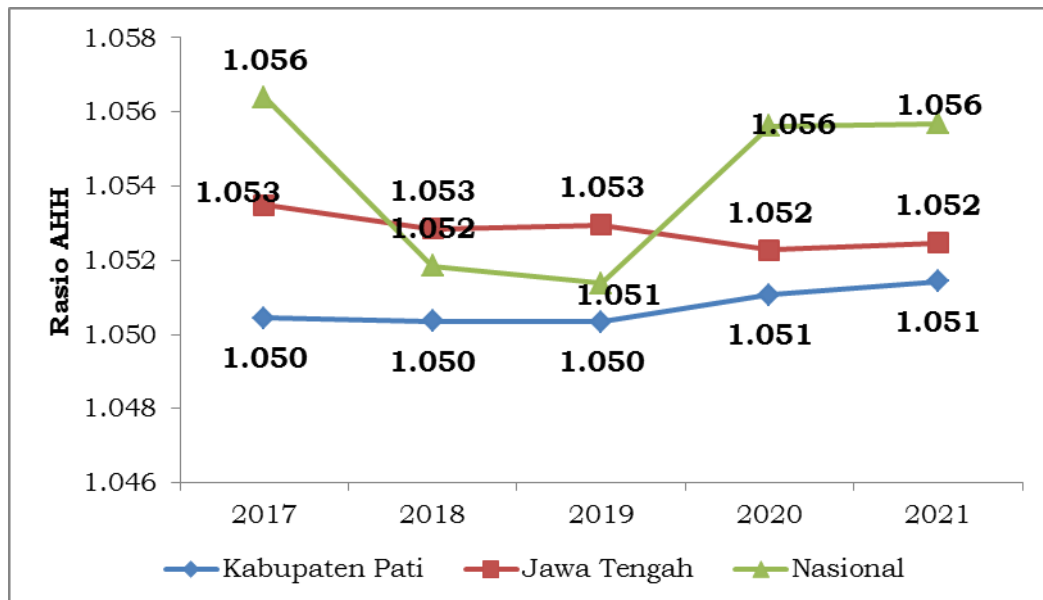


Sumber : Data BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2 . 32 Perubahan IPG Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017 hingga 2020, IPG Kabupaten Pati rata-rata mengalami peningkatan sekitar 0,23 poin per tahun. Peningkatan IPG tersebut relatif lebih baik dibandingkan rata-rata peningkatan IPG Jawa Tengah (0,054) dan Nasional (0,048). Selama periode lima tahun (2017-2021), kinerja Kabupaten Pati dalam pembangunan gender cenderung fluktuatif. Kinerja peningkatan kualitas pembangunan gender Kabupaten Pati tertinggi terjadi di tahun 2017 (0,92 poin). Sementara itu, kinerja pembangunan gender terendah terjadi di tahun 2018, dimana di tahun tersebut IPG Kabupaten Pati mengalami koreksi sebesar -0,48 poin. Di tahun 2020, sebagai dampak Pandemi Covid-19, IPG Kabupaten Pati juga mengalami penurunan, namun penurunan tersebut masih lebih baik dibandingkan penurunan yang terjadi di tahun 2018. Tahun 2021, IPG Kabupaten Pati kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan peningkatan IPG Kabupaten Pati melampaui peningkatan IPG Jawa Tengah dan Nasional.

Pengamatan terhadap tren perubahan komponen IPG Rasio UHH Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017-2021 menunjukkan bahwa kondisi kesenjangan gender pada aspek kesehatan di Kabupaten Pati relatif lebih baik dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.

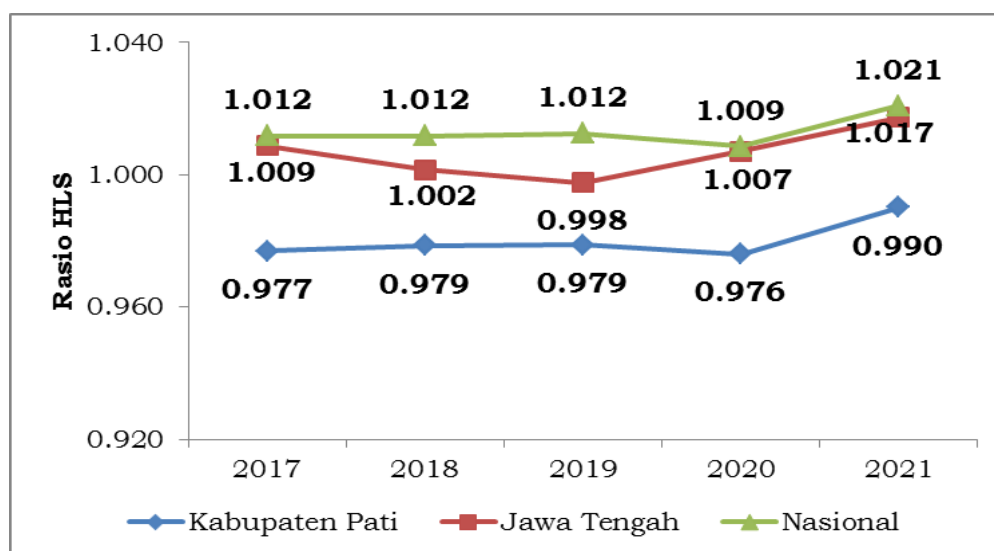


Sumber : Data BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2 . 33 Perubahan Rasio IPG UHH Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Rasio UHH Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017-2021 selalu berada pada nilai lebih dari satu. Nilai tersebut menunjukkan derajat kesehatan penduduk perempuan relatif lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki. Di Kabupaten Pati, kinerja terbaik dalam menurunkan kesenjangan gender aspek kesehatan terjadi di tahun 2017 hingga 2019 dengan nilai rasio 1,050. Mulai tahun 2020, rasio UHH mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,051 yang artinya kesenjangan usia harapan hidup penduduk berdasarkan jenis kelamin semakin lebar. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas kesehatan bagi penduduk laki-laki perlu lebih ditingkatkan sehingga kesenjangan gender tidak menjadi semakin besar.

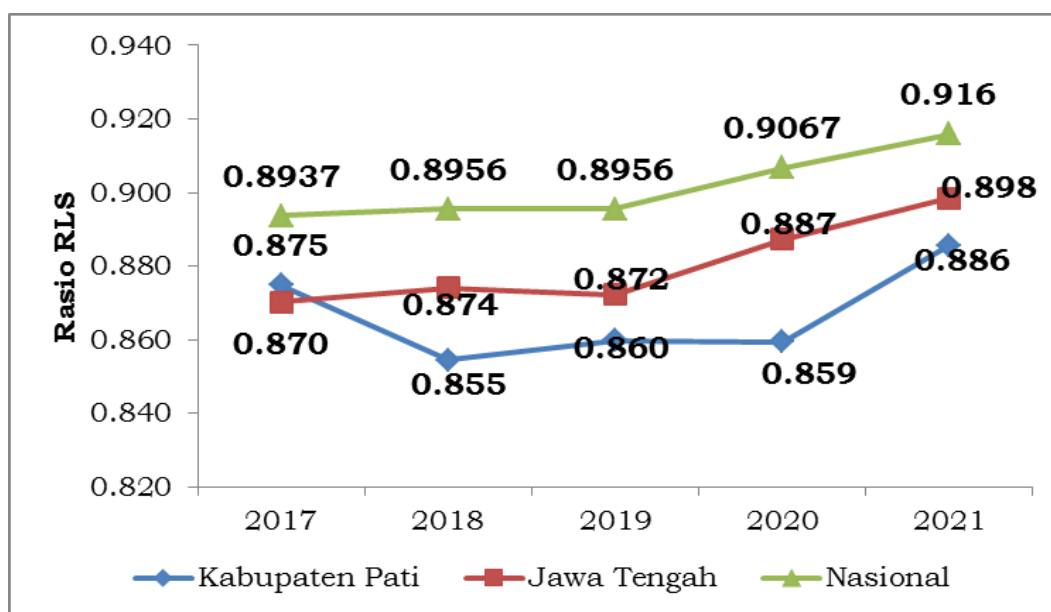
Kualitas pembangunan gender pada aspek pendidikan yang ditunjukkan melalui Rasio Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Kabupaten Pati relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan gender di Jawa Tengah dan Nasional. Gambaran kesenjangan gender pada aspek pendidikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017-2021 ditampilkan pada grafik-grafik berikut.



Sumber : Data BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2 . 34 Perubahan Rasio HLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017-2021, Harapan lama sekolah penduduk perempuan di Kabupaten Pati cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Sementara di Jawa Tengah dan Nasional, rasio HLS memiliki nilai lebih dari satu yang bermakna, HLS penduduk perempuan di Jawa Tengah dan Nasional relatif lebih tinggi dibandingkan HLS penduduk laki-laki. Selanjutnya, dapat dinyatakan bahwa Kabupaten memiliki kinerja yang cukup baik dalam meningkatkan kesenjangan HLS, namun demikian, hingga tahun 2021, kesenjangan HLS di Kabupaten Pati masih relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Kesenjangan HLS perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi akan menyebabkan kesenjangan kualitas manusia di masa mendatang. Kinerja terbaik Kabupaten Pati dalam menurunkan kesenjangan HLS terjadi di tahun 2021 dimana rasio HLS berada pada nilai 0,990. Pada tahun tersebut HLS penduduk perempuan sebesar 12,93 tahun, sedangkan HLS penduduk laki-laki relatif lebih tinggi, yaitu 13,06 tahun.

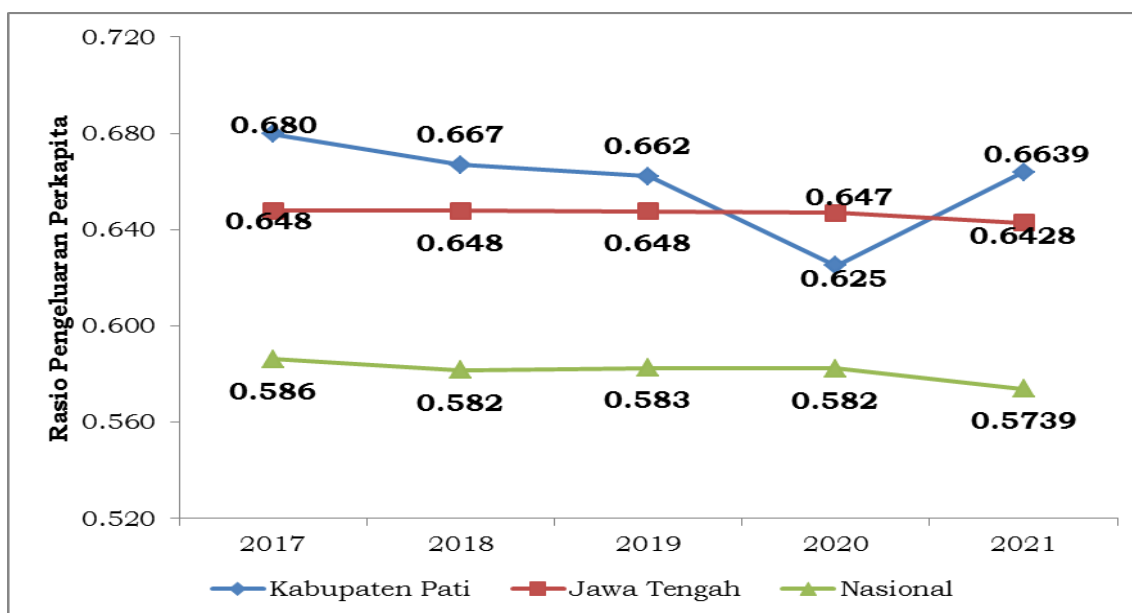


Sumber : Data BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2 . 35 Perubahan Rasio RLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dinyatakan bahwa selama periode 2017-2021, rasio RLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional memiliki nilai kurang dari 1 (satu) yang menandakan bahwa tingkat pendidikan formal penduduk perempuan relatif lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Selanjutnya, apabila dilihat dari nilai kesenjangan RLS, terlihat bahwa kesenjangan RLS Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Kinerja penurunan kesenjangan gender berdasarkan RLS di Kabupaten Pati cenderung fluktuatif. Kinerja terbaik dalam penurunan kesenjangan gender aspek pendidikan terjadi di tahun 2021, dimana di tahun tersebut rasio RLS sebesar 0,886 meningkat 0,027 poin dibandingkan rasio RLS di tahun 2020. Bahkan, peningkatan RLS Kabupaten Pati di tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan RLS Jawa Tengah dan Nasional. Penurunan kesenjangan RLS menjadi salah satu indikator perbaikan kualitas gender yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh.

Kesenjangan gender pada aspek pendidikan selanjutnya menjadi pemicu kesenjangan gender pada aspek ekonomi, dimana aspek ekonomi memiliki tingkat kesenjangan yang paling tinggi dibandingkan aspek kesehatan dan pendidikan. Kesenjangan gender aspek ekonomi dilihat dari rasio pengeluaran perkapita penduduk perempuan dibagi dengan pengeluaran perkapita penduduk laki-laki. Gambaran rasio pengeluaran perkapita berdasarkan gender di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional periode tahun 2015-2020 ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : Data BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2 . 36 Perubahan Rasio RLS Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa kesenjangan pengeluaran perkapita di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional pada periode 2017-2021 selalu memiliki nilai lebih rendah dari 1 (satu). Kondisi tersebut dapat dimaknai bahwa pengeluaran perkapita penduduk perempuan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita penduduk laki-laki. Lebih lanjut, selama periode lima tahun tersebut, kesenjangan gender aspek ekonomi di Kabupaten Pati relatif lebih rendah dibandingkan kesenjangan gender di Jawa Tengah maupun nasional. Namun demikian, rasio pengeluaran perkapita Kabupaten Pati selama periode 2017-2020 menunjukkan tren penurunan yang berarti meningkatnya kesenjangan gender. Rasio pengeluaran perkapita di tahun 2020 juga menjadi yang terendah selama periode lima tahun terakhir. Peningkatan kesenjangan pengeluaran perkapita di tahun tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memberikan dampak lebih besar kepada penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Namun di tahun 2021, rasio pengeluaran perkapita mengalami perbaikan yang cukup signifikan menjadi 0,664, bahkan capaian tersebut melampaui rasio pengeluaran perkapita Jawa Tengah dan Nasional. Di tahun tersebut pengeluaran perkapita penduduk perempuan di Kabupaten Pati sebesar 9,718 juta rupiah sementara pengeluaran perkapita penduduk laki-laki mencapai 14,638 juta rupiah.

h. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan gender, yang secara spesifik menitikberatkan kepada peran serta perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Komponen IDG terdiri dari Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen, Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan. Data IDG

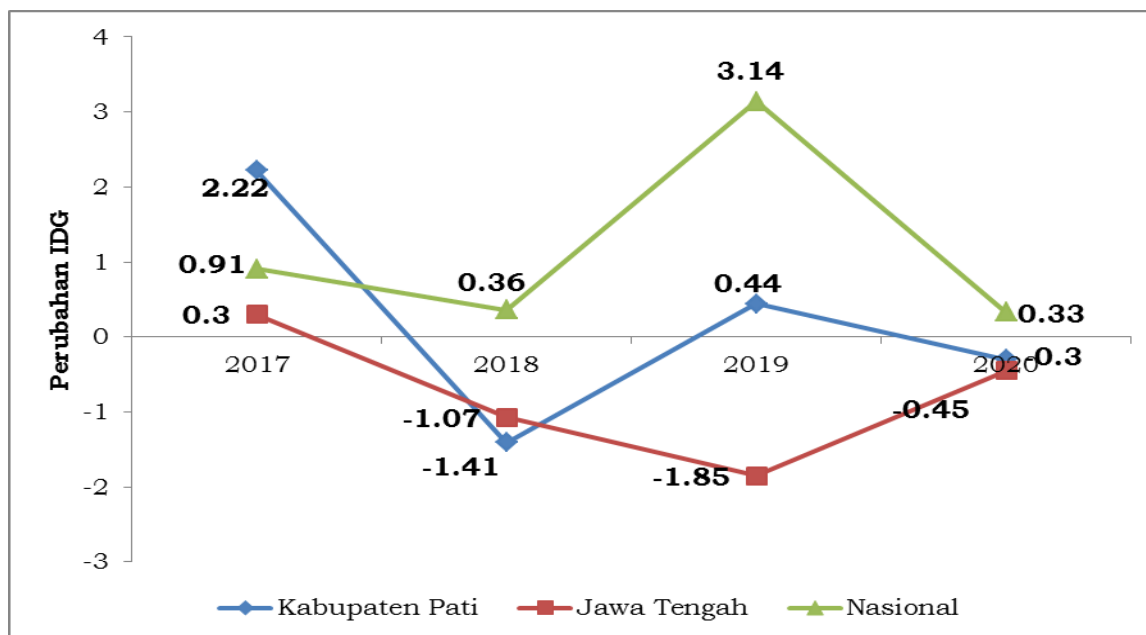
tahun 2016 tidak tersedia sehingga analisis IDG pada periode 2015-2020 tidak menyertakan tahun 2016 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pati, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2015-2020

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
		Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2015	65,74	74,8	70,83
2	2017	67,96	75,1	71,74
3	2018	66,55	74,03	72,1
4	2019	66,99	72,18	75,24
5	2020	66,69	71,73	75,57

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pemberdayaan gender di Kabupaten Pati selama periode 2015-2020 masih lebih rendah dibandingkan pemberdayaan gender Jawa Tengah dan Nasional. Selama periode tersebut, kinerja pemberdayaan gender Kabupaten Pati relatif fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi di tahun 2017 dengan nilai IDG sebesar 67,96. Sementara itu kinerja pemberdayaan perempuan terendah terjadi di tahun 2018 dengan nilai IDG sebesar 66,55. Selanjutnya kinerja pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari nilai perubahan IDG sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



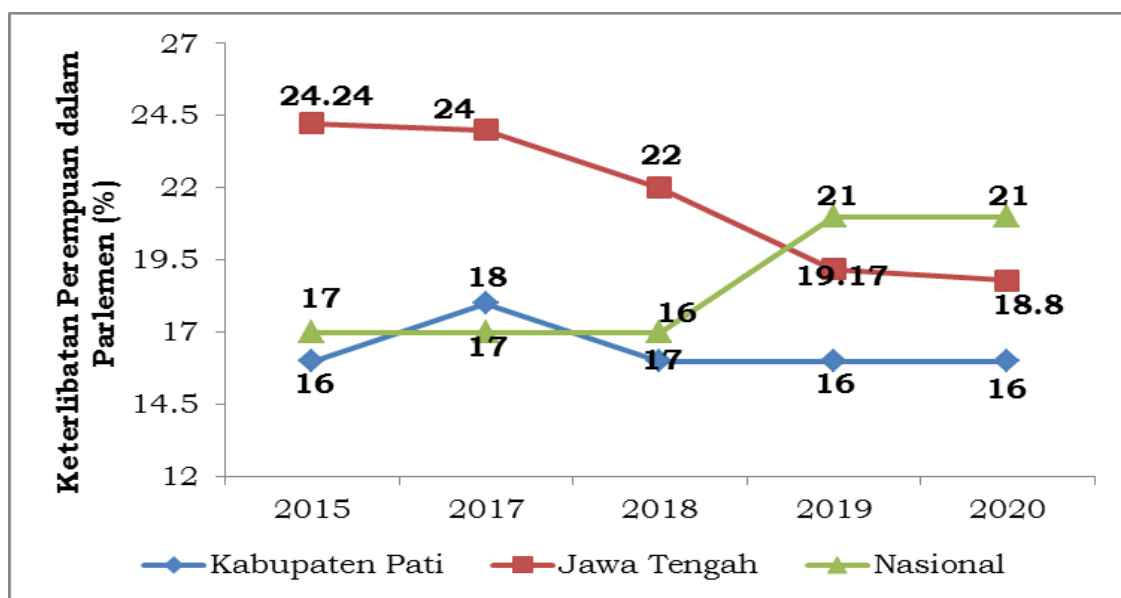
Sumber: BPS, 2021

Gambar 2. 37 Perubahan IDG Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2020

Selama periode 2017 hingga 2020, pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan fluktuasi. Selama periode tersebut Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan IDG dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 0,24 poin. Kinerja tersebut relatif lebih baik dibandingkan Jawa Tengah yang justru menunjukkan penurunan per tahun sebesar -0,77, namun lebih rendah dibanding Nasional yang menunjukkan rata-rata peningkatan IDG 1,12 poin per tahun.

Kinerja peningkatan pemberdayaan gender di Kabupaten Pati terjadi di tahun 2017 dan 2019. Peningkatan IDG di tahun 2017 (2,22 poin) relatif lebih baik dibandingkan peningkatan IDG di tahun 2019 (0,44 poin). Sementara itu, penurunan IDG terjadi di tahun 2018 dan tahun 2020 dimana penurunan IDG di tahun 2020 lebih baik dibandingkan penurunan IDG di tahun 2018. Penurunan IDG yang terjadi di tahun 2020 diprediksi sebagai dampak Covid-19. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, dimana di Kabupaten Pati perdagangan merupakan sektor yang cukup mengalami koreksi. Sektor ini didominasi oleh pedagang kecil dan eceran yang mayoritas dilakukan oleh perempuan. Hal ini lah yang selanjutnya berakibat pada penurunan pendapatan perempuan dan selanjutnya berdampak pada penurunan IDG.

Pemberdayaan perempuan pada aspek politik merupakan komponen IDG dengan kontribusi terendah. Gambaran pemberdayaan perempuan pada aspek politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2015-2020 ditampilkan pada grafik berikut.

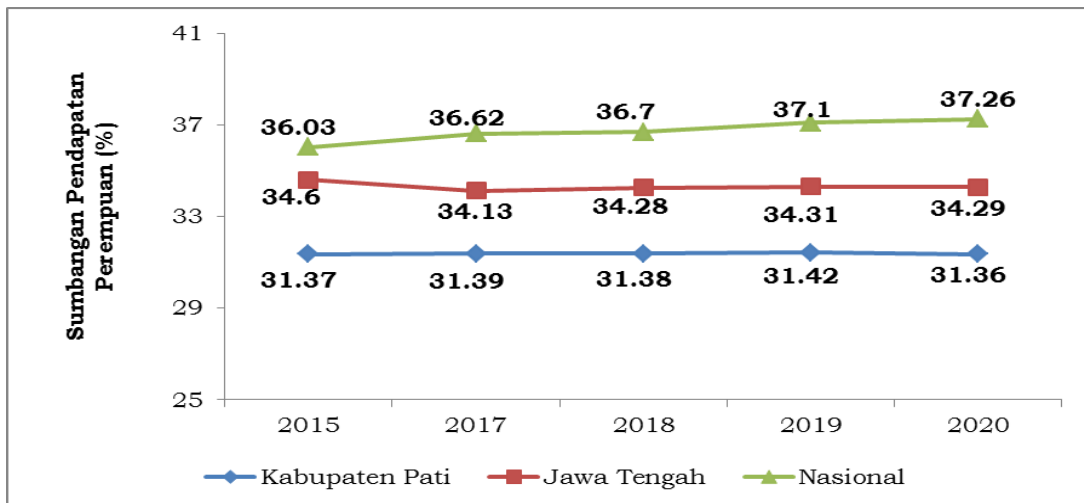


Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2 . 38 Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020

Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional relatif masih jauh dari kondisi ideal sebesar 30%. Selama periode 2015 hingga 2020, persentase anggota parlemen perempuan di Kabupaten hanya sekitar 16%, lebih rendah dibandingkan persentase anggota parlemen di Jawa Tengah dan Nasional. Oleh karena peningkatan kesadaran dan pendidikan politik pada perempuan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

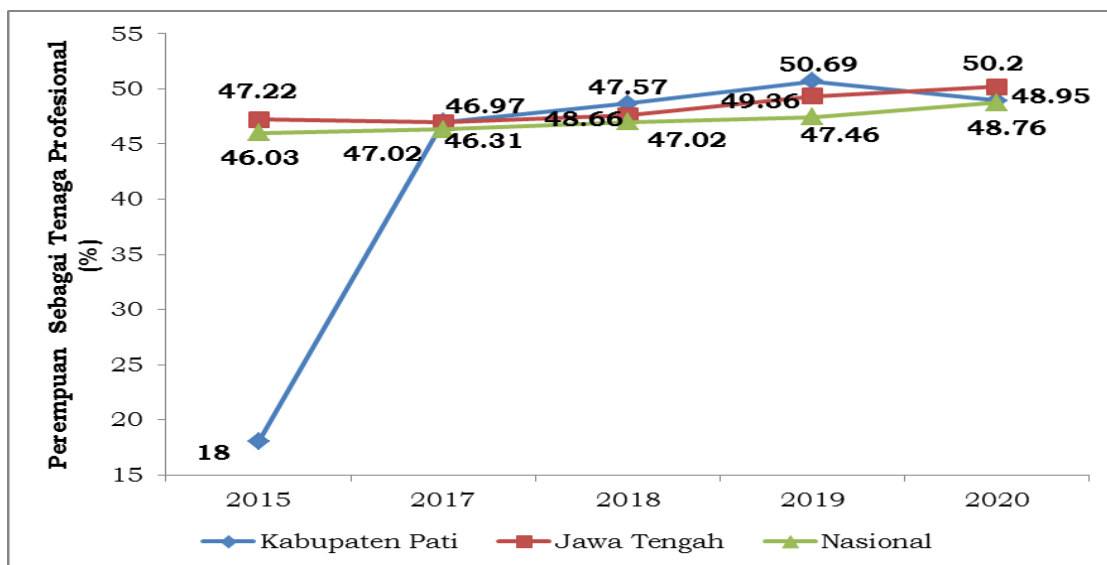
Sumbangan pendapatan perempuan merupakan komponen IDG dengan persentase yang masih rendah. Gambaran persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama 2015-2020 ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2 . 39 Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Pati, JawaTengah, dan Nasional Tahun 2015-2020

Selama periode 2015-2020, rata-rata persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Pati sebesar 31,38%, dimana persentase tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah (34,32%) dan Nasional (36,74%). Rendahnya persentase pendapatan perempuan di Kabupaten Pati, utamanya disebabkan karena tingginya jumlah perempuan usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja serta kecenderungan gaji perempuan yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki. Dari tahun 2015 hingga 2019, persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan. Namun demikian, di tahun 2020, persentase sumbangan pendapatan perempuan mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan menjadi capaian terendah selama periode lima tahun tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi salah satu kelompok yang cukup terdampak Pandemi Covid-19.



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Gambar 2 . 40 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Pati, JawaTengah, dan Nasional Tahun 2015-2020

Perempuan sebagai tenaga profesional merupakan komponen IDG dengan kondisi yang paling baik dibandingkan kedua komponen lainnya. Selama periode 2015 hingga 2020, Rata-rata persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional adalah 42,66% dimana rata-rata tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan rata-rata Jawa Tengah (48,26%) dan Nasional (47,12%). Persentase tertinggi perempuan sebagai tenaga profesional terjadi di tahun 2019 sebesar 50,69%. Namun di tahun 2020, perempuan sebagai tenaga profesional mengalami penurunan, namun nilainya masih relatif lebih baik dibandingkan tahun 2018.

i. Tingkat Pengangguran Terbuka

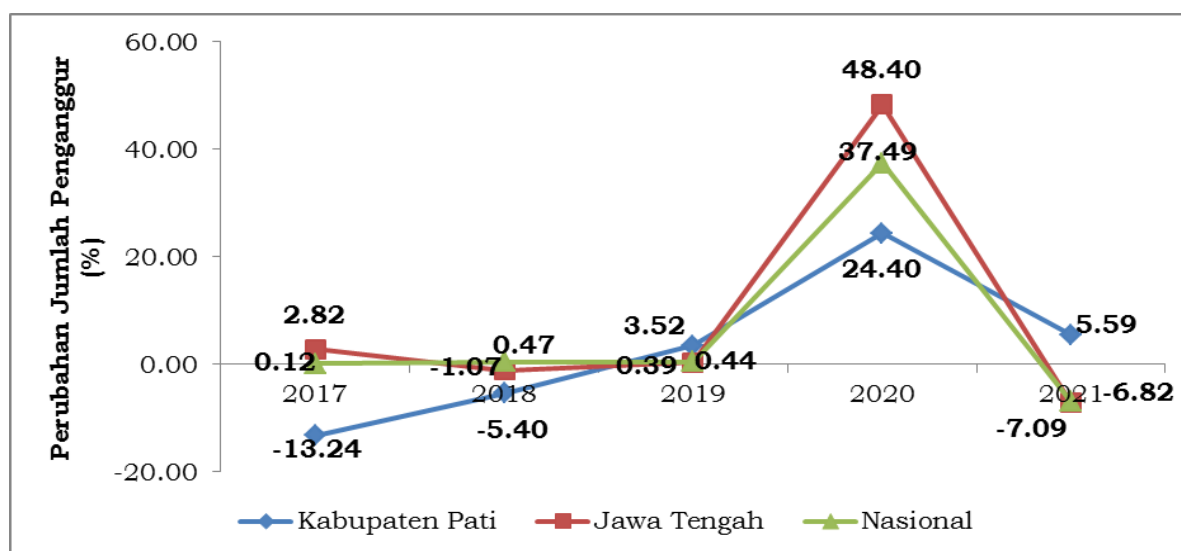
Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan. Salah satu komponen terpenting untuk mengukur TPT adalah jumlah pengangguran. Selama periode lima tahun terakhir, jumlah pengangguran di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 28 Jumlah Penganggur Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penganggur (jiwa)		
		Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	24,826	823,938	7,040,323
2	2018	23,485	815,083	7,073,385
3	2019	24,321	818,276	7,104,424
4	2020	30,244	1,214,342	9,767,754
5	2021	31,935	1,128,223	9,102,050

Sumber: BPS, 2022

Jumlah penganggur di Kabupaten Pati selama periode 2017-2021, mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan jumlah. Kondisi yang sama juga terjadi di Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2018, jumlah penganggur di Kabupaten menunjukkan jumlah terendah selama periode lima tahun terakhir, namun selanjutnya menunjukkan peningkatan jumlah penganggur. Tahun 2020, jumlah penganggur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, utamanya disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Jumlah penganggur bertambah cukup signifikan dikarenakan peningkatan jumlah penduduk usia kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Selain itu, meningkatnya jumlah keputusasaan penduduk yang bekerja di luar daerah karena tidak lagi bekerja juga meningkatkan jumlah penganggur. Gambaran peningkatan jumlah penganggur di Kabupaten Pati dibandingkan dengan peningkatan jumlah pengangguran Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada grafik berikut.

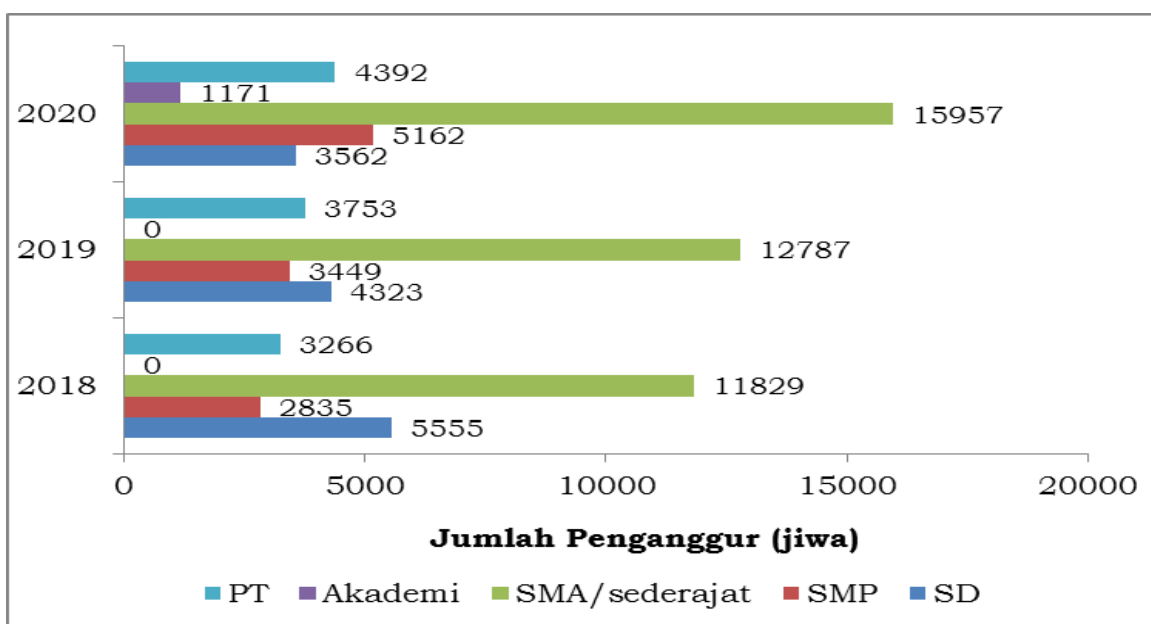


Sumber : Data BPS Kabupaten Pati, 2021 (diolah)

Gambar 2 . 41 Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Pati dan Nasional Tahun 2016-2020

Tahun 2017 dan 2018, Kabupaten Pati memiliki kinerja yang cukup baik dalam penurunan jumlah penganggur, namun sejak tahun 2019, Kabupaten Pati mengalami peningkatan jumlah penganggur. Peningkatan jumlah penganggur tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar lebih dari 24%. Walaupun demikian, peningkatan jumlah penganggur di tahun tersebut masih lebih baik dibandingkan peningkatan jumlah penganggur di Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2021, jumlah penganggur di Kabupaten Pati masih mengalami peningkatan sebesar 5,59%, sedangkan Jawa Tengah dan Nasional berhasil mengurangi jumlah penganggur. Kondisi tersebut menjadi indikasi belum optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten Pati dalam menanggapi pengangguran.

Berdasarkan jenis kelamin, penganggur di Kabupaten Pati didominasi oleh penduduk laki-laki dengan persentase 62,7% di tahun 2018 dan 72,99% di tahun 2019. Namun demikian, di tahun 2020, persentase penganggur perempuan dan laki-laki memiliki rasio yang seimbang, dimana persentase penganggur berada pada persentase 50,33%. Berdasarkan jenis kelamin, penganggur di Kabupaten Pati selama periode 2018 hingga 2020 didominasi oleh tingkat pendidikan SMA sederajat. Gambaran penganggur Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada grafik berikut.



Gambar 2 . 42 Jumlah Penganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pati Tahun 2018-2020

Berdasarkan grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa selama periode 2018 hingga 2020, terjadi peningkatan jumlah penganggur dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat, dimana peningkatan yang cukup drastis terjadi di tahun 2020 dengan persentase mencapai 24,79%. Kondisi yang sama juga terjadi pada penganggur dengan tingkat pendidikan SMP. Tahun 2019 penganggur berpendidikan SMP mengalami peningkatan sebesar 21,66% dan di tahun 2020, peningkatan jumlah penganggur SMP menjadi lebih besar mencapai 49,67%. Tren peningkatan jumlah penganggur juga ditemukan pada tingkat pendidikan akademi dan perguruan tinggi, dengan dengan peningkatan mencapai lebih dari 17% untuk pendidikan perguruan tinggi. Sementara itu, tren penurunan terjadi hanya terjadi untuk penganggur dengan tingkat pendidikan SD. Tahun 2019, jumlah penganggur dengan tingkat pendidikan SD mengalami penurunan sebesar -22,18% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2020 mencapai 17,60%. Peningkatan jumlah penganggur dengan tingkat pendidikan SMA atau lebih tinggi menjadi indikasi belum optimalnya peran daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang tingkat pendidikan tersebut atau kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan

kebutuhan pasar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah perlu meningkatkan akses yang lebih luas terhadap jenis pekerjaan yang lebih beragam.

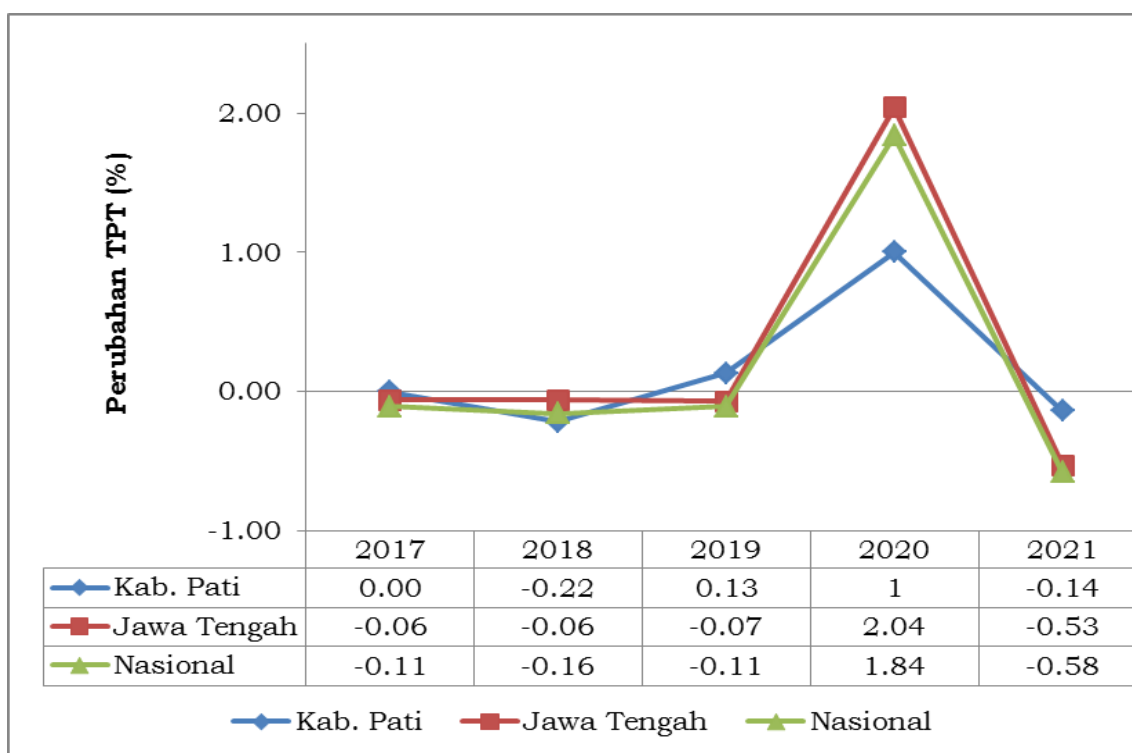
Perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja menghasilkan tingkat pengangguran terbuka. Selama periode 2017-2021, Tingkat pengangguran di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi sebagaimana di Jawa Tengah, dan Nasional.

Tabel 2. 29 TPT Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		Kabupaten Pati	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	3.83	4.57	5.50
2	2018	3.61	4.51	5.34
3	2019	3.74	4.49	5.28
4	2020	4.74	6.48	7.07
5	2021	4.60	5.95	6.49

Sumber: BPS, 2021

Selama periode lima tahun tersebut, TPT Kabupaten Pati relatif lebih rendah dibandingkan TPT Jawa Tengah dan Nasional. Capaian TPT terendah di Kabupaten Pati terjadi di Tahun 2018 dengan persentase sebesar 3,61, sedangkan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 4,74. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di tahun tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah penganggur sebagai dampak Pandemi Covid-19. Sementara di tahun 2021, tingkat pengangguran di Kabupaten Pati mengalami penurunan, walaupun terjadi jumlah penganggur. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk angkatan kerja meningkat cukup signifikan.



Sumber : Data BPS 2021 (diolah)

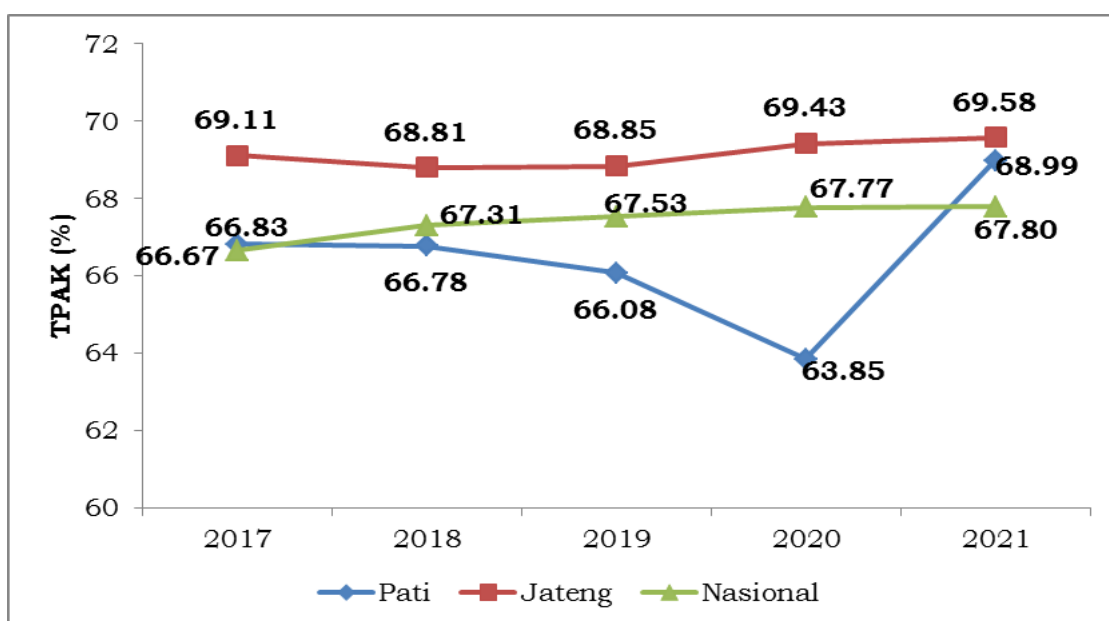
Gambar 2 . 43 Perubahan TPT Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017-2021, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan kinerja penurunan TPT yang cenderung fluktuatif. Selama periode

lima tahun tersebut, rata-rata TPT Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional cenderung mengalami peningkatan. TPT Kabupaten Pati memiliki rata-rata peningkatan TPT sekitar 0,19%, lebih baik dibandingkan Jawa Tengah yang memiliki rata-rata peningkatan TPT tahunan 0,26%, namun masih di bawah Nasional yang memiliki rata-rata peningkatan TPT tahunan sebesar 0,18%. Kinerja penurunan TPT tertinggi Kabupaten Pati terjadi di tahun 2018, dimana TPT mengalami penurunan sebesar -0,22%. Sementara itu, kinerja penurunan TPT terendah terjadi di tahun 2020, dimana TPT mengalami peningkatan cukup drastis mencapai 1%. Tahun 2021, Kabupaten Pati berhasil menurunkan TPT, namun kinerja tersebut masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional.

j. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio penduduk Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan ketersediaan pasokan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK dihitung dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Gambaran TPAK Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional selama periode 2017 hingga 2021 ditampilkan pada grafik berikut.

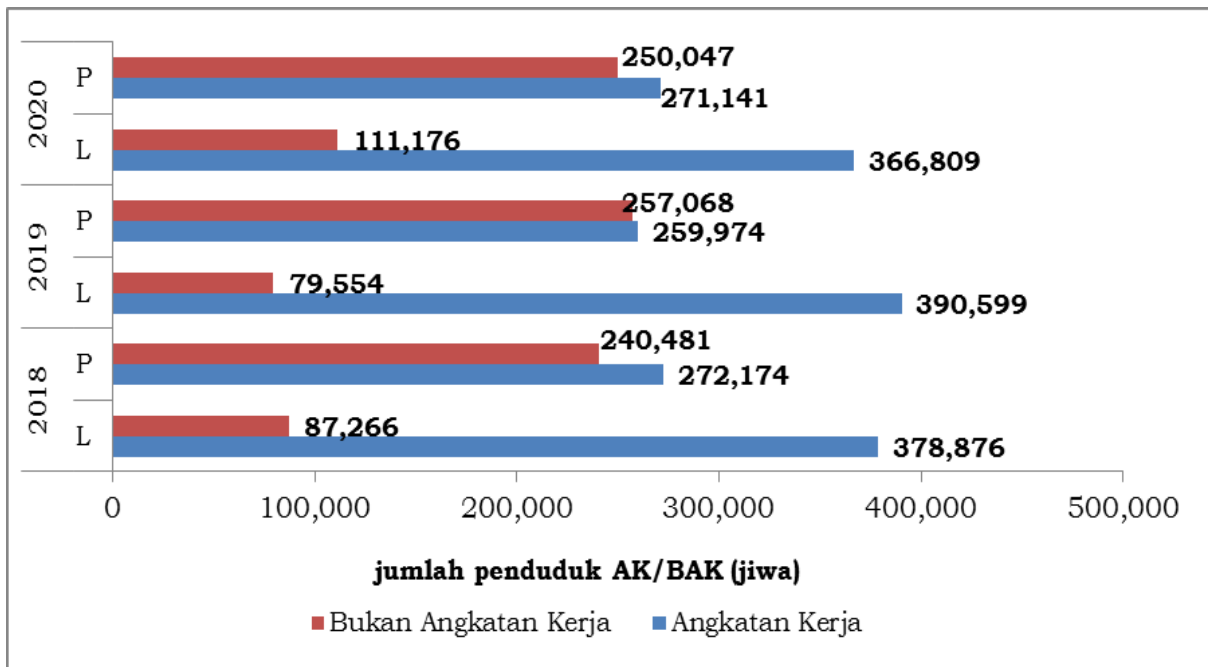


Sumber : Data BPS 2021 (diolah)

Gambar 2 . 44 TPAK Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama periode 2017-2021, TPAK Kabupaten Pati cenderung lebih rendah dibandingkan TPAK Jawa Tengah dan Nasional. TPAK terendah terjadi di tahun 2020 dengan persentase 63,85%. Sementara itu di tahun 2021, TPAK Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan menjadi TPAK tertinggi sejak 2017. Bahkan, Capaian TPAK Kabupaten Pati di tahun 2021 lebih baik dibandingkan Nasional, namun masih lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah.

Peningkatan TPAK merupakan indikasi yang cukup positif berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Pati. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan penduduk angkatan kerja. Data penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja hanya tersedia hingga tahun 2020 sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : Data BPS 2021 (diolah)

Gambar 2 . 45 Jumlah Penduduk Usia Kerja dan Bukan Usia Kerja Kabupaten Pati Tahun 2018-2020

Sejak tahun 2018 hingga 2020, Kabupaten Pati mengalami penurunan penduduk Angkatan Kerja dan peningkatan penduduk bukan usia kerja. Penurunan angkatan kerja di tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan penurunan angkatan kerja di tahun 2019 mencapai -1,94%. Begitu juga dengan peningkatan bukan angkatan kerja di tahun 2020 yang mencapai sekitar 7,3% melampaui peningkatan penduduk bukan angkatan kerja di tahun 2019 sebesar 2,71%.

Angkatan kerja didominasi oleh laki-laki. Tahun 2018 persentase angkatan kerja laki-laki sebesar 58,19%. Selanjutnya di tahun 2019, persentase angkatan kerja laki-laki mengalami peningkatan mencapai 60,04%, namun kembali mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 57,50%. Penurunan tersebut juga dapat dimaknai meningkatnya persentase angkatan kerja perempuan. Peningkatan tersebut hendaknya diikuti dengan peningkatan akses perempuan terhadap dunia kerja sehingga nantinya dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam perekonomian. Berdasarkan usia, angkatan kerja di Kabupaten Pati didominasi oleh penduduk usia 30-44 tahun dan 45-60 tahun dengan persentase lebih dari 30%. Tahun 2020, terjadi penurunan angkatan kerja usia 15-29 tahun. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya penduduk usia kerja di kelas usia tersebut yang terhitung sebagai bukan angkatan kerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, selama periode 2018 hingga 2020, angkatan kerja Kabupaten Pati didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah, dengan rata-rata 65%. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Pati. Oleh karenanya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, diantaranya dapat dilakukan dengan peningkatan tingkat penduduk penduduk angkatan kerja.

Penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk perempuan dengan persentase rata-rata sekitar lebih dari 70%. Tahun 2019, bukan angkatan kerja perempuan mencapai persentase tertinggi, yaitu 76,37%. Selanjutnya di tahun 2020, persentase bukan angkatan kerja perempuan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 69,22%. Kondisi tersebut menjadi indikasi peningkatan ketersediaan tenaga kerja perempuan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pati perlu meningkatkan akses perempuan terhadap dunia kerja dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai. Berdasarkan jenis kegiatannya, Sebagian besar

angkatan kerja merupakan penduduk yang mengurus rumah tangga dengan persentase mencapai lebih dari 60%. Pada kelompok ini, didominasi oleh penduduk perempuan dengan persentase lebih dari 85%. Persentase bukan angkatan kerja karena sekolah mencapai rata-rata persentase 20%. Tahun 2018, persentase bukan angkatan kerja karena sekolah mencapai sekitar 25% dari total bukan angkatan kerja, dimana lebih dari setengahnya merupakan penduduk perempuan. Tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan persentase bukan angkatan kerja karena sekolah menjadi 19%.

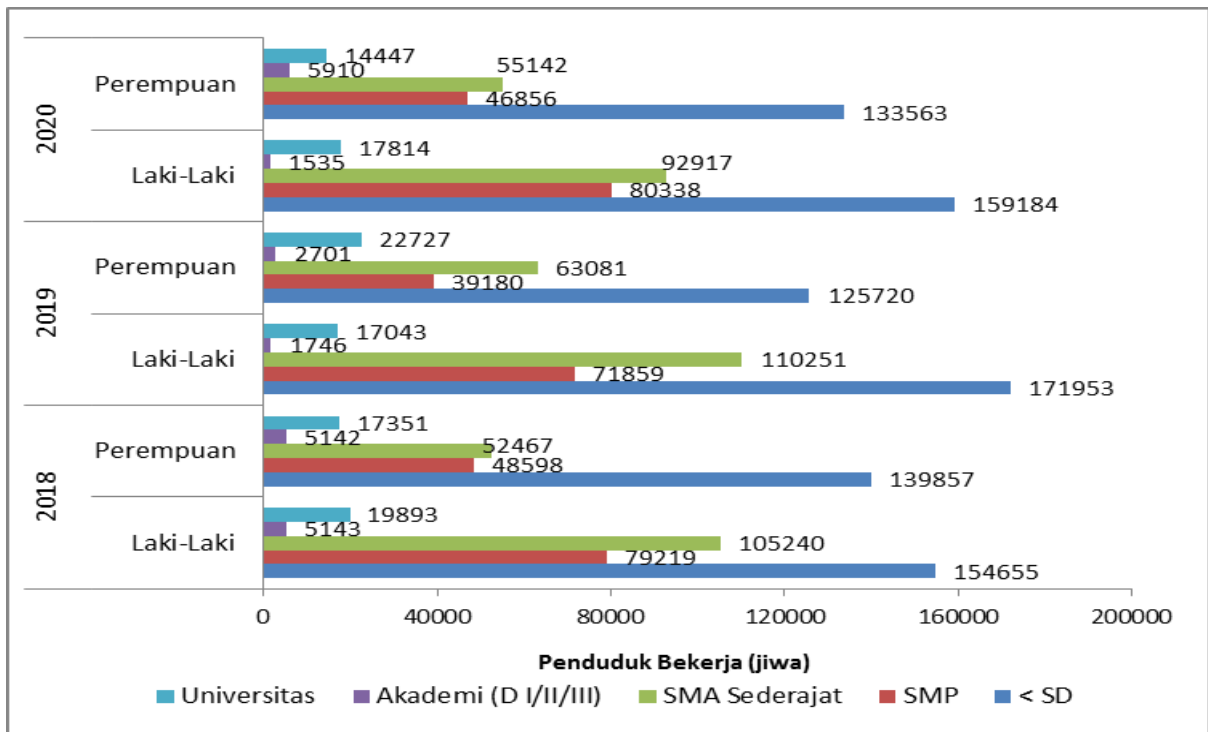
Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pati tahun dari tahun 2017 hingga 2021 berfluktuasi. Jumlah penduduk usia kerja tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan jumlah lebih dari 999 ribu jiwa. Gambaran jumlah penduduk usia kerja, penduduk bekerja, dan rasio penduduk bekerja di Kabupaten Pati tahun 2017 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Usia Kerja	969,955	978,797	987,145	999,911	987,195
Jumlah Penduduk Bekerja	623,407	627,565	626,261	607,706	662,492
Rasio Penduduk Bekerja	0,64	0,64	0,63	0,61	0,67

Sumber: BPS Kab. Pati, 2018 – 2022

Tahun 2017 hingga 2019, Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Namun demikian, di tahun 2021 terjadi penurunan jumlah penduduk usia kerja sekitar 1,2% dibandingkan penduduk usia kerja di tahun 2020. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja selama periode 2017 hingga 2021 bersifat fluktuatif. Tahun 2017 hingga 2019, Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk bekerja. Sementara itu, di tahun 2020, jumlah penduduk bekerja mengalami penurunan sebesar 2,96% sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun tersebut. Penurunan tersebut selanjutnya menyebabkan penurunan rasio penduduk bekerja menjadi 0,61. Di tahun 2021, jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang cukup drastis mencapai lebih dari 9% dan menyebabkan rasio penduduk bekerja meningkat menjadi 0,67. Dengan peningkatan tersebut, jumlah penduduk bekerja dan rasio penduduk bekerja di tahun 2021 menjadi capaian tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah dan rasio penduduk bekerja menjadi indikasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 dan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk.



Sumber : Data BPS Kabupaten Pati, 2021 (diolah)

Gambar 2 . 46 Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan dan JenisKelamin Tahun 2018-2020

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk bekerja di Kabupaten Pati didominasi oleh penduduk laki-laki dengan persentase mencapai sekitar 60%. Namun demikian, terdapat tren peningkatan penduduk perempuan yang bekerja di tahun 2020 dengan persentase mencapai 42,11%. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan SD atau lebih rendah, bahkan terjadi tren peningkatan pada kelompok tersebut dengan persentase lebih dari 48% di tahun 2020. Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP juga memiliki persentase cukup tinggi mencapai sekitar 20%. Dengan kata lain lebih dari 68% penduduk bekerja di Kabupaten Pati memiliki tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah dan didominasi oleh penduduk laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, sebagian besar penduduk tersebut, bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan kualifikasi pendidikan tertentu.

Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat memiliki persentase yang cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Persentase tertinggi untuk kelompok ini terjadi di tahun 2020 dengan persentase mencapai 37,42%. Berdasarkan jenis kelamin, kelompok bekerja dengan tingkat pendidikan SMA/sederajat didominasi oleh laki-laki dengan persentase mencapai lebih dari 60%. Penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan akademi juga memiliki persentase cukup tinggi dan persentase selama 2018-2020, sekitar lebih dari 20%, Namun demikian, pekerja dengan tingkat pendidikan sarjana atau lebih mengalami tren penurunan dengan persentase hanya mencapai sekitar 5%. Kondisi yang menarik adalah, untuk penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan akademi dan sarjana, didominasi oleh penduduk perempuan dengan persentase lebih dari 50%. Hal ini bernilai positif bagi upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pati. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, perempuan berpeluang untuk bekerja sebagai profesional dan menduduki jabatan managerial, sehingga dapat meningkatkan indeks pemberdayaan perempuan.

Tabel 2. 31 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018-2020

	Lapangan Pekerjaan Utama	2018				2019				2020			
		L	P	Total	%	L	P	Total	%	L	P	Total	%
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	105.210	73.218	178.428	28,43	117.264	47.851	165.115	26,37	125.966	72.766	198.732	32,70
B	Pertambangan dan Penggalian	4.171	0	4.171	0,66	7.585	1.500	9.085	1,45	4.977	416	5.393	0,89
C	Industri Pengolahan	5.,039	38.098	93.137	14,84	59.349	67.764	127.113	20,30	49.536	50.778	100.314	16,51
F	Konstruksi	49.413	383	49.796	7,93	58.027	429	58.456	9,33	56.489	433	56.922	9,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	51.299	70.391	121.690	19,39	52.924	67.391	120.315	19,21	42.722	70.348	113.070	18,61
H	Transportasi dan Pergudangan	18.975	0	18.975	3,02	16.292	393	16.685	2,66	16.076	861	16.937	2,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.212	33.126	46.338	7,38	10.602	25.369	35.971	5,74	11.890	27.961	39.851	6,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.340	4.684	14.024	2,23	7.319	1.624	8.943	1,43	5.892	2.460	8.352	1,37
M,N	Jasa Perusahaan	2.691	1.023	3.714	0,59	3.203	1.020	4.223	0,67	4.101	525	4.626	0,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	12.086	1.115	13.201	2,10	11.066	4.176	15.242	2,43	7.670	1.975	9.645	1,59
P	Jasa Pendidikan	9.717	18.015	27.732	4,42	9.098	16.857	25.955	4,14	8.046	14.578	22.624	3,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.495	4.167	5.662	0,90	4.002	4.902	8.904	1,42	1.982	3.033	5.015	0,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya	26.451	16.667	43.118	6,87	14.666	13.552	28.218	4,51	13.483	9.200	22.683	3,73
D,E,J,L	Kategori Lainnya	5.051	2.528	7.579	1,21	1.455	581	2.036	0,33	2.958	584	3.542	0,58
	JUMLAH	364.150	263.415	627.565	100	372.852	253.409	626.261	100	351.788	255.918	607.706	100

Sumber :BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 – 2021.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, menyebabkan perubahan serapan tenaga kerja di beberapa sektor, khususnya lapangan usaha yang sangat terdampak. Beberapa lapangan mengalami penurunan serapan tenaga kerja yang sangat signifikan, namun beberapa lapangan usaha lain justru mengalami peningkatan serapan tenaga kerja. Jasa kesehatan, pertambangan dan penggalian, dan pertambangan dan penggalian merupakan usaha yang mengalami penurunan serapan tenaga kerja tertinggi dengan persentase secara berurutan -43,7%; -40,6%, dan -36,7%. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja tertinggi adalah Kategori lainnya (74%), Pertanian (20,4%), dan penyediaan akomodasi (10,8%).

Selama periode 2018 hingga 2020, Pertanian merupakan sektor usaha dengan serapan tenaga kerja terbesar di Kabupaten Pati. Kondisi tersebut memperkuat indikasi bahwa pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam struktur perekonomian Kabupaten Pati. Serapan tenaga kerja sektor pertanian selama 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dimana serapan tertinggi terjadi di tahun 2020, mencapai 32,70% dari total penduduk bekerja. Di tahun 2020, saat Pandemi Covid-19 gelombang pertama sedang terjadi, lapangan usaha pertanian merupakan salah satu usaha dengan pertumbuhan positif. Hal ini lah berkontribusi terhadap peningkatan serapan tenaga kerja di sektor pertanian. Berdasarkan jenis kelamin, lapangan usaha pertanian didominasi oleh pekerja laki-laki dengan persentase rata-rata lebih dari 50%.

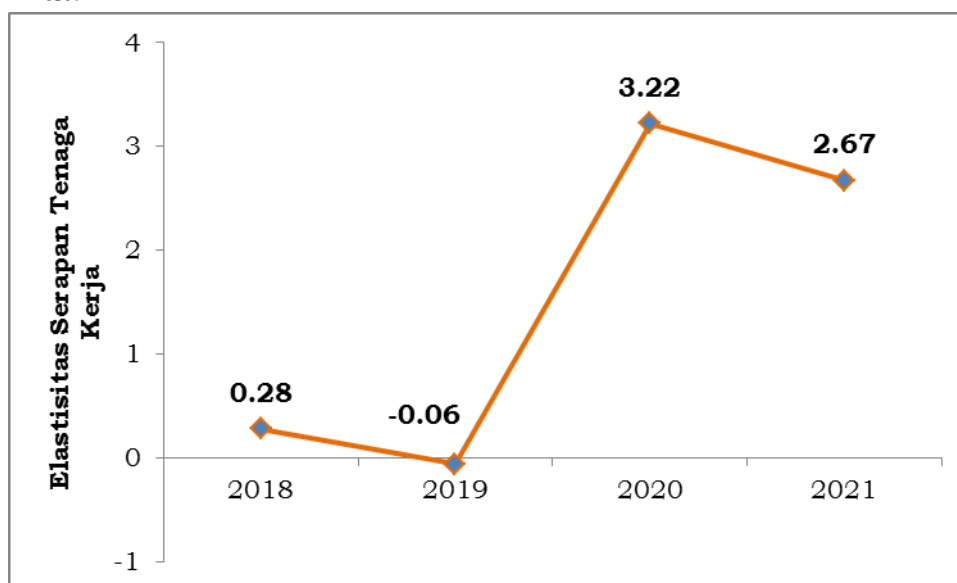
Perdagangan besar dan eceran merupakan lapangan usaha selanjutnya dengan serapan tenaga kerja terbesar. Selama periode 2018-2020, sektor ini berkontribusi sekitar 18% dari total penduduk bekerja. Namun demikian selama tiga tahun terakhir jumlah pekerja pada lapangan usaha ini mengalami kecenderungan penurunan dan mencapai titik terendah di tahun 2020 dengan persentase sebesar 18,61%. Selama Pandemi Covid-19 tahun 2020, sektor perdagangan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Hal ini lah yang menyebabkan penurunan serapan tenaga kerja di sektor ini. Berdasarkan gender, lebih dari 60% tenaga kerja lapangan usaha perdagangan merupakan perempuan dan menjadi sektor dengan jumlah tenaga kerja perempuan terbesar setelah setelah lapangan usaha pertanian.

Industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar pada struktur perekonomian. Selain itu, industri pengolahan juga memiliki serapan tenaga kerja terbesar setelah pertanian dan perdagangan. Serapan tenaga kerja pada lapangan usaha industri pengolahan selama 2018-2020 bersifat fluktuatif dimana tahun 2019, serapan tenaga kerja mencapai jumlah tertinggi dengan persentase mencapai 20,03% dari total penduduk bekerja. Tahun 2020, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap serapan tenaga kerja mengalami penurunan. Penurunan permintaan akan barang dan jasa selama pandemi Covid-19 menyebabkan kinerja industri pengolahan mengalami penurunan. Hal tersebut selanjutnya menyebabkan penurunan serapan tenaga kerja di lapangan usaha tersebut. Berdasarkan gender, Industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan serapan tenaga kerja perempuan yang cukup tinggi. Bahkan, sejak tahun 2019, serapan tenaga kerja perempuan pada lapangan usaha ini melampaui serapan tenaga kerja laki-laki.

k. Elastisitas Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah akan meningkatkan kapasitas daerah dalam memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya, peningkatan barang dan jasa berpotensi menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat dianalisis melalui elastisitas penyerapan tenaga kerja.

Elastisitas penyerapan tenaga dihitung dengan membandingkan persentase pertumbuhan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Gambaran elastisitas tenaga kerja Kabupaten Pati selama periode 2017 hingga 2020 ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber :BPS Kabupaten Pati, 2019 – 2022

Gambar 2 . 47 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

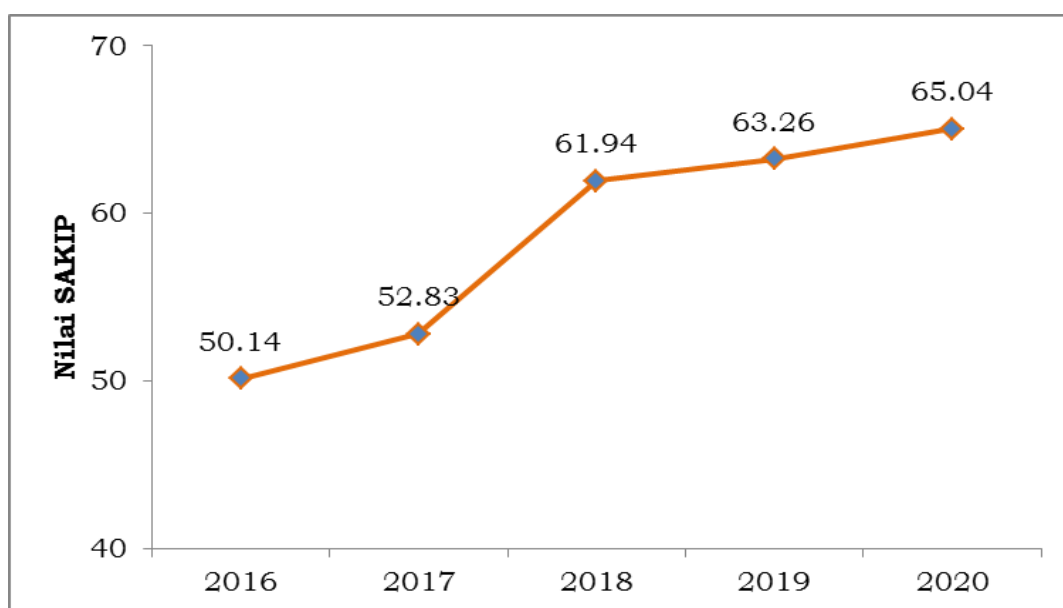
Kondisi ideal elastisitas penyerapan tenaga kerja berada pada range 0,5 hingga 1. Elastisitas positif antara 0 hingga 0,5 dapat dimaknai pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan namun penyerapan tenaga kerja rendah karena didominasi oleh peningkatan industri padat modal. Sementara itu, nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja lebih dari 1, dapat dimaknai pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena industri yang bersifat padat karya.

Tahun 2018 hingga 2019, elastisitas tenaga kerja di Kabupaten Pati berada pada kategori inelastisitas. Namun demikian dapat dinyatakan kondisi inelastisitas di tahun 2018 relatif lebih baik dibandingkan 2019 karena masih bernilai positif. Di tahun 2017, elastisitas penyerapan tenaga kerja bernilai 0,28 yang dapat dimaknai peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,28%. Tahun 2019, elastisitas tenaga kerja bernilai -0.06, yang dapat diartikan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, justru menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar -0,06%. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, elastisitas tenaga kerja di Kabupaten Pati mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Tahun 2019 dan 2020, elastisitas tenaga kerja di Kabupaten Pati berada dalam kategori elastisitas. Elastisitas penyerapan tenaga kerja di tahun 2021 relatif lebih baik dibandingkan tahun 2020 karena mendekati kondisi ideal. elastisitas tenaga kerja bernilai 3,22 yang artinya 1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan serapan tenaga kerja sebesar 3,22%. Selanjutnya di tahun 2020, elastisitas tenaga kerja bernilai 2,67, bermakna 1% pertumbuhan ekonomi meningkatkan serapan tenaga kerja sebesar 2,67%. Peningkatan elastisitas serapan tenaga kerja di tahun 2019 dan 2020 didukung oleh realisasi investasi di Kabupaten Pati yang meningkat dan bercirikan industri padat karya sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang tinggi.

1. Reformasi Birokrasi

Aspek Reformasi Birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2016, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Pati menunjukkan tren

peningkatan. Hal tersebut menjadi indikasi semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.



Gambar 2 . 48 Nilai SAKIP Kabupaten Pati Tahun 2016-2020

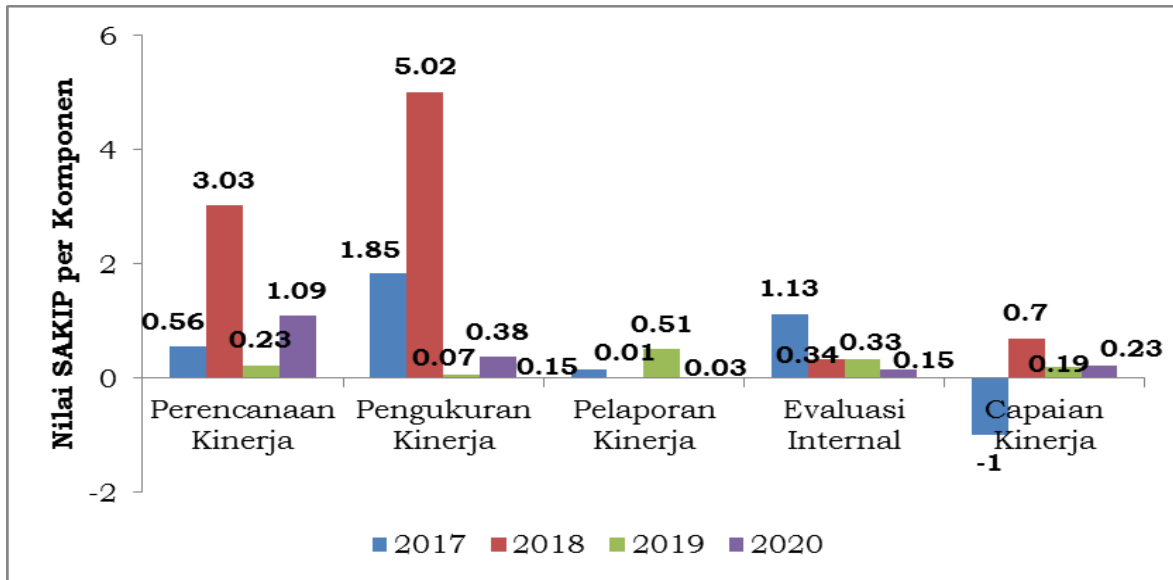
Tahun 2016 hingga 2017, penilaian kinerja Kabupaten Pati menunjukkan nilai antara 50-60, sehingga mendapatkan predikat CC. Selanjutnya, di tahun 2018, penilaian SAKIP Kabupaten Pati mengalami peningkatan cukup signifikan dan berada pada rentang 61-70 sehingga mendapatkan kategori B. Selanjutnya hingga 2020, penilaian SAKIP Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan namun masih berada pada rentang kategori B. Penilaian SAKIP terdiri dari lima komponen dengan bobot yang berbeda. Gambaran capaian penilaian SAKIP Kabupaten Pati selama periode 2016 hingga 2020 pada setiap kategori ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 32 Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kabupaten Pati periode 2016-2020

Komponen	Nilai per-Komponen				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	16.3	16.86	19.89	20.12	21.21
Pengukuran Kinerja	9.69	11.54	16.56	16.63	17.01
Pelaporan Kinerja	9.8	9.95	9.96	10.47	10.50
Evaluasi Internal	4.11	5.24	5.58	5.91	6.06
Capaian Kinerja	10.24	9.24	9.94	10.13	10.36

Sumber: Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP, 2017-2021

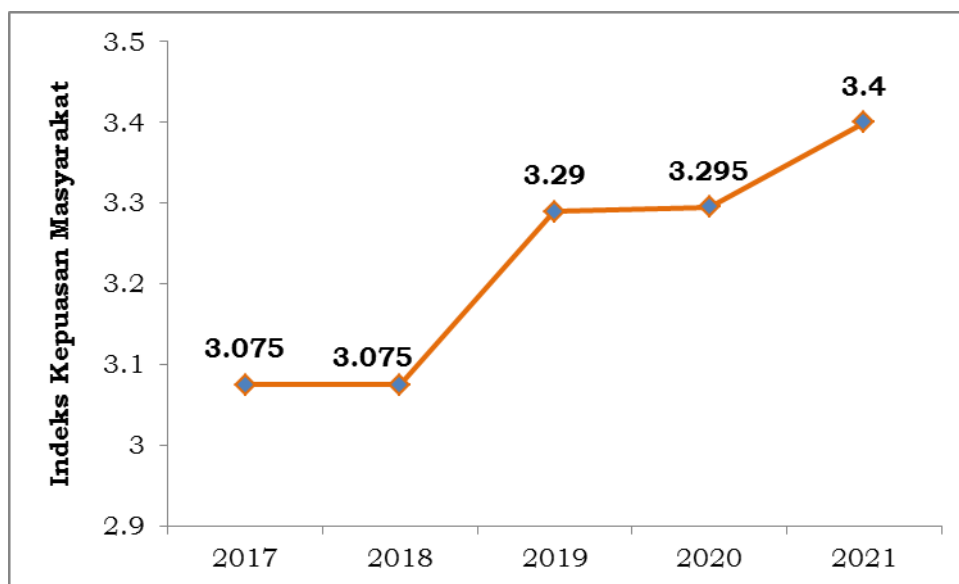
Dari lima komponen penilaian SAKIP, Perencanaan Kinerja memiliki bobot tertinggi mencapai 30%. Sebagai komponen dengan bobot tertinggi, komponen perencanaan kinerja memiliki nilai tertinggi diantara komponen SAKIP lainnya. Setelah Perencanaan Kinerja, Urutan komponen penilaian SAKIP berdasarkan bobot secara berturut-turut adalah Pengukuran Kinerja bobot (25%), Capaian Kinerja (20%), Pelaporan (15%), dan Evaluasi Internal (10%). Selama periode 2016 hingga 2020, setiap komponen mengalami peningkatan dengan nilai yang berbeda. Gambaran peningkatan nilai SAKIP di setiap komponen ditampilkan pada grafik berikut.



Gambar 2 . 49 Perubahan Nilai Komponen SAKIP Kabupaten Pati Tahun 2017-2020

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat apabila sebagian besar komponen menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai setiap tahunnya. Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja memiliki peningkatan nilai yang relatif lebih baik dibandingkan komponen lainnya. Peningkatan tertinggi komponen tersebut terjadi di tahun 2018 dimana periode tersebut merupakan periode pertama pelaksanaan RPJMD periode 2017-2022. Setelahnya peningkatan nilai komponen SAKIP tidak setinggi peningkatan di tahun 2018. Sementara itu, di tahun 2021, Komponen Perencanaan Kinerja kembali menunjukkan peningkatan lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya.

Selain melalui evaluasi SAKIP, penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah juga diukur melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran kualitas pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perangkat daerah yang menyediakan pelayanan.

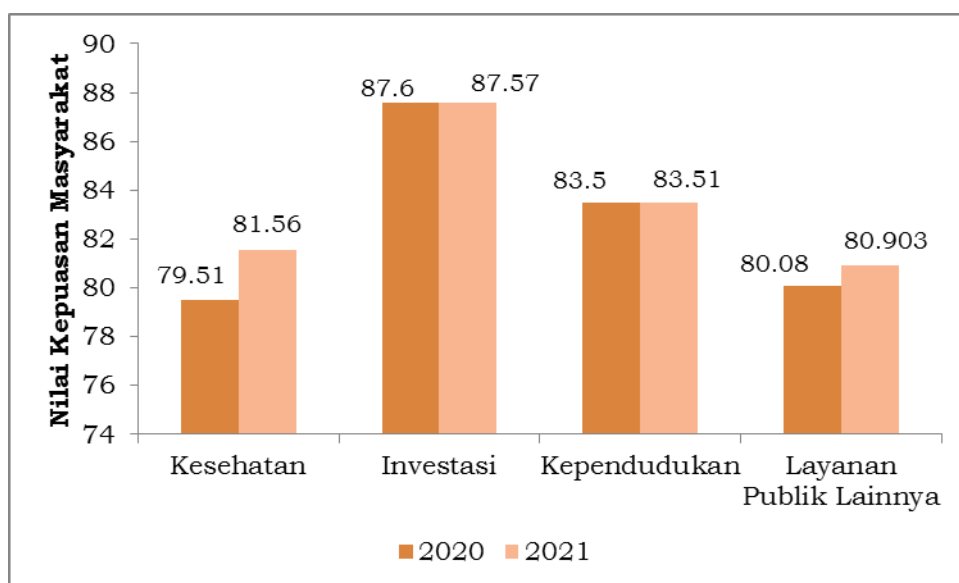


Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Pati (2018-2022)

Gambar 2 . 50 Perubahan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pati Tahun 2017-2020

Selama periode lima tahun terakhir dapat dinyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang disediakan pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan. Selanjutnya berdasarkan kriteria dari Kemenpan RB No. 14 tahun 2017, selama periode tersebut pelayanan publik di Kabupaten Pati berada pada kategori **Baik**. Peningkatan tertinggi selama periode tersebut terjadi di tahun 2019 dengan peningkatan mencapai 0,215 poin dari periode sebelumnya. Sementara itu, di tahun 2020, kepuasan masyarakat tidak berbeda jauh dengan nilai IKM di tahun 2019, yang mengindikasikan kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas belum menunjukkan peningkatan. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhambatnya penyediaan layanan publik. Perbaikan kinerja kembali ditunjukkan di tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat dari peningkatan IKM di tahun tersebut sebesar 0,105 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu melakukan transformasi penyediaan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat walaupun pandemi Covid-19 masih terjadi.

Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dilakukan melalui skala dengan rentang penilaian 1-100. Selanjutnya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dibagi dalam empat bidang, yaitu Kesehatan, Investasi, Kependudukan, dan Pelayanan Publik lainnya sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Pati (2021-2022)

Gambar 2 . 51 Penilaian Kepuasan Masyarakat per Jenis Layanan Tahun 2020-2021

Selama dua tahun terakhir, pelayanan investasi dinilai oleh masyarakat memiliki kinerja paling baik dibandingkan jenis layanan lainnya. Namun demikian, jenis layanan tersebut tidak menunjukkan kinerja peningkatan. Setelah investasi, layanan kependudukan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik, tetapi juga menunjukkan stagnansi hingga tahun 2021. Sementara itu, layanan kesehatan menunjukkan kinerja peningkatan yang paling tinggi dibandingkan jenis layanan publik lainnya. Tahun 2019, layanan kepuasan publik terhadap layanan kesehatan hanya bernilai 79,51. Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan utamanya berkaitan dengan ketidaksiapan fasilitas kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal. Pada periode tersebut, sebagian layanan kesehatan tidak tersedia sehingga menurunkan akses masyarakat terhadap layanan tersebut. Di tahun 2021, kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan mengalami

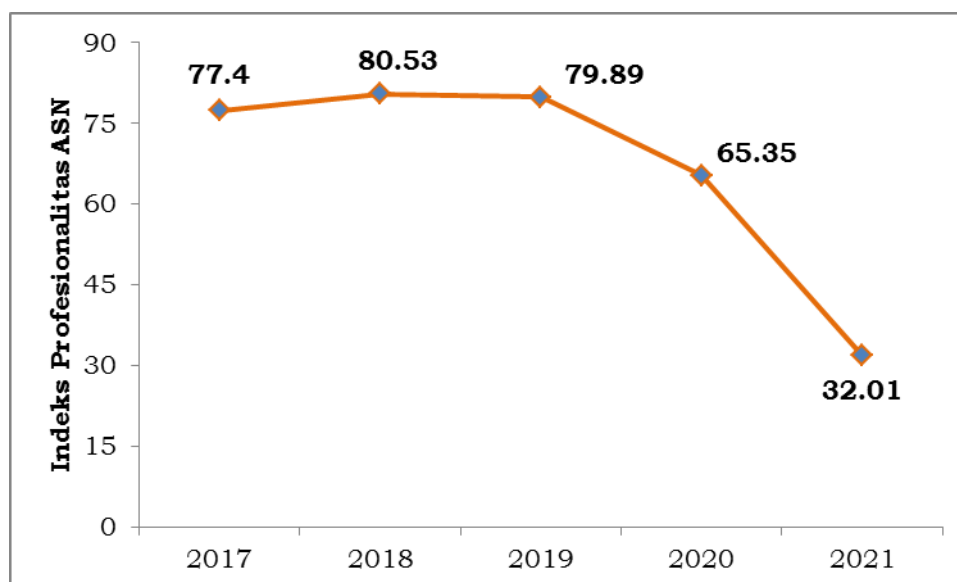
peningkatan hingga dua poin. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar penyedia layanan kesehatan telah bertransformasi dan beradaptasi sehingga tetap dapat menyediakan layanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Reformasi birokrasi juga mencakup kinerja pelaporan keuangan. Capaian kinerja pelaporan keuangan Kabupaten Pati selama periode 2015-2019 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 33 Status Pelaporan Keuangan Kabupaten Pati Periode 2015-2019

Status Laporan Keuangan				
2016	2017	2018	2019	2020
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan apabila Kabupaten Pati mampu menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang cukup memuaskan selama periode 2016-2020. Hal tersebut dapat dilihat dari status Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, walaupun masih terdapat beberapa proses yang masih memiliki kelemahan dan memerlukan perbaikan.

Reformasi birokrasi tidak dapat terwujud tanpa dukungan ASN yang berkualitas. Pengukuran kualitas ASN dilakukan dengan Indeks Profesionalisme ASN yang memiliki empat dimensi, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Capaian Kabupaten Pati dalam meningkatkan profesionalitas ASN ditampilkan pada grafik berikut.

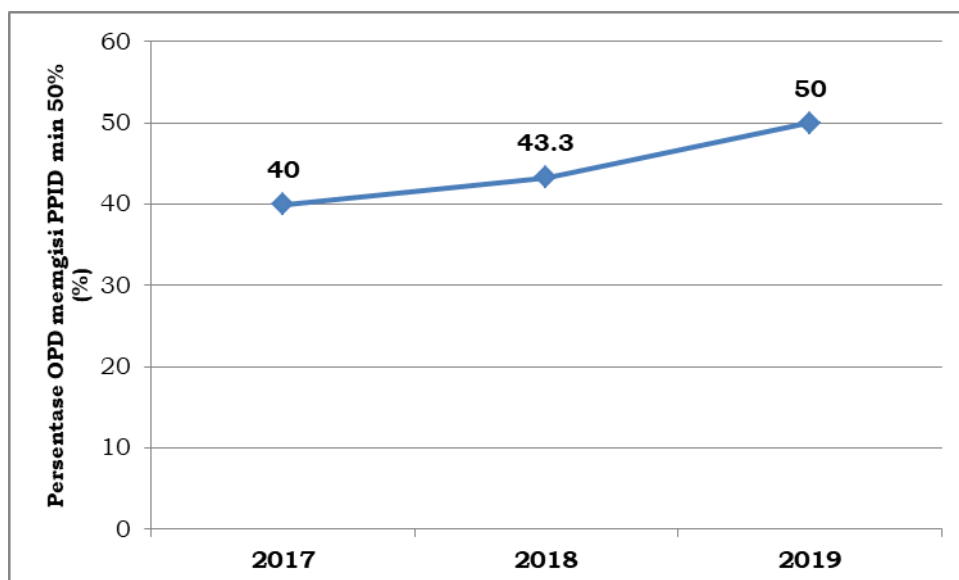


Sumber: BKPP Kab. Pati (2021-2022)

Gambar 2 . 52 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat dinyatakan bahwa indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Pati menunjukkan tren penurunan. Selama periode lima tahun terakhir, kinerja profesionalitas ASN tertinggi dicapai di tahun 2018 dan selanjutnya semakin menurun. Penurunan indeks profesionalitas ASN tertinggi terjadi di tahun 2021 mencapai lebih dari 30 poin. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh perubahan formulasi penghitungan indeks profesionalitas ASN. Analisis terhadap komponen pengukuran indeks profesionalitas ASN, kompetensi merupakan dimensi dengan capaian kinerja terendah dibandingkan komponen lainnya. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh sebagian ASN belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan yang dimiliki. Oleh karenanya penataan ASN merupakan upaya yang harus dilakukan selain mengintensifkan keikutsertaan pelatihan dan diklat sesuai dengan kebutuhan baik yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal.

Dimensi selanjutnya yang menjadi parameter reformasi birokrasi adalah Transparansi dan akuntabilitas. Dimensi tersebut terukur melalui data OPD yang melakukan pengisian dalam PPID lebih dari 50%. Pengukuran terhadap data tersebut dilakukan sejak tahun 2017 sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Gambar 2 . 53 Perangkat Daerah yang Melapor PPID Tahun 2017-2019

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dinyatakan belum seluruh OPD di Kabupaten Pati melakukan pengisian PPID. Namun demikian, juga terdapat perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah OPD yang melapor dalam PPID lebih dari 50%. Tahun 2017, jumlah perangkat daerah yang melapor PPID adalah 12 dari 30 OPD. Selanjutnya perangkat daerah yang melapor ke SPID meningkat menjadi 13 OPD di tahun 2018 dan 15 OPD di tahun 2019.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terutama pada tujuan pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dan target 1.4. yang menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan dasar. Indikator untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian APK dan APM semua jenjang pendidikan di Kabupaten Pati periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 APK dan APM Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
APK PAUD (%)	47,34	86,24	88,22	88,24	89.26
APK SD/MI (%)	112,85	112,42	112,35	111,86	109.35
APK SMP/MTs (%)	101,47	98,45	98,42	98,27	98.45

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
APM SD/MI (%)	99,90	98,32	98,83	98,43	98,31
APM SMP/MTs (%)	81,32	76,60	76,61	76,67	79,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2022

Selama lima tahun terakhir, APK PAUD di Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan, dimana peningkatan APK PAUD yang cukup besar di tahun 2018, sebesar 38,9%. Peningkatan tersebut dikarenakan pengefektifan pemberlakuan usia masuk SD minimal 7 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya persentase siswa baru SD yang berusia kurang dari 7 tahun.

Selanjutnya, di tingkat Sekolah Dasar (SD) Terdapat selisih cukup besar antara APM dan APK SD/MI (13,52%). Hal tersebut kemungkinan disebabkan banyaknya anak di bawah usia 7 tahun yang telah memasuki Sekolah Dasar, sementara penegakan aturan usia minimal masuk SD baru diterapkan secara efektif di tahun 2017. Kesenjangan APK dan APM juga ditemukan di jenjang pendidikan SMP/MI dengan persentase sebesar 21,81%. Kesenjangan tersebut selain disebabkan oleh usia masuk SMP lebih dini, juga banyak murid yang berasal dari luar Kabupaten Pati. Selama periode 2017-2021, Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar menunjukkan kecenderungan tetap, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 35 Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat (%)	0,01	0,01	0,03	0,02	0,01
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP Sederajat	0,15	0,14	0,17	0,13	0,11
3	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat (%)	99,84	107,32	101,85	106,85	104,34

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2022.

Selama lima tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) jenja SD dan SMP bernilai fluktuatif, namun menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019. Selanjutnya APS SMP menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan APS SD. Berdasarkan Profil Pendidikan Tahun 2021, sebagian besar siswa SMP/MTs mengalami putus sekolah di kelas 7 dan didominasi oleh siswa laki-laki. APS SMP tertinggi ditemukan di Kecamatan Juwana, Trangkil, dan Margoyoso dimana hal tersebut kemungkinan disebabkan keinginan untuk bekerja. Oleh karena itu perlu upaya untuk memberikan pelayanan terhadap anak putus sekolah melalui pendidikan kesetaraan.

Tabel 2. 36 Angka Putus Sekolah (APS) SD Sederajat dan SMP Sederajat 2017-2021

No	Indikator	Sat	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,5	100	99,87	100,00	100,00
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,69	99,69	99,90	100,00	99,97
3.	Angka Kelulusan (AL) Kejar Paket A/B/C	%	98,44	99,03	99,00	98,80	100,00

No	Indikator	Sat	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	102,58	107,32	101.85	106.85	104.34
5.	Persentase ruang kelas SD/ sederajat dalam kondisi baik	%	62,97	63,74	74.90	75.13	75.62
6.	Persentase ruang kelas SMP/ sederajat dalam kondisi baik	%	78,17	75.4	84.51	84.17	84.18
7.	Rasio guru/murid SD/MI/SDLB	%	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12
8.	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/SMPLB	%	1:11	1:11	1:11	1:11	1:12
9.	Jumlah PKBM Penyelenggara Kejar Paket	unit	21	21	21	21	21
10.	Persentase guru bersertifikasi	%					
	PAUD	%	38.92	40.09	40.67	30.94	40
	SD	%	51,73	48,27	44.86	45.45	36.62
	SMP	%	58,12	53,37	55.90	57.37	54.80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2021

Selama lima tahun terakhir, angka kelulusan untuk pendidikan dasar menunjukkan kinerja yang baik, bahkan sejak tahun 2020 mencapai angka 100%. Berkaitan dengan kualitas bangunan sekolah dapat dinyatakan adanya tren peningkatan persentase ruang kelas dalam kondisi baik. Namun demikian, persentase bangunan rusak didominasi oleh jenjang pendidikan SD, sehingga rehabilitasi bangunan sekolah sebaiknya difokuskan untuk bangunan SD. Rasio guru dan murid baik untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP sederajat belum menunjukkan kinerja peningkatan dan masih di bawah standar rasio guru terhadap murid selama periode lima tahun. Untuk jenjang pendidikan SD, terdapat indikasi persebaran rasio guru dan murid yang tidak merata, dimana terdapat sekolah di beberapa kecamatan (Gabus, Tlogowungu, Margoyoso, dan Tayu) menghentikan operasionalnya. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya jumlah murid per kelas yang terjadi beberapa tahun terakhir. Selanjutnya untuk menunjang peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) kegiatan kejar paket perlu dioptimalkan. Hingga tahun 2020, terdapat 21 PKBM yang melaksanakan kegiatan kejar paket. Selanjutnya, akreditasi sekolah dapat menjadi indikator kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah. Perkembangan akreditasi sekolah di Kabupaten Pati tahun 2018-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Akreditasi Sekolah SD sederajat dan SMP sederajat di Kabupaten Pati Tahun 2019-2021

No	Jenjang Sekolah	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021			
		A	B	C	Non	A	B	C	Non	A	B	C	Non
1	SD	74.56	22.06	2.79	0.59	75.00	23.38	0.88	0.15	75.11	23.86	0.44	0.59
2	MI	58.13	38.92	1.48	1.48	58.13	38.92	1.48	1.48	61.14	39.97	0.47	1.42
3	SMP	63.74	17.58	9.89	8.79	63.04	17.39	9.78	9.78	58.16	20.41	11.22	10.20
4	MTs	25.36	62.32	8.70	3.62	25.36	62.32	8.70	3.62	29.63	58.52	11.11	0.74

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2020

Secara umum dapat dikatakan terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang SD selama periode 2019-2021. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan sekolah baik SD maupun MI yang mendapatkan akreditasi A

dan penurunan sekolah yang belum terakreditasi. Selanjutnya apabila diperbandingkan antara SD dan MI, ditemukan perbedaan yang cukup besar dimana persentase SD yang terakreditasi A jauh melampaui persentase MI yang terakreditasi A. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang berbasis umum dengan sekolah yang berbasis agama pada jenjang SD/ sederajat.

Berbeda dengan jenjang SD/ sederajat, peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tidak ditemukan pada jenjang SMP/ sederajat. Persentase sekolah yang terakreditasi A pada jenjang SMP dan MTs cenderung stabil, bahkan persentase sekolah yang terakreditasi A untuk jenjang SMP menunjukkan penurunan. Hingga tahun 2021, persentase SMP yang terakreditasi A sebesar 58,16, lebih rendah dari capaian di tahun 2020 (63,04). Selain itu, persentase SMP yang belum terakreditasi juga relatif masih tinggi selama tiga tahun terakhir, dengan persentase tertinggi terjadi di tahun 2021 mencapai 10,20%.

Selanjutnya, Kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang MTs selama tiga tahun menunjukkan tren peningkatan, namun dengan capaian yang jauh dibawah capaian jenjang pendidikan SMP. Kondisi tersebut menjadi indikasi kesenjangan kualitas pendidikan antara jenjang SMP dan MTs. Di tahun 2021, persentase MTs yang terakredits A hanya sebesar 29,63%. Namun demikian, persentase MTs yang belum terakredits relatif rendah hanya sebesar 0,74%.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 38 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian SPM (%)
1	Pendidikan PAUD	Jumlah Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	100	100	38.553	38.553
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar / SD / MI	100	100	107.924	121.522
	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar / SMP / MTs	100	100	50.700	58.015
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam pendidikan kesetaraan	100	100	572	572

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa baru satu indikator SPM Pendidikan yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini diantaranya disebabkan karena masih ada bangunan sekolah baik SD maupun SMP yang rusak sehingga berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar. Perlu diingat bahwa untuk memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak, selama ini Pemerintah Kabupaten Pati masih tergantung pada Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan. Adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan juga

turut mempengaruhi capaian SPM, di mana sebaran guru juga belum merata terutama untuk daerah-daerah terpencil.

2. Kesehatan

Indikator aspek kesehatan yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang kesejahteraan sosial adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). Gambaran kondisi AKI, AKB, dan AKBa Kabupaten Pati selama periode 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 39 Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) Kabupaten Pati 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	AKI	85,86	66,07	45	85	132,73
2	AKB	8,82	10,21	8,5	9,18	6,89
3	AKBa	10,61	10,87	9,4	9,6	n.a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2022

AKI, AKB, dan AKBa di Kabupaten Pati selama periode 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tahun 2017 hingga 2019, AKI dan AKB di Kabupaten Pati menunjukkan penurunan. Sementara itu, AKBa menunjukkan sedikit peningkatan di tahun 2018. Oleh karena itu, secara umum hingga tahun 2019, Kabupaten Pati menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menyediakan layanan kesehatan maternal, bayi, balita. Namun demikian, di tahun 2020 angka kematian untuk ibu, bayi dan balita mengalami peningkatan, dimana peningkatan tertinggi terjadi untuk kematian ibu. Kondisi tersebut disebabkan oleh hampir seluruh fasilitas kesehatan tidak dapat menyediakan layanan kesehatan secara optimal karena persebaran Covid-19. Selain itu, masyarakat juga cenderung enggan untuk mengakses sebagian besar layanan kesehatan tersebut karena khawatir tertular. Tahun 2021, kematian bayi menunjukkan penurunan, namun kematian ibu masih menunjukkan peningkatan. Di tahun tersebut kematian bayi berjumlah 109 kasus lebih rendah dibandingkan tahun 2020 berjumlah 161 kasus. Sementara itu, kematian ibu berjumlah 21 kasus lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 berjumlah 15 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan penyediaan layanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil serta deteksi dan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan belum optimal.

Indikator lain untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati dapat dilihat dari Indeks Keluarga Sehat (IKS). Persebaran capaian IKS sampai tingkat kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Indeks Keluarga Sehat per Kecamatan Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	KECAMATAN																				CAKUPAN PATI	
			SUKOLOLO	KAYEN	TAMBAK-ROMO	WINONG	PUCAK-WANGI	JAKEN	BATANGAN	JUWANA	JAKENAN	PATI	GABUS	MARGO-REJO	GEMBONG	TLOGO-WUNGU	WEDARI-JAKSA	MARGO-YOSO	GUNUNG-WUNGKAL	CLUWAK	TAYU	DUKUHSETI		TRANGKIL
1	Keluarga mengikuti program KB *)	%	73.51	63.14	66.98	79.73	74.71	74.16	83.76	82.54	76.39	36.31	76.42	77.22	55.36	69.86	89.20	74.64	75.48	54.97	73.67	60.04	64.88	70.64
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	%	96.35	93.36	98.04	97.20	93.40	96.53	96.55	97.86	97.88	93.30	99.76	99.75	94.92	98.94	99.60	97.26	97.21	97.44	99.71	92.08	93.81	96.80
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	%	94.64	99.58	100	98.78	99.29	99.49	97.35	99.02	99.33	95.84	97.44	97.37	97.61	99.21	99.41	99.49	99.27	97.67	98.58	93.10	96.49	97.88
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	%	80.44	96.89	98.47	92.93	96.45	97.54	95.34	94.52	90.93	89.26	86.94	71.35	85.79	97.25	80.94	89.03	90.91	87.35	90.88	88.40	94.12	89.96
5	Pertumbuhan Balita dipantau	%	83.88	97.97	99.28	96.19	94.62	98.87	98.63	95.61	96.28	96.15	91.29	91.53	89.88	94.39	95.61	97.81	98.34	94.79	97.20	91.89	96.72	94.85
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	%	18.67	37.95	27.09	58.78	32.26	52.53	35.69	53.12	25.78	30.83	63.20	49.85	35.71	34.74	47.52	46.28	48.17	43.00	43.99	42.68	41.25	42.52
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	%	21.98	52.61	48.57	48.52	43.99	30.04	34.96	40.90	10.15	37.36	28.91	22.28	45.02	47.05	40.36	30.86	28.66	23.69	23.51	44.81	31.02	34.43
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	%	20.59	47.31	37.84	50.00	57.14	31.03	23.29	60.81	54.00	33.04	46.23	45.45	32.08	36.11	57.32	49.17	58.82	31.52	38.27	44.12	46.15	42.75
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok *)	%	40.59	48.48	56.56	57.66	47.66	46.03	49.51	59.25	45.03	57.86	57.40	50.07	53.07	55.88	51.04	50.19	61.10	53.94	49.33	49.64	52.58	52.16
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	%	44.08	58.79	53.59	42.19	54.61	58.35	76.87	53.28	36.18	71.81	40.19	56.95	53.13	56.27	68.51	65.82	51.24	58.74	54.36	49.10	55.15	55.70
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	%	98.58	97.05	86.33	98.31	98.07	97.79	97.21	99.45	97.78	99.30	95.60	99.25	99.23	99.19	99.23	98.45	98.68	98.72	99.03	91.83	99.16	97.78
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	%	87.29	94.65	97.61	96.30	92.06	91.07	98.85	99.21	96.70	97.97	98.26	98.65	96.71	86.78	98.16	92.90	92.90	93.83	95.12	95.35	97.86	95.19
Indeks Keluarga Sehat (IKS)			0.15	0.31	0.28	0.27	0.26	0.25	0.38	0.34	0.15	0.35	0.23	0.27	0.26	0.29	0.37	0.31	0.26	0.25	0.26	0.24	0.29	0.28

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Nilai Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Pati di tahun 2020 adalah 0,28, meningkat dari nilai IKS tahun 2019 (0,268). Nilai IKS tahun 2020 masih jauh dari nilai minimum IKS level sehat (0,600). Nilai IKS yang relatif rendah ditemukan di seluruh kecamatan. Selain itu, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kecamatan memiliki nilai IKS lebih rendah dibandingkan rata-rata nilai IKS kabupaten. Kondisi tersebut menjadi indikasi masih rendahnya kesadaran penduduk untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kecamatan yang berada di wilayah utara dan selatan memiliki nilai IKS lebih rendah dibandingkan rata-rata IKS kabupaten. Kecamatan dengan nilai IKS terendah adalah Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Jakenan dengan nilai IKS masing-masing 0,15.

Indeks Keluarga Sehat memiliki 12 komponen pembentuk. Terdapat lima komponen yang memiliki nilai di bawah nilai minimum untuk level sehat. Komponen dengan nilai terendah adalah Penderita Hipertensi yang berobat teratur dengan persentase 34,43%. Persentase tersebut dapat dimaknai hanya sekitar 34% keluarga dengan anggota keluarga penderita hipertensi yang memeriksakan kesehatan secara teratur. Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang menunjukkan peningkatan prevalensi setiap tahunnya. Apabila tidak mendapatkan penanganan secara teratur, hipertensi dapat memunculkan komplikasi beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Selain masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya hipertensi, rendahnya pemeriksaan hipertensi juga disebabkan oleh rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan akibat pandemi Covid-19. Rendahnya pemeriksaan hipertensi terjadi merata di seluruh kecamatan. Namun demikian terdapat beberapa kecamatan dengan persentase sangat rendah, antara lain Kecamatan Jakenan (10,15%), Sukolilo (21,98%), dan Margorejo (22,28%). Komponen selanjutnya yang memiliki nilai IKS rendah adalah penderita TB yang menjalankan pengobatan secara standar dengan persentase sebesar 42,52%. Sebagaimana hipertensi, Kabupaten Pati juga mengalami peningkatan prevalensi TB. Pengobatan TB yang tidak sesuai standar berpotensi memperparah kondisi penderita serta meningkatkan penularan penyakit. Rendahnya pengobatan TB sesuai standar ditemukan di semua kecamatan. Namun demikian, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki persentase pengobatan TB standar yang rendah, yaitu Kecamatan Sukolilo (18,67%), Tambakromo (27,09%), dan Pati (30,83%).

Kabupaten Pati menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah ODGJ terbanyak di Jawa Tengah. Namun demikian, persentase pengobatan dan perawatan ODGJ oleh keluarga relatif masih rendah (42,75%). Rendahnya pengobatan teratur yang disertai penelantaran ODGJ pada umumnya disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan keluarga tentang penanganan dan perawatan ODGJ. Masih tingginya penelantaran ODGJ di Kabupaten Pati dapat ditemukan di hampir seluruh kecamatan. Namun demikian, persentase pengobatan ODGJ secara teratur yang relatif rendah ditemukan di Kecamatan Sukolilo (20,59%), Batangan (23,29%), dan Jakenan (31,03%). Rendahnya kualitas kesehatan keluarga di Kabupaten Pati juga disebabkan oleh masih tingginya anggota keluarga yang mengonsumsi tembakau dan rokok. Tingkat konsumsi tembakau per kapita di Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko beberapa penyakit, utamanya penyakit degeneratif dan menurunkan kualitas hidup anggota keluarga yang lain sebagai perokok pasif. Kecamatan dengan persentase keluarga tidak merokok yang relatif masih rendah terdapat di Kecamatan Sukolilo (40,59%), Jakenan (45,03%), dan Jakenan (46,03%). Rendahnya kepesertaan JKN juga menjadi penyebab rendahnya nilai IKS Kabupaten. Rata-rata keluarga yang telah mengikuti JKN berada pada persentase 55,70%. Persentase keluarga dengan kepesertaan JKN rendah ditemukan pada

Kecamatan Jakenan (36,18%), Gabus (40,19%), dan Winong (42,19%). Selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa hambatan lain dalam bidang kesehatan yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 41 Kondisi Kesehatan di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kasus Kematian Bayi	kasus	153	170	150	161	109
2	Kasus Kematian Balita	kasus	184	181	166	169	6
3	Kasus Kematian Ibu	Kasus	15	11	8	15	21
4	Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	118	136	150	139	94
5	Jumlah Balita gizi buruk	Kasus	78	72	134	207	n.a
6	Persentase kasus stunting pada Baduta	%	6,61	5,35	3,88	5,42	n.a
7	Persentase kasus stunting pada Balita	%	6,1	5,31	4,2	6	6
8	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	76,8	76,56	79,8	81	n.a
9	Persentase kehamilan risiko tinggi yang tertangani	%	96,8	100	100	100	100
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	98,6	100	126	132	100
11	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	92,6	98,03	94	100	91.93
12	Cakupan Rumah Sehat	%	65,20	66,78	68,55	69	
13	Cakupan penggunaan Sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat	%	93,37	95,47	100	100	n.a
14	Prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	angka	50,85	50,21	141	101	n.a
15	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (<i>success rate</i>)	%	64,28	130,87	82,5	88	n.a
16	Jumlah penderita penyakit DBD	Kasus	357	133	391	186	n.a
17	Kejadian malaria per 1000 org	Angka	0,03	0,03	0,03	0	n.a
18	Jumlah penderita kusta	Org	62	77	65	51	29
19	Jumlah penderita filiarisis	Org	19	11	10	6	n.a
20	Jumlah kasus HIV/AIDS	Kasus	115	118	125	103	260
21	Jumlah penderita HIV/AIDS yang mendapatkan terapi <i>retroviral</i>	Kasus	115	118	140	493	176
22	Jumlah kasus Hipertensi yang tercatat	Kasus	15.367	48.326	75.860	66.947	n.a
203	Prevalensi hipertensi	/1000 pend	12,4	38,98	60,86	64	312,513
24	Jumlah kasus Diabetes yang tercatat	Kasus	13.653	33.424	22.568	25467	n.a
25	Prevalensi Diabetes Melitus	/1000 pend	11	26,96	18,11	24	31.276
26	Jumlah kasus penyakit jantung yang tercatat	Kasus	NA	NA	71,494	8,267	n.a
27	Prevalensi penyakit jantung	/1000 pend	NA	NA	5,74	8	n.a
28	Persentase keluarga dengan anggota keluarga perokok aktif	%	30	25	57,31	48	n.a
29	Persentase merokok pada penduduk usia kurang dari 18 tahun	%	10	10	NA	1	n.a

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
30	Persentase merokok pada penduduk usia 18 tahun ke atas	%	10	10	NA	44	n.a
31	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Desa	351	354	406	406	n.a
32	Jumlah Desa/Kel ODF (Open defecation Free)	Desa	92	133	406	406	n.a
33	Rasio dokter per satuan penduduk	/100.000 pend	12,5	16,94	16,9	16	17.24
34	Persentase Puskesmas PONED sesuai standar	%	17,24	17,24	17,24	17	n.a
35	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0,260	0,260	0,260	0	n.a
36	Jumlah RS PONEK	Unit	10	10	9	1	n.a
37	BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>)	%	68,1	64,5	62,1	47	n.a
38	AVLOS (<i>Average Length of Stay</i> = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	Hari	3,3	3	3	3	n.a
39	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	Hari	1,7	1,9	2	4	n.a
40	BTO (<i>Bed Turn Over</i> = Angka perputaran tempat tidur)	%	68,47	68	69,1	55	n.a
41	NDR (<i>Net Death Rate</i>)	%	10	11	10,9	19	N,a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2022

Jumlah kematian selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Hingga tahun 2019 sebenarnya menunjukkan penurunan, namun pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 kembali meningkatkan jumlah kematian. Di tahun 2021, jumlah kematian menunjukkan penurunan, untuk neonatal, bayi, dan balita, sedangkan kematian ibu justru mengalami peningkatan. Pandemi Covid-19 juga meningkatkan angka kesakitan. Prevalensi stunting sejak tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 6,0 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 6,3. Perilaku masyarakat berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Selama lima tahun terakhir, terdapat peningkatan penduduk yang merokok. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga bergeser menjadi konsumsi makanan dan minuman jadi. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan prevalensi penyakit degeneratif. Diantara beberapa penyakit degeneratif, hipertensi menunjukkan peningkatan prevalensi yang sangat signifikan. Di tahun 2021, prevalensi hipertensi sebesar 312,51, artinya setiap 1000 penduduk terdapat sekitar 312 orang yang menderita hipertensi. Selanjutnya, prevalensi Diabetes mellitus juga menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Di tahun 2021, prevalensi Diabetes mellitus adalah 31,28, meningkat dari tahun 2020 sebesar 24. Selanjutnya, jumlah kasus HIV/AIDS menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir bersifat fluktuatif, namun menunjukkan tren peningkatan. Kasus HIV di tahun 2021 berjumlah 206 kasus, meningkat lebih dari 100% dibandingkan jumlah kasus HIV di tahun 2020. Namun demikian, peningkatan jumlah penderita HIV, belum sejalan dengan peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS yang mendapatkan terapi retroviral. Penderita HIV/AIDS yang mendapatkan terapi retroviral di tahun 2021 berjumlah 176 orang, menurun dibandingkan tahun 2020 sebanyak 493 orang. Urusan kesehatan juga berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 42 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Target (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	94,7
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	86,6
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	64,1
4	Pelayanan kesehatan balita	100	32,7
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	24
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	-
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	76,7
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	78,7
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	99,9
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	50,1
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	79,4
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	97,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, 2022

Sebagaimana yang terjadi di tahun 2020, Capaian SPM kesehatan di tahun 2021 juga masih di bawah target yang ditentukan, namun secara umum kondisi di tahun 2021 relatif lebih baik dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini disebabkan pandemi Covid-19 masih terjadi di tahun 2021 sehingga sebagian besar layanan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan beberapa layanan tidak dapat disediakan. Capaian SPM paling rendah ditemukan pada pelayanan pendidikan pada usia dasar. Kondisi tersebut utamanya disebabkan tahun 2021, kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan secara daring sehingga pemberian pelayanan kesehatan di lembaga pendidikan dasar menjadi terhambat. Pelayanan kesehatan balita juga memiliki cakupan yang cukup rendah, bahkan pelayanan kesehatan usia lanjut memiliki cakupan nol. Pemberian pelayanan kesehatan balita dan usia lanjut selama ini diberikan melalui Posyandu yang dihentikan selama pandemi Covid-19. Pelayanan maternal dan neonatal juga mengalami penurunan capaian dan kemungkinan hal ini lah yang menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan neonatal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diukur dengan aspek fasilitas dan infrastruktur wilayah dengan komponen: kapasitas air baku, daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik, jalan kondisi baik, jembatan kondisi baik, dan rasio tingkat pelayanan ruas jalan. Perkembangan kinerja aspek ini ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 43 Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pati

Komponen	Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan (%)	76,33	81,72	82,91	83,53	82,87
a. Kapasitas air baku (%)	85,05	93,95	82,38	85,70	86,50
b. Daerah Irigasi dlm. kondisi baik (%)	80,82	85,37	83,13	87,02	87,69
c. Jalan kondisi baik (%)	64,25	70,71	73,44	75,87	77,70

Komponen	Capaian				
	2017	2018	2019	2020	2021
d. Jembatan kondisi baik (%)	75,21	76,86	79,34	79,67	73,13
e. Rasio tingkat pelayanan ruas jalan	0,31	0,25	0,33	0,29	0,287

Sumber: DPUTR, 2022

Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada tahun 2021 menunjukkan kinerja sebesar 82,87%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (83,53%). Penurunan tersebut disebabkan penurunan peresnetase jembatan dalam kondisi baik yaitu menjadi 73,13% pada Tahun 2021.

Terhadap capaian yang baik tersebut sesungguhnya masih meninggalkan berbagai masalah dan kondisi pandemi yang terjadi sepanjang Tahun 2021 (dan masih terus berlangsung pada tahun 2022) serta kondisi alam yang akan sangat berpengaruh pada kondisi infrastruktur wilayah. Beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan adalah: (1) meskipun kapasitas air baku mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi peningkatan pemanfaatan air tanah dengan sumur dalam; (2) kondisi jalan dan jembatan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang akan meningkatkan tingkat kerusakannya. Selanjutnya capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 44 Gambaran Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Pati

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	%	76,33	81,72	82,91	83,53	82,87
2	Kapasitas air bersih daerah	%	82,99	74,62	71,86	85,81	85,96
3	Kapasitas air baku	M3	458.154.088,74	472.383.599,56	493.346.654,55	347.970.048	351.207.245
4	Kapasitas Irigasi daerah	M3	437.393.529	502.751.183	472.586.112	317.635.302	320.828.516
6	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	km	479.211	629.174	660.385	1.106.187*)	1132,887*)
7	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	km	98,87	98,87	98,87	98,87	98,87
8	Jumlah jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	unit	276	279	288	290	313
6	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	km	22,31	22,32	15,165	15,165	14.365
7	Panjang turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	km	1,51	2,71	2,47	1,44	2,3684
9	Luas wilayah bebas banjir	Km2	1.142,80	1.477,72	1.471,32	1.486,03	1.488,99
10	Panjang Jaringan Irigasi	Km	1.852.782	854,958	854,958	747.995,00	747.995,00
11	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Km	1.446.968	638,563	733,186	651.679,39	655.917,39

No	Indikator	Sat	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
12	Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	17.671,50	17.748,42	17.282,73	17.623,08	24.588,72
13	Air Minum Perkotaan (PDAM)	KK	27.535	88.498	88.498	97.470	139.446
	Air Minum (sumur dalam) (DPU)	KK	228.265,75	146.665,75	148.494,50	153.752	176.153
15	Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Km	118.703	116.881	125.547	176.579	176,580
16	Jumlah kasus pelanggaran terhadap RTRW	kasus	-	1	-	1	0
17	Jumlah ruang terbuka publik	unit	54	56	57	58	58

Ket.: *) termasuk Jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa
 Sumber: DPUTR Kabupaten Pati, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum cukup baik. Indikator yang tetap atau tidak mengalami peningkatan maupun penurunan adalah panjang jaringan irigasi yaitu tetap sepanjang 747.995 km pada Tahun 2021, yang disebabkan tidak adanya pembangunan jaringan irigasi baru pada Tahun 2021. Namun kondisi irigasi mengalami peningkatan karena adanya peningkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.. Program IPDMIP yang dilaksanakan sejak Tahun 2018 telah mampu meningkatkan kondisi DI yang terintervensi (yaitu seluas 5.500 Ha). Kapasitas irigasi yang menurun terutama adalah wilayah-wilayah yang tidak termasuk program tersebut utamanya dalam hal ketersediaan air baku dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang pada Tahun 2020.

Khusus infrastruktur jalan, data menunjukkan bahwa kondisi jalan keseluruhan yaitu jalan kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi baik terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Akan tetapi kondisi jalan harus terus-menerus dijaga dikarenakan tingkat kerusakan jalan setiap tahunnya sekitar 21% atau 175,85 km. Tingkat kerusakan jalan tersebut terutama masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu baru sepanjang 20% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase. Jika dirinci menurut kondisi permukaan jalan kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2. 45 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020 dan 2021

No.	Jenis permukaan dan kondisi	2020		2021	
		Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
1	Jalan beraspal kondisi baik	592,857	70,80	515,277	61,53
2	Jalan beraspal kondisi sedang	45,458	5,43	143,198	17,10
3	Jalan beraspal kondisi rusak ringan	134,802	16,10	122,907	14,68
4	Jalan beraspal kondisi rusak berat	64,260	7,67	55,995	6,69
	Jumlah	837,377	100,00	837,77	100

Sumber: DPUTR Kabupaten Pati, 2021

Berdasarkan data jalan kabupaten di atas, jalan beraspal kondisi baik pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 515,277 km (61,53%), yang disebabkan terjadinya kerusakan jalan minor sehingga menjadi kondisi sedang. Jalan kondisi

mantap sepanjang 658,475 km (78,64%) dan tidak mantap 178,902 km (21,36%). Kerusakan jalan juga disebabkan konstruksi jalan yang dibangun kurang sesuai dengan kondisi tanah yang menyebabkan mudah terjadi kerusakan jalan, sehingga ke depannya dalam penentuan konstruksi jalan perlu memperhatikan kondisi tanahnya.

Terkait dengan ketaatan terhadap tata ruang, pada Tahun 2021 tidak terjadi kasus pelanggaran tata ruang, namun demikian untuk menjaga agar masyarakat tetap patuh dalam pemanfaatan ruang terus menerus perlu dilakukan upaya baik penguatan regulasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha. Upaya peningkatan layanan informasi tata ruang antara lain dilakukan melalui penyediaan Aplikasi SIPETARUNG yang merupakan aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas yang ingin mengakses informasi tata ruang.

Sementara itu untuk penyediaan ruang terbuka hijau pada RPJMD Tahun 2017-2022 menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, namun untuk ke depannya ruang terbuka hijau menjadi tanggung jawab DLH Kabupaten Pati. Luasan ruang terbuka hijau khususnya di kawasan perkotaan masih minim, sehingga ke depannya diperlukan pembangunan RTH baru dan peningkatan kualitas RTH yang telah ada.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 46 Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	100	1.349.172	1.096.742	81,29 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	1.349.172	1.349.172	100 %

Sampai dengan tahun 2021, jumlah penduduk yang terlayani air minum layak baru mencapai 1.096.742 jiwa (81,29%) yang berarti masih terdapat 252.430 penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum yang layak. Layanan air minum layak tersebut terdiri dari jaringan perpipaan sebesar 66,29% dan non perpipaan sebesar 15%.

Selanjutnya untuk pemenuhan sanitasi sejak akhir tahun 2019 Kabupaten Pati telah dinyatakan sebagai Kabupaten Open Defecation Free (ODF) atau dengan perkataan lain bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang berperilaku buang air besar sembarangan (Stop BABS). Namun demikian akses 100% tersebut jika dilihat secara rinci, persentase akses rumah tangga dengan sanitasi aman masih sebesar 0,45% dan akses layak sebesar 80,10% dan sisanya masih akses dasar.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi prioritas urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Gambaran

capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 47 Gambaran Urusan Perumahan di Kabupaten Pati

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	175.07	99.06	50.00	45,62	23,47
2	Jumlah Rumah tidak layak huni	unit	31,829	30,272	28,174	24.738	21.056
3	Jumlah rumah layak huni	unit	339,549	341,865	343,204	346.640	350.322
4	Luasan permukiman yang ditata	Ha	19,253.51	19,329.52	19,378.58	19.382,96	19.405,11

Sumber: Disperkim Kabupaten Pati, 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak adalah adanya kawasan permukiman kumuh. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 050/1783/tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 050/4852 Tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati adalah sebesar 181,58 Ha yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Pati, Tayu, Juwana, Kayen, Batangan, Dukuhseti, dan Margoyoso. Hingga tahun 2021 luas kawasan kumuh masih tersisa 23,47 Ha yaitu di Desa Banyutowo (3,69 Ha), Puncel (10,36 Ha), dan Kayen (9,42 Ha). Namun kemudian pada Tahun 2021 dilaksanakan penyusunan SK Kumuh terbaru yang memasukkan kawasan kumuh yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam SK Kumuh Tahun 2017 dan memasukkan luasan SK Kumuh Tahun 2017 yang masih tersisa. Berdasarkan SK Bupati Pati Nomor 050/3985 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati, luas kawasan kumuh yang ditetapkan adalah 177,89 Ha.

Jumlah RTLH pada Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 yaitu menjadi 21.056 unit. Jumlah RTLH yang ditangani pada Tahun 2020 sebanyak 3.438 unit dengan berbagai sumber pendanaan yaitu dari APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Penurunan RTLH menjadikan peningkatan jumlah rumah layak huni yaitu menjadi 350.322 pada Tahun 2021.

Masih banyaknya RTLH di Kabupaten Pati memerlukan kolaborasi dan peran serta dari berbagai sektor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta (CSR). Backlog juga menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian. Sampai Tahun 2021, Kabupaten Pati masih menyisakan 78.018 backlog rumah, sehingga diperlukan peningkatan fasilitasi kepemilikan rumah dan penyediaan tanah untuk pembangunan rumah. Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 48 Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	16	16	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	100	109	109	100

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan SPM , ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan yaitu:

1. Perlu pengembangan sistem aplikasi untuk pengajuan proposal bantuan pemugaran rumah bagi korban bencana.
2. Perlu penyusunan regulasi dan aturan-aturan teknis sebagai pedoman atau Juknis dalam penanganan korban bencana yang menjadi kewenangan Disperkim sesuai SPM.
3. Agar penanganan rehabilitasi rumah akibat korban bencana alam dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran maka alokasi anggaran dan pendanaan harus diselaraskan mulai dari proposal, verifikasi, pelaksanaan sampai dengan tahap kegiatan Monev di Disperkim.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Daya saing suatu daerah dapat meningkat jika ditunjang dengan lingkungan yang kondusif. Kondusivitas wilayah diukur melalui aspek Gangguan Keamanan dan Ketertiban dengan komponen pembentuknya adalah Penanganan Penyakit masyarakat, Penanganan Kriminalitas, dan Penanganan Pelanggaran K3. Gambaran penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 49 Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penanganan keamanan dan gangguan keamanan	%	70.30	71.01	50.61	70.25	99,48
2	Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	kasus	465	458	490	460	396
3	Jumlah Penegakan PERDA	kasus	115	143	233	216	7
4	Jumlah Kriminalitas	kasus	254	342	327	511	191
5	Jumlah demo	kejadian	8	10	10	21	n.a
6	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	angka	0.014	0.020	0.020	0.017	0,0017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
7	Jumlah penanganan kebakaran yang sesuai standar (sesuai dengan time response)	kejadian	59	128	149	54	85
8	Jumlah Korban akibat bencana						
	Meninggal	Orang	1	0	0	2	0
	Luka	Orang	3	2	2	0	0
	Hilang	Orang	1	0	0	0	0
	Mengungsi	Orang	631	143.957	10.956	68	342
9	Jumlah Desa Tangguh bencana	Desa	6	8	12	14	22
10	Jumlah sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan kebencanaan	Unit	9	9	10	10	10
11	Jumlah Satlinmas	orang	9431	9431	8906	8906	8403
12	Jumlah Satlinmas terlatih	orang	90	90	90	90	90
13	Jumlah Satlintas yang terlatih dan dikukuhkan		90	90	90	90	90
14	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia	kegiatan	0	0	0	32	64
15	Jumlah pos pemadam kebakaran yang dilengkapi saran/prasarana damkar di kantor kecamatan	pos	0	0	0	2	3
16	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran	Orang	23	32	32	30	56
	PNS	orang	23	23	23	19	17
	THL	orang	0	9	9	11	39
17	Jumlah Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	orang	0	0	0	0	0
	PNS	orang	0	0	0	0	0
	THL	orang	0	0	0	0	0

Sumber: Satpol PP Kabupaten Pati, 2021

Terdapat beberapa kejadian yang berpotensi menjadi gangguan keamanan, antara lain pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3), kriminalitas, demonstrasi, dan kejadian kebakaran. Selama periode 2017-2021, jumlah pelanggaran K3 di Kabupaten relatif tinggi dengan jumlah yang fluktuatif dengan rata-rata 450 kasus per tahun. Tahun 2019, jumlah pelanggaran K3 merupakan yang tertinggi, sedangkan tahun 2021, pelanggaran K3 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan 396 kasus. Selanjutnya, wilayah yang cukup luas, jumlah penduduk yang tinggi, serta berada di kawasan Pantura membuat Kabupaten Pati memiliki kerawanan terhadap tindak kriminalitas. Selama lima tahun terakhir, jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Pati cenderung fluktuatif. Jumlah kasus kriminalitas tertinggi terjadi di tahun 2020, mencapai 511 kasus. Tingginya kasus kriminalitas di tahun tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk melepaskan sebagian narapidana melalui program asimilasi dan integrasi ketika masa pandemi. Selanjutnya di tahun 2021, kasus kriminalitas mengalami penurunan cukup drastis menjadi 191 kasus. Kejadian demonstrasi sejak 2017 hingga 2020 juga menunjukkan tren peningkatan. Jumlah

kasus demonstrasi di tahun 2020 menjadi yang tertinggi selama periode tersebut. Di tahun tersebut, demonstrasi didominasi oleh sebab ekonomi, utamanya menuntut pembatalan kebijakan PPKM.

Kejadian kebakaran di Kabupaten Pati menunjukkan flutuasi. Periode 2017 hingga 2019, kejadian kebakaran menunjukkan peningkatan, dimana di tahun 2019 mencapai 149 kasus. Di tahun 2020 kejadian kebakaran mengalami penurunan yang cukup drastis (54 kasus), namun kembali meningkat tajam di tahun 2021, mencapai 85 kasus. Upaya penanganan kebakaran di Kabupaten terus ditingkatkan dengan tersedianya 3 pos pemadam kebakaran di tiga kecamatan. Peningkatan personel pemadam kebakaran juga telah dilakukan. Jumlah personel pemadam kebakaran terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dan mencapai 56 personel di tahun 2021. Namun demikian, masalah yang dihadapi adalah kompetensi yang belum memadai. Hingga 2021, belum ada personel pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2009.

Selama periode lima tahun terakhir, persentase penanganan gangguan keamanan di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Penanganan gangguan keamanan terendah terjadi di tahun 2019, sedangkan di tahun 2021, meningkat cukup signifikan mencapai 99.48%. Namun demikian, peningkatan penanganan gangguan dan keamanan tidak diikuti dengan peningkatan penegakan Perda. Hingga tahun 2019, capaian penegakan Perda menunjukkan tren penurunan, namun periode selanjutnya justru menunjukkan penurunan dan tahun 2021 capaian penegakan Perda menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir dengan hanya 7 kasus. Ketersediaan sumber daya yang memadai merupakan salah satu modal untuk meningkatkan keamanan dan ketenteraman wilayah. Permasalahan ketersediaan satlinmas merupakan salah satu kendala dalam peningkatan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pati. Selama lima tahun terakhir jumlah Satlinmas di Kabupaten Pati menunjukkan penurunan. Selain itu, hingga tahun 2021, jumlah satlinmas yang terlatih hanya 90 dari total 8.403 Satlinmas.

Kabupaten Pati memiliki potensi beberapa jenis bencana yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah. Bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Pati antara lain banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dari beberapa jenis bencana tersebut, bencana banjir dan kekeringan memberikan dampak yang paling luas dibandingkan bencana lainnya. Gambaran bencana yang terjadi di Kabupaten Pati selama periode 2017 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 50 Peristiwa Bencana Alam di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Keterangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lokasi Bencana di Kabupaten Pati	174	218	184	64	58
2	Perkiraan kerugian akibat bencana (juta rupiah)	2.939,0	55,0	7.865,351	618	18.260,64

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2021.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa persebaran bencana dari tahun 2017 sd. 2021 mengalami fluktuasi. Persebaran bencana tertinggi terjadi di tahun 2018 dengan jumlah lokasi terdampak bencana mencapai 218 lokasi. Di tahun tersebut, bencana yang memberikan dampak yang luas adalah bencana kekeringan (100 lokasi) dan banjir (87 lokasi). Setelah tahun 2018, luasan bencana mengalami penurunan. Tahun 2021, bencana terjadi di 58 lokasi, lebih rendah dari jumlah lokasi bencana di tahun 2020 (64 lokasi). Di tahun tersebut, bencana banjir memberikan dampak paling besar dibandingkan bencana lain (41 lokasi). Luasan bencana selanjutnya berpengaruh terhadap kerugian, baik material maupun korban.

Kerugian materi akibat bencana juga berfluktuasi. Kerugian tertinggi terjadi di tahun 2021 mencapai lebih dari 18 milyar rupiah. Kerugian tersebut disebabkan oleh bencana yang terjadi di 58 lokasi dan didominasi oleh bencana banjir. Di tahun tersebut, lokasi bencana lebih rendah, namun kerugian sangat tinggi karena intensitas bencana yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain kerugian secara materi, bencana yang terjadi di Kabupaten Pati juga memunculkan korban, dimana selama periode lima tahun terakhir, jumlah korban bencana tertinggi adalah korban mengungsi. Jumlah korban mengungsi tertinggi terjadi di tahun 2018, ketika terjadi bencana banjir mencapai lebih dari 143 ribu jiwa. Di tahun 2020, kejadian bencana di Kabupaten Pati menurun secara drastis, sehingga korban mengungsi juga mengalami penurunan, hanya berjumlah 68 orang. Selanjutnya di tahun 2021, jumlah korban mengungsi kembali mengalami peningkatan (324 orang), namun lebih rendah dibandingkan periode 2017-2019.

Upaya untuk mencegah dan mengatasi bencana antara lain dengan meningkatkan kapasitas desa dengan membentuk desa tangguh bencana. Jumlah desa tangguh bencana yang dimiliki Kabupaten Pati juga masih relatif sedikit. Dari 44 desa rawan bencana, baru 14 desa yang menjadi desa tangguh bencana. Masalah lainnya adalah masih minimnya sarana prasarana kesiapsiagaan bencana seperti jumlah sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan kebencanaan berupa *Early Warning System* (EWS), yaitu baru 10 desa yang sudah memiliki EWS. Penyediaan rambu evakuasi bencana juga masih minim, baru 5 desa yang memiliki rambu tersebut.

Tabel 2. 51 Gambaran Urusan Keamanan dan Ketertiban (Bencana)

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	LAMA						
1	Jumlah Korban akibat bencana						
	Meninggal	Orang	1	0	0	2	0
	Luka	Orang	3	2	2	0	0
	Hilang	Orang	1	0	0	0	0
	Mengungsi	Orang	631	143.957	10.956	68	342
2	Jumlah Desa Tangguh bencana	Desa	6	8	12	14	22
3	Jumlah sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan kebencanaan	Unit	9	9	10	10	10
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Orang					
	- informasi rawan bencana	Orang	65	345	6.205	21.700	11.540
	- pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	6.598	6.878	12.798	28.243	18.148
	- penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	631	6.687	3.416	70	413
5	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
6	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	65	345	1.265	710	1.115
7	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
8	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	65	345	1.265	590	855
9	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	42	10	20	8.810	63.200
10	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	0	0	0	0	3
11	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0	0	0	0	3
12	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	0	0	0	12
13	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
14	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	65	145	1.015	390	655
15	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
16	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	30	60	120	80	280
17	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0	0	1.100	1.350
18	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	0	0	0	4	0
19	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	442	77	356	516	342
20	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	478	454	356	547	456
21	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	2	2	2	2	2

Sumber: BPBD Kabupaten Pati, 2022

Kapasitas penanggulangan bencana daerah masih harus ditingkatkan. Jumlah desa tangguh bencana yang dimiliki Kabupaten Pati juga masih relatif sedikit. Dari keseluruhan desa yang masuk kawasan rawan bencana, baru 22 desa yang menjadi desa tangguh bencana. Masyarakat yang memperoleh informasi kebencanaan juga terbilang masih sangat minim. Sehingga masyarakat masih banyak yang belum memahami bagaimana langkah-langkah dalam mitigasi bencana. Penanggulangan bencana memerlukan koordinasi dari berbagai sektor terkait. Namun koordinasi tersebut masih lemah yang antara lain disebabkan beberapa dokumen dalam rangka penanggulangan bencana masih belum disusun dan dilegalkan.

6. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial. Gambaran penanganan PMKS di Kabupaten Pati periode 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Pencapaian Kinerja Bidang Sosial di Kabupaten Pati

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	64.034	81.702	66.154	100.879	72.750
2	Jumlah PPKS yang ditangani	Orang	1.613	1.792	2.659	7.638	5.930
3	Jumlah PPKS yang direhabilitasi	Orang	1.613	1.792	2.659	25	50
4	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang tertangani	Orang	363	258	239	205	160
5	Jumlah panti asuhan dan panti jompo yang memenuhi standar	unit	21	21	8	12	9
6	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	2,13	2,13	2,14	2,4	2,4

Sumber : Dinsos, P3A dan KB Kabupaten Pati, 2022

Jumlah PMKS di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Jumlah PMKS tertinggi terjadi di tahun 2020 mencapai lebih dari 100 ribu orang. Meningkat sekitar 50% dibandingkan jumlah PMKS di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut utamanya terjadi untuk kelompok fakir miskin yang meningkat secara signifikan selama pandemi Covid-19. Peningkatan PMKS seharusnya diikuti dengan peningkatan penanganan PMKS, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesejahteraan lanjutan. Jumlah penanganan PMKS selama periode 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi. Sejak pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 2021, jumlah PMKS yang tertangani mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya jumlah PMKS tertangani di tahun 2020 mencapai 7.638 orang. Sementara itu, di tahun 2021 terjadi penurunan PMKS tertangani menjadi 5.930 orang. Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 53 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	90	356	25
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	30	30	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	1.451	1.451	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	200	200	100
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara yang mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	117	120	98

SPM bidang sosial masih ada yang belum tercapai, yang disebabkan karena data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) belum terbaru sehingga masih banyak data PPKS yang belum masuk DTKS maupun SIMPD. Oleh karena itu perlu pemutakhiran data PPKS yang dimulai dari tingkat desa.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pati selama periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 54 Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pati

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produktivitas tenaga kerja (ADHK)	Jt/org	44.16	46.29	48,98	50,26	47.64
	Produktivitas tenaga kerja (ADHB)	Jt/org	58.71	63.07	68,34	71,28	68.55
2	Persentase penyerapan tenaga kerja	%	40.32	61.77	88.16	76,45	76,45
3	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	orang	4,482	6,696	4,756	2,733	6,879
4	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	144	192	192	480	128
5	Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja	orang	623,407	627,565	626,261	607,706	662,492
6	Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun yang bekerja	orang	260,278	263,415	253,409	255.918	n.a.
7	Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat/ lebih rendah	orang	317,998	294,512	297,673	292.747	n.a.
8	Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat	orang	126,725	127,817	111,039	127.194	n.a.
9	Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat/ lebih tinggi	orang	149,656	205,236	173,332	148.059	n.a.
10	Jumlah penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Dipoma/ sederajat/ lebih tinggi	rang	53,854	47,529	44,217	39.706	n.a.
11	Jumlah PPTKIS/ PPPMI yang kredibel	unit	19	19	18	16	16
12	Jumlah pekerja migran yang diberangkatkan bekerja ke LN	orang	1,053	1,641	2,318	973	31

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
13	Jumlah perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan sarana hubungan industrial	Perusahaan	395	420	448	475	501
14	Jumlah kasus hubungan industrial	kasus	n.a.	6	n.a.	11	9
15	Proporsi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	86	86	78	78	n.a
16	Jumlah Balai Latihan Kerja Pemerintah	Balai	1	1	1	1	1

Sumber : Disnaker Kabupaten Pati, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga tahun 2020, lapangan kerja di Kabupaten Pati masih didominasi unskilled labour (tidak memiliki ketrampilan) yaitu oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD/lebih rendah yaitu sebesar 48,17%, dan kalau dilihat dari jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) plus tidak tamat SD maka jumlah mereka sangat mendominasi di lapangan usaha yaitu sebesar 69,10%. Sisanya adalah penduduk yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan SLTA/ sederajat (24,36%) dan diploma/ sederajat atau lebih tinggi (6,53%). Sedangkan berdasarkan gender, perempuan yang berkerja sebesar 42,11% dari total pekerja. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya karena kesempatan bekerja dan berusaha semakin menurun sebagai dampak Covid-19. Pada tahun 2021 penempatan tenaga kerja kembali meningkat sebagai tanda bahwa perekonomian sudah mulai pulih.

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pati saat ini masih menjadi kendala untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, sehingga ke depan diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif dan lebih luas dengan stakeholder terkait guna meningkatkan link and match di pasar kerja daerah maupun luar daerah (regional, nasional dan luar negeri) serta upaya pemberdayaan pekerja untuk kewirausahaan baik dalam konteks untuk usaha mandiri maupun untuk kelembagaan usaha.

Urusan tenaga kerja perlu ditangani lebih intensif dengan pendekatan kemitraan, berbasis komunitas, dan mendorong inovasi masyarakat. Kemitraan dengan kelompok asosiasi pengusaha dan profesional lain di Kabupaten Pati berpeluang mendapatkan kesempatan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Hal lain yang masih memerlukan perhatian adalah masih adanya kasus hubungan industrial walaupun angkanya fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Namun demikian patut disyukuri dalam lima tahun terakhir perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan hubungan industrial semakin meningkat, sehingga kasus hubungan industrial yang terjadi dapat diselesaikan semuanya.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kinerja peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 55 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di KabupatenPati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata lama sekolah perempuan	tahun	6,57	6,64	6,69	6,91	7,13

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	angka	90,59	91,05	98,30	1,001	n.a
2	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	angka	77,59	78,23	79,11	0,988	n.a
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%	53,45	53,09	53	52,50	n.a
5	Jumlah anggota DPRD Perempuan	Orang	8	8	8	8	8
6	Jumlah perempuan pada jabatan eselon II	Orang			1	1	4
	Jumlah perempuan pada eselon III		42	42	46	47	
7	Jumlah Kasus KDRT	kasus	2	0	15	58	2
8	Jumlah Kasus terhadap anak	kasus	12	14	104	76	2
9	Jumlah Lembaga perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender	unit	10	10	10	10	10

Sumber : DinsosP3A & KB Kabupaten Pati, 2021

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kekerasan, baik terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap anak. Selama lima tahun terakhir, KDRT fluktuasi dan menunjukkan jumlah tertinggi di tahun 2020 dengan 58 kasus, sementara di tahun 2021, jumlahnya menunjukkan penurunan sangat signifikan menjadi 2 kasus. KDRT merupakan fenomena gunung es, sehingga jumlah aktual kemungkinan melampaui jumlah yang dilaporkan. Kekerasan terhadap anak juga menunjukkan flutuasi, namun menunjukkan jumlah yang sangat tinggi di tahun 2019 (104 kasus) dan tahun 2020 (76 kasus). Tahun 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurun secara signifikan dengan jumlah 2 kasus. Kasus kekerasan terhadap anak didominasi oleh kasus perkuliahian dan *bullying* yang dilakukan oleh teman sebaya. Penurunan kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2020 dan 2021, kemungkinan disebabkan karena proses pembelajaran online selama pandemi sehingga membatasi interaksi anak.

Pemberdayaan dan perlindungan anak berperan strategis mendukung pencapaian pembangunan berkeadilan dan pada gilirannya menuju masyarakat sejahtera. Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender menyasar pada semua aspek kehidupan, untuk menguatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang kompetitif.

3. Pangan

Masalah pangan merupakan hal mendasar dalam kehidupan, sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan, termasuk di daerah menjadi sangat krusial dan harus menjadi prioritas. Kondisi pangan di wilayah Kabupaten Pati perlu mendapat perhatian karena ketersediaan pangan utama dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Berikut gambaran bidang pangan Kabupaten Pati.

Tabel 2. 56 Gambaran Ketahanan Pangan di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Skor PPH	angka	86,26	88,8	87	88,6	87
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kap	294,42	324,83	649,79	299,442	168,641
2	Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal/kap/hari	3.305	3.801	6.694,71	6.694,71	3.787

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Ketersediaan Protein Per Kapita	gram/kap/hari	61,75	87,43	332,22	332,22	84,05
4	Jumlah Lumbung pangan pemerintah	unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah Lumbung pangan masyarakat	unit	-	4	2	-	3
6	Jumlah Desa Rawan Pangan	desa	96	101	111	86	104

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualitas pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Pati belum ideal yang diindikasikan oleh skor PPH masih di bawah 100 dan pada tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya. Hal lain yang menjadi masalah pada urusan pangan adalah masih adanya desa rawan pangan dan jumlahnya meningkat di tahun 2021 apabila dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Upaya peningkatan ketahanan pangan daerah harus terus diupayakan melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan keamanannya sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkesinambungan. Disamping itu promosi konsumsi pangan beragam dan bergizi kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan untuk menggugah kesadaran mereka akan konsumsi pangan yang sehat, bergizi dan seimbang. Penguatan kelembagaan pangan daerah harus terus diperkuat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan dan resilien terhadap kemungkinan bencana yang terjadi.

Ketersediaan pangan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, setelah mengalami peningkatan di tahun 2019 kemudian menurun di tahun 2020 dan 2021. Hal ini diduga disebabkan oleh penurunan produksi pertanian dan juga penjualan hasil pertanian ke luar daerah.

4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup terukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan komponennya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Berikut ini adalah gambaran lingkungan hidup Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 tahun terkahir.

Tabel 2. 57 Gambaran Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitansi Lingkungan Hidup	Angka	53,37	51,2	54,69	53,88	52,35
2	Indeks Kualitas Air	angka	47,60	26,32	44,4	32,86	35,33
3	Indeks Kualitas Udara	angka	81,55	95,53	78,83	76,33	76,46
4	Indeks Tutupan Lahan	angka	36,56	36,60	44,31	48,44	36,99
5	Pengelolaan sampah						

N o.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	-Volume timbunan sampah	ton	342.548,78	345.832,08	182.981,65	239.060,58	241.664,31
	- Volume sampah yang didaur ulang	ton	109.140,38	125.195,80	81.145,05	103.707,78	140.262,50
	- Volume sampah yang masuk ke TPA	ton	59.480,27	65.230,11	44.321,95	47.032,08	93.072,08
6	Jumlah kelompok pengelola sampah	klp	70	90	90	114	114
7	Jumlah kelompok pengelola sampah aktif	klp	70	90	90	100	40
8	Jumlah Bank Sampah Aktif	Unit	60	70	90	100	40
9	Jumlah TPS dan TPS 3R	Unit	30	35	36	36	37
10	Jumlah Pusat Daur Ulang	Unit	0	0	0	0	2
11	Jumlah rumah kompos	Unit	0	0	0	0	4
12	Jumlah Biogas	Unit	28	34	39	43	46
13	Volume limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan	%	0	30%	32%	36%	36%
14	Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru	perusahaan	5	5	5	5	5
15	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO SNI 14001	perusahaan	5	5	5	5	5
16	Jumlah Pejabat Pengawas LH	orang	2	3	3	3	3

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
17	Jumlah pengaduan masyarakat terkait ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	kasus	15	15	15	25	25
18	Jumlah pengaduan masyarakat terkait ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan yang ditangani	lokasi	15	15	15	25	25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, 2022

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 yaitu menjadi 52,35. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya indeks tutupan lahan karena adanya perubahan komponen perhitungan indeks tutupan lahan.

Dalam rangka mengatasi/mengurangi tingkat pencemaran, diperlukan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Disdagperin, DPMPTSP, dan Dinas Pertanian sebagai upaya untuk meminimalisir pencemaran dari sumbernya melalui pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

Berkaitan dengan pengelolaan persampahan, volume sampah yang didaur ulang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun jumlah bank sampah aktif pada Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis karena pada masa Pandemi Covid 19 bank sampah sekolah rata-rata tidak beroperasi. Hal yang juga membutuhkan perhatian adalah keterbatasan kapasitas TPA Sukoharjo dihadapkan pada volume sampah yang masuk ke TPA semakin meningkat. Sehingga ke depannya perlu peningkatan peran masyarakat dan desa dalam mengurangi Bungan sampah dari sumbernya dan mendaur ulang sampah untuk mengurangi buangan residu sampah ke TPA.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada selama periode 2017 hingga 2022, ditunjukkan melalui persentase kepemilikan dokumen baik kependudukan dan catatan sipil sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 58 Pencapaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil diKabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	84	97.16	101	103.4	100
2	Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil	%	47.39	44.9	87.51	91,25	97
3	Rasio penduduk usia di atas 17 tahun ber KTP	%	68	74	98	102.42	98,67
4	Rasio penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akte kelahiran	%	36	37	87	93.88	1
5	Jumlah Penduduk usia lebih dari 17 tahun dan atau sudah	jiwa	978.968	1.001.761	101.992	1.013.262	1.032.847

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
	menikah						
6	Jumlah Penduduk usia lebih dari 17 tahun dan atau sudah menikah yang memiliki KTP elektronik	jiwa	941.512	985.702	1.004.342	1.001.587	1.012.074
7	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	rasio	78,73	79,59	81,57	81,94	83,55
8	Rasio penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akte kelahiran	%	36	37	87	93,88	94,84
9	Jumlah penduduk usia 0-17 tahun	jiwa	307.440	308.160	336.269	334.939	333.066
10	Jumlah Penduduk usia lebih dari 17 tahun dan atau sudah menikah	jiwa	978.968	1.001.761	101.992	1.013.262	1.032.847
11	Jumlah Penduduk usia lebih dari 17 tahun dan atau sudah menikah yang memiliki KTP elektronik	jiwa	941.512	985.702	1.004.342	1.001.587	1.012.074
12	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	jiwa	78,73	79,59	81,57	81,94	83,55
13	Rasio penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akte kelahiran	rasio	36	37	87	93,88	94,84
14	Jumlah penduduk usia 0-17 tahun	jiwa	307.440	308.160	336.269	334.939	333.066
	- Memiliki akte kelahiran	jiwa	318.847	324.412	321.092	315.329	340.884
	- Tidak memiliki akte kelahiran	jiwa	30.369	2.762	22.534	21.592	22.849
	- Memiliki Kartu Identitas Anak	jiwa	-	-	25.246	114.049	143.611
	- Tidak memiliki Kartu Identitas Anak	jiwa	307.440	308.160	311.023	313.347	189.455
15	Persentase Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100
16	Jumlah kematian	kasus	4.092	4.853	4.586	6.164	10.893
17	Jumlah akte kematian yang dikeluarkan	dokumen	4.092	4.853	4.586	6.164	10.893
18	Jumlah pasangan yang memiliki akta nikah	pasangan	61058	75793	135524	153112	172784
19	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)		ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, 2022

Hingga tahun 2021, capaian kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Pati sudah mencapai 100%, sehingga dapat dinyatakan kepemilikan KTP dan kartu keluarga di Kabupaten Pati telah mencapai 100%. Selain itu, kepemilikan kartu identitas anak bagi kelompok usia di bawah 17 tahun juga belum optimal. Hingga tahun 2021, masih terdapat sekitar 189 ribu penduduk yang belum memiliki kartu identitas anak.

Kepemilikan dokumen catatan sipil baru mencapai 97%. Terdapat beberapa penyebab kepemilikan dokumen catatan sipil belum 100%, antara lain kepemilikan akta kelahiran pada beberapa kelompok usia yang belum maksimal. Kepemilikan akta kelahiran pada anak usia di bawah lima tahun baru mencapai 83,55%.

Selanjutnya kepemilikan akta nikah juga belum 100%. Hal ini dikarenakan belum adanya integrasi pencatatan perkawinan dengan Kementerian Agama yang bertugas mencatat perkawinan secara islam.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) selama periode 2017 hingga 2021 menunjukkan peningkatan yang berarti peningkatan pembangunan desa di Kabupaten Pati. Gambaran Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati di tahun 2017 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 59 Pencapaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Desa Membangun	Angka	0,644	0,644	0,676	0.699	0,710
2	Indeks Ketahanan Ekonomi	Angka	0,593	0,593	0,634	0.64	0,647
3	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,717	0,717	0,756	0.764	0.775
4	Indeks Ketahanan Lingkungan	Angka	0,621	0,621	0,638	0.693	0,708
5	Jumlah Desa Mandiri	desa	1	1	2	4	6
6	Jumlah Desa Maju	desa	42	42	71	94	122
7	Jumlah Desa Berkembang	desa	277	277	313	303	273
8	Jumlah Desa Tertinggal	desa	81	81	15	0	0
9	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	desa	0	0	0	0	0
10	Jumlah BumDes Aktif	unit	270	398	401	401	401
11	Jumlah BumDes Bersama Aktif	unit	2	4	6	7	7
12	Posyandu aktif	unit	1.614	1.614	1.614	1605	1605
13	Jumlah PKK Aktif	unit	406	406	406	406	406
14	Jumlah sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	unit	194	221	221	406	406

Sumber: Dispermades Kabupaten Pati, 2022

Tahun 2021, nilai IDM Kabupaten Pati adalah 0,710 meningkat dibandingkan IDM tahun 2020 sebesar 0,699. Peningkatan IDM diikuti oleh peningkatan jumlah desa berkategori mandiri. Tahun 2021, desa mandiri di Kabupaten Pati berjumlah enam (6) lebih tinggi dibandingkan jumlah desa mandiri di tahun 2020 sebanyak empat (4) buah. Peningkatan juga terjadi pada desa maju. Jumlah desa maju di tahun 2021 adalah 122 desa, meningkat dari tahun 2020 dengan jumlah desa maju 94 desa. Selanjutnya, sejak tahun 2020, di Kabupaten Pati tidak lagi ditemukan desa yang berkategori desa tertinggal. IDM merupakan komposit dari tiga komponen, yaitu Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Dari ketiga komponen tersebut. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) memiliki nilai terendah dibandingkan ketiga komponen lainnya. Nilai IKE di tahun 2021 adalah 0,674 meningkat dari IKE tahun 2020, namun peningkatannya lebih kecil dibandingkan ketahanan sosial (IKS) dan ketahanan lingkungan (IKL). Rendahnya nilai IKE diantaranya menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan lembaga perekonomian di desa. Hingga tahun 2021, seluruh desa di Kabupaten Pati telah memiliki BUMDes dan aktif. Dari seluruh BUMDes tersebut lebih dari 50% berada pada kategori Dasar. Hanya 4 BUMDes yang merupakan BUMDes berkembang dan 2 BUMDes yang berkategori maju.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Pati periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase peningkatan keluarga sejahtera	%	68,99	70,31	58,57	43,40	59,66
2	Laju Pertumbuhan Penduduk dari Kelahiran	%	0,56	0,56	0,50	0,54	0,33
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	1,05	1,02	2,1	1,8	1,66
4	Prevalensi KB	angka	82,16	68,51	67,02	68,05	66,27
5	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	11,00	15,87	15,63	11,68	11,99
6	Persentase Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	2,9	2,94	2,83	2,86	0,42
7	Jumlah kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun)	kelahiran	1241	853	110	60	582

Sumber: DinsosP3A & KB Kabupaten Pati, 2022

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, memberikan pengaruh terhadap penurunan kesejahteraan keluarga. Di tahun tersebut, persentase keluarga sejahtera di Kabupaten Pati mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga menjadi capaian yang terendah selama lima tahun terakhir. Tahun 2021, persentase keluarga sejahtera mengalami peningkatan menjadi 59,66%, namun persentase tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan persentase keluarga sejahtera sebelum pandemi Covid-19. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dalam lima tahun terakhir terjadi laju pertumbuhan penduduk menunjukkan fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2019, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan penurunan. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan menjadi 0,54%, namun kembali mengalami penurunan menjadi 0,33. Bahkan, laju pertumbuhan penduduk di tahun tersebut merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir.

Perubahan laju pertumbuhan penduduk selanjutnya berpengaruh terhadap rata-rata jumlah anak per keluarga. Selama lima tahun terakhir, rata-rata jumlah anak per keluarga tertinggi terjadi di tahun 2019 (2,1), sedangkan rata-rata anak terendah berada di tahun 2018 (1,02). Di tahun 2021, rata-rata jumlah anak per keluarga adalah 1,6, relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata anak per keluarga di tahun 2020 (1,8). Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain prevalensi KB dan persentase *unmet need*. Prevalensi KB selama lima tahun terakhir mencapai persentase tertinggi di tahun 2017 sebesar 82,16% dan capaian terendah terjadi di tahun 2021 sebesar 66,27%. Rendahnya prevalensi KB antara lain disebabkan oleh meningkatnya keengganan PUS untuk melakukan KB. Selain itu, juga dipengaruhi oleh layanan KB yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase *unmet need*. Persentase *unmet need* yang cukup tinggi terjadi di tahun 2018 mencapai 15,87%. Sementara itu, tahun 2021, persentase *unmet need* sebesar 11,99%, sedikit lebih tinggi dibandingkan persentase *unmet need* tahun 2020 (11,68%).

8. Perhubungan

Gambaran mengenai layanan urusan perhubungan menunjukkan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Urusan ini memiliki fokus utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat mobilitas

orang dan/atau barang dan jasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berikut ini merupakan capaian kinerja pada urusan perhubungan.

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan difokuskan untuk menurunkan angka rasio pelayanan ruas jalan, dalam pengertian semakin kecil rasio maka pelayanan ruas jalan menjadi lebih baik. Capaian pelayanan ruas jalan pada Tahun 2021 adalah 0,287 atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Capaian target tersebut juga didukung oleh kondisi pandemi Covid19 dimana pergerakan masyarakat dibatasi. Namun titik kemacetan yang belum teratasi pada Tahun 2021 meningkat menjadi 4 titik lokasi. Kemacetan tersebut utamanya berada di sekitar pusat perdagangan/perbelanjaan dengan parkir *on street*, yaitu di depan Pasar Puri dan Depan Swalayan Surya.

Jika dilihat data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan memang mengalami penurunan yang berarti bahwa kapasitas jalan semakin baik, akan tetapi kapasitas jalan yang dihitung termasuk dengan keseluruhan ruas jalan di Kabupaten Pati dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada. Data tersebut didapatkan dari survei beberapa titik pemantauan dan (dimungkinkan) belum menunjukkan rasio pelayanan ruas jalan aktual. Ke depan pengambilan sample titik pemantauan harus semakin ditingkatkan sehingga perhitungan akan semakin reliable untuk seluruh wilayah.

Tabel 2. 61 Gambaran Urusan Perhubungan di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio pelayanan Ruas Jalan	Angka	0,31	0,25	0,33	0,292	0,287
2	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas	Angka	1028	1121	1142	1236	1096
3	Jumlah Kepemilikan kendaraan						
	Roda 4	unit	30.471	38.344	41.718	34.176	71.437
	Roda 2	unit	333.646	509.116	553.918	453.775	365.946
	Jumlah titik kemacetan lalu lintas yang belum teratasi	lokasi	20	18	16	2	4
5	Ketersediaan Rambu Lalu Lintas						
	Rambu Jalan	Unit	2085	2145	2183	2278	2448
	RPPJ	Unit	134	140	136	138	140
	APILL	Unit	30	30	30	30	34
	Guardrail	M	240	240	240	340	340
	Marka Jalan	M2	20504,1	20504,1	22339,9	22501,12	22501,12
6	Jumlah Terminal Tipe C Layak	Unit	3	3	3	3	3
7	Jumlah halte yang melayani angkutan umum dalam trayek (keseluruhan)	Unit	22	22	25	28	30
	Jumlah halte yang melayani angkutan umum dalam trayek yang layak	Unit	20	22	24	24	26
8	Jumlah angkutan Perdesaan	Unit	294	350	346	320	291
9	Jumlah angkutan online						

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Roda 4	unit	0	0	0	400	30
	Roda 2	unit	0	0	0	250	250
10	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	96,71	62,56	60,14	100	93,36
4	Jumlah Moda Angkutan Barang						
	- Jumlah Truk Barang Umum	unit	12886	13354	13839	14416	15017
	- Jumlah Mobil Box	unit	888	921	955	989	1025
	- Jumlah Mobil Peti Kemas	unit	-	-	-	-	-
	- Jumlah Mobil Tangki	unit	14	16	18	18	19
	- Roda 3 (Viar/Tosa)	unit	-	-	-	-	-
5	Jumlah Moda Angkutan Umum						
	- Jumlah Bus	unit	160	157	160	205	187
	- Jumlah Angkutan Kota	unit	94	100	0	0	0
	- Jumlah Angkutan Perdesaan	unit	294	350	346	320	291
	- Jumlah Ojek	unit	200	170	160	157	88
	- Jumlah Ojek Online roda 2	unit	80	150	200	250	300
	- Jumlah Ojek Online roda 4	unit	0	0	80	50	35
	- Jumlah Becak Kayuh	unit	0	0	300	300	150
	- Jumlah Becak Motor	unit	0	0	0	0	0
6	Jumlah Terminal Tipe C Layak	Unit	3	3	3	3	3
	- Jumlah penumpang masuk	orang	343.331	341.832	335.546	215.053	250.043
	- Jumlah penumpang keluar	orang	382.607	376.183	370.972	233.964	263.304
7	Jumlah halte yang melayani angkutan umum dalam trayek.	Unit	22	22	25	28	30
8	Jumlah angkutan kota/perdesaan	Unit	294	350	346	320	291
9	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	96,71	62,56	60,14	100	93,36
10	Jumlah kebutuhan trayek	trayek	12	12	16	16	16
11	Jumlah trayek yang dilayani						
	- Jumlah Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu)	kali	36	36	48	48	48
	- Jumlah Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam	kali	24	24	32	32	32

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	seminggu)						
	- Jumlah Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (< 3 dalam seminggu)	kali	12	12	16	16	16
12	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	3	1	1
13	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1
14	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	3	1	1
15	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	3	3	3	4	4
16	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	9	9	9	9	9
17	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	2	1	2	2	2
18	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	15.546	15.945	16.354	16.774	17.205
19	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	20.481	21.559	22.694	22.215	27.285
20	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	1	1	1	1	1
21	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	2	3
22	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	2	1
23	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	4	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
24	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	3054	3546	3299	3056	2878

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, 2022

Peningkatan pelayanan ruas jalan juga diiringi menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. Kejadian kecelakaan lalu lintas juga dipengaruhi masih kurangnya prasarana keselamatan jalan, utamanya rambu lalu lintas dan masih banyaknya ruas jalan yang belum dilengkapi dengan penerangan jalan meskipun data menunjukkan bahwa ketersediaan rambu lalu lintas meningkat tetapi masih diperlukan penambahan. Hal tersebut terungkap dari masih banyaknya usulan pengadaan rambu, APILL dan lampu penerangan jalan di seluruh wilayah, terutama jalan penghubung antar kecamatan pada musyawarah perencanaan pembangunan setiap tahun. Selain prasarana keselamatan jalan, kejadian kecelakaan juga terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

Dalam hal pengujian kendaraan wajib uji, data menunjukkan bahwa jumlah kendaraan wajib uji mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) sebesar 93,36%. Kondisi tersebut menuntut Dinas Perhubungan untuk meningkatkan volume layanan pengujian kendaraan. Namun demikian, peningkatan volume layanan pengujian kendaraan bermotor masih relatif lebih rendah dibandingkan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan masih perlu meningkatkan volume layanan, dengan meningkatkan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana prasarana pengujian kendaraan. Data kinerja uji kendaraan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Kondisi terminal penumpang tipe C yang ada saat ini, yaitu Terminal Kembangjoyo, Tayu dan Juwana secara umum sudah cukup baik, akan tetapi jika dilihat secara detail pada masing-masing terminal sebenarnya masih terdapat fasilitas yang kondisinya tidak ada atau tidak layak.

Tabel 2. 62 Kondisi Terminal

NO	FASILITAS TERMINAL	KEMBANGJOYO				TAYU				JUWANA			
		A	TA	KONDISI		A	TA	KONDISI		A	TA	KONDISI	
				L	TL			L	TL			L	TL
A.	FASILITAS UTAMA												
1	Jalur Kedatangan Kendaraan	√		√		√		√		√		√	
2	Jalur Keberangkatan Kendaraan	√		√		√		√		√		√	
3	Ruang Tunggu Penumpang	√		√			√			√		√	
4	Tempat Parkir Kendaraan Pengunjung	√		√		√		√		√		√	
5	Tempat Naik Turun Penumpang	√		√		√			√	√		√	
6	Perlengkapan Jalan (Rambu Petunjuk,dll)	√		√		√		√		√		√	
7	Kantor	√		√		√		√		√		√	
8	Loket	√		√		√		√		√		√	
B.	FASILITAS PENDUKUNG												
1	Fasilitas untuk Penyandang Cacat/Ibu Hamil/Menyusui		√				√				√		
2	Pos Kesehatan		√				√				√		
3	Fasilitas Kesehatan		√				√				√		
4	Fasilitas Peribadahan (Mushola)	√		√			√				√		

NO	FASILITAS TERMINAL	KEMBANGJOYO				TAYU				JUWANA			
		A	TA	KONDISI		A	TA	KONDISI		A	TA	KONDISI	
				L	TL			L	TL			L	TL
5	Pos Polisi	√		√			√				√		
6	Alat Pemadam Kebakaran	√					√				√		
7	Fasilitas Umum (Toilet, Rumah Makan/Warung/Ruko/Tempat Istirahat Awak Kendaraan/Fasilitas Kebersihan)	√		√		√			√	√		√	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, 2022

Keterangan: A=Ada; TA=Tidak Ada; L=Layak; TL=Tidak Layak

Data kondisi terminal tersebut menunjukkan bahwa secara umum ketiga terminal telah memiliki fasilitas utama dan sebagian besar dengan kondisi layak. Namun kondisi “layak” tersebut belum bisa dikatakan sebagai fasilitas publik yang “baik” yang dapat menjamin kenyamanan calon penumpang, pengunjung, petugas maupun operator kendaraan. Sehingga masih perlu dilakukan peningkatan fasilitas penunjang yang disediakan pada ketiga terminal penumpang tersebut.

9. Komunikasi dan Informatika

Penerapan e-government menjadi fokus dalam program kegiatan urusan komunikasi dan informatika dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendampingan teknis kepada perangkat daerah dalam pengembangan teknologi informasi dalam penerapan e-government.

Tabel 2. 63 Gambaran Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang Sudah Menerapkan E GOV/ aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	unit	2	1	33	44	49
2	Jumlah WiFi Publik yang disediakan pemerintah.	spot	3	4	5	5	8
3	Jumlah media penyiaran						
	TV	buah	7	10	10	3	3
	radio	siaran	11	11	10	6	6
4	Jumlah Desa yang terlayani internet		401	401	401	401	401
5	Persentase penduduk yang menggunakan internet	%	58,26	56,49	54,73	77,78	77,78
6	Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam		58,26	56,49	54,73	77,78	77,78
7	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	0,14	0,14	0,13	0,35	0,35

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pati, 2022

Penerapan e government didukung oleh sistem aplikasi pemerintahan yang terintegrasi. Hingga Tahun 2021 sistem tersebut sudah didukung oleh 49 perangkat daerah. Informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat didukung dengan

penyampaian informasi dalam website-website pemerintah daerah. Namun updating informasi tersebut masih belum berjalan optimal.

10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Pati periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 64 Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	%	12.6	14.3	13.16	13,83	13,73
2	Jumlah koperasi Aktif	unit	594	332	294	277	278
3	Jumlah koperasi simpan pinjam sehat	unit	12	16	24	35	31
4	Jumlah koperasi serba usaha	unit	529	178	177	175	154
5	Jumlah Usaha Mikro	unit	3.508	3.909	11.769	12.969	13.487
6	Jumlah pengusaha mikro perempuan	orang	1864	2050	4123	743	319

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, 2022

Kinerja urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Pati masih perlu terus ditingkatkan. Kinerja koperasi yang ditunjukkan dengan keaktifannya menunjukkan tren yang terus menurun. Jenis koperasi serba usaha juga mengalami hal serupa. Hal ini diduga disebabkan oleh pengetahuan pengelola koperasi tentang perkoperasian yang masih rendah. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang paling ideal, harus terus didorong menuju koperasi yang mandiri dan memiliki daya saing usaha diantaranya melalui penguatan kelembagaan koperasi berbasis kewirausahaan dan teknologi serta inovasi.

Hal krusial lain yang harus menjadi perhatian perangkat daerah yang mengampu Urusan Koperasi dan UMKM adalah masalah validitas data, khususnya data pelaku UMKM. Hal ini penting untuk membantu efektivitas dalam melakukan intervensi baik melalui fasilitasi, pendampingan, pelatihan ketrampilan maupun pemberian bantuan (teknis maupun permodalan) serta pemetaan kondisi UMKM (termasuk stratifikasi UMKM) di Kabupaten Pati.

11. Penanaman Modal Daerah

Penanaman modal atau Investasi dalam pengertian arus masuk modal dalam sektor riil pada suatu daerah sudah menjadi suatu keniscayaan, mengingat keberadaannya secara empirik membawa dampak positif bagi perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kinerja investasi suatu daerah yang diantaranya direpresentasikan sebagai daya tarik investasi tercermin melalui besaran capaian indeks daya saing daerah yang didalamnya terdapat banyak aspek/unsur pembentuk beserta parameternya.

Guna mengoptimalkan kinerja investasi daerah, perlu dukungan kelembagaan yang kuat seperti jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perijinan, ketersediaan lahan, insentif pajak dan dukungan kondusivitas sosial kemasyarakatan. Selain itu promosi (roadshow) dan keikutsertaan dalam event-event pameran untuk lebih memperkenalkan keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor baik calon investor domestik maupun internasional. Perkembangan investasi di Kabupaten Pati periode 2017-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 65 Perkembangan Investasi di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai investasi berskala nasional	%					
	PMA	US\$ Ribu	2,000	1,500	64,000	330,775	323,134
	PMDN	Rp. (juta)	5,155,015.5	5,238,210.3	5,470,899.9	2.956.253,0	2.979.756,031
2	Jumlah Investor						
	PMA	Investor	2	1	2	1	2
	PMDN	Investor	2,056	2,689	2,394	11.682	9.102
3	Jumlah peminat investasi	investor	2	4	4	2	4
4	IKM Pelayanan Perijinan	Indeks	n.a.	n.a.	3.37	3.5	3.5

Sumber: DPMPTSP, 2022

Sebagaimana terlihat dalam tabel II.82, realisasi investasi sebelum Tahun 2020 relatif meningkat, namun dengan adanya pandemi, realisasi investasi dalam negeri turun cukup signifikan walaupun untuk modal asing realisasinya terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Perkembangan yang lebih baik untuk tahun 2021 realisasi investasi dalam negeri meningkat 0,79% dari tahun 2020 walaupun apabila dilihat dari jumlah investor yang ada menurun 22,08%.

Realisasi investasi yang fluktuatif diantaranya disebabkan oleh belum lengkapnya database/peta potensi investasi Kabupaten Pati, sistem informasi perizinan yang belum terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten, sistem layanan perizinan masih dalam pengembangan dan terus mengalami pembaruan, dan belum optimalnya pelayanan perijinan terutama dalam aspek waktu penyelesaian proses perijinan. Hal ini menandakan bahwa Mall Pelayanan Publik yang mulai beroperasi sejak tanggal 16 Desember 2020 belum bisa memberikan pelayan perijinan secara optimal.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga sebelum pandemi (Tahun 2020) cenderung meningkat, kecuali indikator jumlah organisasi pemuda yang aktif (relatif stagnan). Namun pandemi Tahun 2020 yang menghantam pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat, berdampak pada menurunnya kinerja urusan kepemudaan dan olah raga, kecuali indikator jumlah wirausaha muda yang justru pada masa pandemi ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menjadi gambaran bahwa ditengah situasi yang serba sulit, justru memunculkan ide-ide kreatif dari para pemuda untuk bisa eksis dan bertahan secara ekonomi melalui kegiatan wirausaha. Pada tahun 2021 seluruh indikator urusan kepemudaan dan olahraga kembali meningkat, mengindikasikan bahwa kegiatan masyarakat sudah kembali ke kondisi normal.

Secara lengkap perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pati periode 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 66 Perkembangan Olahraga dan Kepemudaan di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	27	33	26	29	31
2	Jumlah wirausaha muda	orang	557	564	578	588	618

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha	%	n.a.	0.20	0.21	0.20	0.21
4	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabor	15	25	28	8	16
5	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	Orang	461	532	562	250	189
6	Jumlah atlet muda yang dibina	Atlet	2,516	3,386	4,784	518	2,911
7	Jumlah atlet berprestasi	Orang	327	746	655	149	155
8	Jumlah stadion	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: Dinporapar Kabupaten Pati, 2022

Capaian prestasi olah raga tidak hanya ditujukan untuk mengejar kuantitas namun juga kualitas yaitu menysasar pada prestasi nasional bahkan regional ataupun yang internasional, khususnya untuk jangka menengah-panjang berikutnya. Namun demikian ada beberapa kendala yang masih dihadapi

Peran pemuda dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan persentase pemuda yang menjadi wirausaha di Kabupaten Pati relatif stagnan yaitu 0.2%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda lebih senang mencari pekerjaan daripada menciptakan lapangan kerja sendiri. Oleh karena itu, peningkatan jumlah wirausaha bagi pemuda juga harus terus didorong melalui pelatihan, pendampingan usaha, temu usaha maupun jejaring usaha yang lebih luas guna menambah pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan bisnis secara lebih profesional.

13. Statistik

Ketersediaan data dan informasi yang terpercaya adalah kunci keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami permasalahan dan tantangan. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan statistik. Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Statistik dasar dilakukan oleh BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sedangkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Kabupaten Pati (terutama Single Data System dan Open Data) masih belum 100%, meskipun target capaian pada akhir RPJMD 97,5% dan sampai dengan tahun 2021 telah tercapai 74,38%. Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi sudah ada (yaitu data warehouse bernama GageNda, namun kelengkapan data sektoral masih kurang. Data statistik makro untuk level kecamatan juga belum tersedia.

Kebijakan Satu Data Indonesia yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Jaringan Informasi Geospasial (Kebijakan Satu Peta) yang relatif masih baru mengakibatkan belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi maupun pengelolaan satu data. Regulasi pemanfaatan satu data di level kabupaten juga belum tersedia sehingga pemenuhan data masih bersifat rintisan menuju pengelolaan dan pemanfaatan satu data sebenarnya. Selain itu, masih banyaknya data warehouse pada OPD yang membidangi dan masih belum terintegrasi dengan Pati GageNda juga menjadi PR dalam pengelolaan satu data ke depan.

14. Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan persandian merupakan urusan konkuren yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. Urusan persandian telah diselenggarakan di Kabupaten Pati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja urusan persandian terlihat dari Indeks Keamanan Informasi yaitu pada Tahun 2021 sebesar 264 dimana termasuk kategori kurang.

Pada Tahun 2021 perangkat daerah yang sudah menerapkan kebijakan keamanan baru 7 dari 51 perangkat daerah. Salah satu bentuk keamanan informasi adalah penggunaan tanda tangan elektronik (TTE). Sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada OPD agar segera memanfaatkan TTE akan tetapi peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik memang memerlukan waktu serta peningkatan kapasitas SDM penyelenggaranya. Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah hardware dan software keamanan informasi yang dimiliki Kabupaten Pati masih sangat minim.

15. Kebudayaan

Penetapan cagar budaya dan pelestarian budaya menjadi kinerja urusan kebudayaan selama periode 2017 hingga 2021 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 67 Perkembangan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Sat	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah cagar budaya yang sudah ditetapkan	unit	0	0	0	12	4
2	Jumlah cagar budaya yang baru teridentifikasi	unit	0	3	4	3	15
3	Jumlah grup kesenian	Unit	57	80	95	101	118
4	Jumlah event Budaya	%	25	41	39	17	11
5	Jumlah Kelompok Seni Budaya	unit	9	9	10	11	17
6	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	2	5	3	2

Sumber: Disdikbud Kabupaten Pati, 2022

Hingga tahun 2021, terdapat 16 cagar budaya yang telah ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, dimana 12 cagar budaya ditetapkan di tahun 2020 dan empat lainnya ditetapkan di tahun 2021. Sementara itu, peningkatan kinerja identifikasi cagar budaya di tahun 2021 menunjukkan 15 cagar budaya baru yang teridentifikasi. Selanjutnya hingga 2021, terdapat 12 karya budaya yang telah direvitalisasi dan diinventarisasi. Kinerja revitalisasi karya budaya tertinggi terjadi di tahun 2019 sebanyak lima karya budaya. Setelahnya di tahun 2020, jumlah karya budaya yang direvitalisasi mengalami penurunan menjadi 3 karya budaya di tahun 2020 dan 2 karya budaya di tahun 2021. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pati mengakibatkan berkembangnya grup kesenian dan grup budidaya. Hingga di tahun 2021, terdapat 118 grup kesenian dan 17 kelompok seni budaya. Namun demikian, pandemi Covid-19 menyebabkan penyelenggaraan event kebudayaan. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata 35 event budaya dilakukan per tahun, namun setelah pandemi penyelenggaraan event budaya mengalami penurunan menjadi 17 event di tahun 2020 dan 11 event budaya di tahun 2021.

16. Perpustakaan

Kinerja perpustakaan selama periode lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, terlihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan yang juga menunjukkan fluktuasi. Gambaran kinerja perpustakaan di Kabupaten Pati periode 2017 hingga 2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 68 Gambaran Urusan Perpustakaan di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perpustakaan	skor	3.0	3.0	3.22	3.10	3.2
2	Jumlah perpustakaan	Unit	1.512	1.517	1.518	1.518	1.518
3	Persentase perpustakaan yang sudah dibina	%	13,54	18,67	29,66	31,23	23,54
4	Jumlah kunjungan						
	Perpustakaan daerah	Orang	34.520	36.858	39.385	8.022	7.441
	Perpustakaan Digital						
5	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksp	54,143	55,883	56,669	59,523	58.869
6	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	27,768	30,026	30,804	33,219	31,385
7	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/bulan	Orang	2,876	3,072	3,282	669	620
8	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2	4	4	4	2

Sumber: Dinarpusda Kabupaten Pati, 2021

Hingga tahun 2019, IKM layanan perpustakaan menunjukkan peningkatan, namun di masa pandemi Covid-19, kepuasan masyarakat mengalami penurunan. Hal tersebut utamanya disebabkan, pada masa tersebut, perpustakaan daerah tidak memberikan layanan secara langsung, sementara layanan secara digital belum optimal. Namun di tahun 2021, kinerja pelayanan perpustakaan meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh kepuasan masyarakat yang juga meningkat (3,2). Belum optimalnya layanan selama masa pandemi menyebabkan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan Tahun 2020, jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan penurunan hampir mencapai 80% dari jumlah pengunjung di tahun 2019. Penurunan tersebut masih berlangsung di tahun 2021. Jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2021 adalah 7.441 orang, mengalami penurunan sekitar 7,2% dari pengunjung di tahun 2020. Kabupaten Pati memiliki lebih dari 1500 perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah, sekolah, dan pemerintah desa. Namun demikian, pembinaan perpustakaan tersebut relatif belum optimal. Hingga tahun 2020, persentase perpustakaan yang dibina menunjukkan peningkatan, namun di tahun 2021, persentase perpustakaan yang dibina mengalami penurunan menjadi 23,54%.

17. Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan dalam meningkatkan penerapan pengelolaan arsip pola baru di Kabupaten Pati menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir. Hingga tahun 2021, terdapat 42 perangkat daerah atau sekitar 85,71% yang telah menerapkan pengelolaan arsip pola baru. Gambaran urusan kearsipan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 69 Perkembangan Urusan Kearsipan di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip pola baru	unit	4	8	24	33	42
2	Jumlah dokumen/arsip daerah yang telah diduplikasi dalam bentuk informatika	dokumen	52	66	80	683	893
	Persentase	%	1,76	26,92	21,21	22,76	29,76
3	jumlah pengguna dokumen/arsip daerah	pengguna	21	22	66	297	1931
		%	1	4,8	2	3,5	55
4	SDM pengelola kearsipan	Orang	13	13	14	14	13

Sumber: Dinarpusda Kabupaten Pati, 2022

Kinerja digitalisasi dokumen arsip juga menunjukkan peningkatan selama lima tahun terakhir, namun masih relatif rendah sehingga masih perlu ditingkatkan. Hingga tahun 2021, jumlah dokumen arsip yang telah didigitalisasi sebanyak 893 dokumen atau mencakup 29,76% dari total dokumen arsip. Digitalisasi arsip tersebut menjadikan pemenuhan layanan ketersediaan arsip meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengguna arsip daerah yang juga meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021, jumlah pengguna arsip mencapai lebih dari 1,900 pengguna, dimana jumlah tersebut menjadi capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan perikanan merupakan salah satu urusan unggulan Kabupaten Pati, serta termasuk penyangga produksi perikanan di tingkat nasional. Sektor perikanan di Kabupaten Pati cukup lengkap, mulai dari sub sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan sampai produksi garam tersedia disini. Komoditas unggulan perikanan, baik budidaya maupun tangkap sangat tergantung pada alam, sehingga tantangan seperti perubahan iklim/ cuaca yang tidak menentu sangat mempengaruhi produktivitasnya. Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19 yang belum berakhir, terbatasnya pasar, teknologi juga merupakan tantangan tersendiri sektor perikanan tersebut. Perkembangan kinerja urusan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 70 Perkembangan Sektor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	produktivitas perikanan tangkap	ton/kapal/tahun	12,6	9,02	26,83	60,17	46,78
2	Produksi perikanan tangkap	Ton	26,734	23,517	58,233,39	95,208,61	78.182,17
3	Produktivitas perikanan budidaya	ton/ha/tahun	3,92	4,02	16,04	16,11	16,19
4	produksi perikanan budidaya	ton	42,510	43,608	46,140,10	46.576,00	46.649,50

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kapita/tahun	40.28	41.16	42,62*	42,75	44.69**
6	Produktivitas garam	Ton/ha/musim prod	40.5	112.8	120.88	66,62	33,85
7	Produksi garam	Ton	115,639	320,229	350,761	193.307	98.212
8	Saluran tambak (primer)	km	103.6	103.6	103.6	103,6	103,6
9	Saluran tambak (sekunder)	km	206.98	206.98	206.98	206,98	206,98
10	Saluran tambak (tersier)	km	14.1	14.1	14.1	14,1	14,1
11	Jumlah pelanggaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	kasus	12	13	9	6	2
12	Jumlah usaha pengolahan produk perikanan	unit	860	931	1,056	1.133	1.587
13	Ketersediaan bibit ikan	ekor	955,188,055	873,029,300	880,668,425	891.660.500	884.490.171
14	Ketersediaan pakan ikan		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
15	Kebutuhan bibit ikan	ekor	1,074,823,370	1,069,638,760	1,072,673,566	1.077.672.400	980.174.413
16	Kebutuhan pakan ikan	ton	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53.783,85
17	Jumlah pengolah ikan	Orang	n.a.	n.a.	n.a.	4.240	6.625
18	Jumlah benih yang diproduksi BBI	ekor	n.a.	n.a.	n.a.	649.741	1.547.320

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2022.

Produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, hal ini karena kegiatan ini sangat tergantung pada kondisi alam. Pada sub sektor perikanan tangkap, ketersediaan stok ikan di laut, cuaca dan kondisi alat tangkap maupun regulasi cukup berperan. Secara umum, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata sebesar 192% (51.448,17 ton pada tahun 2021) . Sedikit berbeda kondisinya pada produksi perikanan budidaya, walaupun tidak begitu tergantung pada kondisi alam (cuaca), namun tergantung pada kondisi lingkungan. Daya dukung dan daya tampung media budidaya, baik kolam maupun tambak sudah menurun. Namun demikian, produksi perikanan budidaya secara umum masih meningkat walaupun peningkatannya sedikit, sebesar rata-rata 9,74% selama 5 tahun terakhir. Hal yang menjadi perhatian adalah bencana banjir yang bisa mengurangi produksi perikanan budidaya secara signifikan.

Adanya komoditas baru nila salin juga turut menaikkan jumlah produksi perikanan, dimana ikan ini memiliki keunggulan tahan terhadap salinitas cukup tinggi walaupun asalnya adalah ikan air tawar, waktu produksi yang relatif singkat, lebih resisten terhadap penyakit, tidak berbau lumpur, ketersediaan benih, serta harga yang relatif stabil. Peningkatan produksi perikanan ini juga berpengaruh pada tingkat konsumsi ikan, dimana mengalami peningkatan dari 40,28 kg/kapita/tahun pada tahun 2017 menjadi 44,69 kg/kapita/tahun. Selain itu juga meningkatkan jumlah usaha pengolahan produk perikanan dari 860 unit pada tahun 2017 menjadi 1.587 unit pada tahun 2021. Di sisi lain, kegiatan pengawasan perikanan cukup berhasil, terlihat dari jumlah pelanggaran penggunaan alat tangkap yang tidak

sesuai peraturan mengalami penurunan dari 12 kasus pada tahun 2017 menjadi 2 kasus pada tahun 2021.

Produksi garam juga mengalami fluktuasi, dari 115.639 ton pada tahun 2017 menjadi 350.761 ton pada tahun 2019, kemudian menurun produksinya menjadi 918.212 ton pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa produksi garam di Kabupaten Pati sangat tergantung pada kondisi cuaca alam, dimana waktu musim hujan cenderung lebih cepat, yang mengakibatkan proses produksi garam kurang maksimal. Penggunaan teknologi seperti pemakaian geo isolator perlu ditingkatkan, agar diperoleh hasil produksi yang efisien, serta kualitas garam yang cukup baik.

Agar bisa lebih memberikan manfaat dan dampak ganda perekonomian bagi semua pelaku usaha perikanan maupun industri garam, perlu adanya dukungan infrastruktur yang memadai serta penciptaan sistem industri yang menghubungkan antara hulu (usaha nelayan) dan hilir (industri manufakturing) untuk menciptakan rantai nilai (penciptaan nilai tambah) dan rantai pasok (kontinuitas bahan baku) serta daya saing produk ikan dan garam lokal.

2. Pariwisata

Secara geografis, Kabupaten Pati memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang cukup banyak dan beraneka ragam, sehingga hal ini bisa menjadi modal bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Berdasarkan kondisi eksisting hingga Tahun 2019 atau sebelum pandemi, kondisi industri kepariwisataan khususnya terkait kunjungan wisatawan dan manfaat pariwisata terhadap pendapatan daerah secara signifikan selalu meningkat, namun dengan adanya pandemi di Tahun 2020, ke dua indikator tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini mempertegas bukti empiris secara global, bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi korona karena mobilitas dan aktivitas sektor ini sangat dibatasi bahkan dihentikan karena terbukti menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan kasus Covid-19 jika tidak ada pelarangan aktivitas kunjungan wisata. Hal ini yang menjadikan usaha pariwisata mengalami pertumbuhan negatif dan berdampak pada hilangnya sebagian besar kesempatan usaha sektor pendukung pariwisata seperti perhotelan, restoran/rumah makan, biro perjalanan/travel, UMKM pariwisata (usaha souvenir) maupun para pelaku/pemandu wisata itu sendiri.

Tabel 2. 71 Pereembangan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2,017	2,018	2,019	2020	2021
1	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	1.357.254	1.621.400	1.739.500	510.361	422.351
2	PAD sektor pariwisata	Rupiah	2,190,846,208	7,128,352,392	8,351,235,237	6.414.727.180	8.330.755.915
3	Jumlah objek wisata	Objek	18	19	22	26	28
4	Rata-rata lama kunjungan wisata	hari	1	1	1	1	1
5	Jumlah hotel	unit	32	32	33	32	27
6	Jumlah Restoran	unit	1	3	3	39	39
7	Jumlah kerjasama antardaerah di kawasan PAKUDJEMBARA	Dok	1	1	1	1	0

Sumber: Disporapar Kabupaten Pati, 2022.

Destinasi wisata di Kabupaten Pati sebagian besar berupa wisata alam dan religi. Berdasarkan tabel di atas jumlah kunjungan wisata dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, namun terus mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Rata-rata lama kunjungan wisata juga hanya satu hari. Hal ini menunjukkan

bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pati belum berkembang. Destinasi wisata ini belum berkembang secara optimal karena terbatasnya kapasitas sumber daya pelaku usaha pariwisata menyebabkan kunjungan wisata masih didominasi oleh wisatawan lokal. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 turut menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah kunjungan wisata. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha di sektor pariwisata, sarana dan prasarana pendukung pariwisata, serta pemasaran pariwisata.

3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah industri manufaktur dalam perekonomian daerah dan menjadi tumpuan mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan. Ditinjau dari tingkat kesejahteraan para pelaku usaha sektor pertanian Tahun 2017-2018 yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP), ada kecenderungan tetap yaitu pada angka ± 102 dan ada peningkatan pada Tahun 2019 menjadi ± 104 . Namun di Tahun 2020 turun menjadi 101,79. Diduga penurunan ini sebagai dampak dari pandemi yang menyebabkan daya beli masyarakat berkurang dan hal ini berpengaruh terhadap penjualan produk pertanian. Ke depan pemerintah daerah yang direperesentasikan oleh perangkat daerah yang mampu urusan pertanian seyogyanya menyusun suatu kebijakan yang betul-betul efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan petani (tercermin dari nilai NTP yang semakin meningkat). Capaian indikator kinerja lain yang perlu mendapat fokus perhatian ke depan adalah budidaya tanaman padi dan kedelai khususnya terkait luasan tanam dan panennya. Mengacu pada kondisi luasan tanam dan panen tahun 2017, maka luasan tersebut mengalami penyusutan yang cukup besar, sehingga apabila hal ini tidak segera diantisipasi atau dicarikan solusi, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terutama menyangkut sisi *supply* produksi pertanian khususnya padi dan kedelai yang merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi bila dikaitkan dengan upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan secara lebih mandiri.

Sektor pertanian juga menjadi tumpuan bagi penyediaan bahan pangan masyarakat ke depan akan terus mengalami tekanan yang cukup kuat khususnya dalam hal ketersediaan lahan dan juga ancaman bencana alam. Berikut adalah data secara lengkap capaian sektor pertanian Kabupaten Pati Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 72 Gambaran Pertanian Kabupaten Tahun 2017-2021

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	angka	102.75	102.46	104.26	101,79	n.a.
2	Jumlah kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/ perkebunan	klp	605	617	638	643	649
3	Jumlah kelompok tani madya	klp	29	29	36	40	51
4	Luas Tanam Padi	Ha	112,245	104,461	96,671	110.797	104679.6
5	Luas Panen Padi	Ha	109,508	103,754	99,077	105.088	99366.2
6	Luas Tanam Jagung	Ha	28,115	28,776	28,815	29.249	26492.3
7	Luas Panen Jagung	Ha	26,183	28,608	27,639	28.089	27071.8
8	Luas Tanam Kedelai	Ha	3,465	1,728	1,900	2.042	981.4
9	Luas Panen Kedelai	Ha	3,465	1,728	1,900	2.042	981.4
10	Luas Tanam Ubi Kayu	Ha	16,316	15,009	12,563	19.458	17861.0
11	Luas Panen Ubi Kayu	Ha	16,219	15,319	14,230	16.950	16482.9

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
12	Produksi Padi	ton			585.336	620.861	
13	Produksi Jagung	ton			175.448	178.310	
14	Produksi Kedelai	ton			2.559	2.751	
	Produksi Ubi Kayu	ton			563.748	671.500	
	Produksi Bawang Merah	kwintal			396.760	380.254	
	Produksi Cabai	kwintal			14.148	15.582	
	Produksi Jeruk Pamelon	kwintal			124.556	67.220	
12	Produksi Daging	kg	6,364,325	6,396,147	11,719,469	14.532.414	14,532,414
13	Produksi Telur	kg	3,924,538	3,994,161	7,065,884	5.541.917	5,541,917
14	Produksi Susu	liter	229,772	235,563	272,143	213.042	213.04

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pati, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, luasan lahan pertanian tanaman pangan (padi dan kedelai) cenderung terus turun. Perlu adanya regulasi (Perda) yang dapat menjamin keberlangsungan ketersediaan lahan pertanian (LP2B) sehingga potensi penurunan produksi pertanian (tanaman pangan) dapat dihindari.

Upaya peningkatan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan fokus pada komoditas kedelai dan jeruk pamelon harus menjadi perhatian. Kedelai menjadi salah satu komoditas strategis nasional, sehingga upaya memaksimalkan hasil produksi termasuk produktivitasnya menjadi suatu keharusan guna mendukung program nasional. Sedangkan komoditas jeruk pamelon merupakan salah satu produk *ikon daerah* yang memiliki ciri khas dan nilai ekonomi yang cukup tinggi, perlu diupayakan peningkatan produktivitasnya. Tak kalah penting untuk mendongkrak pamor produk *ikon daerah* adalah melalui upaya hilirisasi dalam konteks kemasan produk dan juga pemasaran produk melalui jejaring bisnis maupun digitalisasi serta pendiversifikasian produk.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya lahan padi yang puso setiap tahun. Lahan puso terjadi pada saat musim penghujan karena terjadi genangan dan pada saat musim kemarau karena kekurangan air. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen penggunaan air belum optimal dan belum bisa beradaptasi dengan perubahan iklim.

Kelembagaan petani juga merupakan salah satu permasalahan yang harus segera diatasi. Sampai dengan tahun 2021 jumlah kelompok tani utama hanya 4 kelompok atau 0,15% dari 2617 kelompok yang ada. Sebagian besar petani sudah berusia tua karena minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian rendah diduga menjadi salah satu penyebab kelompok tani sulit untuk berkembang.

4. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor terbesar ketiga kontribusinya terhadap perekonomian daerah bahkan memiliki kecenderungan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam pemasaran produk yang menandai era industri 4.0.

Dalam konteks perdagangan, Pemerintah Kabupaten Pati selaku pemilik pasar daerah menghadapi tekanan persaingan dalam pengelolaan pasar yang saat ini mulai bergeser pada pasar virtual. Harus sudah mulai penerapan *mix management* pasar berbasis konvensional-modern-digital. Pengelolaan pasar (pasar daerah dan pasar desa) konvensional-modern mengacu pada penyediaan layanan pasar (fisik) yang lebih baik dan berkualitas (hyginitas, keamanan dan ketertiban) dalam mendukung roda perekonomian masyarakat harus menjadi perhatian yang

lebih bagi pemerintah daerah, mengingat semakin merebaknya jumlah pasar modern, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi telah merambah wilayah luar kota (kecamatan) dimana wilayah itu merupakan teritori pasar bagi pelaku pedagang kecil dengan latar belakang kondisi sarana prasarana yang sangat terbatas dan tentu kalah bersaing dengan pasar retail modern. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dituntut beradaptasi menuju digitalisasi dengan mendorong dan memberikan fasilitasi/pendampingan bagi pelaku usaha (perdagangan) untuk bisa meleak teknologi informasi agar mereka tetap mampu meningkatkan transaksi dan omset perdagangannya. Perkembangan urusan perdagangan tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 73 Perkembangan Perdagangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar (Rp)	707.92	585.03	655.936	655.671	827.478**
2	Nilai Retribusi Pasar	Rupiah	5,029,969,350	5,588,744,700	6,730,211,499	6.010.398.829	6.867.419.098
3	Jumlah pengusaha yang menggunakan e-commerce	Orang	350	384	415	506	94
4	Jumlah Pasar Tradisional	Unit	21	21	21	20	20
5	Jumlah Pasar Modern	Unit	109	127	133	147	152

Sumber: Disdagperin Kab. Pati, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai perdagangan luar negeri (ekspor) cenderung terus mengalami peningkatan, dan diharapkan peningkatan nilai ekspor ini juga melibatkan produk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) daerah sehingga dapat membantu mendorong minat pelaku UMK yang lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang berorientasi ekspor.

Berkaitan dengan sarana distribusi perdagangan, pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah jumlahnya cenderung tetap dan yang telah memenuhi SNI baru satu unit yaitu Pasar Puri Baru. Sedangkan apabila dilihat dari persebarannya, pasar tersebut hanya berada di sebelas wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut: 7 unit pasar berada di Kecamatan Pati; masing-masing 2 unit di Kecamatan Juwana, Tayu, dan Winong; serta masing-masing 1 unit di Kecamatan Trangkil, Wedarijaksa, Kayen, Gembong, Margorejo, Dukuhseti, dan Margoyoso. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sarana distribusi perdagangan masih rendah dan persebarannya juga belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Beberapa hal yang perlu terus didorong guna meningkatkan kinerja perdagangan daerah adalah penyediaan dan pengelolaan pasar daerah yang mengarah pada manajemen pasar modern dengan karakter pada pemenuhan kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Disamping itu, perlu juga para pedagang baik yang ada di pasar maupun pedagang rumahan difasilitasi untuk menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan usahanya sehingga dapat menjangkau konsumen maupun pelanggan secara lebih luas dan serta mengikuti tren keinginan kosumen yang cenderung berperilaku “praktis dan mudah”.

5. Perindustrian

Kontribusi lapangan usaha industri manufaktur dalam perekonomian daerah menempati urutan pertama diantara 17 lapangan usaha yang ada. Meskipun sebagai kontributor terbesar dalam perekonomian, ada kecenderungan penurunan proporsinya dalam PDRB sebagaimana kondisi lima tahun terakhir. Demikian pula dengan tren pertumbuhannya yang mengalami penurunan dalam kurun waktu yang sama. Hal ini yang sering disebut dengan proses deindustrialisasi. Kondisi deindustrialisasi yang berlarut-larut justru akan mengurangi kemampuan sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja dan upaya menciptakan daya saing daerah.

Pelaku industri skala rumah tangga yang jumlahnya semakin meningkat tiap tahun dan mendominasi dalam lapangan usaha, dapat dijadikan modal bagi Pemerintah Daerah untuk pengembangan sektor hilir skala mikro-kecil dalam meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk khususnya industri yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dengan sektor hulu (pertanian). Mengacu pada upaya menciptakan keterkaitan hulu-hilir sektor usaha, maka jenis industri yang relevan adalah industri berbasis agro (agro-industri). Secara empiris bahwa Kabupaten Pati memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah untuk mendukung sektor industri manufaktur berbasis pertanian. Ditinjau dari kondisi eksisting industri manufaktur yang berkarakter *backward linkage* di Kabupaten Pati adalah industri perikanan (skala kecil, menengah dan besar), industri tepung tapioka dan industri kuliner. Kabupaten Pati masih banyak membutuhkan industri manufaktur skala besar-menengah yang dapat berperan sebagai mitra bisnis pelaku usaha sektor hulu (pertanian) yang saling menguntungkan.

Disamping agroindustri, industri kreatif juga cukup berkembang di daerah ini. Namun karena Tahun 2020 terjadi pandemi sehingga industri kreatif mengalami kontraksi -5,30% di tahun 2020 dan -4,9% di tahun 2021. Pandemi menggerus daya beli masyarakat dan hal ini berdampak pada *demand* masyarakat yang akhirnya memaksa industri untuk menurunkan *supply* produknya.. Industri kreatif sangat erat kaitannya dengan kreativitas dan inovasi, sehingga hal ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dan pembinaan/ pendampingan/pelatihan (termasuk membangun jejaring usaha) dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi, lebih-lebih industri kreatif merupakan jenis industri yang semua pelakunya merupakan pelaku usaha skala mikro (rumah tangga) dan kecil. Kondisi Perkembangan sektor industri Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 74 Perkembangan Sektor Perindustrian di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan produktifitas komoditas unggulan sektor industri	%	5.6	5.8	6	0,46	4
2	Jumlah Pelaku industri skala rumah tangga	unit	3508	3909	3981	3.675	3.646
3	Jumlah Pelaku industri kecil	unit	2273	2476	2547	722	828
4	Jumlah Pelaku industri menengah	unit	NA	NA	109	77	77
5	Jumlah pelaku industri kreatif	unit	329	355	388	334	463
6	Cakupan pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan SDM dan pemasaran	orang	1328	1396	1536	80	80

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
7	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan lapangan usaha industri	persen	6.4	6.5	7.9	1,5	-5,0
8	Pertumbuhan industri kreatif	persen	19,64	7.80	9,30	-5,30	-4,90
9	Pertumbuhan Industri	persen	NA	NA	7.7	8,26	1,72
10	Jumlah industri garam yang telah memenuhi standar	persen	23.03	51.12	84.27	85,71	97,8
11	Jumlah Industri Garam	persen	NA	NA	NA	91	91

Sumber: Disdagperin Kab. Pati, 2022

Poin penting dari urusan perindustrian adalah bagaimana menciptakan keterkaitan industri hulu dengan hilir agar bisa membentuk rantai nilai dan pasok (penciptaan nilai tambah dan kontinuitas pendukung industri) agar memiliki dampak ganda bagi perekonomian daerah serta daya saing produk inudstri manufaktur daerah. Selain itu industri rumah tangga juga harus diberikan fasilitasi dalam hal pemanfaatan teknologi produksi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pangsa pasar dan jejaring/kemitraan bisnis melalui konsep *e-business* baik dalam konteks *business to business* maupun *business to consumer/customer*.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan bagian dari urusan penunjang pemerintahan yang mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati. Sekretariat Daerah tidak lepas dari tugas dan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 2. 75 Gambaran Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai IKM (SKM)	Nilai	3,07	3,26	3,3	3,4	3,4
2	Nilai SAKIP	Nilai		61,94	63,26	65,04	65.04
3	Jumlah kebijakan bidang pemerintahan	unit	2	5	2	6	3
4	Jumlah kebijakan bidang ekonomi pembangunan	unit	11	11	0	4	3
5	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	unit	13	16	13	7	11
6	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga yang disepakati	MoU	1	15	10	38	16
7	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Kasus	0	1	1	1	2
8	Jumlah orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Jumlah	0	2	5	7	8

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
9	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B	Persen	100	100	100	100	100
10	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, 2022

Sekretariat Daerah bertanggung jawab terhadap capaian kinerja indikator kinerja pemerintah daerah yang antara lain ditunjukkan dalam nilai SAKIP dan IKM yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai SAKIP tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pati sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan. Sementara itu peningkatan nilai IKM menunjukkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

Fungsi koordinasi Sekretariat Daerah selama ini masih kurang optimal terutama dalam mengawal capaian indikator kinerja masing-masing urusan yang akan berpengaruh pada capaian indikator kinerja daerah. Pencapaian indikator kinerja utama daerah tidak hanya melibatkan satu OPD saja melainkan juga lintas sektor atau melibatkan beberapa OPD.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu stakeholder pemerintah daerah yang memiliki peran untuk mengawal dan melayani tugas kedewanan/legislatif (secara administratif) dalam konteks menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi. Keberadaannya sangat menentukan kelancaran dan kualitas dari output kelembagaan dewan sebagai partner eksekutif dalam pembangunan daerah. Kebijakan-kebijakan daerah yang menyangkut kepentingan publik harus mendapatkan pengawalan dari wakil rakyat agar tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan bersama. Kinerja Sekretariat DPRD dalam lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 76 Gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase rata-rata kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurma	%	95	95	96	98	97	98
2	Persentase Perda yang disahkan terhadap Propemperda	%	80	80	80	50	35	47.6

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja dewan belum optimal. Persentase Perda yang disahkan terhadap Propemperda dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena waktu yang diperlukan untuk membahas penetapan Perda tidak mencukupi sehingga dilanjutkan di tahun berikutnya. Penjadwalan pembahasan Raperda kurang efektif menjadi salah satu penyebab molornya penetapan Perda.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib. Perencanaan pembangunan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD. Dalam urusan perencanaan, ketersediaan dan akurasi arah pembangunan menjadi fokus utama. Guna memastikan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat perlu dilakukan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini dituntut untuk semakin berkualitas dan kompetitif, baik dalam hal pelayanan publik maupun akuntabilitas berbasis kinerja. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang harus baik dan tepat dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan secara komprehensif. Integrasi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penerapan e-government menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas.

Terkait dengan kehadiran para pemangku kepentingan dalam Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang RKPD pada tahun 2021 dilaksanakan secara daring dan luring sehingga dengan keterbatasan sistem informasi kehadiran masyarakat mungkin saja berkurang. Akan tetapi dengan tersedianya akses baik melalui zoom meeting maupun grup whatsapp, dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, akses masyarakat untuk menyampaikan usulan juga tidak berkurang bahkan bisa dikatakan meningkat. Namun demikian, pertemuan musrenbang secara tatap muka tetaplah lebih baik jika dibandingkan dengan yang dilakukan secara virtual dikarenakan sering kali keterbatasan sistem informasi yang tidak dapat mengartikulasikan konteks substansi yang dimusyawarahkan.

Tabel 2. 77 Gambaran Urusan Perencanaan Tahun 2017-2021

No	Indikator	sat	Capaian Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Persentase sinkronisasi dokumen RPJMD dan RKPD	%	89,18	97,92	93,26	69
2	Persentase sinkronisasi dokumen RKPD dan APBD	%	100	98,94	99,38	100,75
3	Persentase hasil Musrenbang yang tercantum dalam RKPD		90	95	65	21
4	Rata-rata kehadiran Musrenbang kecamatan	orang	300	358	Dilaksanakan secara virtual	Dilaksanakan secara virtual

2. Sumber : Bappeda Kabupaten Pati, 2022

Kesesuaian antara dokumen perencanaan tahunan dengan jangka menengah yaitu RPJMD pada Tahun 2021 terbilang rendah. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Capaian persentase hasil musrenbang yang tercantum dalam RKPD juga masih rendah karena kurangnya informasi terkait prioritas pembangunan daerah yang tersampaikan kepada masyarakat khususnya peserta musrenbang kecamatan.

Sehingga banyak usulan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan. Selain itu adanya refocussing anggaran juga menyebabkan beberapa kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat tidak bisa terealisasi.

2. Keuangan

Aspek keuangan sebagaimana tercermin dalam struktur APBD menyangkut penerimaan/pendapatan daerah dan pengeluaran/belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan belanja daerah dialokasikan kedalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kualitas pengelolaan keuangan maupun aset daerah sangat ditentukan oleh beberapa indikator sebagaimana tercermin dalam tabel capaian berikut.

Tabel 2. 78 Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Sat	Capain Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		A	A	B	A	A
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	%	16,22	13,77	12,82	13,96*	14,26*
3	Pertumbuhan Penerimaan Pajak	%	14.41	12.05	12.68	5.23*	10,99*
4	Belanja Langsung terhadap Total Belanja	%	38.3	37.83	37.61	34,83	32,76
5	Rasio Defisit (Realisasi) terhadap Pendapatan (Realisasi)	%	4.38	0.28	-1.11	-2,91	3,73
6	Rasio Defisit (Realisasi) terhadap SILPA	%	68	2.76	-12.46	-38,51	100,51*
7	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	n.a.
8	Persentase SILPA terhadap APBD	%	6.2	10.19	6.99	3,69	7,73*
9	Persentase belanja pendidikan	%	31.89	29.75	29.61	30,11	32,18*
10	Persentase belanja kesehatan	%	17.49	15.39	16.55	15,66	16,76*
11	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	% : %	38:62	37:63	38:62	35:65	33:67

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir (2017-2020) kinerja keuangan daerah Kabupaten Pati mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan diharapkan pada Tahun 2021 akan memperoleh predikat yang sama. Kondisi PAD sebagai wujud dari kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah, secara proporsional belum menunjukkan tren peningkatan. Demikian pula pertumbuhannya yang cenderung fluktuatif atau tidak memiliki pola pertumbuhan yang progresif sebagaimana tercermin dalam penerimaan pajak daerah. Proporsi belanja langsung yang merupakan cermin pengalokasian belanja yang berkualitas, masih dibawah 50% meskipun pemenuhan mandatory spending telah melampaui sebagaimana amanat undang-undang (pendidikan dan kesehatan).

Ke depan pengelolaan daerah diharapkan dapat diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif (untuk pos belanja daerah) dan melakukan inovasi dalam menggenjot penerimaan daerah khususnya PAD guna meningkatkan kemandirian

fiscal daerah. Beberapa langkah yang bisa dijalankan untuk meningkatkan PAD antara lain melalui optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, baik dalam konteks intensifikasi wajib pajak dan potensi wajib pajak serta pemanfaatan teknologi informasi secara lebih komprehensif guna lebih mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Pengelolaan aset daerah melalui pemutakhiran data dan pemanfaatan aset untuk keperluan produktif baik yang dikelola sendiri maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Guna mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah, khususnya dari aspek penerimaan asli daerah (PAD) yang utamanya bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan/aset daerah yang dipisahkan, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan nya melalui intensifikasi, pemanfaatan teknologi informasi (e-pajak, e-retribusi) secara lebih komprehensif, pengelolaan aset/kekayaan daerah (BUMD dan aset tidak bergerak) secara lebih produktif dan profesional baik melalui kemitraan maupun swakelola.

Terwujudnya peningkatan PAD dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah yang merupakan suatu keniscayaan bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kesehatan fiskal daerah. Daerah juga dituntut untuk berinovasi dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kapasitas APBD, khususnya dalam pembiayaan infrastruktur daerah (proyek yang bersifat *cost recovery*). Alternatif sumber pembiayaan non APBD dapat berupa pengelolaan dana CSR, penerbitan obligasi daerah, kerjasama pemerintah-swasta (*public-private partnership*), maupun melalui hutang daerah baik kepada lembaga perbankan maupun non perbankan.

3. Kepegawaian

Selama periode 2017 hingga 2021 terdapat perubahan komposisi ASN dan non ASN di Kabupaten Pati sebagaimana ditampilk pada tabel berikut.

Tabel 2. 79 Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		25	32	28	29	30
2	Jumlah jabatan administrasi (Eselon III) pada instansi pemerintah		185	186	185	189	186
3	Jumlah pemangku jabatan pengawas (Eselon IV)		614	560	550	554	547
4	Jumlah pelaksana (fungsional umum)		2.675	2.406	2.277	2.020	1.742
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (PNS)		7.763	5.967	7.508	6.993	6.792
a	Guru		5.790	5.452	5.450	4.948	4.688
b	Tenaga Kesehatan		1.554	158	1.713	1.719	1.788
c	Non guru dan tenaga kesehatan		419	357	345	326	316
6	Jumlah Pegawai (komulatif)						
a	PNS		11.294	10.608	10.551	9.750	9.408
b	PPPK		0	0	0	0	493
c	THL (biaya APBD)		1.218	1.469	1.583	1.679	2.038
d	Pegawai Non PNS (biaya BLUD)		584	632	624	621	621
7	Jumlah Perekrutan Pegawai		774	367	1.341	1.045	579
a	PNS		274	5	534	496	2

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
b	PPPK		0	0	498	0	0
c	THL (biaya APBD)		255	115	98	360	25
d	Pegawai Non PNS (biaya BLUD)		85	48	0	0	0
e	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan		160	199	211	189	552

Sumber : BKPP Kabupaten Pati Tahun 2022

Selama periode 2017 hingga 2021 jumlah pegawai di Kabupaten Pati mengalami fluktuasi. Hingga tahun 2020, jumlah pegawai di Kabupaten Pati mengalami penurunan dan berjumlah 12.050 pegawai di tahun 2020. Di tahun 2021, terjadi peningkatan pegawai sekitar 4% menjadi 12.560 pegawai. Pegawai di Kabupaten Pati didominasi oleh PNS. Jumlah PNS selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hingga tahun 2021, PNS di Kabupaten Pati berjumlah 9.408 pegawai atau mencakup sekitar 74,9% dari total pegawai di Kabupaten Pati. Selain PNS, struktur pegawai di Kabupaten Pati juga terdiri dari P3K, THL (dengan biaya APBD) dan Pegawai Non PNS (biaya BLUD). THL (dengan biaya APBD) merupakan kelompok pegawai nonPNS dengan jumlah yang cukup tinggi dan menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hingga tahun 2021, jumlah THL (dengan biaya APBD) mencapai 2.038 pegawai atau mencakup sekitar 16,23% dari total pegawai pemerintah di Kabupaten Pati.

Berdasarkan jenis jabatannya, sekitar 68% ASN di Kabupaten Pati merupakan fungsional tertentu. Selama lima tahun terakhir, jumlah fungsional tertentu di Kabupaten Pati mengalami penurunan. Tahun 2021, ASN fungsional tertentu di Kabupaten Pati berjumlah 4.688 ASN. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% adalah guru dan 26% merupakan tenaga kesehatan. Selain jabatan fungsional tertentu, Struktur kepegawaian di Kabupaten Pati juga memiliki proporsi yang cukup besar untuk fungsional umum. Selama periode lima tahun terakhir, jumlah fungsional umum terus mengalami penurunan. Hingga tahun 2021, jumlah fungsional umum adalah 1.788 pegawai, mencakup sekitar 17,6% dari total ASN di tahun tersebut.

Kinerja urusan kepegawaian dapat dilihat dari perubahan indeks profesionalitas ASN. Selama periode 2017 hingga 2021, indeks profesionalitas Kabupaten Pati menunjukkan fluktuasi sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2. 80 Perkembangan Urusan Kepegawaian di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77.4	80.53	79.89	65.35	32,01
2	Indeks ASN yang memenuhi kompetensi	%	73	80.2	79.57	78.5	88,73
3	Indeks kesenjangan tunjangan dalam jabatan yang sama	%	0.46	1.76	1.79	1.79	1,79
4	Indeks kedisiplinan	%	99.9	99.6	99.55	99.62	99,52
5	Pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti	kasus	n.a	n.a	47	37	45
	Pelanggaran ringan	Kasus	n.a	n.a	22	15	31
	Pelanggaran sedang	Kasus	n.a	n.a	3	4	7
	Pelanggaran berat	kasus	n.a	n.a	22	18	7
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	99.9	99	99.55	99.62	99.52

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
6	(IKM) pelayanan Kepegawaian	Angka	3.25	2.95	3.136	3.24	3,24

Sumber : BKPP Kabupaten Pati Tahun 2022

Mulai di tahun 2019, Indeks profesionalitas ASN mengalami penurunan. Bahkan, tahun 2021, nilai indeks profesionalitas ASN mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan indeks profesionalitas ASN di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan tahun 2021 terdapat perubahan cara penghitungan indeks profesionalitas ASN dan terdapat komponen yang belum dicantumkan dalam penghitungan. Berdasarkan pembentuk indeks profesionalitas ASN, beberapa aspek yang membutuhkan perbaikan antara lain peningkatan kapasitas ASN berdasarkan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Selain itu, penegakan disiplin juga perlu ditingkatkan. Jumlah pelanggaran disiplin pegawai selama tiga tahun relatif redah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai. Namun jika dilihat dari trennya, menunjukkan peningkatan di tahun 2021. Dilihat dari jenisnya, pelanggaran disiplin didominasi oleh pelanggaran ringan, namun pelanggaran sedang menunjukkan tren peningkatan selama tiga tahun terakhir.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk mengisi kesenjangan kompetensi pada ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Gambaran keikutsertaan ASN Kabupaten Pati dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 81 Perkembangan Urusan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat (Tahunan)	Org					
	- Diklat Kepemimpinan Tk. II	Org	-	3	2	3	
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Org	8	10	9	10	
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Org	16	40	30	11	6
	- Diklat Fungsional	Org	12	92	68	2	80
	- Diklat Teknis	Org	134	456	336	272	322
2	Jumlah ASN yang sudah mengikuti Diklat (komulatif)	Org	513	549	499	328	266
	- Diklat Kepemimpinan Tk. II	Org	17	19	18	16	17
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Org	156	173	169	78	63
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Org	340	357	312	234	186
	- Diklat Fungsional	Org	6,134	4,575	6,250	6,555	6,681
	- Diklat Teknis	Org	1,951	1,741	1,584	1,586	1,401
3	Jumlah pejabat yang belum mengikuti Diklat	Org	311	224	264	444	513
	- Diklat Kepemimpinan Tk. II	Org	8	13	10	13	15
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Org	29	13	16	111	121
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Org	274	198	238	320	377
4	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan		-	263	445	98	495
5	Jumlah CPNS yang lulus Diklat Pra Jabatan		-	263	445	98	495

Sumber : BKPP Kabupaten Pati Tahun 2022

Secara komulatif, jumlah ASN yang mengikuti diklat menunjukkan fluktuasi. Jumlah ASN yang mengikuti diklat tertinggi terjadi di tahun 2019, sementara jumlah terendah terjadi di tahun 2017. Tahun 2021, jumlah ASN yang mengikuti diklat adalah 408 ASN, meningkat dari tahun 2020 dengan jumlah 298 ASN. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara umum dapat dibedakan menjadi diklat wajib dan dan diklat teknis. Diklat wajib terdiri dari diklat kepemimpinan dan diklat fungsional. Dapat dinyatakan bahwa hampir seluruh fungsional khusus telah mengikuti diklat fungsional karena kelulusan diklat tersebut menjadi prasyarat untuk menjadi fungsional khusus. Berkaitan dengan diklat kepemimpinan, masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural. Hingga tahun 2021, terdapat 15 pejabat eselon 2 atau (50%) yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II. Jumlah pejabat eselon 3 yang belum mengikuti diklat kepemimpinan berjumlah 121 atau sekitar 68% dari total pejabat eselon 3, sedangkan jumlah pejabat eselon IV yang belum mengikuti diklat kepemimpinan adalah 186 atau sekitar 68,9 atau sekitar 68,9% dari total pejabat eselon IV.

5. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan terutama dari indikator persentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah. Data menunjukkan bahwa dari target tahun 2020 sebesar 38% baru tercapai 30%. Hal tersebut terutama disebabkan dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid19, dimana kegiatan-kegiatan kajian yang dibutuhkan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya.

Urusan penelitian dan pengembangan juga ditujukan untuk mendorong pengembangan inovasi daerah. Inovasi dalam hal ini merujuk kepada inovasi di masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian, penerapan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat belu optimal. Permasalahan lain adalah implementasi hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan belum optimal dilaksanakan. Oleh karena itu pada tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan penelitian yang didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Selain itu juga masih terus diperlukan penguatan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Kinerja inspektorat daerah sampai dengan tahun 2020 cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil temuan baik oleh BPK RI, Inspektorat Daerah Provinsi maupun Kabupaten telah ditindaklanjuti seluruhnya. Gambaran kinerja inspektorat daerah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 82 Gambaran Kinerja Inspektorat Daerah di Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Sat.	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Maturitas SPIP	level	2 (2,535)	3 (3,218)	3(3,218)	3(3,608)	2
2	Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan	level	level 3 dengan	level 3 dengan	level 3 dengan	level 3 dengan	level 3 dengan

No	Indikator	Sat.	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	Intern Pemerintah (APIP)		catatan	catatan	catatan	catatan	catatan
3	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti (%)	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (laporan)	Dok	192	192	192	216	216
5	Jumlah laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	Dok	192	192	192	216	216
6	Persentase tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/ teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (%)	%	100	100	100	100	100
7	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah Provinsi	%	100	100	100	100	100
8	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah Kabupaten	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah kerugian Negara yang dikembalikan	Rp.	448,517,897	416,634,921	180,935,587	93,373,546.55	50,862,298.00
10	Indeks Reformasi Birokrasi		62.5	69.15	61.89	62.02	n.a
11	Jumlah PD yang telah menerapkan kebijakan dan SOP pengendalian Internal	OPD	0	5	10	15	20
12	Jumlah PD yang mendokumentasikan pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten	OPD	0	5	10	15	20
13	Jumlah PD yang melaksanakan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik.	OPD	0	5	10	15	20

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pati, 2022

Kinerja pengawasan menunjukkan fluktuasi. Hingga tahun 2020, tingkat maturitas menunjukkan peningkatan hingga mencapai level 3 di tahun tersebut. Namun demikian, di tahun 2021, tingkat maturitas SPIP mengalami penurunan hingga kembali menjadi level 2. Belum optimalnya pengawasan selanjutnya berdampak terhadap indeks Reformasi Birokrasi (RB) yang menunjukkan penurunan. Tahun 2020, indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Pati adalah 66,63, dimana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan capaian indeks reformasi birokrasi di tahun 2018 (69,15). Tahun 2020, indeks reformasi biorkasi menunjukkan nilai 62.02, meningkat dari Indeks RB di tahun 2019. Namun demikian, capaian Indeks RB di tahun 2020 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Permasalahan lain dalam urusan pengawasan adalah belum seluruh perangkat daerah melaksanakan pengendalian internal. Hingga tahun 2021, masih terdapat 29 perangkat daerah

yang belum melaksanakan pengendalian internal. Selanjutnya terdapat kinerja pengawasan yang patut mendapatkan apresiasi berkaitan dengan kerugian negara yang dikembalikan. Selama periode lima tahun, jumlah kerugian negara yang dikembalikan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

g. Urusan Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari jumlah organisasi yang terdaftar sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 83 Capaian Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar	unit	55	83	93	107	186
	- Bidang Keagamaan	Unit	55	81	91	105	182
	- Bidang Kepemudaan	Unit	0	2	2	2	4
	- Lain-lain	unit	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesbangpol Kab. Pati, 2022

Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terdaftar menunjukkan peningkatan. Hingga tahun 2021, jumlah Ormas yang terdaftar adalah 186 unit, meningkat sekitar 7,4% dari jumlah Ormas terdaftar di tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan bidangnya, hampir seluruh Ormas (182 unit) merupakan Ormas keagamaan dan hanya empat (4) unit Ormas yang merupakan Ormas Kepemudaan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pembahasan daya saing daerah pada bagian ini sangat terkait dengan bagian sebelumnya yang telah menjelaskan indikator dan capaian pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek pelayanan umum serta terkait dengan daya saing Kabupaten Pati. Selanjutnya, bagian ini akan fokus pada 4 (empat) aspek daya saing daerah, yaitu: (1) kemampuan ekonomi daerah; (2) fasilitas wilayah/infrastruktur; (3) iklim berinvestasi; dan (4) sumber daya manusia.

Jika merujuk pada Laporan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021, Aspek Daya Saing Daerah berisi mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Pati yang meliputi 4 (empat) aspek) yaitu: (1) Faktor Penguat/Enabling Environment yang didalamnya memuat unsur kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian; (2) Sumber Daya Manusia yang dipengaruhi unsur kesehatan, pendidikan dan ketrampilan; (3) Pasar/market yang memuat unsur efisiensi pasar, ketenagakerjaan, akses keuangan dan ukuran pasar; serta (4) Ekosistem inovasi yang memuat unsur dinamika bisnis, kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi.

Aspek Ekosistem Inovasi di Kabupaten Pati merupakan nilai aspek yang paling unggul sebesar 4,1981, dengan sektor Kesiapan Tekologi memiliki nilai tertinggi. Hal ini terbukti dengan Predikat Kabupaten Pati sebagai Kabupaten Sangat Inovatif yang tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020 dengan skor Indeks sebesar 2,736. Aspek Pasar/Market menempati peringkat kedua setelah aspek ekosistem inovasi dengan nilai 3,5833. Dimana pilar ketenagakerjaan menduduki peringkat tertinggi yakni 4,1667. Indeks Pembangunan Gender menunjukkan skor tertinggi yakni 5,000. Aspek Penguat/ Enabling Environmet memiliki nilai 3.443 menempati peringkat ketiga. Smart City adalah konsep tata

kelola kota yang disusun secara cerdas untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat, melalui pengelolaan sumberdaya dan komunitas yang ada yang kemudian diwujudkan dalam strategi penyelesaian masalah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan situasi dan kondisi kota yang sejahtera dan nyaman. Pilar kelembagaan yang merupakan salah satu faktor penguat dimana dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pati memperoleh skor 3,5570 dengan status Kinerja Sangat Tinggi.

Aspek Sumber Daya Manusia/ Human Capital menempati posisi terendah dengan skor 3,0625. Hal ini ditandai dengan Pilar kesehatan dan keterampilan yang memiliki nilai rendah yakni 3,000. Hal ini antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah kasus kematian neonatal, kematian bayi, kematian balita, terjadi peningkatan kasus gizi buruk dan peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS.

Pendukung aspek-aspek andalan daerah berupa pilar-pilar daya saing daerah yang memiliki nilai lebih dari rata-rata, antara lain: Pilar Kesiapan Teknologi, Pilar Dinamika Bisnis, Pilar Kelembagaan dan Pilar Ketenagakerjaan. Pilar yang mempunyai peringkat paling tinggi adalah Pilar Kesiapan Teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase masyarakat pengguna HP/telepon/Smartphone, yakni sebesar 78.52%. Segala aspek yang dilakukan saat ini sangat memerlukan kesiapan teknologi. Dari jumlah sebesar ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, apalagi untuk tahun 2020 di masa pandemi ini diperlukan penjualan secara online untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Pilar tertinggi kedua adalah Pilar Dinamika Bisnis, yakni sebesar 4,500. Dimana komponen penyusunan yang berasal dari Dimensi Regulasi, terdiri dari 4 indikator yang masing-masing bernilai 5,000. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersedia dengan sangat baik sehingga dimensi kewirausahaan dapat tumbuh dan berkembang. Kebijakan regulasi insentif pajak, pelayanan dan durasi perijinan sangat mendukung kewirausahaan. Pilar Kelembagaan memiliki nilai tertinggi ketiga, yakni 4,300 dimana selain Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional yang menunjukkan skor 3,5570 dengan predikat Sangat Tinggi, juga dari indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati sebesar 62,02 dengan kategori B.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pandemi COVID-19 Tahun 2020 yang masih terus berlangsung sampai saat ini membawa implikasi atau dampak yang sangat hebat, termasuk mengakibatkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi. Sebelum pandemi, Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ekonominya mampu tumbuh rata-rata diatas 5%, sedangkan pada Tahun 2020, terkontraksi -1,15%, meskipun pada Tahun 2021 sudah kembali positif di angka 3,38. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 3,69%) dan provinsi (3,32%) kondisi Kabupaten Pati tidak berbeda jauh.

Jika dilihat dari lapangan usaha yang paling besar memberikan kontribusi pada PDRB, lapangan usaha industri pengolahan (manufaktur) memberikan kontribusi terbesar sebesar 26,69%, pertanian (dalam arti luas) sebesar 25,59%, perdagangan dan reparasi sebesar 14,19%, konstruksi sebesar 7,76% serta berbagai macam jasa dan lainnya yang berkontribusi kurang dari 5%. Hal demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Pati sedang mengalami transformasi ekonomi menuju sektor tersier (jasa) yang meliputi perdagangan, jasa konstruksi dan berbagai bidang jasa lainnya, meskipun berdasarkan besaran kontribusinya, terbesar masih berada di sektor manufaktur dan pertanian (dalam arti luas). Selanjutnya jika dilihat dari PDRB (ADHB), terus mengalami peningkatan dari Rp 27,38 juta pada Tahun 2016 menjadi 34, 18 pada Tahun 2019 dan kemudian

mengalami penurunan hampir Rp 2 juta pada saat terjadi pandemi pada Tahun 2020 dan kembali meningkat di Tahun 2021. Lebih jauh lagi, jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Pati tetap lebih tinggi kecuali pada Tahun 2020 yang terkoreksi cukup dalam hingga -5,97%. Profil makro ekonomi Kabupaten Pati tersebut masih didukung dengan tingkat inflasi selama kurun waktu 2017-2021 yang cenderung menurun, meskipun pada Tahun 2021 kembali naik, kemungkinan karena meningkatnya konsumsi masyarakat karena pandemic yang semakin membaik.

Dari sisi kemiskinan, selama periode 2017-2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Pati cenderung meningkat, termasuk setelah terjadinya pandemi Covid 19 pada Tahun 2020, garis kemiskinan tetap meningkat rata-rata sebesar 4%, merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Selanjutnya di tahun 2020 dan tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pati mengalami peningkatan utamanya karena Pandemi Covid-19, menjadi sekitar 128,74 ribu jiwa yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Secara proporsi, perbandingan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan populasi penduduk di tahun 2021 adalah 10,21%, masih lebih baik jika dibandingkan dengan proporsi yang sama di tingkat provinsi dan sedikit lebih tinggi dari nasional.

Tahun 2021, IPM Kabupaten Pati adalah 72,28, sedikit lebih baik dari provinsi dan hamper sama dengan nasional, dengan UHH sebesar 76,27, RLS 12,94, sedikit lebih baik dari provinsi dan hamper sama dengan nasional. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pati tahun 2021 adalah 4,6, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,74%.

Dari semua indikator yang terkait dengan kemampuan ekonomi, dapat dikatakan bahwa sebagian besar indikator menunjukkan bahwa capaian pembangunan Kabupaten Pati pada aspek ini relatif lebih baik jika dibandingkan dengan terutama provinsi dan kabupaten sekitarnya.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dalam pembangunan daerah dijabarkan dalam urusan pekerjaan umum (dan penataan ruang) dan perhubungan. Infrastruktur wilayah terkait dengan komponen: kapasitas air baku, kondisi daerah irigasi (DI), kondisi jalan dan jembatan, dan rasio tingkat pelayanan ruas jalan. Data menunjukkan bahwa seluruh komponen kondisinya meningkat pada Tahun 2021 sehingga secara keseluruhan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 82,87, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 83,53%.

Sementara itu, jika dilihat lebih dalam lagi terdapat beberapa fasilitas yang mengalami penurunan, yaitu: penurunan kapasitas air baku untuk irigasi, dikarenakan menurunnya kondisi sumber air baku permukaan (khususnya pendangkalan bendung-bendung akibat sedimentasi yang sangat tinggi); kapasitas irigasi dikarenakan luas daerah irigasi di Kabupaten Pati sangat luas, dengan sebaran luasan daerah irigasi yang berbeda-beda, mayoritas DI dengan luasan kurang dari 100 Ha, dalam hal masih kurangnya ketersediaan air baku dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Sementara itu, meskipun data menunjukkan bahwa jalan dalam kondisi baik terus meningkat dalam lima tahun terakhir akan tetapi tingkat kerusakan jalan setiap tahunnya sekitar 21% atau 175,85 km. Tingkat kerusakan jalan tersebut terutama masih banyaknya genangan pada musim penghujan yang juga berkaitan dengan masih kurangnya drainase jalan yang dibangun, yaitu baru sepanjang 20% jalan kabupaten yang dilengkapi drainase.

Terkait dengan fasilitas wilayah yang mendukung transportasi orang maupun barang, kinerja urusan perhubungan difokuskan untuk menurunkan angka rasio pelayanan ruas jalan dengan capaian indikator pelayanan ruas jalan sebesar 0,29, yang bermakna perbaikan kualitas pelayanan ruas jalan di Kabupaten Pati. Selanjutnya peningkatan layanan luas jalan juga diikuti dengan penurunan titik kemacetan yang cukup signifikan. Tahun 2021, titik kemacetan di Kabupaten Pati tersisa 2 buah jumlah 17 buah di tahun sebelumnya, dimana titik kemacetan tersebut berada di sekitar kawasan perdagangan/perbelanjaan. Terkait dengan layanan angkutan umum, faktor muat rata-rata sangat rendah, yaitu 23,6% yang menunjukkan bahwa kemauan masyarakat menggunakan transportasi umum sangat rendah dan beralih menggunakan kendaraan pribadi (utamanya sepeda motor). Akan tetapi, sejak tahun 2020, di Kabupaten Pati sudah tersedia layanan angkutan online. Dalam hal kondisi terminal menunjukkan bahwa secara umum seluruh terminal telah memiliki fasilitas utama dan sebagian besar dengan kondisi layak meskipun kondisi “layak” tersebut belum bisa dikatakan sebagai fasilitas publik yang “baik” yang dapat menjamin kenyamanan calon penumpang, pengunjung, petugas maupun operator kendaraan. Pada aspek ini peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah masih perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Guna mengoptimalkan kinerja investasi daerah, perlu dukungan kelembagaan yang kuat seperti jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perijinan, ketersediaan lahan, insentif pajak dan dukungan sosial kemasyarakatan serta promosi (roadshow) dan keikutsertaan dalam event-event pameran untuk lebih memperkenalkan keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor baik calon investor domestik maupun internasional.

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat, termasuk para investor, sejak tahun 2020 telah diwujudkan integrasi pelayanan perijinan baik perijinan usaha maupun pelayanan administrasi/dokumen sosial dalam bentuk Mall Pelayanan Publik yang menyediakan 110 layanan publik dari 20 instansi baik pemerintah maupun BUMN. Berbagai even promosi baik tingkat regional, nasional dan internasional juga diikuti oleh Kabupaten Pati.

Dalam hal kondusivitas wilayah yang dapat mencerminkan kepastian hukum, terkait dengan aspek Gangguan Keamanan dan Ketertiban dengan komponen pembentuknya adalah Penanganan Penyakit masyarakat, Penanganan Kriminalitas, dan Penanganan Pelanggaran K3. Pada tahun 2020, persentase penanganan gangguan keamanan di Kabupaten Pati sebesar 99,48%, meningkat signifikan dari 70,25% pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan kondisi wilayah yang semakin kondusif.

Dalam hal reformasi birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020 sebesar 62,02, meningkat dari Tahun 2019 sebesar 61,89 (data 2021 belum tersedia). Selama periode 2016-2020, evaluasi SAKIP Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan yang menunjukkan peningkatan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Pati. Tahun 2020, Kabupaten Pati mendapatkan nilai 65,04 untuk evaluasi SAKIP, meningkat dari evaluasi SAKIP tahun 2019 sebesar 63,26. Sementara itu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perangkat daerah yang menyediakan pelayanan pada Tahun 2021 sebesar 3,4 meningkat dari capaian Tahun 2020 sebesar 3,295 dengan kepuasan yang tertinggi terhadap pelayanan publik di bidang investasi dengan nilai 87,57.

Jika dilihat dari kinerja investasi, sebelum terjadi pandemi, peningkatan nilai investasi baik PMA maupun PMDN sangat signifikan pada Tahun 2019 sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan jumlah peminat investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pati

masih ada dan upaya untuk membangun iklim investasi yang baik masih terus menerus dilakukan.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek ini terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk usia sekolah menunjukkan angka yang cukup baik utamanya peningkatan yang signifikan pada pendidikan usia dini. Dalam hal angka putus sekolah Tahun 2021 pun data menunjukkan sangat kecil, yaitu sebesar 2% pada SD dan 13% SMP dengan 100% siswa melanjutkan ke SMP. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD sederajat dan juga SMP sederajat di tahun 2021 menunjukkan persentase 100%. Dengan 75% SD berakreditasi A dan 63,04% SMP memiliki akreditasi A. Data-data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan fasilitas yang tersedia sudah cukup baik.

Indikator aspek kesehatan yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang kesejahteraan sosial adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). Seluruh indikator mengalami peningkatan pada Tahun 2021, akan tetapi jika melihat tren dalam kurun 2017 sd. 2021 seluruh indikator mengalami penurunan yang cukup signifikan. Indikator lain untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pati dapat dilihat dari Indeks Keluarga Sehat (IKS) dimana pada tahun 2020 adalah 0,28, meningkat dari nilai IKS tahun 2019 (0,268) namun masih jauh dari nilai minimum IKS level sehat sebesar 0,600.

2.2. Ringkasan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan 2017–2022

Untuk melakukan interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pati dalam RPJMD, digunakan kategori sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mendasarkan pada tingkatan range capaian, sebagai berikut.

Tabel 2. 84 Kriteria Penilaian Kinerja menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kabupaten Pati berdasar data tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 85 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD berdasar Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Pertumbuhan PDRB	Persen	5.6 - 6.0	5.54	5.67	5.71	5.86	-1.16	3.38	60.36	Rendah
	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian	Persen	3.75	3.74	2.59	2.77	4.08	2.2	-0.20	-5.33	Sangat Rendah
	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Persen	6	5.8	7.24	7.9	7.06	-3.58	7.12	118.67	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perindustrian	Persen	5.9	5.4	5.01	4.72	4.77	0.34	3.42	57.97	Rendah
	Laju Inflasi	Persen	3 - 5	3 - 5	3.51	2.77	2.51	1.24	1.59	53	Rendah
	PDRB per kapita	Rupiah	41,073,749	38,298,427	29,511,000	31,837,000	34,187,000	34,223,000	45,570,727	110.95	Sangat Tinggi
	Indeks Gini	Indeks	0.29	0.3	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	93.10	Sangat Tinggi
	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Persen			20.14	19.03	21.48	18.69	n.a.	n.a.	
	IPM	Angka	73	72.21	70.12	70,71	71.35	71.77	72.28	99.01	Sangat Tinggi
	Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 25 tahun	Tahun	7.13	7.08	7.08	7,18	7.19	7.44	7.48	104.91	Sangat Tinggi
	Harapan lama sekolah	Tahun	12.22	12.17	12.29	12,3	12.41	12.65	12.94	105.89	Sangat Tinggi
	Angka melek huruf	Angka	98.67	97.5	99.35	99,72	99.74	99.75	97.51	98.82	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Persentase pertumbuhan pengunjung perpustakaan	Persen	6.73	6.72	7.77	6.77	6.85	1.37	6.23	92.57	Sangat Tinggi
	Usia Harapan Hidup	Tahun	76	76	75.8	75,93	76.04	76.22	76.27	100.36	Sangat Tinggi
	Angka kematian ibu	Angka	73	75	85.86	66.07	45.00	85.00	132.73	18.18	Sangat Rendah
	Angka kematian bayi	Angka	7.8	8	8.82	10.21	8.50	9.18	6.89	111.67	Sangat Tinggi
	Indek Keluarga Sehat	Indeks	0.6	0.5	0.25	0.23	0.268	0.28	0.31	51.67	Rendah
	Persentase peningkatan keluarga sejahtera	Persen	55	55	51.59	69.54	58.57	42.66	96.38	175.24	Sangat Tinggi
	IPG	Rasio	93	93	91.98	91,50	91.60	91.50	92.21	99.15	Sangat Tinggi
	IDG	Rasio	70	70	67.96	66.55	66.99	66.69	n.a.	n.a.	
	Penurunan kesenjangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan	Rasio	0,96	0.94	0.88	0.86	0.86	0.86	0.89	92.26	Sangat Tinggi
	Penurunan kesenjangan Usia Harapan Hidup laki-laki dan perempuan	Rasio	1.020	1.025	1.05	1.05	1.05	1.05	1.051	103.08	Sangat Tinggi
	Penurunan kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja yang terserap di	Rasio	1.015	1.02	0.72	0.71	0.67	0.73	n.a.	n.a.	

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	lapangan kerja										
	Tingkat Kemiskinan	Persen	9.51	9.51	11.38	9,9	9.46	10.08	10.21	92.64	Sangat Tinggi
	TPT	Persen	3.01	3.19	3.83	3.57	3.64	4.74	4.6	47.18	Sangat Rendah
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	69.00	68.85	66.83	66.78	66.08	63.85	68.99	99.99	Sangat Tinggi
	Indek Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.685 - 0.700	0.684	0.644	0.644	0.676	0.699	0.71	101.43	Sangat Tinggi
	Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Air Bersih	Persen	78.03	77.39	74.36	75.2	71.86	85.81	85.15	109.12	Sangat Tinggi
	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0.444	0.533	0.888	0.497	0.257	0.235	0.12	172.97	Sangat Tinggi
	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Sosial	Persen	3.43	3.45	1.25	6.55	5.25	7.97	5.49	39.94	Sangat Rendah
	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	11	12	23.65	25.00	26.84	21.18	25.62	-32.91	Sangat Rendah
	Skor PPH	Angka	90	89	86.26	88.8	87	88.6	87	96.67	Sangat Tinggi
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
	Indek Reformasi birokrasi	Indek	65	64.5	62.5	69.15	61.89	62.02	n.a.	n.a.	
	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.5	3.45	3.075	3.075	3.29	3.295	3.4	97.14	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Nilai LKJiP	Nilai	68	66	52.83	61.94	63.26	65.04	65.04	95.65	Sangat Tinggi
	Persentase kinerja dewan yang dipublikasikan	Persen	100	100	100	94.56	95	99.71	98.79	98.79	Sangat Tinggi
	Persentase Pengelolaan Arsip Pola Baru	Persen	100	82.1	8	16.21	47.06	64.7	82.1	82.1	Tinggi
	Persentase realisasi capaian RPJMD	Persen	80	77.7	69.23	85.71	92.86	64.29	60.32	75.40	Sedang
	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persen	85	84	97	82	101	103.4	111.79	131.52	Sangat Tinggi
	catatan sipil	Persen	86	85	41	83	87.51	91.25	96.04	111.67	Sangat Tinggi
	Persentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah	Persen	42.25	40	40	35,20	53.3	30	33	78.11	Tinggi
	Persentase ketepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang	Persen	61.14	56.14	68.63	81.97	81.82	96.43	92.79	151.77	Sangat Tinggi
	Indek Profesionalisme ASN	Indek	83.4	83.4	77.4	80.53	79.89	65.35	32.01	38.38	Sangat Rendah
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a	n.a.	
	Persentase OPD yang sudah menerapkan E GOV/aplikasi	Persen	100	85.51	21.37	35.17	37	50.98	95.92	95.92	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	pemerintahan yang terintegrasi										
	Tingkat maturitas SPIP	Level	4=4,0	Level 3	Level 2 = 2,535	3.218	3.218	3.608	2	50	Sangat Rendah
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3 = 3,608	level 3 dengan catatan	level 3 dengan catatan	level 3 dengan catatan	level 3 dengan catatan	100	Sangat Tinggi
	Proporsi PAD terhadap APBD (PAD / APBD)	Persen	15	14.58	16.22	13.77	12.82	13.96	14.82	98.8	Sangat Tinggi
	Nilai PDRB ADHK (= 000.000)	Juta rupiah	35,772,352.95	33,875,334.23	27,612,445.94	29,189,879.34	30,900,203.93	30,545,614.27	33,795,096.47	94.47	Sangat Tinggi
	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/orang	69.53	67.2	59.02	63	68.22	71.28	68.786	98.93	Sangat Tinggi
	Persentase penyerapan tenaga kerja	Persen	67	66	40.32	61.77	88.16	76.45	98.51	147.03	Sangat Tinggi
	Pertumbuhan UMK yang aktif berproduksi	Persen	13	13	12.6	14.3	13.16	13.83	13.73	105.62	Sangat Tinggi
	Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat	Persen	7	6	4.53	7.92	5.41	7.88	6.98	99.71	Sangat Tinggi
	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Sosial	Persen	75	69.14	90.80	73.99	76.56	93.75	99.48	132.64	Sangat Tinggi
	Angka Penyakit Masyarakat Tertangani	Angka	5	6	0.77	0.58	0.55	4.55	0.42	191.56	Sangat Tinggi
	Angka Kriminalitas	Angka	1.51	1.54	1.7	1.55	1.11	0.55	1.44	104.64	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	yang Tertangani										
	Persentase penanganan pelanggaran K3	Persen	87	77	97.6	94.05	88	98	100	114.94	Sangat Tinggi
	Tingkat pelestarian nilai seni dan budaya	Persen	85	78.48	40	61.66	66.67	72.73	72.73	85.56	Tinggi
	NTP	Indeks	103.1	103.05	102.36	102.46	104.26	101.79	n.a.	n.a.	
	Pertumbuhan investasi daerah (%)	Persen	2	1.9	1.33	1.47	6.02	-0.476	0.5	25	Sangat Rendah
	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor pertanian	Persen	1.25	1	-0.08	5.64	-4.82	1	-3.88	-310.4	Sangat Rendah
	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri	Persen	8	7	5.10	5.8	6	0.46	5	62.5	Rendah
	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan	Persen	5.43	4.08	193.19	27.51	85.47	3.09	-9.79	-180.29	Sangat Rendah
	Pertumbuhan kunjungan wisata	Persen	8	8	-1.70	19.46	7.28	-70.66	-17.24	-215.5	Sangat Rendah
	Pertumbuhan industri kreatif daerah	Persen	8	7	19.64	7.80	9.30	-5.30	4.90	61.25	Rendah
	Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan	Persen	78.59	76.3	76.33	81.72	82.91	83.53	82.87	105.45	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Kapasitas air baku daerah	Persen	88.37	86.26	85.05	93,95	83.38	85.07	86.50	97.88	Sangat Tinggi
	Daerah irigasi (DI) dalam kondisi baik	Persen	87	85	80.82	85,37	83.13	87.12	87.09	100.10	Sangat Tinggi
	Persentase jalan kondisi baik	Persen	77	74	64.25	70,71	73.44	75.87	77.70	100.91	Sangat Tinggi
	Persentase jembatan kondisi baik	Persen	80	79	75.21	76,86	79.34	79.67	73.13	91.41	Sangat Tinggi
	Rasio tingkat pelayanan ruas jalan	Persen	0.285	0.29	0.31	0.25	0.33	0.292	0.287	99.30	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69.01	64.38	53.37	51.2	54.69	52.62	52.35	75.86	Sedang
	Indek Kualitas Udara	Indeks	95	90	81.55	95.53	78.83	76.33	76.46	80.48	Tinggi
	Indek Kualitas Air	Indeks	52.35	51.25	47.6	26.33	44.4	32.86	35.33	67.49	Sedang
	Indek tutupan lahan	Indeks	62	55	36.56	36.6	44.31	48.44	36.99	59.66	Rendah
	Penurunan Indeks Risiko Bencana	Indeks	144	144	169	171	171	171	169.07	82.59	Tinggi
	Indek Kapasitas Daerah Dalam Penanganan Bencana	Indeks	55	52	40	42	46	49	52	94.55	Sangat Tinggi
III	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	Pendidikan										
1	APK PAUD	%	81.32	77.67	63.5	86.24	88.22	88.24	89.26	109.76	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
2	Persentase PAUD yang bisa melaksanakan kurikulum sesuai standar	%	95.50	95	67	67	100	100	100	104.71	Sangat Tinggi
3	Angka kelulusan SD/MI/SDLB	%	99.92	99.92	98.5	100	99.87	100	100	100.08	Sangat Tinggi
4	Rata-rata nilai ujian nasional (UN)SD/MI/SDLB	Angka	78.97	76.97	73.52	69.7	75.98	n.a.	-		
5	Angka Kelulusan SMP/MTs./SMPLB	Angka	99.95	99.9	99.69	99.72	99.9	100	99.97	100.02	Sangat Tinggi
6	Rata-rata nilai ujian nasional (UN) SMP/MTs./ SMPLB	Angka	85	75	50.54	49.79	54.02	n.a.	-		
7	Persentase ruang belajar dalam kondisi baik										
	SD	%	80	60	61.8	61.14	74.9	75.13	75.62	94.53	Sangat Tinggi
	SMP	%	85	65	77.1	76.7	84.51	84.17	84.18	99.04	Sangat Tinggi
8	Persentase kelulusan kejar Paket A/B/C dan kursus	%	93.65	93	93.46	89.36	99	98.80	100.00	106.78	Sangat Tinggi
9	Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi S1 PG PAUD	%	100	100	58.6	58.95	72.64	73.48	70.4	70.40	Sedang
10	Persentase tenaga pendidik S1/D4	%	92.30	90.05	94.1	83.62	89.47	92.64	93.36	101.15	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
1 1 1	persentase Pelayanan pendidikan berbasis aplikasi	%	95	91	94.12	98.92	100	100	100	105.26	Sangat Tinggi
1 2 2	Persentase siswa SD yang dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran disiplin atau norma sosial	%	0.00	0	0.004	0.00004	0	0	0	100	Sangat Tinggi
1 3 3	Persentase siswa SMP yang dikeluarkan dari sekolah karena pelanggaran disiplin atau norma sosial	%	0.03	0.04	0.06	0.0006	0	0	0	200	Sangat Tinggi
Kesehatan											
1	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	97	90	90	Tinggi
2	Persentase penanganan KLB <24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	%	100	100	26.12	100	100	40.93	46.8	46.8	Sangat Rendah
4	Persentase pengawasan sarana distribusi makanan sehat di swalayan/toko makanan dan sekolah	%	100	100	70	76.02	76.02	52	52	52	Rendah

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
5	Persentase pengawasan sarana distribusi obat yang aman di apotek, toko obat, instalasi farmasi klinik dan instalasi farmasi rumah sakit	%	100	85	50	41.32	57.9	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Cakupan IRT yang menerapkan CPPB-IRT	%	45	43	30	28.49	30.2	100	45	100	Sangat Tinggi
7	Persentase PHBS RT Sehat Paripurna	%	72	70	72	65.56	85.6	86.1	87.2	121.11	Sangat Tinggi
8	Peningkatan strata posyandu mandiri	%	23.7	22.6	19.6	23.76	22.7	36	41.95	177.00	Sangat Tinggi
9	Prevalensi Gizi Buruk	%	0.74	0.76	0.82	0.98	0.16	0.48	0.25	166.22	Sangat Tinggi
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	13	69.37	69.37	Sedang
11	Prevalensi Ibu Hamil KEK	%	7.2	8	9.8	9.7	9.2	8.7	8.2	86.11	Tinggi
12	Prevalensi Ibu Hamil Anemi	%	16.5	16.8	11.3	11.9	7	6.3	8.8	146.67	Sangat Tinggi
13	Persentase Peningkatan Rumah Sehat	%	70	69	66	66.78	68.55	68.8	69.8	99.71	Sangat Tinggi
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV	%	100	100	100	100	75.1	87.9	100	100.00	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
15	Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	%	100	100	100	75.09	61.9	54.2	55.15	55.15	Rendah
16	Case Fatality Rate Demam Berdarah	%	<2	<2	<2	<2	<2	<2	1.85	100.00	Sangat Tinggi
17	Persentase FKTP terakreditasi	%	50	45	65.9	36.71	100	100	100	200.00	Sangat Tinggi
18	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	99.49	39.5	39.50	Sangat Rendah
19	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	2.7	3	3.6	3.6	3.6	7.22	6.9	-55.56	Sangat Rendah
20	Persentase puskesmas serta jaringannya sesuai standart	%	41.37	34.48	3.4	3.4	34.5	90	36.14	87.36	Tinggi
21	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	%	100	100	79.7	95.11	100	100	84	83.79	Tinggi
22	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	95.4	88.2	88.20	Tinggi
23	Cakupan Pelayanan pada usia lanjut	%	100	100	46,07	50.13	100	54.62	74	74.26	Sedang
24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	%	100	100	95.1	96 ,74	94	86.41	92	92.17	Sangat Tinggi
25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan	%	100	100	100	99, 99	100	92.4	99.96	99.96	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	%	100	100	99.3	98,55	99	92	99	99.10	Sangat Tinggi
27	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	61.61	25	17.27	99.92	99.92	Sangat Tinggi
28	Cakupan Pelayanan Penderita DM	%	100	100	100	38.86	100	56.03	79	78.66	Tinggi
29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	100	64.69	72	71.75	Sedang
30	Persentase ODGJB Pasung	kasus	16	17	21	18	30	9	34	-12.50	Sangat Rendah
31	Pertumbuhan pendapatan BLUD Puskesmas	%	0.93	0.92	0.6	3.37	0.90	-17	-2.00	-215.05	Sangat Rendah
32	persentase sarana dan prasarana sesuai dengan standar RS Tipe B	%	100	98	94	95	95	95	92.18	92.18	Sangat Tinggi
33	Persentase pertumbuhan pendapatan BLUD RSUD RAA Soewondo Pati	%	10.88	9.60	12.03	5.00	4.90	4.90	-11.23	-103.22	Sangat Rendah
34	Prosentase sarana dan prasarana sesuai standar RS kelas C	%	90	81	44.8	53.4	76.0	81.0	80.0	88.89	Tinggi
35	pertumbuhan pendapatan BLUD RSUD Kayen	%	10.88	9.6	22.75	5.94	8.97	-8.56	4.42	40.63	Sangat Rendah

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase panjang Jalan lokal primer (Kabupaten) yang ditingkatkan	%	26.79	22.73	15.25	20.80	24.14	21.12	29.52	110.19	Sangat Tinggi
2	Persentase panjang Jalan lokal sekunder (Poros Desa) yang ditingkatkan	%	15.86	15	9.98	13.61	13.00	14.14	15.60	98.36	Sangat Tinggi
3	Persentase panjang jalan baru	%	100	0	0	0	0	0	0	0.00	Sangat Rendah
4	Persentase jembatan rusak yang dibangun kembali	%	28	21.79	6.67	8.33	13.79	16.09	21.79	77.82	Tinggi
5	Persentase Drainase/ gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	80	79	0.78	17.01	20.15	21.10	81.08	101.35	Sangat Tinggi
6	Persentase Terbangunnya Turap/Talud/ Bronjong	%	2.30	1.8	1.04	0.59	0.94	1.04	1.11	48.26	Sangat Rendah
7	Terpeliharanya rutin jalan dan jembatan	%	17.40	3.89	1.93	2.76	3.20	4.33	1.99	11.44	Sangat Rendah
8	Persentase terpeliharanya Talud, bronjong	%	0.969	0.162	0.179	0.226	0.240	0.200	0.14	14.45	Sangat Rendah
9	Persentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan dan jembatan	%	100	75	-	0	50	50	90	90.00	Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
10	Prosentase Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	65	64	100	80	92.86	78.57	92.86	142.86	Sangat Tinggi
11	Persentase Daerah yang terlayani PJU	%	60.80	56.8	46.13	53.28	54.08	54.50	54.66	89.90	Tinggi
12	Persentase jaringan irigasi rusak yang tertangani	%	23	20	22.63	12.23	15.29	18.35	21.41	93.09	Sangat Tinggi
13	Persentase sungai yang dinormalisasi	%	45	40	17.37	38	39.03	43.77	47.80	106.22	Sangat Tinggi
14	Persentase Tersedianya air Baku	%	5.83	1.37	-	0.55	1.17	1.25	1.25	21.44	Sangat Rendah
15	Prosentas Kinerja Pengolahan Air Minum dan air Limbah	%	78.03	77.39	74.8	75.86	71.86	86.46	90.65	116.17	Sangat Tinggi
16	Terdapatnya Perda Tentang Perencanaan tata ruang	%	100	100	0	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	77.29	74.29	68.63	73.53	73.53	99.86	97.73	126.45	Sangat Tinggi
18	Tercapainya Pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kab. Pati	%	100	100	100	100	100	100	92.86	92.86	Sangat Tinggi
19	Persentase Rekomendasi Baru	%	27	24	20.27	6.61	13.89	17.87	22.65	83.89	Tinggi
20	Persentase sampah perkotaan yang	%	46	44	40.41	36.30	42.75	55.95	78.12	169.83	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	tertangani										
2 1	Persentase Ruang Terbuka Publik di Perkotaan	%	24.50	21	3.35	33.10	33.16	17.64	3.39	13.84	Sangat Rendah
2 2	Persentase Pembangunan Gedung Pemerintahan	%	30	6	3.6	5.4	3.4	4.0	2.0	6.80	Sangat Rendah
	Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase Rumah layak huni yang dibangun	%	13.755	10.818	1.743	2.072	5.057	6.350	8.870	64.49	Rendah
2	Persentase peningkatan lingkungan kumuh yang ditangani	%	100	75	-	0	25	50	84	84.00	Tinggi
3	Persentase permukiman yang tertata	%	99.556	99.467	99.112	99.5	99.74	99.76	99.879	100.32	Sangat Tinggi
4	Persentase perbaikan rumah korban bencana alam atau sosial	%	100	100	-	0	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
	Ketentraman dan Ketertiban Umum										
1	Persentase unjuk rasa/ kegiatan insidental yang tertib	%	98.00	97	100	88.40	92.00	96.00	100.00	102.04	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
2	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	%	98.00	97	80	61.34	92.27	98.00	100.00	102.04	Sangat Tinggi
3	Persentase Personil Linmas yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	%	57.00	55	49	80.5	88	71	73	128.07	Sangat Tinggi
4	persentase sarana pemadam kebakaran	%	0.00085	0.00080	0.00470	0.0005	0.00057	0.00057	0.00059	69.41	Sedang
5	Rasio SDM pemadam kebakaran	Angka	5.75	5.75	3.43	3.00	0.16	3.80	6.20	107.83	Sangat Tinggi
6	Persentase bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran	%	23	20	14	15	10	10	20	86.96	Tinggi
10	Persentase desa yang memiliki perdes tentang penanggulangan bencana	%	5.66	4.67	1.5	1.995	2.95	3.44	5.42	95.76	Sangat Tinggi
11	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana	%	5.66	4.67	1.5	1.995	2.95	3.44	5.42	95.76	Sangat Tinggi
12	Persentase desa yang memiliki forum pengurangan risiko bencana	%	5.66	4.67	1.5	1.995	2.95	3.44	5.42	95.76	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
1 3	SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat kabupaten	dokumen	7	7	3	4	4	4	4	57.14	Rendah
1 4	Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	Sangat Tinggi
Sosial											
1	Persentase PMKS yang ditangani	%	3.45	1.67	8.6	8.6	4.02	7.57	8.21	237.97	Sangat Tinggi
2	Persentase PMKS yang direhabilitasi	%	0.45	0.4	0.36	0.36	0.06	0.002	0.07	15.56	Sangat Rendah
3	Persentase penyandang cacat dan trauma yang tertangani	%	1.87	1.86	1.82	1.82	0.36	0.765	2.27	121.39	Sangat Tinggi
4	Persentase eks-penyandang penyakit sosial yang tertangani	%	0.0075	0.007	100	100	0.005	0.198	100	1333333.3 3	Sangat Tinggi
5	Persentase kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	2.6	2.4	0.005	0.005	2.14	2.14	0.069	2.65	Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Tenaga Kerja											
1	Prosentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi	%	7	6	14	22.92	79.45	0	0	0	Sangat Rendah
2	Prosentase penempatan tenaga kerja	%	82.8	81.13	56.58	86.34	50.46	28.7	60.7	73.31	Sedang

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
3	Prosentase PPTKIS yang kredibel	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Prosentase perusahaan yang menerapkan dan melaksanakan sarana hubungan industrial	%	100	95	75.17	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Persentase OPD yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Anak	%	61	60	55.77	55.77	60	75	100	163.93	Sangat Tinggi
2	Persentase Lembaga Perempuan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan anak	%	92	91.5	88.65	88.65	45.5	52	92	100.00	Sangat Tinggi
3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
4	Persentase perempuan di level pengambil kebijakan pada lembaga pemerintah dan DPRD										
	Pemerintah	%	22.5	22	20,29	20.29	22.5	22.5	56.07	249.20	Sangat Tinggi
	DPRD	%	38.00	38	16	16	16	16	16	42.11	Sangat Rendah
	Pangan										
1	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat										
	Pemerintah	ton	180	160	0	100	140	89	89	49.44	Sangat Rendah
	Masyarakat	ton	70	65	31.46	146.18	55	60	62.75	89.64	Tinggi
2	Persentase penanganan rawan pangan	%	80	77	30.9	95.4	52	106	58	72.11	Sedang
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	75	70	100	100	98	80	100	133.33	Sangat Tinggi
	Pertanahan										
1	Prosentase Ketepatan Ruang sesuai dengan Fungsinya	%	100	100	100	100	100	98	100	100	Sangat Tinggi
2	Prosentase konflik pertanahan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	80	100	100	Sangat Tinggi
3	Prosentase informasi Pertanahan yang baik	%	100	100	100	100	100	0	28.57	28.57	Sangat Rendah

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Lingkungan Hidup										
1	Peningkatan prosentase tonase sampah yang diolah secara 3R	%	2.1	1.91	1.44	0.89	2.53	17.5	1.76	83.81	Tinggi
2	persentase kelompok pengelola sampah aktif	%	100	100	90	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Persentase kasus lingkungan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase perusahaan yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5	persentase bertambahnya kawasan resapan air	%	1.12	0.9	0	0.22	0.45	0.67	1.12	100.00	Sangat Tinggi
6	Persentase desa/ kelurahan sadar lingkungan	%	1.73	1.48	0.49	0.74	0.99	1.23	1.48	85.55	Tinggi
7	Prosentase tersedianya data lingkungan yang aktual	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Persentase kecamatan yang menjadi titik pantau kualitas udara	%	100	90.48	19.5	38.10	57.14	76.19	90.48	90.48	Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
9	Persentase sungai yang menjadi titik pantau analisis kualitas air	%	100	89.47	15.79	31.58	73.68	28.57	89.47	89.47	Tinggi
10	Persentase biogas aktif	%	96.60	96.2	92.9	98.00	95.70	98.33	96.20	99.59	Sangat Tinggi
11	Persentase RTH	%	45	44	43	43	44	44	44	97.78	Sangat Tinggi
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	persentase permohonan layanan adminduk yang terlayani sesuai SOP	%	85	84	100	81	82	84	100	118	Sangat Tinggi
2	persentase permohonan layanan capil yang terlayani sesuai SOP	%	86	84	100	82	83	84	97	113	Sangat Tinggi
3	Persentase data kependudukan yang ter-update	%	75	70	20	20	100	100	100	133	Sangat Tinggi
4	jumlah inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil	unit	5	4	1	2	3	4	1	20	Sangat Rendah
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Prosentase desa yang berhasil mengembangkan potensinya	%	83	76	14.7	59	14.96	100	100	120	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
2	Pertumbuhan pendayagunaan Alat TTG	%	40	39	33.3	33	33.33	43.33	19.76	49	Sangat Rendah
3	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	98	87.5	95	99.75	100	100	100	Sangat Tinggi
4	prosentase BUMDes yang mampu meningkatkan omzet	%	21.4	21.2	20.5	20.5	33.41	33.41	46.13	216	Sangat Tinggi
5	prosentase BUMDes Bersama yang mampu meningkatkan omzet	%	100	90	76	76	75	85.71	85.71	86	Tinggi
6	prosentase swadaya masyarakat dalam membangun desa bidang pembangunan desa	%	17	13	3.9	7	5	0.5	14.99	88	Tinggi
7	prosentase swadaya masyarakat dalam membangun desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa	%	11.70	9.4	3.2	5.9	13.66	9.62	7.55	65	Rendah
8	prosentase fasilitas desa dalam kondisi baik	%	75	71	40.3	45	69.7	72.73	84.85	113	Sangat Tinggi
9	prosentase kelompok BP-SPAMS yang melaksanakan pengelolaan PAMSIMAS berkelanjutan	%	100	52.2	0	10	11.2	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
10	prosentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID)	%	100	100	71.1	75	100	100	100	100	Sangat Tinggi
11	prosentase kesesuaian APBDes dengan RKPDes	%	100	100	0	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
12	prosentase peran serta perempuan yang aktif dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa	%	100	100	0	100	94.56	94.56	100	100	Sangat Tinggi
Keluarga Berencana											
1	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	%	83.25	83	80.74	80.74	67.09	68.05	66.28	79.62	Tinggi
2	Cakupan PUS yang istrinya berusia <20 th	%	2.50	2.65	2.84	2.84	2.83	0.072	0.42	183.20	Sangat Tinggi
3	Penurunan Unmeet Need	%	6	7	11	11	15.63	11.68	12.04	-0.67	Sangat Rendah
4	Jumlah UPPKS yang aktif	klp	797	795	699	699	790	271	444	55.71	Rendah
5	Jumlah PIK Remaja yang aktif	klp	40	37	33	33	44	30	40	100	Sangat Tinggi
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita yang berKB	%	86	85.75	75.89	75.89	58.57	42.66	97.75	114	Sangat Tinggi
7	Persentase Kelompok BKB yang aktif	%	51.50	51	49.41	49.41	51	35.34	100	194	Sangat Tinggi
Perhubungan											

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	persentase terminal dalam kondisi layak	%	100	95	57.77	68.98	71.66	79.41	97.22	97.22	Sangat Tinggi
2	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	90	89	85.7	85.70	85.70	88.00	91.67	101.86	Sangat Tinggi
3	Persentase fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	100	96	80	84.04	87.25	92.00	97.60	97.60	Sangat Tinggi
4	Persentase tingkat operasi kendaraan angkutan umum	%	90	88	78.6	78.60	72.13	80.00	87.92	97.69	Sangat Tinggi
5	Persentase penanganan titik kemacetan pada saat jam sibuk	%	90	88	78	78	78	83	89	98.78	Sangat Tinggi
6	persentase ketersediaan halte yang layak	%	68	66	55	55	63.64	72.73	78.79	115.87	Sangat Tinggi
7	persentase ketersediaan terminal	%	100	83	50	50	50	50	67	66.70	Sedang
8	Persentase ketersediaan rambu lalu lintas jalan	%	82	80	70	72.49	74.73	77.50	84.10	102.56	Sangat Tinggi
9	Persentase pelanggaran LLAJ	%	16	17	20	20	19	14	16.9	94.38	Sangat Tinggi
	Informatika										
1	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan aplikasi terintegrasi	%	75.85	65.51	17.1	27	37	50.98	95.92	126	Sangat Tinggi
	Koperasi dan UMKM										

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	%	85	80	62	6	7.93	40.25	43.60	51	Rendah
2	Peningkatan jumlah KUB/Klaster usaha mikro	%	51	12	5	11	14.29	13.04	13.33	26	Sangat Rendah
3	Proporsi KUB/Klaster usaha mikro yang mampu menjalin kemitraan	%	80	20	7	71	13.33	5.56	21.74	27	Sangat Rendah
4	Persentase peningkatan manajemen koperasi	%	45	37	32	46	98.22	35.73	34.33	76	Sedang
5	Persentase koperasi yang berkinerja baik	%	100	20	1	24	31.28	20.35	16.38	16	Sangat Rendah
Penanaman Modal											
1	Peningkatan promosi investasi	kali/tahun	17	4	3	4	3	0	0	0	Sangat Rendah
2	Peningkatan pengawasan investasi	%	100	20	50	83	20	20	20	20	Sangat Rendah
3	Peningkatan efektivitas perencanaan penanaman modal	%	100	15	45	44	11	14	15	15	Sangat Rendah
4	Persentase Pertumbuhan investor	%	100	20	86	-38	20	10	10	10	Sangat Rendah
5	Persentase kesesuaian perijinan	%	100	94	99	97	85	90	94	94	Sangat Tinggi
Kepemudaan dan Olahraga											
1	Jumlah database	database	4	1	0	1	1	1	1	25	Sangat

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	yang terupdate										Rendah
2	Persentase OKP aktif	%	100	100	100	100	100	94	100	100	Sangat Tinggi
3	Persentase wirausahawan muda	%	18	17	13.53	14.15	15.00	6.96	4.26	24	Sangat Rendah
4	Persentase fasilitasi pembinaan cabang olahraga	%	75	72.9	60	70	69	40	97.3	130	Sangat Tinggi
5	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	%	76	74	72	75	100	100	100	132	Sangat Tinggi
	Statistik										
1	Persentase data sektoral yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	%	97.50	70	0	39	70.61	74.38	90.00	92	Sangat Tinggi
	Persandian										
1	Prosentase OPD yang sudah menerapkan Kebijakan Keamanan Informasi	%	31.37	25.49	0	9.8	10.2	12.24	52.94	168.8	Sangat Tinggi
	Kebudayaan										
1	prosentase sekolah dan instansi pemerintah yg menerapkan kebijakan budaya lokal	%	75	60	14.37	19	19	30.06	59.52	79	Tinggi
2	persentase sekolah yang menyelenggarakan	%	26	22	9.06	9	9	16.63	26.49	102	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	ekstra kurikuler seni budaya										
3	Pertumbuhan pelaku seni budaya	%	220	200	38.56	38.56	38.56	160	204	93	Sangat Tinggi
4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	20	17	4.88	12	12	12.09	16.58	83	Tinggi
5	Prosentase peningkatan kelompok budaya yang aktif di masyarakat	%	17	14	5.83	9	9	30.57	14.28	84	Tinggi
	Perpustakaan										
1	Persentase buku yang dipinjam	%	39.82	38.8	34.74	35.76	36.84	21.57	23.00	57.76	Rendah
2	Rata-rata pengunjung perpustakaan perbulan	orang/bulan	3,917	3,667	2,876	3,072	3,282	669	620	15.83	Sangat Rendah
3	Persentase perpustakaan yang dibina	%	26.04	23.54	13.54	16.21	29.66	31.22	23.58	90.55	Tinggi
	Kearsipan										
1	Pertambahan jaringan informasi arsip daerah	%	70	50	0	0	20.00	30.00	50.00	71	Sedang
2	Persentase digitalisasi dokumen/arsip daerah	%	70	60	16.7	16.61	40.06	50.00	60.00	86	Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
3	Pertambahan dokumen/ arsip daerah yang dipelihara	%	60	50	5	3.2	12.97	13.11	50.00	83	Tinggi
4	Persentase ketepatan temu kembali arsip	%	100	100	67	80	100	100	100	100	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Perikanan											
1	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	0.60	0.50	5.72	10.62	5.56	1.84	-3.82	-636.67	Sangat Rendah
2	Produksi garam	Ton	326,382.65	283,811.00	115,638.86	320,228.58	350,761.32	193,307.04	193,307.04	59.23	Rendah
3	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	%	8.33	7.69	0.00	7.69	-30.80	-11.11	-75.00	-900.36	Sangat Rendah
4	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	%	0.26	0.18	0.27	6.9	0.33	0.19	0.22	84.62	Tinggi
5	Luasan eksisting lahan mangrove	Ha	199.98	192.11	174.32	184.74	225.39	247.80	230.974	115.50	Sangat Tinggi
6	produksi perikanan budidaya	ton	42,775	42,640	42,509.65	43,608.04	46,140	46,576	46,650	109.06	Sangat Tinggi
	<i>udang windu</i>		780	775	1,000	812	778	782	786	100.78	Sangat Tinggi
	<i>bandeng</i>		28,100	28,080	29,423	26,027	28,136	28,276	27,345	97.31	Sangat Tinggi
	<i>nila salin</i>		710	665	462	3,357	3,928	3,948	4,884	687.93	Sangat Tinggi
	<i>lele</i>		11,650	11,600	9,500	11,752	11,531	11,578	11,635	99.87	Sangat Tinggi
	<i>ikan lain</i>		1,535	1,520	2,125	1,662	1,767	1,992	1,998	130.19	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
7	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham	%	28.13	28	18.18	30.77	47.06	28	6.25	22.22	Sangat Rendah
8	Volume ikan yang dilelang di TPI	ton	29,228	28,853	26,734	23,517	34,768.82	30,363.39	33,833.86	115.76	Sangat Tinggi
9	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	%	7.18	6.67	5.17	25.28	27.74	25.39	25.39	353.62	Sangat Tinggi
10	Produksi olahan ikan	ton	42,725.17	42,512.60	52,399.42	115,448.40	126,444.60	83,364.66	19,723.47	46.16	Sangat Rendah
11	Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	%	8.70	8.3	6.67	33.33	25.00	20.00	0.00	0.00	Sangat Rendah
12	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan Tambak Dinas	%	100	100	132.54	101.09	106.55	100.20	100.09	100.09	Sangat Tinggi
Pariwisata											
1	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata	%	1.39	1.56	-14.4	0.86	24.65	1.71	1.79	71.22	Sedang
2	Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan	%	34	30	13.64	14.04	6.90	7.31	5.98	17.59	Sangat Rendah
3	Peningkatan jumlah kemitraan	mitra	8	7	3	5	5	0	0	0.00	Sangat Rendah
Pertanian											

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	3.52	2.75	0	2	2.75	2.72	2.78	78.98	Tinggi
2	Persentase kelompok tani madya	%	1.72	1.59	1.27	1.31	1.47	1.49	2.00	116.28	Sangat Tinggi
3	Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi hortikultura	%	3.14	2.91	0.57	1.60	2.12	2.45	2.79	88.85	Tinggi
4	Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi perkebunan	%	3.96	3.75	1.67	3.20	3.32	3.60	3.91	98.74	Sangat Tinggi
5	Persentase desa yang menerapkan teknologi pertanian	%	14.63	12.20	5.18	6.50	8.54	10.67	12.47	85.24	Tinggi
6	Persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan teknologi perkebunan	%	8.51	7.45	4.26	4.26	5.32	6.38	7.50	88.13	Tinggi
7	Persentase jumlah kelompok pengguna terapan teknologi pertanian/perkebunan	%	0.51	0.45	0.25	0.25	0.32	0.39	0.48	94.12	Sangat Tinggi
8	<i>Peningkatan produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura</i>										
	Padi	ton	674,300	667,600	637,377	637,976	585,336	620,861	563,406	83.55	Tinggi
	Jagung	ton	171,500	169,800	164,480	178,880	175,448	178,310	179,014	104.38	Sangat Tinggi
	Kedelai	ton	4,975	4,925	4,970	2,330	2,559	2,751	1,323	26.59	Sangat Rendah
	Ubi Kayu	ton	734,760	727,500	701,920	598,584	563,748	671,500	653,662	88.96	Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Bawang Merah	kwintal	286,700	285,300	394,725	270,722	396,760	380,254	297,626	103.81	Sangat Tinggi
	Cabai	kwintal	18,100	18,000	33,310	12,784	14,148	15,582	18,668	103.14	Sangat Tinggi
	Jeruk Besar/Jeruk Pamelos/Bageng Taji	kwintal	304,988	301,969	78,991	98,428	124,556	67,220	246,373	80.78	Tinggi
9	<i>Peningkatan produksi hasil tanaman perkebunan</i>										
	Tebu	ton	899,800	890,900	856,137	864,925	874,250	882,080	550,990	61.23	Rendah
	Tembakau	ton	134	132	124	128	135	128	731	545.37	Sangat Tinggi
	Kelapa Kopyor	butir	975,970	956,830	883,967	901,675	919,750	1,030,757	789,858	80.93	Tinggi
	Kopi	kg	1,298,244	1,272,788	1,205,145	1,217,235	1,237,216	1,294,100	1,293,797	99.66	Sangat Tinggi
10	Persentase peningkatan nilai Indek Pertanian (IP)	%	50	50	20	50	50	50	50	100.00	Sangat Tinggi
11	Persentase ketersediaan data pertanian terhadap kebutuhan	%	100	100	80	90	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
12	Pertumbuhan nilai prestasi kerja penyuluh pertanian	%	2.6	2.6	2	1.5	1.3	2.8	2.87	110.38	Sangat Tinggi
13	Rasio tenaga paramedis/medis terhadap populasi ternak	rasio	0.08	0.08	0.06	0.09	0.07	0.08	0.08	106.67	Sangat Tinggi
14	<i>Peningkatan populasi ternak</i>										
	Sapi Potong	ekor	112,695	110,485	102,071	107,226	112,231	110,731	117,563	104.32	Sangat Tinggi
	Kambing	ekor	216,135	211,890	179,552	184,650	210,375	207,875	234,888	108.68	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Itik	ekor	342,355	335,645	310,081	391,683	392,798	329,798	365,744	106.83	Sangat Tinggi
1 5	<i>Peningkatan hasil produksi peternakan</i>										
	Daging	kg	6,228,920	6,106,790	6,332,325	5,250,773	5,879,870	6,357,054	14,532,414	233.31	Sangat Tinggi
	Susu	liter	260,080	254,980	235,563	130,570	246,050	255,628	213,042	81.91	Tinggi
	Telur	kg	4,333,000	4,248,040	3,924,538	5,517,560	4,084,075	4,978,320	5,541,917	127.90	Sangat Tinggi
1 6	Persentase kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	%	4.50	3.86	1.42	1.97	2.68	3.54	3.91	86.89	Tinggi
	Perdagangan										
1	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	%	12	11.5	10	10	52.47	5.51	0	0.0	Sangat Rendah
2	Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	%	12	11.5	10	50	101.90	15.3	100	833.3	Sangat Tinggi
3	peningkatan nilai ekspor pertahun	%	30	20	20	-27	-2.39	-2.07	15.99	53.3	Rendah
4	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	%	70	65	45	50	55	60	0	0.0	Sangat Rendah
5	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	%	14	12	10	75	55	-10.07	14.26	101.9	Sangat Tinggi
6	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	%	13	12	10	56	76	79	75.2	578.5	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
7	Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	%	14	13	19	-44	100	19.41	11.87	84.8	Tinggi
	Perindustrian										
1	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	%	8	7.5	6	12.6	12.6	61.05	4.99	62	Rendah
2	Persentase peningkatan produksi industri kreatif	%	6	6	6	10.9	10.9	6.70	11.80	197	Sangat Tinggi
3	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	%	8	7.5	6	8.4	8.4	15.46	0	0	Sangat Rendah
4	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	%	8	7.5	6	12.18	12.18	37.50	0	0	Sangat Rendah
5	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	%	8	7.5	6	10.9	10.9	7.59	9.41	118	Sangat Tinggi
	Transmigrasi										
1	Jumlah MoU dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi	dok MoU	5	1	1	1	1	0	0	60	Rendah
2	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	5	5	5	6	6	0	0	0	Sangat Rendah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Sekretariat Daerah										
1	Persentase agenda kerja kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana	%	100.00	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	Sangat Tinggi
2	Indek kepuasan layanan kepada pimpinan	%	3.55	3.45	3	3	3.25	3.25	3.4	95.77	Sangat Tinggi
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
4	Persentase penanganan kasus hukum aparatur	%	100.00	100	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
5	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang kesra	%	85	81	70	70	100	100	100	117.65	Sangat Tinggi
6	Persentase peraturan bidang kesra yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	98	95	95	96	0	100	100.00	Sangat Tinggi
7	Persentase peraturan bidang ekonomi yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda,	%	100	100	100	100	100	0	100	100.00	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	perbup, instruksi bupati, SE)										
8	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang ekonomi	%	85	81	70	70	100	100	100	117.65	Sangat Tinggi
9	Persentase peraturan bidang organisasi dan SDM Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
10	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Organisasi dan SDM	%	85	81	70	70	100	100	100	117.65	Sangat Tinggi
11	Persentase peraturan bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
1 2	Persentase penyediaan analisis kebijakan bidang Tata Pemerintahan	%	95	94	90	99.51	99.05	100.00	100	105.26	Sangat Tinggi
1 3	Persentase verifikasi draft dokumen hukum	%	98	96	90	90	100	99.36	99.04	101.06	Sangat Tinggi
1 4	Persentase peraturan bidang Pengadaan Barang/ Jasa yang sudah ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah (perda, perbup, instruksi bupati, SE)	%	100	100	100	100	0	0	100	100.00	Sangat Tinggi
1 5	Persentase penyelesaian lelang oleh pokja ULP	%	100	98	95	95	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi
1 6	Persentase saluran informasi publik yang aktif	%	100	98	95	95	103.09	100.00	100	100.00	Sangat Tinggi
1 7	Persentase Realisasi Pembangunan Infrastruktur Daerah > 90%	%	100	97	90	90	100	78.43	61.22	61.22	Rendah
Sekretariat DPRD											
1	Persentase rapat yang memenuhi kuorum sesuai jadwal	%	100	100	80	80	69	99	99	99	Sangat Tinggi
2	Persentase pembahasan oleh dewan yang tepat	%	100	100			99	99	98	98	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	waktu										
3	Persentase penyelesaian Raperda	%	100	100	100	100	100	88	71.5	72	Sedang
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Perencanaan											
1	Persentase ketersediaan data base perencanaan pembangunan	%	100	100	45	75.2	75.2	77.14	100	100	Sangat Tinggi
2	Persentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Persentase kegiatan yang terselesaikan	%	100	100	100	98.31	98.31	98.52	100	100	Sangat Tinggi
4	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah sesuai amanat regulasi	%	100	100	100	100	100	0	0	0	Sangat Rendah
5	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	0	0	0	0	0	Sangat Rendah
6	Prosentase ketersediaan dokumen	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	perencanaan pembangunan daerah										
7	Prosentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Prosentase program dalam Restra OPD di bawah koordinasi bidang ekonomi yang sesuai dengan RPJMD	%	100	100	100	76.19	76.19	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
10	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi yang tertampung dalam Renja	%	30	30	30	41	41	50	100	333.33	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
1 1 1	Prosentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	90	90	90	100	100	100	100	111.11	Sangat Tinggi
1 2	Persentase program dalam Restra OPD di bawah koordinasi bidang pemsosbud yang sesuai dengan RPJMD	%	100	100	100	54.63	54.63	54.63	100	100	Sangat Tinggi
1 3	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemsosbud	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi
1 4	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang pemsosbud yang tertampung dalam Renja	%	100	100	100	36.86	36.86	36.86	60	60	Sangat Rendah
1 5	Prosentase hasil kajian bidang pemsosbud yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	100	100	100	0	0	0	0	0	Sangat Rendah

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
16	Jumlah (Prosentase) program dalam Restra OPD di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang sesuai dengan RPJMD	%	100	100	100	69.88	69.88	81.75	90	90	Tinggi
17	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	100	100	100	n.a.	n.a.	100	100	100	Sangat Tinggi
18	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tertampung dalam Renja	%	90	80	75	n.a.	n.a.	84.31	90	100.00	Sangat Tinggi
19	Prosentase hasil kajian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang	%	100	100	100	n.a.	n.a.	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	ditindaklanjuti menjadi kebijakan										
	Keuangan										
1	Ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP	tanggal	30 November untuk anggaran murni dan 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran untuk perubahan	30 November untuk anggaran murni dan 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran untuk perubahan	24 Desember 2016 APBD dan 5 Oktober 2017 APBD-P	29 Desember 2017 APBD dan 16 Oktober 2018 APBD-P	28 Desember 2018 APBD dan 18 September 2019 APBD-P	26 Desember 2019 untuk APBD 2020 dan 16 September 2020 untuk APBD-P 2020	28 Desember 2020 untuk APBD 2021 dan 12 Oktober 2021 untuk APBD-P 2021	90	Tinggi
2	Ketepatan waktu penyaluran dana perimbangan dan pembiayaan	hari	3	3	3	3	3	3	3	100	Sangat Tinggi
3	Ketepatan waktu pelayanan pengelolaan keuangan	hari	2	2	2	2	2	2	2	100	Sangat Tinggi
4	Ketepatan penetapan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	tanggal	30 Juli	30-Jul	3 Agustus 2018	23 Juli	17 Juli	17 Juli	Menunggu proses audit	n.a	
5	Integrasi laporan Barang Milik Daerah dengan SIMDA	%	1	100	100	100.54	99.73	98.99	100	100	Sangat Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	Keuangan										
6	Pertumbuhan jumlah objek pajak daerah (non PBB-P2 dan PBHTB)	%	10	10	11.09	347.7	20.03	7.75	7.50	75	Sedang
7	Pertumbuhan jumlah objek pajak daerah PBB-P2 dan PBHTB	%	1	1	1.8	1.3	1.85	4.60	1.33	133	Sangat Tinggi
	Kepegawaian										
1	persentase ASN struktural yang telah mengikuti diklat penjenjangan /PIM	%	100	92	62.2	70.56	70.56	65.45	35.92	35.92	Sangat Rendah
2	Persentase ASN fungsional yang telah mengikuti diklat Teknik fungsional wajib	%	100	94	0	10.15	10.15	83.24	97.19	97.19	Sangat Tinggi
3	Persentase CPNS yang lulus prajabatan	%	100	100	0	0	0	100	100	100.00	Sangat Tinggi
4	Persentase ASN yang mengikuti diklat penunjang jabatan	%	90	85	0	72.35	72.35	69.58	78.75	87.50	Tinggi
5	Persentase pelayanan diklat yang berbasis aplikasi	%	90	90	0	66	66	0	80	88.89	Tinggi
6	Persentase ASN berkinerja baik	%	99.86	99.86	99.86	99.69	99.69	99.55	99.52	99.66	Sangat Tinggi
7	Persentase pelanggaran disiplin	%	0	0	0.146	0.3	0.3	0.44	0.47	56	Rendah

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
	ASN										
	- ringan	%	0	0	0.12	0.25	0.25	0.2	0.32	80	Tinggi
	- sedang	%	0	0	0	0	0	0.02	0.7	98	Sangat Tinggi
	- berat	%	0	0	0.026	0.05	0.05	0.2	0.07	80	Tinggi
8	Persentase pelayanan kepegawaian yang menggunakan data SIMPEG	%	100	90	75	71.17	71.17	100	92.31	92.31	Sangat Tinggi
9	Persentase layanan Bidang Kinerja Mutasi yang berbasis aplikasi	%	100	93	72	71.17	71.17	71.55	80	80.00	Tinggi
10	Persentase layanan Bidang Forjab yang berbasis aplikasi	%	100	90	80	70.7	70.7	71.08	88.89	88.89	Tinggi
	Penelitian dan Pengembangan										
1	Pertumbuhan mitra penerima publikasi produk kelitbangan	%	6	6	5	6	6	6	3	50	Sangat Rendah
2	Persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian	%	100	100	100	21	21	22	80	80	Tinggi
3	Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan ijin penelitian	Angka	95	90	85	90	90	96	0	0	Sangat Rendah

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
4	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah	%	50	48	37.5	29	29	23	33	66	Sedang
5	Pertumbuhan inovasi oleh masyarakat	%	8	8	5	16.6	16.6	33	16.5	206	Sangat Tinggi
6	Pertumbuhan inovasi oleh OPD	%	15	15	10	15.6	15.6	19	15	100	Sangat Tinggi
Pengawasan											
1	Penurunan temuan hasil Pengawasan	%	5	5	0	5	5	5	5	100	Sangat Tinggi
2	Persentase OPD yang menerapkan kebijakan dan SOP pengendalian internal	%	25	20	0	10	10	15	20	80	Tinggi
3	Persentase OPD yang mendokumentasikan pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten	%	25	20	0	10	10	15	20	80	Tinggi
4	Persentase OPD yang melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik	%	25	20	0	10	10	15	20	80	Tinggi

No	Indikator	Sat.	Target RPJMD 2017-2022	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD					Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
					2017	2018	2019	2020	2021		
5	6 elemen kapabilitas APIP di level 3	Leveling	6 elemen kapabilitas APIP di level 3	elemen 1, 2, 4, 5,6 dilevel 3	40% elemen 2, 4, 5 dilevel 3	elemen 1, 4, 5,6 dilevel 3	elemen 1, 4, 5,6 dilevel 3	6 elemen dilevel 3	6 elemen dilevel 3	100	Sangat Tinggi
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
Kesatuan Bangsa dan Politik											
7	Pertumbuhan LSM, Ormas & OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD'45	%	0.09	19.00	19	0.114	10	10	120	133,333.33	Sangat Tinggi
8	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	70	65	0	36	56	56	5	6.80	Sangat Rendah
9	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)	%	80	75	68.53	75	80	80	18	22.50	Sangat Rendah

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam mendukung ketercapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran kepala daerah yang terangkum dalam program-program prioritas daerah (yang telah diselaraskan dengan kebijakan pusat dan provinsi), dalam konteks jangka menengah maupun tahunan. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang telah direncanakan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan/ditugaskan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut hubungan keuangan pusat dan daerah, ada pembiayaan dari pusat kepada daerah sebagaimana Pasal 279, ayat (2), yaitu berupa : (a) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (b) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (c) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan (d) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Atas pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah, ada kewajiban-kewajiban bagi daerah dalam pengelolaan keuangan (yang bersumber dari pembiayaan tersebut) yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat 2, yaitu : (a) mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (b). menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan (c) melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 yang mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara tegas juga menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian pembahasan yang secara komprehensif digambarkan dan dianalisis terkait kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi keuangan daerah dalam penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah masa yang akan datang. Poin-poin pembahasan terkait kinerja keuangan masa lalu dan proyeksi keuangan daerah periode berikutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya pada Pasal 156 yaitu yang meyangkut : (a) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (b) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; dan (c) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam mendanai prioritas-prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Analisis keuangan daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah mencakup analisa terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kapasitas riil yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan dengan total pengeluaran daerah. Analisis pendapatan daerah fokus pada analisa sumber-sumber pendapatan baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pendapatan transfer (pusat dan provinsi). Terkait analisa pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 102 , dalam penganggarannya di APBD bahkan dikaitkan dengan kondisi Makro Ekonomi yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing daerah. Analisa belanja daerah fokus pada analisa alokasi pada urusan pemerintahan yang memiliki peran pada pemenuhan layanan dasar dan non dasar, urusan pemerintahan tentatif sesuai kondisi sumber daya daerah dan juga urusan-urusan pendukung dan penunjang serta yang bersifat kewilayahan. Pemenuhan belanja daerah menurut urusan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditentukan. Sedangkan aspek pembiayaan fokus pada analisa sumber pembiayaan dalam rangka untuk menyeimbangkan anggaran daerah serta untuk pembiayaan penyertaan modal daerah.

Pembahasan tentang kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, terdiri dari 3 (dtiga) aspek, yaitu terkait Kinerja dan Kebijakan Keuangan Masa Lalu serta Proyeksi Keuangan Daerah yang tertuang dalam Kerangka Penganggaran dan Pendanaan periode perencanaan. Berikut pembahasan kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati secara lengkap.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu merupakan potret keuangan pada periode sebelum penyusunan perencanaan yaitu beberapa tahun atau periode (lima tahun terakhir jika konteksnya jangka menengah). Guna keperluan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, perlu didukung data empirik keuangan (penganggaran) daerah yaitu kondisi keuangan pada periode 2017-2022 sebagai cermin kebijakan penganggaran pembangunan yang telah dijalankan pada periode tersebut.

Pembahasan kinerja keuangan masa lalu meliputi aspek Kinerja Pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Berikut adalah pembahasan atau analisa kondisi keuangan daerah masa lalu secara lengkap.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 (sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan amanah bahwa keuangan daerah (APBD) harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki struktur yang terdiri dari (a) pendapatan daerah; (b) belanja daerah, dan (c) pembiayaan daerah. Dengan munculnya peraturan pemerintah yang baru terkait pengelolaan keuangan daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019) yang telah dilengkapi dengan pedoman teknisnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur APBD saat ini (mulai berlaku Tahun 2021) harus sudah menggunakan struktur yang sesuai dengan peraturan terbaru tersebut, baik dari sisi pendapatan maupun belanjanya.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 20019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1 ayat 7, adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan cakupan yang termasuk dalam pendapatan daerah, sebagaimana dalam Pasal 28 ayat 1 PP Nomor 12 Tahun 2019, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun struktur pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1.1. Pajak Daerah
 - 1.2. Retribusi Daerah
 - 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1.4. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - 2.1. Transfer Pemerintah Pusat
 - 2.1.1. Dana Perimbangan
 - 2.1.1.1. Dana Transfer Umum
 - 2.1.1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 2.1.1.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 2.1.1.2. Dana Transfer Khusus (DAK)
 - 2.1.1.2.1. DAK Fisik
 - 2.1.1.2.2. DAK Non Fisik
 - 2.1.2. Dana Insentif Daerah

- 2.1.3. Dana Otonomi Khusus
- 2.1.4. Dana Keistimewaan
- 2.1.5. Dana Desa
- 2.2. Transfer Antar Daerah
 - 2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil
 - 2.2.2. Bantuan Keuangan
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 3.1. Hibah
 - 3.2. Dana Darurat
 - 3.3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan

Pendapatan Daerah Kabupaten Pati selama ini masih sangat bergantung dari Dana Transfer Pemerintah Pusat maupun Dana Transfer Antar Daerah (Provinsi Jawa Tengah). Berdasarkan data kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, secara rata-rata menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari pendapatan berasal dari Dana Transfer yaitu sebesar 82,97%. PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan masing-masing sebesar 14,09% dan 2,94%. Sedangkan dari perspektif pertumbuhannya, selama 5 (lima) tahun terakhir pendapatan daerah rata-rata turun sebesar 0,57%. Berikut data secara lengkap kondisi pendapatan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dari perspektif pertumbuhannya.

**Tabel 3 . 1 Realisasi Pendapatan dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 -2022
(dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata Pertumb .
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp 2.769.242.943.472	Rp 2.789.055.859.854	Rp 2.838.881.396.181	Rp 2.662.375.437.006	Rp 2.725.165.066.281	Rp 2.690.543.064.000	-0,57%
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 449.821.345.800	Rp 384.041.846.939	Rp 363.997.151.178	Rp 371.708.005.192	Rp 388.607.252.979	Rp 362.814.604.000	-4,21%
4.1.01	PAJAK DAERAH	Rp 73.677.156.628	Rp 82.553.070.563	Rp 93.020.249.056	Rp 97.884.137.026	Rp 108.637.584.364	Rp 113.512.000.000	9,03%
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	Rp 19.018.514.209	Rp 19.680.365.297	Rp 22.753.279.678	Rp 22.502.075.249	Rp 27.194.008.685	Rp 29.525.235.000	9,20%
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Rp 14.643.421.178	Rp 16.232.546.385	Rp 19.067.729.172	Rp 27.635.302.583	Rp 30.662.101.276	Rp 29.863.469.000	15,32%
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Rp 342.482.253.785	Rp 265.575.864.694	Rp 229.155.893.272	Rp 223.686.490.334	Rp 222.113.558.654	Rp 189.913.900.000	-11,12%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.311.686.783.608	Rp 2.302.274.053.924	Rp 2.355.465.506.446	Rp 2.173.448.276.835	Rp 2.218.729.244.498	Rp 2.307.299.964.000	-0,04%
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Rp 2.060.431.758.220	Rp 2.045.265.509.390	Rp 2.091.298.105.857	Rp 1.970.800.007.568	Rp 1.989.613.887.982	Rp 2.084.902.922.000	0,24%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	Rp 1.689.030.336.220	Rp 1.637.310.968.390	Rp 1.637.460.890.857	Rp 1.505.063.848.568	Rp 1.519.385.725.982	Rp 1.630.975.815.000	-0,70%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp 39.792.642.741	Rp 33.452.113.433	Rp 24.894.731.590	Rp 40.287.107.342	Rp 51.883.119.780	Rp 35.274.176.000	-2,38%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp 1.186.296.947.000	Rp 1.189.796.870.000	Rp 1.240.426.635.000	Rp 1.115.340.333.000	Rp 1.107.122.582.000	Rp 1.107.122.582.000	-1,37%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp 180.681.353.967	Rp 128.980.784.622	Rp 109.441.933.837	Rp 76.276.208.201	Rp 94.941.517.200	Rp 98.066.598.000	-11,50%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp 282.259.392.512	Rp 285.081.200.335	Rp 262.697.590.430	Rp 273.160.200.025	Rp 265.438.507.002	Rp 390.512.459.000	6,71%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	Rp 53.948.012.000	Rp 42.500.000.000	Rp 36.798.657.000	Rp 39.355.325.000	Rp 43.847.328.000	Rp 26.830.976.000	-13,04%
4.2.01.05	Dana Desa	Rp 317.453.410.000	Rp 365.454.541.000	Rp 417.038.558.000	Rp 426.380.834.000	Rp 426.380.834.000	Rp 427.096.131.000	6,11%
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Rp 251.255.025.388	Rp 257.008.544.534	Rp 264.167.400.589	Rp 202.648.269.267	Rp 229.115.356.516	Rp 222.397.042.000	-2,41%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp 172.499.977.258	Rp 185.507.312.441	Rp 200.391.359.851	Rp 173.865.155.267	Rp 217.909.242.516	Rp 205.454.042.000	3,56%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	Rp 78.755.048.130	Rp 71.501.232.093	Rp 63.776.040.738	Rp 28.783.114.000	Rp 11.206.114.000	Rp 16.943.000.000	-26,46%
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 7.734.814.064	Rp 102.739.958.991	Rp 119.418.738.557	Rp 117.219.154.979	Rp 117.828.568.804	Rp 20.428.496.000	21,44%
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	Rp 7.734.814.064	Rp 5.363.158.991	Rp 8.179.458.557	Rp 3.719.994.979	Rp 4.343.248.804	Rp 20.428.496.000	21,44%
4.3.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp -	Rp 97.376.800.000	Rp 111.239.280.000	Rp 113.499.160.000	Rp 113.485.320.000	Rp -	5,24%
	JUMLAH SELURUH PENDAPATAN DAERAH	Rp 2.769.242.943.472	Rp 2.789.055.859.854	Rp 2.838.881.396.181	Rp 2.662.375.437.006	Rp 2.725.165.066.281	Rp 2.690.543.064.000	-0,57%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) komponen pendapatan daerah, hanya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang selama 5 (lima) tahun terakhir tumbuh positif yaitu sebesar rata-rata 21,44%, yang dikontribusikan oleh pertumbuhan (positif) rata-rata Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan masing-masing sebesar 21,44% dan 5,24%. PAD dan Pendapatan Transfer tumbuh negatif atau turun per tahun dengan penurunan masing-masing sebesar 4,21% dan 0,04%. Kecenderungan penurunan pada PAD dikarenakan rata-rata pertumbuhan negatif dari pos Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar -11,12%. Hal ini logis mengingat bahwa kontribusi PAD terbesar berada pada pos pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Komponen PAD yang lain yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masing-masing tumbuh positif, yaitu secara berurutan adalah sebesar 9,03%, 9,20% dan 15,32%. Sedangkan Pendapatan Transfer yang rata-rata tumbuh negatif disebabkan oleh rata-rata pertumbuhan negatif dari komponen DBH (-2,38%), DAU (-1,37%), DAK Fisik (-11,50%), DID (-13,04%), dan Bantuan Keuangan (-26,26%). Komponen Pendapatan Transfer yang lain yang rata-rata tumbuh positif yaitu DAK Non Fisik dan Pendapatan Bagi Hasil yaitu masing-masing sebesar 6,11% dan 3,56%.

Pemerintah Kabupaten Pati ke depan tetap memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhannya secara progresif yaitu melalui optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Lebih-lebih dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022, yang secara efektif akan berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan, khususnya pada Pasal 102 yang mengaitkan penentuan pajak daerah dan retribusi daerah perlu mempertimbangkan kondisi makro ekonomi daerah seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM dan daya saing daerah. Khusus pada indikator makro ekonomi daerah terkait struktur ekonomi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ini memberikan suatu indikasi bahwa pajak dan retribusi daerah dapat dioptimalkan melalui pemilihan lapangan usaha/sektor ekonomi yang dominan dan terus tumbuh (sektor unggulan atau sektor basis dan berdaya saing) sebagai media peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Momentum pertumbuhan ekonomi daerah juga harus bisa berdampak positif pada pertumbuhan perolehan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan kontribusi komponen pendapatan daerah, pendapatan dari Dana Transfer masih menjadi sumber pendapatan yang paling dominan, kemudian disusul PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berikut gambaran secara lengkap kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Tabel 3 . 2 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 (dalam persen)

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata2 Kontribusi
4	PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16,24	13,77	12,82	13,96	14,26	13,48	14,09
4.1.01	PAJAK DAERAH	2,66	2,96	3,28	3,68	3,99	4,22	3,46
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	0,69	0,71	0,80	0,85	1,00	1,10	0,86
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,53	0,58	0,67	1,04	1,13	1,11	0,84
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	12,37	9,52	8,07	8,40	8,15	7,06	8,93
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	83,48	82,55	82,97	81,64	81,42	85,76	82,97
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	74,40	73,33	73,67	74,02	73,01	77,49	74,32
4.2.01.01	Dana Perimbangan	60,99	58,70	57,68	56,53	55,75	60,62	58,38
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1,44	1,20	0,88	1,51	1,90	1,31	1,37
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	42,84	42,66	43,69	41,89	40,63	41,15	42,14
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6,52	4,62	3,86	2,86	3,48	3,64	4,17
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	10,19	10,22	9,25	10,26	9,74	14,51	10,70
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	1,95	1,52	1,30	1,48	1,61	1,00	1,48
4.2.01.05	Dana Desa	11,46	13,10	14,69	16,02	15,65	15,87	14,47
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	9,07	9,21	9,31	7,61	8,41	8,27	8,65
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	6,23	6,65	7,06	6,53	8,00	7,64	7,02
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2,84	2,56	2,25	1,08	0,41	0,63	1,63
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,28	3,68	4,21	4,40	4,32	0,76	2,94
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	0,28	0,19	0,29	0,14	0,16	0,76	0,30
4.3.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	3,49	3,92	4,26	4,16	-	2,64

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati (data Diolah)

Tabel 3.2 memberikan gambaran cukup jelas terkait sumber-sumber pendapatan bagi daerah baik pendapatan yang dominan (paling besar sumbangannya) maupun yang memiliki sumbangan paling sedikit bagi kas daerah. Pada pos PAD, kontribusi terbesar adalah pada Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar 8,93%, yang disusul oleh pajak daerah sebesar 3,46%. Pos retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing berkontribusi sebesar kurang dari 1%.

Mengacu pada komposisi kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah saat ini yang, isu kemandirian fiskal (APBD) Kabupaten Pati beberapa tahun ke depan akan tetap selalu menyertai dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya terobosan (melalui kebijakan anggaran daerah) yang mampu mengungkit pertumbuhan pendapatan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin. Sektor ekonomi daerah yang mampu menjadi pengungkit harus dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, melibatkan stakeholder khususnya para pelaku usaha untuk lebih giat berinvestasi di wilayah Kabupaten Pati harus terus didorong dan difasilitasi, khususnya dalam penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Kerjasama secara lebih intensif dan saling menguntungkan dengan korporasi yang ada, harus mulai menjadi perhatian, khususnya dalam penyaluran

dana CSR (corporate social responsibility) maupun kaitannya dengan andil pembangunan infrastruktur daerah. Ketika hal-hal semacam ini sudah mulai dilakukan, maka harapannya akan berdampak positif bagi keuangan daerah, khususnya dalam jangka menengah maupun jangka panjang, sehingga kemandirian fiskal (APBD) Kabupaten Pati akan semakin meningkat.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD merupakan bagian dari agregat ekonomi daerah dalam bentuk konsumsi pemerintah (*government expenditure*), secara teoritikal menjadi salah satu sumber pendorong perekonomian. Hal ini akan terlihat pada seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian variabel makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) dan lain-lain.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 298, khususnya yang terkait dengan Belanja Daerah, bahwa: (a) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (b) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (c) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Pati secara umum telah diarahkan untuk mendukung program-program strategis Pemerintah Pusat, urusan yang menjadi mandat Nasional (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) termasuk mendukung pencepaian program-program kaitannya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, program prioritas daerah serta program-program yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah termasuk program yang bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar lainnya.

Belanja Daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, khususnya dalam Pasal 55, terdiri dari (a) Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial; (b) Belanja Modal; (c) Belanja Tak Terduga atau BTT; (4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Gambaran secara lengkap tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pati periode Tahun 2017 – 2022 pada Tabel berikut.

Tabel 3 . 3 Realisasi Belanja dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017– 2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata 2 Pertum- buan
5.	BELANJA DAERAH	2.930.590.553.180	3.033.394.854.044	3.070.920.452.560	2.840.618.222.324	2.842.495.527.000	2.781.043.064.000	-1,04%
5.1.1	BELANJA OPERASI	1.902.387.206.815	1.930.972.049.486	1.952.152.895.308	1.789.396.754.284	1.886.328.968.828	1.833.787.182.620	-0,73%
5.1.2	Belanja Pegawai	1.048.302.516.921	1.047.960.165.220	1.052.494.159.099	1.025.781.381.318	1.033.389.532.617	1.115.364.106.400	1,25%
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	799.345.111.294,00	826.398.041.766,00	849.363.136.509,00	706.590.014.291	790.992.943.411	644.385.611.820	-4,22%
5.1.4	Belanja Hibah	47.889.276.200,00	44.362.677.500,00	41.314.099.700,00	47.872.858.675	52.821.997.800	64.117.164.400	6,01%
5.1..5	Belanja Bantuan Sosial	6.850.302.400,00	12.251.165.000,00	8.981.500.000,00	9.152.500.000	9.124.495.000	9.920.300.000	7,69%
5.2.	BELANJA MODAL	448.942.339.053,00	439.492.642.225,00	405.100.296.549,00	315.613.926.745	271.122.015.437	234.139.888.380	-12,21%
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.882.293.238,00	0,00	15.680.000,00	49.041.582.248	17.268.286.802	17.070.000.000	34,47%
5.4.	BELANJA TRANSFER	575.378.714.074	662.930.162.333	713.651.580.703	686.565.959.047	667.776.255.933	696.045.993.000	3,88%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.282.702.814,00	9.316.056.684,00	10.262.144.386,00	11.577.352.874	10.903.855.106	13.378.862.000	10,07%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	567.096.011.260,00	653.614.105.649,00	703.389.436.317,00	674.988.606.173	656.872.400.827	682.667.131.000	3,78%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan Tabel 3.3, belanja daerah Kabupaten Pati periode Tahun 2017-2022 rata-rata mengalami penurunan per tahun sebesar 1,04%. Sedangkan menurut komponen belanja daerah, belanja operasi rata-rata per tahun turun sebesar 0,73%, belanja modal rata-rata turun sebesar 12,21%, belanja tak terduga rata-rata naik 34,47% dan belanja transfer per tahun rata-rata naik 3,88%. Penyebab penurunan pertumbuhan rata-rata per tahun belanja operasi adalah adanya penurunan rata-rata dari pos belanja barang dan jasa yaitu sebesar 4,22%. Komponen yang lain pada pos belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bansos masing-masing tumbuh (positif) dengan rata-rata sebesar 1,25%; 6,01% ; dan 7,69%. Komponen pos belanja transfer yaitu belanja bagi hasil dan belanja bankeu masing-masing tumbuh (positif) rata-rata sebesar 10,07% DAN 3,78%.

Belanja daerah (government expenditure) memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi capaian indikator makro daerah, khususnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Secara teoritik, dari hasil beberapa kajian/analisis tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, variabel penting yang berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah variabel belanja modal dan belanja barang dan jasa. Mengacu dengan kondisi perkembangan belanja daerah Kabupaten Pati yang ada hingga saat ini, nampak bahwa jenis belanja daerah yaitu belanja modal dan belanja barang dan jasa justru rata-rata per tahun mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 12,21% dan 4,22%. Hal ini tentu menjadi kontradiktif dimana kedua jenis belanja daerah ini secara empirik justru memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, idealnya juga akan berdampak pada penurunan jumlah pengangguran, penurunan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan dan peningkatan kualitas SDM. Sedangkan jenis belanja daerah yang harus dikendalikan, dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai upaya menekan proporsi belanja pegawai hingga pada angka 30%, maka Pemerintah Kabupaten Pati harus mulai melakukan upaya menurunkan proporsi belanja pegawainya sejalan dengan kebijakan nasional.

Berikut adalah gambaran proporsi belanja daerah berdasarkan komponen-komponen pembentuknya (jenis belanja daerah) secara lengkap sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3 . 4 Proporsi Belanja Daerah di Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 (dalam Persen)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata 2 Kontribusi
5.	BELANJA DAERAH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.1.1	BELANJA OPERASI	64,91%	63,66%	63,57%	62,99%	66,36%	65,94%	64,57%
5.1.2	Belanja Pegawai	35,77%	34,55%	34,27%	36,11%	36,36%	40,11%	36,19%
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	27,28%	27,24%	27,66%	24,87%	27,83%	23,17%	26,34%
5.1.4	Belanja Hibah	1,63%	1,46%	1,35%	1,69%	1,86%	2,31%	1,72%
5.1..5	Belanja Bantuan Sosial	0,23%	0,40%	0,29%	0,32%	0,32%	0,36%	0,32%
5.2.	BELANJA MODAL	15,32%	14,49%	13,19%	11,11%	9,54%	8,42%	12,01%
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,13%	0,00%	0,00%	1,73%	0,61%	0,61%	0,51%
5.4.	BELANJA TRANSFER	19,63%	21,85%	23,24%	24,17%	23,49%	25,03%	22,90%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,28%	0,31%	0,33%	0,41%	0,38%	0,48%	0,37%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	19,35%	21,55%	22,90%	23,76%	23,11%	24,55%	22,54%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati (data diolah)

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa proporsi belanja operasional masih mendominasi dalam struktur belanja daerah yaitu rata-rata sebesar 64,57% dengan komposisi di dalam belanja operasional terbesar adalah belanja pegawai (36,19%) dan belanja barang dan jasa (26,34%). Belanja modal berkontribusi pada belanja daerah rata-rata sebesar 12,01%, belanja transfer rata-rata sebesar 22,90% dan belanja tak terduga rata-rata sebesar 0,5%.

Berpedoman pada gambaran proporsi belanja daerah sebagaimana Tabel 3.4, Pemerintah Kabupaten Pati ke depan perlu lebih memberikan perhatian pada peningkatan alokasi belanja modal dan belanja operasional khususnya belanja barang-jasa, yang memiliki pengaruh signifikan dalam pencapaian indikator makro ekonomi. Khusus untuk belanja modal, ke depan idealnya harus mendominasi proporsinya dalam struktur belanja daerah karena jenis belanja inilah yang manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, yaitu pada kisaran 60-70%, dan alokasi untuk belanja pegawai serta belanja barang-jasa untuk keperluan pegawai harus dikendalikan/ditekan sehingga belanja daerah memiliki daya ungkit bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Terkait kondisi pos pembiayaan surplus atau defisit, PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 83, menyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, di mana Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk pembiayaan: (a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (b) Penyertaan Modal Daerah; (c) Pembentukan

Dana cadangan; dan/atau (d) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penjabaran lebih lanjut juga dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: (a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; (b) Pencairan dana cadangan; (c) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (d) Pinjaman Daerah; dan (e) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perihal gambaran perkembangan pos pembiayaan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.5.

Tabel 3 . 5 Realisasi Pembiayaan dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET 2022	Rata2 Pertum- buan
2	PENDAPATAN	2.769.242.943.472	2.789.055.859.854	2.838.881.396.181	2.662.375.437.006	2.725.266.173.879	2.690.543.064.000	-0,57%
2.1	BELANJA	2.647.104.847.971	2.781.234.687.644	2.870.260.403.230	2.739.724.372.740	2.623.734.531.639	2.781.043.064.000	0,99%
	Surplus / (Defisit)	122.138.095.501	7.821.172.210	- 31.379.007.049	- 77.348.935.734	101.531.642.240	- 90.500.000.000	
3	PEMBIAYAAN	161.704.409.508	244.577.769.290	232.237.286.061	178.242.785.318	101.243.996.734	90.500.000.000	-10,96%
3,1	Penerimaan Pembiayaan	178.838.742.508	283.680.769.290	252.593.286.061	200.855.785.318	101.243.996.734	97.000.000.000	-11,52%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	17.134.333.000	39.103.000.000	20.356.000.000	22.613.000.000	-	6.500.000.000	-17,62%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan Tabel 3.5, pos pembiayaan pembangunan daerah masih didominasi oleh perolehan SiLPA daerah, meskipun ada kecenderungan menurun tiap tahun. Secara total, pembiayaan pembangunan rata-rata per tahun mengalami penurunan sebesar 10,96% yang dikontribusikan oleh penurunan penerimaan pembiayaan rata-rata per tahun sebesar 11,52% dan pengeluaran pembiayaan turun sebesar 17,62%.

Pemanfaatan pos pembiayaan daerah, khususnya ketika dalam kondisi surplus yang dipakai untuk pembiayaan berupa penyertaan modal, diharapkan ada imbal hasil yang proporsional bagi kas daerah. Penyertaan modal untuk sektor usaha (sektor riil) milik daerah (BUMD) perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan peluang bisnis yang dilakukan oleh entitas bisnis milik daerah tersebut, termasuk pertimbangan kualitas manajemen BUMD (terkait visi rencana bisnis perusahaan) yang akan menerima kucuran penyertaan modal.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana (dana) yang tersedia. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Berikut gambaran perkembangan keuangan daerah berupa Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2020 sebagaimana Tabel 3.6. *Sebagai catatan : data neraca Tahun 2021 belum dicantumkan dalam Tabel 3.6 karena pada saat proses penyusunan dokumen RPD ini berlangsung, data neraca tersebut masih dalam proses auditing oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.*

Tabel 3 . 6 Realisasi Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 –2020 (dalam Rupiah)

NOMOR	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertum- buan
1	ASET					
1.1.	ASET LANCAR					
1.1.1.	Kas					
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	239.628.331.543,00	222.719.569.537,00	182.100.340.982,00	69.487.923.310,00	-33,81%
1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	9.145.245,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	93.901.485,00	68.743.173,00	-26,79%
1.1.1.4	Kas di BLUD	40.285.761.889,00	27.496.396.878,00	13.082.270.865,00	27.335.396.537,00	-12,13%
1.1.1.5	Kas di Bendahara BOS	3.919.266.332,00	2.182.975.085,00	5.581.765.680,00	4.348.290.273,00	3,52%
1.1.1.6	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.771.203,00	0,00%
1.1.1.7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Piutang Pajak	7.826.609.709,60	7.518.292.913,00	7.696.285.394,00	7.403.015.171,00	-1,84%
1.1.1.9	Penyisihan Piutang Pajak	-5.202.644.405,39	-6.217.739.679,00	-6.544.775.298,00	-6.565.416.938,00	8,06%
1.1.1.10	Piutang Pajak Netto	2.623.965.304,21	1.300.553.234,00	1.151.510.096,00	837.598.233,00	-31,66%
1.1.1.11	Piutang Retribusi	766.314.432,21	748.737.447,34	813.025.537,21	794.993.555,00	1,23%
1.1.1.12	Penyisihan Piutang Retribusi	-716.501.478,23	-714.216.783,60	-674.871.279,21	-690.143.565,00	-1,24%
1.1.1.13	Piutang Retribusi Netto	49.812.953,99	34.520.663,74	138.154.258,00	104.849.990,00	28,16%
1.1.1.14	Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	26.789.964.479,00	0,00%
1.1.1.15	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	-652.154.054,00	0,00%
1.1.1.16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	0,00	0,00	0,00	26.137.810.425,00	0,00%
1.1.1.17	Piutang Transfer Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	29.235.433.235,00	0,00%
1.1.1.18	Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.19	Piutang Transfer Bagi Hasil Netto	0,00	0,00	0,00	29.235.433.235,00	0,00%
1.1.1.20	Piutang Lainnya	14.895.139.678,00	42.468.168.980,00	49.298.604.835,00	2.917.106.357,00	-41,93%
1.1.1.21	Penyisihan Piutang Lainnya	-581.558.986,52	-672.770.070,04	-2.067.646.785,48	-2.917.106.357,00	71,18%
1.1.1.22	Piutang Lainnya Netto	14.313.580.691,48	41.795.398.909,96	47.230.958.049,52	0,00	-100,00%
1.1.1.23	Beban Dibayar Dimuka	154.307.761,00	126.410.019,00	159.786.567,00	650.854.019,00	61,57%
1.1.1.24	Persediaan	22.361.297.131,75	23.237.430.328,00	22.759.340.344,00	26.963.245.497,00	6,44%
	JUMLAH ASET LANCAR	323.345.468.851,42	318.893.254.654,70	272.298.028.326,52	185.202.915.895,00	-16,95%

NOMOR	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertum- buan
1.1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG					
1.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
1.1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.4	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	302.770.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	302.770.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	Investasi Jangka Panjang Permanen					
1.1.3.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	159.570.129.207,59	181.570.888.211,94	206.459.536.639,63	243.970.471.527,56	0,00%
1.1.3.2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	159.570.129.207,59	181.570.888.211,94	206.459.536.639,63	243.970.471.527,56	0,00%
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	159.872.899.757,59	181.570.888.211,94	206.459.536.639,63	243.970.471.527,56	0,00%
1.2.	ASET TETAP					
1.2.1	Tanah	3.422.360.562.086,00	3.424.264.054.126,00	3.442.728.513.526,00	3.253.421.025.831,00	-1,67%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	523.737.612.532,37	638.892.835.900,04	744.261.066.035,04	793.426.496.608,31	14,85%
1.2.3	Gedung dan Bangunan	1.052.696.604.688,83	1.093.343.934.029,83	1.245.799.794.903,83	1.289.335.781.347,89	6,99%
1.2.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.204.791.063.900,00	1.444.011.219.350,00	1.650.211.703.985,75	1.792.375.511.712,75	14,16%
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	62.470.841.261,07	79.021.244.773,07	93.508.890.804,07	97.734.585.547,14	16,09%
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.913.968.130,00	31.654.203.905,00	570.867.000,00	24.188.862.694,00	-32,00%
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	-860.815.851.485,59	-1.031.885.541.618,63	-1.226.901.178.315,27	-1.438.860.499.222,47	18,68%
	JUMLAH ASET TETAP	5.482.154.801.112,69	5.679.301.950.465,32	5.950.179.657.939,42	5.811.621.764.518,62	1,96%

NOMOR	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertum- buan
1,3	DANA CADANGAN					
1.3.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.	ASET LAINNYA					
1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi	2.062.801.417,00	2.061.101.417,00	2.061.101.417,00	2.030.013.960,00	-0,53%
1.4.2	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3	Tuntutan Ganti Rugi Netto	2.062.801.417,00	2.061.101.417,00	2.061.101.417,00	0,00	-100,00%
1.4.4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.412.851.765,00	6.412.851.765,00	6.412.851.765,00	6.390.918.286,00	-0,11%
1.4.5	Aset Tak Berwujud	4.533.286.376,00	5.366.358.376,00	6.198.676.036,00	5.546.542.266,00	6,96%
1.4.6	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-2.473.757.471,00	-3.486.180.275,00	-4.652.712.484,00	0,00	-100,00%
1.4.7	Aset Tak Berwujud Netto	2.059.528.905,00	1.880.178.101,00	1.545.963.552,00	0,00	-100,00%
1.4.8	Aset Lain-lain	30.913.990.009,00	802.924.669,00	797.476.340,00	135.009.213,00	-83,65%
	JUMLAH ASET LAINNYA	41.449.172.096,00	11.157.055.952,00	10.817.393.074,00	6.525.927.499,00	-46,00%
	JUMLAH ASET	6.006.822.341.817,70	6.190.923.149.283,96	6.439.754.615.979,58	6.254.897.635.666,18	1,36%
2	KEWAJIBAN					
2,1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00		251.749.762,00	0,00%
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	518.609.691,00	896.621.852,00	1.254.845.816,00	714.564.333,00	11,28%
2.1.5	Utang Beban	12.872.281.613,00	14.359.396.528,00	14.675.464.964,00	16.538.753.647,00	8,71%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	15.680.000,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.390.891.304,00	15.271.698.380,00	15.930.310.780,00	17.505.067.742,00	9,34%

NOMOR	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertum- buhan
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00		0,00	0,00%
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	13.390.891.304,00	15.271.698.380,00	15.930.310.780,00	17.505.067.742,00	9,34%
3	EKUITAS					
	EKUITAS	5.993.431.450.513,70	6.175.651.450.903,96	6.423.824.305.199,58	6.237.392.567.924,18	1,34%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.006.822.341.817,70	6.190.923.149.283,96	6.439.754.615.979,58	6.254.897.635.666,18	1,36%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Guna mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dikaitkan dengan kemungkinan adanya *default* atau gagal bayar atas kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang telah diambil, dilakukan analisa rasio keuangan daerah mengacu pada informasi/data neraca keuangan sebagaimana telah tertuang dalam tabel di atas (Tabel 3.6). Berikut disampaikan hasil penghitungan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2020 yang meliputi rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Tabel 3 . 7 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	
1	RASIO LIKUIDITAS :					
a)	Rasio Lancar (Current Ratio)	24,15	20,88	17,09	10,58	18,18
b)	Rasio Quick (Quick Ratio)	23,73	22,18	18,70	12,22	19,21
c)	Rasio Kas (Cash Ratio)	21,20	16,53	12,61	5,79	14,03
2	RASIO SOLVABILITAS					
a)	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (Total Debt to Total Assets Ratio)	0,002229	0,002467	0,002474	0,002799	0,002492
b)	Rasio Total Hutang terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio)	0,002234	0,002473	0,002480	0,002806	0,002498

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio likuditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rata-rata rasio lancar pada periode Tahun 2017-2020 adalah sebesar 18,18, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek didasarkan pada kondisi aset lancarnya, adalah sebesar 18 kali lebih.
2. Rasio *Quick* (*Quick ratio*)
Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rata-rata Rasio *Quick* pada periode Tahun 2017-2020 adalah sebesar 19,21, yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Pati dalam membayar kewajiban jangka pendeknya didasarkan pada aset likuidnya, adalah sebesar 19 kali lebih.
3. Rasio Kas (Cash Ratio)
Rasio kas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan instrumen berharga. Rata-rata Rasio Kas pada periode Tahun 2017-2020 adalah sebesar 14,03, yang berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Pati dalam membayar kewajiban jangka pendeknya didasarkan pada kas yang tersedia, adalah sebesar 14 kali lebih.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, yang terdiri dari :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (*Total Debt to Total Assets Ratio*)
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Rata-rata Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada periode Tahun 2017-2020 adalah sebesar 0,002229. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal (*Total Debt to Equity Ratio*)
Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Rata-rata Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Pati pada periode Tahun 2017-2020 adalah sebesar 0,002234. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pati, yang berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017 –2022

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Pati bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud di sini merupakan besaran atau rasio yang didapatkan dari besaran / total belanja untuk belanja pegawai terhadap total pengeluaran yang merupakan penjumlahan dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran, yang dinyatakan dalam satuan persen. Belanja pegawai/aparatur dimaksud merupakan bagian dari komponen belanja operasional sebagaimana struktur belanja daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Adapun perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 secara lebih lengkap sebagaimana tertuang pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3 . 8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1.	T. A 2017	1.048.302.516.921	2.947.724.886.180	35,56%
2.	T. A 2018	1.047.960.165.220	3.072.497.854.044	34,11%
3.	T. A 2019	1.052.494.159.099	3.091.276.452.560	34,05%
4.	T. A 2020	1.025.781.381.318	2.863.231.222.324	35,83%
5.	T. A 2021	1.033.389.532.617	2.862.460.527.000	36,10%
6.	T. A 2022	1.115.364.106.400	2.787.543.064.000	40,01%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa sejak Tahun 2020, ketika terjadi pandemi covid-19, total pengeluaran daerah cenderung menurun hingga 2022. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi adanya *refocusing* anggaran APBD yang diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi. Sedangkan dari pos belanja pegawai ada sedikit penurunan sejak terjadinya pandemi, namun meningkat kembali pada Tahun 2022 sebagai konsekuensi penerimaan ASN formasi Tahun 2021 sehingga menambah pengeluaran untuk belanja pegawai.

Secara proporsional, belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah ada tren peningkatan sejak Tahun 2019 sebesar 34,05% menjadi 40,01% pada Tahun 2022 atau naik sebesar 5,96 basis poin. Kenaikan proporsi belanja pegawai dalam struktur belanja daerah, harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan untuk berupaya menekan proporsi mendekati target nasional terkait proporsi belanja pegawai yang telah ditentukan yaitu sebesar maksimal 30%.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang secara konsep APBD, idealnya setiap tahun bernilai Rp.0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan dampak dari pelaksanaan APBD.

Berikut adalah gambaran secara lengkap kondisi pos pembiayaan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 3.9

Tabel 3 . 9 Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 –2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata2 Pertum- buan Def.Riil
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.769.242.943.472	2.789.055.859.854	2.838.881.396.181	2.662.375.437.006	2.736.238.607.000	2.690.543.064.000	
	Dikurangi Realisasi :							
2.	Belanja Daerah	2.930.590.553.180	3.033.394.854.044	3.070.920.452.560	2.840.618.222.324	2.842.495.527.000	2.781.043.064.000	
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.134.333.000	39.103.000.000	20.356.000.000	22.613.000.000	19.965.000.000	6.500.000.000	
	Surplus/(Defisit) Riil	-178.481.942.708	-283.441.994.190	-252.395.056.379	-200.855.785.318	-126.221.920.000	-97.000.000.000	-11,48%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Tabel 3 . 10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati sebagai Proporsi dari Surplus / Defisit Tahun 2017 – 2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata2 Pertum- buan
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	178.481.942.708	283.441.994.190	252.395.056.379	200.855.785.318	126.221.920.000	97.000.000.000	-11,48%
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Pos pembiayaan daerah Kabupaten Pati selama ini lebih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun anggaran sebelumnya. Dengan SiLPA ini, defisit anggaran yang terjadi akan diseimbangkan dengan penerimaan pembiayaan dari SiLPA, meskipun idealnya penganggaran yang muncul dari hasil perencanaan diupayakan seefektif dan seefisien mungkin dalam implementasinya sehingga semua program/kegiatan yang dialokasikan dapat berjalan dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Tabel 3.9 dan 3.10 menunjukkan peran SiLPA yang berfungsi sebagai penyeimbang anggaran yang selalu dalam keadaan defisit dan ada tren penurunan nominal SiLPA tiap tahun, yaitu rata-rata sebesar 11,48% dan diharapkan ini akan terus terjadi (penurunan SiLPA) sebagai bentuk efektivitas penganggaran pembangunan.

Dari sisi komponen pembentuk, realisasi SiLPA selama ini lebih dominan disebabkan adanya sisa dari penghematan belanja atau akibat lainnya dan pelampauan perolehan PAD.

Gambaran realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 –2022 secara lengkap sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3 . 11 Realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 –2022 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Rata-Rata Pertum- buhan (%)
		Nilai	% Dari SiLPA	Nilai	% Dari SiLPA	Nilai	% Dari SiLPA	Nilai	% Dari SiLPA	Nilai	% Dari SiLPA	Nilai	% Dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	178.481.942.708	100,00%	283.441.994.190	100,00%	252.395.056.379	100,00%	200.855.785.318	100,00%	126.221.920.000	100,00%	97.000.000.000	100,00%	-11,48%
1.	Pelampauan penerimaan PAD	24.451.803.791	13,70%	32.854.991.800	11,59%	21.869.932.939	8,66%	4.754.272.178	2,37%	20.804.834.192	16,48%		0,00%	-3,96%
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-56.122.984.603	-31,44%	18.601.891.608	6,56%	-9.917.958.076	-3,93%	-22.193.557.554	-11,05%	413.755.491.835	327,80%		0,00%	-531,75%
3.	Pelampauan penerimaan lain-Lain pendapatan daerah yang sah	11.557.636.745	6,48%	5.009.662.064	1,77%	1.785.243.991	0,71%	-559.048.443	-0,28%	-461.649.626.021	-365,74%		0,00%	20556,35%
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	199.155.888.834	111,58%	226.618.649.210	79,95%	238.819.573.235	94,62%	218.659.774.076	108,86%	153.186.188.526	121,36%	97.000.000.000	100,00%	-13,40%
5.	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
6.	Kegiatan lanjutan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
7.	Selisih Pembiayaan	-560.402.059	-0,31%	356.799.508	0,13%	-161.735.710	-0,06%	194.345.061	0,10%	125.031.468	0,10%		0,00%	-141,21%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Sebagaimana Tabel 3.11, penghematan belanja atau akibat lainnya menjadi penyumbang nominal SiLPA terbesar yang kemudian disusul dengan pelampauan perolehan PAD. Secara umum komponen-komponen pembentuk SiLPA memiliki kecenderungan menurun yang berarti ada indikasi menuju sistem penganggaran yang semakin ideal (memiliki tingkat efektivitas yang semakin tinggi). Secara empiris, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya rata-rata per tahun turun 13,40%. Pelampauan perolehan PAD (realisasi lebih tinggi dari target) juga mengalami tren penurunan yaitu rata-rata sebesar 3,96%, yang berarti penentuan target PAD sudah mulai didasarkan pada kapasitas sumber daya sesungguhnya yang dimiliki (penentuan target tidak terlalu rendah yang menyebabkan selalu terjadi pelampauan target).

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Ditengah kondisi ke depan yang penuh ketidakpastian, khususnya lingkungan eksternal Kabupaten Pati, lebih-lebih dampak Pandemi Covid-19 yang masih dirasakan hingga saat ini (bahkan bulan Pebruari 2022 ada kecenderungan penambahan kasus baru Covid-19 varian Omicron), akan menjadi tantangan yang semakin berat bila tidak dilakukan upaya/strategi untuk bisa keluar dari kelesuan akibat Pandemi yang berkepanjangan. Protokol kesehatan harus terus diupayakan dipatuhi oleh segenap masyarakat, sembari menata sektor ekonomi yang saat ini sudah mulai terasa menggeliat. Upaya pendampingan dan fasilitasi kemudahan berbisnis, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi, bagi usaha mikro-kecil harus terus ditingkatkan agar bisa membantu mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Mendasarkan pada capaian kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang ada kecenderungan menurun (sebagai dampak Pandemi) yaitu sebesar 0,57%, maka pada periode Tahun 2023 hingga 2026 Pemerintah Kabupaten Pati harus semangat dan optimis untuk bisa meningkatkan performa pelayanan publik melalui penyusunan instrumen kebijakan (perencanaan dan pengelolaan keuangan) yang lebih efektif dan efisien, meskipun ada keterbatasan ruang fiskal daerah.

Pendapatan daerah pada periode perencanaan Tahun 2023-2026 diskenariokan dapat terus ditingkatkan secara moderat dan diharapkan ini akan menjadi suatu landasan bagi pencapaian target pendapatan secara lebih progresif pada periode perencanaan yang selanjutnya (2024-2029), sehingga dalam jangka menengah-panjang akan berdampak pada peningkatan ruang fiskal daerah. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pati, dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Intensifikasi PAD, melalui:
 - a. Optimalisasi sistem pajak *on line* dengan menambahkan peralatan berupa *tapping box* (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
 - b. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak.
 - c. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.

- d. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
 - e. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
 - f. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
 - g. Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
 - h. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
 - i. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.
2. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:
- a. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
 - b. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
 - c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Selain 2 (dua) strategi dalam mendongkrak pendapatan daerah seperti yang telah disebutkan di atas, ada peluang yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan bisnis BUMD serta BLUD yang tidak menggunakan dana APBD, sehingga tidak membebani keuangan daerah, salah satunya adalah penggunaan alternatif pembiayaan pembangunan daerah melalui konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Alternatif ini harus dipertimbangkan dengan serius, dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan ketepatan asas dan manfaat sebelum diambil keputusan.

Gambaran proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 secara lengkap sebagaimana tertuang pada Tabel 3.12.

Tabel 3 . 12 Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertum- buan
4	PENDAPATAN DAERAH	2.755.290.062.756,55	2.802.240.415.831,55	2.852.834.633.988,42	2.908.211.349.479,72	1,96%
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	418.732.249.456,55	423.044.519.131,55	426.736.845.548,42	430.521.480.125,72	4,37%
4.1.01	PAJAK DAERAH	116.349.800.000,00	119.258.545.000,00	122.240.008.625,00	125.296.008.840,63	2,50%
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	27.740.987.000,00	28.434.511.675,00	29.145.374.466,88	29.874.008.828,55	0,29%
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	29.153.469.000,00	29.863.469.000,00	29.863.469.000,00	29.863.469.000,00	0,00%
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	245.487.993.457	245.487.993.456,55	245.487.993.456,55	245.487.993.456,55	6,63%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.218.729.244.496,00	2.261.367.327.896,00	2.308.269.219.636,00	2.359.861.300.550,00	0,56%
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.989.613.887.980,00	2.032.251.971.380,00	2.079.153.863.120,00	2.130.745.944.034,00	0,55%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.519.385.725.980,00	1.519.385.725.980,00	1.519.385.725.980,00	1.519.385.725.980,00	-1,76%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	51.883.119.780,00	51.883.119.780,00	51.883.119.780,00	51.883.119.780,00	10,13%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.107.122.582.000,00	1.107.122.582.000,00	1.107.122.582.000,00	1.107.122.582.000,00	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	94.941.517.200,00	94.941.517.200,00	94.941.517.200,00	94.941.517.200,00	-0,81%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	265.438.507.000,00	265.438.507.000,00	265.438.507.000,00	265.438.507.000,00	-9,20%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	43.847.328.000,00	43.847.328.000,00	43.847.328.000,00	43.847.328.000,00	13,06%
4.2.01.05	Dana Desa	426.380.834.000,00	469.018.917.400,00	515.920.809.140,00	567.512.890.054,00	7,36%
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	229.115.356.516,00	229.115.356.516,00	229.115.356.516,00	229.115.356.516,00	0,75%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	217.909.242.516,00	217.909.242.516,00	217.909.242.516,00	217.909.242.516,00	1,48%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.206.114.000,00	11.206.114.000,00	11.206.114.000,00	11.206.114.000,00	-9,82%
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	117.828.568.804,00	117.828.568.804,00	117.828.568.804,00	117.828.568.804,00	0,00%
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	4.343.248.804,00	4.343.248.804,00	4.343.248.804,00	4.343.248.804,00	0,00%
4.3.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN	113.485.320.000,00	113.485.320.000,00	113.485.320.000,00	113.485.320.000,00	0,00%
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Sebagaimana tabel 3.12, total pendapatan daerah Tahun 2023-2026 diproyeksikan meningkat per tahun sebesar 1,96%. PAD diharapkan dapat meningkat rata-rata sebesar 4,37% yang ditopang oleh pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah (2,50%), Retribusi Daerah (0,29%), Lain-lain PAD yang Sah (6,63%).. Sedangkan Pendapatan Transfer rata-rata per tahun tumbuh sebesar 0,56%, yang dikontribusikan oleh pertumbuhan positif rata-rata dari komponen pendapatan DBH (10,13%), DID (13,06%), Dana Desa (7,36%) dan Pendapatan Bagi Hasil (1,48%). Komponen pendapatan transfer yang diproyeksikan rata-rata tumbuh negatif yaitu dari pos pendapatan DAK Fisik (-0,81%), DAK Non Fisik (-9,20%) serta Bankeu (-9,82%), sedangkan DAU diproyeksikan hingga Tahun 2026 adalah tetap (tumbuh 0,00%). Pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami peningkatan atau tumbuh rata-rata sebesar 0,00%. Proyeksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan tren pendapatan masa lalu serta kondisi riil kapasitas sumber daya (fisik dan non fisik) yang dimiliki dan proyeksinya relatif bersifat moderat. Ke depan ketika kondisi sosial ekonomi dan geopolitik semakin kondusif dan didukung dengan kapasitas sumber daya yang sangat memadai, maka sudah saatnya ketika menyusun target perencanaan dan penganggaran menganut paham model pertumbuhan yang optimis maupun progresif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

3.3.1.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pati pada periode Tahun 2023 – 2026, sebagaimana amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan fokus pada :

- a. Pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Pemenuhan pelaksanaan program prioritas daerah sesuai kewenangan daerah;
- c. Kontribusi pada pemenuhan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional program dan kegiatan ;
- d. Optimalisasi penjangkaran aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- e. Program-program pendukung utama pencapaian indikator makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pengentasan kemiskinan peningkatan distribusi pendapatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);
- f. Belanja *mandatory* terkait pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat;

Penyusunan kebijakan terkait Belanja Daerah pada periode 4 (empat) tahun ke depan disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan pemenuhan norma-norma : tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut rancangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pati periode tahun 2023 – 2026 sebagaimana tabel 3.13.

Tabel 3 . 13 Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertum- buan
5.	BELANJA DAERAH	2.781.043.064.000,00	2.780.290.062.756,55	2.929.240.415.831,55	2.897.834.633.988,42	2.948.211.349.479,72	1,47%
5.1.1	BELANJA OPERASI	1.833.787.182.620,00	1.760.764.636.543,55	1.880.763.802.085,55	1.833.372.979.060,42	1.865.277.374.816,72	0,43%
5.1.2	Belanja Pegawai	1.115.364.106.400,00	1.091.861.206.113,00	1.122.866.439.206,00	1.139.985.680.131,00	1.159.768.619.121,00	0,98%
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	644.385.611.820,00	609.577.831.546,55	696.887.111.024,55	631.446.886.709,42	642.493.449.802,72	-0,07%
5.1.4	Belanja Hibah	64.117.164.400,00	49.361.190.870,00	50.762.887.244,00	51.536.816.613,00	52.431.169.688,00	-4,91%
5.1..5	Belanja Bantuan Sosial	9.920.300.000,00	9.964.408.014,00	10.247.364.611,00	10.403.595.607,00	10.584.136.205,00	1,63%
5.2.	BELANJA MODAL	234.139.888.380	359.122.150.171,00	369.320.044.652,00	374.950.686.333,00	381.457.458.024,00	12,98%
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.070.000.000	20.905.987.699,00	21.499.649.372,00	21.827.432.344,00	22.206.218.473,00	6,80%
5.4.	BELANJA TRANSFER	696.045.993.000,00	639.497.288.343,00	657.656.919.722,00	667.683.536.251,00	679.270.298.166,00	-0,61%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.378.862.000	10.277.963.968,00	10.569.824.528,00	10.730.971.737,00	10.917.193.514,00	-4,96%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	682.667.131.000	629.219.324.375,00	647.087.095.194,00	656.952.564.514,00	668.353.104.652,00	-0,53%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Tabel 3.13 memberikan gambaran bahwa Belanja Daerah pada periode 4 (empat) tahun ke depan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 1,47%; Belanja Operasional meningkat sebesar 0,43%, yang dikontribusikan oleh rata-rata peningkatan pos Belanja Pegawai dan Belanja Bansos yaitu masing-masing sebesar 0,98% dan 1,63%. Meskipun Belanja Pegawai diproyeksikan mengalami peningkatan pertahun, namun upaya untuk menekan proporsinya terhadap total belanja daerah hingga sebesar 30% tetap menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Pati. Komponen Belanja Operasi yang lain yaitu Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata per tahun yaitu masing-masing sebesar -0,07% dan -4,91%; Belanja Modal diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 12,98%; Belanja Tak Terduga meningkat rata-rata sebesar 6,80%; Belanja Transfer diproyeksikan rata-rata tumbuh negatif atau menurun yaitu sebesar -0,61% yang dikontribusikan oleh penurunan rata-rata pos Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bankeu masing-masing sebesar -4,96% dan -0,53%. Hal penting lain dari gambaran kebijakan belanja daerah 4 (empat) tahun mendatang adalah porsi pertumbuhan belanja modal tahunan yang dipatok paling besar dibandingkan proyeksi pertumbuhan jenis belanja yang lain, dan pada periode perencanaan dan penganggaran selanjutnya, jenis belanja ini dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi dibandingkan periode perencanaan saat ini (2023-2026).

3.3.1.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun atau dihitung untuk menentukan kapasitas (kekuatan) riil finansial yang akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas baik prioritas pertama (P1) yang meliputi belanja mandatory untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, belanja program-program pendukung utama pencapaian tujuan dan sasaran daerah (indikator makro ekonomi dan indikator kinerja daerah lainnya), belanja program pendukung pencapaian SPM dan program-program lain yang selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi; maupun prioritas kedua (P2) terkait pendanaan program urusan pemerintahan lainnya di luar program Prioritas Pertama (P1). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Terkait pengklasifikasian peruntukkan kapasitas riil keuangan daerah pada perencanaan pembangunan jangka menengah saat ini, kapasitas riil dialokasikan hanya pada 2 (dua) jenis Program Prioritas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mengingat bahwa konten dokumen perencanaannya tidak memuat unsur Visi dan Misi Kepala Daerah karena terjadi kekosongan pemimpin yang *legitimate* sebagai dampak dari kebijakan pemilukada serentak dari Pemerintah Pusat.

3.3.1.3.1 Pembiayaan Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70, Pembiayaan Daerah terdiri dari komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan neto dan pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran (APBD).

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : (1) SiLPA; (2) pencairan Dana Cadangan; (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan Pinjaman Daerah; (5) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

dan/atau (6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan : (1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; (2) penyertaan modal daerah; (3) pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 secara lengkap sebagaimana Tabel 3.14

Tabel 3 . 14 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertum- buan
2	PENDAPATAN	2.755.290.062.757	2.802.240.415.832	2.852.834.633.988	2.908.211.349.480	1,96%
2.1	BELANJA	2.780.290.062.757	2.929.240.415.832	2.897.834.633.988	2.948.211.349.480	1,47%
	Surplus / (Defisit)	-25.000.000.000	-127.000.000.000	-45.000.000.000	-40.000.000.000	-18,46%
3	PEMBIAYAAN	25.000.000.000	127.000.000.000	45.000.000.000	40.000.000.000	-18,46%
3,1	Penerimaan Pembiayaan	95.000.000.000	127.000.000.000	50.000.000.000	45.000.000.000	-17,47%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-6,35%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 diproyeksikan selalu mengalami defisit dengan tren menurun yaitu rata-rata per tahun sebesar -16,03%, dimana defisit terbesar diproyeksikan terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 127.000.000.000,-; yang bertepatan dengan diselenggarakannya Pemilu dan Pemilukada, sehingga pada tahun tersebut diperkirakan akan banyak menguras APBD guna penyelenggaraan hajatan besar tersebut. Pos pembiayaan diproyeksikan menurun per tahun dengan rata-rata penurunan sebesar 18,46%, yang dikontribusikan oleh penurunan rata-rata per tahun pada pos penerimaan dan pos pengeluaran pembiayaan masing-masing sebesar -17,47% dan -6,35%.

3.3.1.3.2 Kapasitas Riil Daerah

Penghitungan kapasitas riil dilakukan dengan formula : Total Penerimaan (Pendapatan Daerah plus Pencairan Dana Cadangan plus Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)) dikurangi dengan Total Pengeluaran (Belanja Tidak Langsung yang Wajib Mengikat plus Pengeluaran Pembiayaan).

Data proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pati periode Tahun 2023-2026 secara lengkap sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3 . 15 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Untuk Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023– 2026 (dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertum- buan
1.	Pendapatan	2.790.057.062.757	2.802.001.590.832	2.852.589.838.363	2.907.960.433.964	1,96%
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	70.000.000.000	-	-	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran	60.000.000.000	57.000.000.000	50.000.000.000	45.000.000.000	-17,47%
	Total Penerimaan	2.815.057.062.757	2.859.001.590.832	2.902.589.838.363	2.952.960.433.964	1,45%
	Dikurangi :					
4.	Belanja Tidak Langsung (Belanja Wajib Mengikat)	1.591.863.372.000	1.597.818.985.000	1.621.555.346.000	1.632.479.186.000	0,46%
5.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-6,35%
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.188.193.690.757	1.261.182.605.832	1.276.034.492.363	1.315.481.247.964	2,80%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

Tabel 3.14 menunjukkan bahwa kapasitas riil belanja diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 2,80%. Hal ini wajar mengingat bahwa kebutuhan akan pelayanan publik relatif terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan sektor kehidupan yang lain. Kapasitas riil inilah sebetulnya yang menjadi media atau instrumen intervensi berbagai macam programs strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan sosial maupun hibah kepada masyarakat dan berbagai macam program / fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat secara luas; Dana Cadangan (sesuai Perda) dianggarkan sejak Tahun 2022 sebagai persiapan untuk penganggaran Pemilu serentak Tahun 2024 yang pencairannya dilakukan di Tahun 2023 dan 2024 dengan total sebesar Rp.70.000.000.000,-; Silpa sebagai salah satu komponen penambah pos penerimaan daerah diproyeksikan mengalami penurunan yaitu rata-rata per tahun sebesar -17,47%; Belanja Wajib Mengikat diproyeksikan tumbuh positif rata-rata per tahun sebesar 0,46%; Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2025 dan 2026 sebesar masing-masing Rp. 5.000.000.000,- direncanakan digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD sehingga diproyeksikan pos Pengeluaran Pembiayaan dalam 4 (empat) tahun perencanaan mengalami penurunan yaitu rata-rata sebesar -6,35%.

Adapun penghitungan kapasitas riil sebagaimana tertera pada Tabel 3.15 dititikberatkan dulu pada pemenuhan kebutuhan penganggaran untuk program-program Prioritas Pertama (P1) yang didalamnya mencakup program pendukung utama pencapaian tujuan dan sasaran daerah, program-program pendukung kebijakan strategis Pusat dan Provinsi, program-program pendukung pencapaian indikator SPM, program-program pendukung pencapaian indikator SDGs maupun program-program strategis daerah lainnya. Sedangkan selebihnya diproyeksikan untuk pemenuhan pendanaan program-program Prioritas Kedua (P2) yang merupakan program-program untuk Urusan Pemerintahan Lainnya.

Kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pati pada periode perencanaan dan penganggaran 4 (empat) tahun ke depan yang telah didistribusikan kedalam Prioritas Pertama dan Prioritas Kedua diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 3,45% dan diharapkan hasil proyeksi ini dapat memenuhi kebutuhan pendanaan sesuai harapan masyarakat meskipun belum optimal.

Hasil penghitungan proyeksi Kapasitas Riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pati periode Tahun 2023-2026 secara lengkap sebagaimana tertuang pada Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3 . 16 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 (dalam Rupiah)

NO.	PRIORITAS	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertum- buan
1.	PRIORITAS I (Belanja Urusan Pemerintahan Pendukung Utama Pencapaian Tujuan & Sasaran Daerah)	959.050.887.324	1.081.668.876.938	1.094.409.489.450	1.128.240.330.184	2,80%
2.	PRIORITAS II (Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya)	159.375.803.433	179.752.553.893	181.869.798.538	187.491.833.296	2,80%
TOTAL KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH		1.118.426.690.757	1.261.421.430.832	1.276.279.287.988	1.315.732.163.480	2,80%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Adanya permasalahan pembangunan kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis yang membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kabupaten Pati. Berdasarkan permasalahan pembangunan di setiap urusan dan lingkungan strategis selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan dalam pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Selanjutnya, permasalahan dan isu strategis ini akan menjadi bahan perumusan tujuan dan sasaran Daerah.

4.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan *outcome* yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta *outcome* yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan masalah pokok yaitu masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan. Penyebab utamanya adalah karena belum optimalnya layanan dasar pendidikan baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal/ kesetaraan, belum sesuainya kurikulum dengan perkembangan zaman, belum optimalnya pengelolaan pendidik dan kependidikan, dan masih lemahnya pengawasan dan pengendalian perizinan pendidikan. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pati.

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Belum optimalnya pengelolaan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan
		Belum optimalnya pelaksanaan SPM layanan dasar bidang pendidikan
		Belum optimalnya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
	Belum sesuai kurikulum dengan perkembangan zaman	Kurikulum mutan lokal pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal belum dilakukan penyesuaian
		Kompetensi Dasar Muatan Lokal belum terstruktur
	Belum optimalnya pengelolaan Pendidik dan Kependidikan	Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum merata
		Kompetensi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih belum sama
	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Perizinan Pendidikan	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Belum optimalnya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		

4.1.1.2. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional.

Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan masih menyisakan beberapa masalah pokok yaitu masih tingginya angka kesakitan dan kematian hal ini ditunjukkan dari indikator angka kematian ibu (AKI), prevalensi penyakit degeneratif, serta kurangnya gizi masyarakat terlihat dari indikator indeks keluarga sehat, masih adanya kasus stunting dan gizi buruk. Hal ini ditambah dengan masih belum optimalnya penyelenggaraan SPM layanan dasar bidang kesehatan, belum optimalnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, standar kapasitas sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman masih ada yang belum memenuhi standar, serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Selain beberapa permasalahan tersebut, bencana global yang terjadi pada tahun 2020 ini menjadi hal lain yang perlu mendapatkan perhatian di setiap daerah, yaitu terkait pengendalian Covid 19. Penanganan Covid 19 di Kabupaten Pati masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Pati.

Tabel 4.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya pembangunan kesehatan masyarakat ditandai dengan masih tingginya angka kesakitan dan kematian, serta rendahnya gizi masyarakat.	Belum optimalnya pelayanan dan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat belum optimal	Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP belum semuanya memenuhi standar	
		Belum optimalnya penyelenggaraan SPM layanan dasar bidang kesehatan.	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan belum sesuai standar	
		Belum Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan	
	Belum Optimalnya standar Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Belum optimalnya upaya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Belum optimalnya upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
			Belum tercukupinya ketersediaan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan untuk UKM dan UKP
			Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar
	Ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman masih ada yang belum memenuhi standar	Belum optimalnya upaya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Belum optimalnya upaya Pengendalian dan Pengawasan Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
			Belum optimalnya upaya Pemeriksaan dan pengawasan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
			Belum optimalnya upaya Promotif Preventif yang dilakukan
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Belum optimalnya peningkatan hidup sehat berbasis keluarga dan masyarakat	Belum optimalnya upaya Promotif Preventif yang dilakukan	
		Belum optimalnya peningkatan hidup sehat berbasis keluarga dan masyarakat	

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pati masih dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas infrastruktur dan penataan ruang. Masalah terkait pemenuhan infrastruktur wilayah meliputi pengelolaan sumber daya air, air baku, air minum, sanitasi, jaringan jalan, dan drainase. Sedangkan dalam urusan penataan ruang, masalah pokok yang dihadapi adalah pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal yang mengakibatkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pati secara lebih detil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Kualitas infrastruktur wilayah kurang optimal	Pengelolaan Sumber Daya Air belum optimal	Belum adanya Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	
		Masih banyak turap/talud/bronjong yang belum dibangun dan rusak	
		Belum adanya bangunan pengendali banjir	
	Ketersediaan air baku belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh wilayah	Tampungan dan sumber air baku masih belum mencukupi	
	Pengelolaan jaringan irigasi masih belum optimal	Masih ada DI yang belum terbentuk kelembagaannya	
		Banyak jaringan irigasi yang belum memenuhi standar	
	Layanan air minum layak dan aman belum optimal	Beberapa sumber air minum yang tersedia di kawasan pesisir mengandung kadar garam yang tinggi	
			Masih adanya daerah yang belum memiliki jaringan perpipaan air minum dari sumber yang layak
			Masih kurangnya sumber air baku untuk air minum di wilayah yang rawan kekeringan
			Pelaksanaan SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum belum optimal
	Pembangunan sarana prasarana persampahan belum optimal	Belum dibangunnya TPA yang layak di Pati Utara dan Selatan	
		Bangunan TPS 3R/TPST masih kurang	
	Layanan sanitasi layak belum optimal	IPLT yang tersedia sudah Overload	
			Belum adanya Perda terkait pengelolaan air limbah domestik
			Sarpras pendukung pengelolaan air limbah masih kurang
			Pelaksanaan SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik belum optimal
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase	Belum disusunnya masterplan drainase	
Masih belum adanya saluran drainase di beberapa ruas jalan utama			
Masih banyaknya saluran drainase yang rusak dan tersumbat			
Penyelenggaraan jalan kabupaten belum optimal	Beberapa ruas jalan mengalami kerusakan		
		Konstruksi jalan yang kurang sesuai dengan kondisi tanah	
Masih adanya bangunan pemerintah yang belum memenuhi standar	Masih adanya bangunan gedung pemerintah yang belum terbangun seperti Gedung Diklat, Gedung parkir Dewan		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kualitas bangunan milik masyarakat banyak yang belum memenuhi ketentuan	Adanya fasilitas bangunan gedung pemerintah yang sudah tidak memadai seperti Gedung KIR dan gedung DPUTR
		Masih banyaknya bangunan usaha yang belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi
		Masih banyak tenaga konstruksi yang belum bersertifikasi
		Masih banyak tenaga konstruksi yang belum ahli
Pengendalian Pemanfaatan Ruang belum optimal	Belum tersedianya beberapa instrumen pengendalian pemanfaatan ruang	Belum adanya Perda RDTR
		Sinronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) belum disusun

Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik sesuai standar pelayanan menjadi indikator tujuan RPJMD Tahun 2017-2022, dengan komponen pembentuknya adalah kapasitas air baku, kondisi irigasi, jalan dan jembatan, serta rasio tingkat pelayanan ruas jalan. Namun ke depannya yaitu pada RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, infrastruktur dalam kondisi baik menjadi Indikator Tujuan DPUTR dengan perubahan komponen perhitungan yang terdiri dari kapasitas air baku, kondisi irigasi, jalan dan jembatan, sanitasi, serta drainase.

4.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan perwujudan kawasan permukiman yang layak huni. Data tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase rumah layak huni. Meskipun demikian, hingga Tahun 2021 masih terdapat 21.299 unit rumah berkategori tidak layak huni.

Berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pati, berdasarkan SK Bupati Pati Nomor 050/1783 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 050/4852 Tahun 2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati, pada Tahun 2021 luas kawasan kumuh yang tersisa adalah 23,47 Ha. Namun kemudian pada Tahun 2021 dilaksanakan penyusunan SK Kumuh terbaru yang memasukkan kawasan kumuh yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam SK Kumuh Tahun 2017 dan memasukkan luasan SK Kumuh Tahun 2017 yang masih tersisa. Berdasarkan SK Bupati Pati Nomor 050/3985 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pati, luas kawasan kumuh yang ditetapkan adalah 177,89 Ha. Permasalahan yang dihadapi urusan perumahan dan kawasan permukiman secara lebih detail adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya masyarakat yang belum mampu menjangkau rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak	Kebutuhan terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman belum dapat diidentifikasi secara tepat	Data urusan perumahan dan kawasan permukiman yang belum terbaru
	Kualitas PSU perumahan yang menjadi rendah	Masih terdapat perumahan yang PSUnya belum diserahkan
		Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi terkait penerbitan Sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil
	Keberadaan dan tumbuhnya RTLH	Keterbatasan akses bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni
		Kegiatan rehabilitasi rumah layak huni masih minim
	Ada kawasan permukiman yang tidak dilengkapi dengan PSU yang layak	Perkembangan beberapa kawasan permukiman dan perumahan tidak disertai pembangunan PSU yang sesuai standar
		Belum adanya peraturan di daerah yang mengatur tentang kasiba/lisiba
	Masih adanya kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan kumuh belum optimal
Kurangnya sinergitas antar sektor dalam penanganan kawasan kumuh		
Penanganan rumah rusak akibat korban bencana belum optimal	Kurangnya koordinasi terkait penanganan rumah korban bencana	

4.1.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penanggulangan bencana merupakan permasalahan yang harus ditangani lintas sektoral, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja, melainkan juga melibatkan perangkat daerah yang lain seperti DPUTR, Disperkim, dan Dinas Sosial. Namun masalah yang selama ini dihadapi adalah masih lemahnya koordinasi lintas sektor, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPBD belum optimal, dan masih minimnya informasi terkait kebencanaan di masyarakat. Masalah tersebut akan menyebabkan rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Permasalahan yang dihadapi dalam sub urusan bencana secara lebih detail adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya upaya pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Masih lemahnya upaya Penegakan Peraturan Daerah
		Belum optimalnya upaya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Masih adanya kejadian kebakaran	Belum optimalnya upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Keterlambatan proses pemadaman dan pengendalian kebakaran
		Belum optimalnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran belum dilakukan secara berkala
		Belum optimalnya upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		Masih terbatasnya upaya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih belum optimal	Lemahnya koordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana	Kurangnya kesepahaman antar pemangku kepentingan tentang kebencanaan
		Masih minimnya koordinasi dengan PD terkait dan lembaga penanganan bencana yang lain seperti PMI dan BAZNAS dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
		Belum terlaksananya koordinasi yang baik dengan PD terkait dan lembaga lain dalam hal perencanaan dan penyediaan logistik bagi korban bencana
	Pelaksanaan tugas dan kewenangan BPBD belum optimal	Masih kurangnya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
		Beberapa dokumen terkait penanggulangan bencana masih belum disusun dan dilegalisasi
		Minimnya relawan/TRC yang bersertifikat dan perlu ditingkatkan kapasitasnya
	Masih minimnya penduduk yang memperoleh informasi kebencanaan	Masih minimnya kegiatan edukasi informasi kebencanaan kepada masyarakat
		Masih minimnya desa/kawasan tangguh bencana, terutama di daerah rawan bencana
		Minimnya rambu jalur evakuasi dan petunjuk pada daerah rawan bencana

4.1.1.6. Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Urusan kesejahteraan sosial dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan sosial. Secara umum Kabupaten Pati sudah melaksanakan fungsi pelayanan sosial, namun masih menyisakan beberapa masalah. Permasalahan pokok urusan sosial yaitu masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang disebabkan karena belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial, belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta belum optimalnya penanganan bencana. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pati.

Tabel 4.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial	belum optimalnya pemberdayaan sosial	Belum optimalnya pengembangan potensi Pekerja Sosial Masyarakat
		kurangnya keterlibatan dan rendahnya kapasitas Keluarga
		Kurangnya kapasitas SDM dan masih lemahnya peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
	belum optimalnya pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Masih lemahnya upaya Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial	belum optimalnya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
		belum optimalnya Pengelolaan dan pemanfaatan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
belum optimalnya penanganan bencana		Belum optimalnya perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial
		Masih rendahnya kapasitas Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pati masih belum optimal khususnya dalam serapan tenaga kerja. Data pada tahun 2020, menunjukkan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Pati sebesar 60,82%, nilai ini diperoleh dari data penduduk yang bekerja yang yang berusia 15 tahun keatas yaitu sebanyak 607.706 orang, dibagi jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yaitu sebanyak 999.173 orang. Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja pada tahun 2020 didominasi oleh lulusan setara SD sebesar 48,17%, SMP 20,93%, SMK/SMA 24,36%, dan sarjana/diploma 6,54%. Hal tersebut menunjukkan masih adanya tantangan untuk menyerap penduduk usia kerja agar mampu bekerja serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Maka dari itu, ada beberapa tantangan urusan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan yaitu:

Tabel 4.7 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingkat partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih rendah	Belum optimalnya layanan ketenagakerjaan daerah	Belum tersedianya data yang telah divalidasi dan verifikasi tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja
		Belum optimalnya fasilitasi bursa kerja bagi pencari kerja
		Belum optimalnya fasilitasi pelatihan tenaga kerja
		Belum optimalnya deteksi dini perselisihan hubungan industrial
		Masih adanya perusahaan yang tidak taat terhadap aturan

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Secara umum permasalahan pokok yang dihadapi yaitu Masih rendahnya kesetaraan gender serta rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan karena masih lemahnya peran dan kedudukan perempuan di masyarakat, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pati, kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, belum optimalnya pemenuhan hak - hak anak serta belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pati:

Tabel 4.8 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kesetaraan gender serta rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Masih lemahnya peran dan kedudukan perempuan di masyarakat	Belum optimalnya upaya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
		Masih lemahnya kedudukan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
		Masih lemahnya peran dan fungsi lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pati	Belum optimalnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
		Belum maksimalnya pemberian advokasi dan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Masih lemahnya peran dan fungsi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	
	Kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak	Masih rendahnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	
	belum optimalnya pemenuhan hak - hak anak		Belum optimalnya Pelembagaan Pemenuhan hak anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
			Masih lemahnya peran dan fungsi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
	belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak		Belum optimalnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak
			Belum optimalnya penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Masih lemahnya peran dan fungsi Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

4.1.2.3. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Pati masih perlu untuk dioptimalkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya desa rawan pangan, belum optimalnya penganekaragaman pangan lokal dan pengawasan keamanan pangan. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan pangan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Belum optimalnya tata kelola pangan	Belum terintegrasinya data cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
		Belum optimalnya infrastruktur pendukung ketersediaan pangan
		Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
		Belum optimalnya promosi keanekaragaman pangan lokal kepada masyarakat, pengusaha warung makan dan lembaga umum
		Data ketersediaan pangan belum lengkap dan akurat
		Belum optimalnya kelembagaan ketahanan pangan
	Masih adanya desa rawan pangan	Belum optimalnya penanganan rawan pangan
	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan belum memadai
		Belum optimalnya sertifikasi pangan segar

4.1.2.4. Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Pati masih dihadapkan pada adanya konflik pertanahan yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurang optimalnya kerjasama antar instansi terkait, tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang bersengketa, dan masih adanya pengelolaan pertanahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun detail pemetaan permasalahan pada urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Masih adanya konflik pertanahan	Kurang optimalnya kerjasama antar instansi terkait dalam deteksi dini dan resolusi konflik
	Administrasi pertanahan masih belum tertib.	Masih adanya pengelolaan pertanahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Masih belum tersedianya Sistem Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)

4.1.2.5. Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pati masih perlu ditingkatkan. Pada Tahun 2021, Nilai IKLH Kabupaten Pati adalah sebesar 52,35 dan masih menempati predikat sedang karena berada pada rentang 50-60, sehingga ke depannya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai predikat baik, agar kualitas lingkungan hidup menjadi lebih baik. Masalah yang dihadapi dalam pengukuran Indeks Kualitas Air dan Udara sebagai komponen IKLH adalah Laboratorium DLH Kabupaten Pati belum terakreditasi, sehingga masih adanya keterbatasan dalam uji sampling. Masalah lain yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup adalah masih tingginya volume sampah yang belum terkelola dengan baik, masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, serta belum optimalnya pengelolaan limbah domestik, peternakan dan industri. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pencemaran lingkungan hidup (Penurunan nilai IKLH)	Volume sampah yang belum tertangani masih tinggi	Masih banyaknya pembuangan sampah ke sungai
		Keterbatasan kapasitas TPA
		Masih minimnya kegiatan pengolahan sampah secara 3R di masyarakat
	Pencemaran sungai akibat buangan limbah yang belum terkelola dengan	Pembuangan limbah peternakan ke sungai
		Pembuangan limbah industri yang belum terolah dengan baik ke sungai
		Buangan limbah rumah tangga (domestik) ke sungai

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	baik	Pengambilan titik sampling untuk pengukuran kualitas air yang belum memenuhi persyaratan
		Lab LH untuk mendukung pengukuran kualitas air belum terakreditasi
	Kualitas udara masih perlu ditingkatkan	Buangan gas dari industri yang mengandung polutan
		Kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buangan yang mengandung polutan
		Pengambilan titik sampling untuk pengukuran kualitas udara yang belum memenuhi persyaratan
		Lab LH untuk mendukung pengukuran kualitas udara belum terakreditasi
	Kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau masih minim	Belum disusun dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		Pemeliharaan ruang terbuka hijau yang belum optimal

4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat erat kaitannya dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Secara umum, pelayanan kependudukan masih belum optimal, kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya pendaftaran penduduk, belum optimalnya pencatatan sipil serta belum optimalnya pengelolaan data informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pati:

Tabel 4.11 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan kependudukan	Belum optimalnya pendaftaran penduduk	Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk
		Belum Optimalnya Penataan Pendaftaran Penduduk
		Belum optimalnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	Belum optimalnya pencatatan sipil	Belum Optimalnya Pelayanan Pencatatan Sipil
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	Belum optimalnya pengelolaan data informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan	Belum Optimalnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
		Belum optimalnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Belum tersedianya profil kependudukan

4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pati masih memiliki tantangan berupa peningkatan status desa dari sebagian besar berkembang dan maju menjadi desa mandiri. Secara umum tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Pati masih belum optimal hal ini disebabkan belum optimalnya upaya penataan desa, masih rendahnya pelaksanaan kerja sama desa, belum tertatanya administrasi pemerintahan desa, dan belum optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di desa. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pati:

Tabel 4.12 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya upaya penataan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan desa
		sarana dan prasarana penataan desa masih terbatas
	Masih rendahnya pelaksanaan kerja sama desa	Belum optimalnya upaya fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
		Kawasan Perdesaan yang ada belum berkembang
	Belum tertatanya administrasi pemerintahan desa	Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
		Masih lemahnya pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
	Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di desa	Masih lemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
		Masih rendahnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
		Belum optimalnya upaya fasilitasi terhadap pemerintahan desa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan

4.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terjadinya peningkatan laju pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari kegagalan dalam pengendalian pendudukan dan kemunduran pengelolaan keluarga berencana, sehingga upaya pengendalian populasi penduduk sangatlah penting. Secara umum permasalahan pokok pada urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih tingginya angka kelahiran dan masih rendahnya kualitas pembangunan keluarga sejahtera, hal ini disebabkan karena belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan, masih tingginya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) serta belum optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Berikut adalah rumusan masalah dalam bidang pengendalian penduduk dan KB.

Tabel 4.13 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya angka kelahiran	Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan	Belum adanya keterpaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
		Belum berjalannya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten
Masih tingginya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)		Belum optimalnya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Belum optimalnya Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
		Belum optimalnya peran dan fungsi Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Belum optimalnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
		Belum optimalnya Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten
		Masih lemahnya Peran dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Masih rendahnya kualitas pembangunan keluarga sejahtera	Belum optimalnya upaya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Belum optimalnya upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Belum optimalnya upaya pembangunan keluarga
		Masih lemahnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga

4.1.2.9. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dalam upaya menciptakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah rasio pelayanan ruas jalan dan angka kecelakaan lalu lintas. Pada periode Tahun 2016 hingga 2021 rasio pelayanan ruas jalan bersifat fluktuatif dengan nilai terendah sebesar 2,5 pada Tahun 2018. Jumlah kecelakaan di Kabupaten Pati senantiasa mengalami peningkatan selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun pada Tahun 2021 angkanya berhasil diturunkan menjadi 1.096 kasus. Jumlah

kecelakaan tertinggi mencapai 1.065 kasus pada tahun 2018. Adapun detail permasalahan pembangunan pada urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kelancaran dan keselamatan lalu lintas belum optimal	Masih adanya kemacetan dan hambatan dalam kelancaran lalu lintas	Masih banyaknya fasilitas parkir yang belum berizin
		Masih minimnya pemantauan terhadap kegiatan perparkiran
		Masih adanya pemanfaatan badan jalan untuk parkir yang mengganggu lalu lintas di beberapa titik
Kurangnya prasarana dan sarana pendukung layanan perhubungan darat	Kurangnya fasilitas pada lokasi Pangkalan Truk di Depan Stadion Joyokusumo, Muktiharjo	Belum adanya terminal barang di ruas jalan nasional
		Belum adanya inventarisasi kebutuhan prasarana dan perlengkapan jalan
		Belum adanya Lokasi Workshop/Bengkel PJU
		Keterbatasan armada Mobil Crane untuk penunjang operasional PJU
		Belum adanya dokumen kajian rekayasa lalu lintas dan jaringan jalan
Manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal	Belum diterapkannya Pola pengembangan traffic light dengan sistem ATCS (Area Traffic Control System)	Belum adanya dokumen kajian kapasitas gedung dan tempat parkir uji KIR belum memadai
		Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan dari simpul transportasi ke pusat kegiatan
Pelayanan uji KIR kurang optimal		Belum tersedianya dokumen rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan
Pelayanan transportasi umum belum optimal		Penurunan jumlah dan kualitas layanan angkutan perdesaan
		Belum optimalnya pelayanan di Terminal Tipe C
		Belum adanya kajian lokasi Terminal Tipe A dan B dalam rangka mendukung reaktivasi KA dan jalan tol Semarang-Tuban

4.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal

karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang belum terintegrasi. Beberapa persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi berkaitan dengan jaringan fiber optik adalah belum mencakup semua wilayah sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Tabel 4.15 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi belum optimal	Jaringan intra pemerintah belum mencakup seluruh perangkat daerah terutama kecamatan dan kualitasnya belum memenuhi kebutuhan dalam mendukung kinerja pemerintah.	Jaringan FO belum merata di seluruh wilayah kabupaten Kurangnya koordinasi antara Diskominfo dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan jaringan intra pemerintah Belum adanya standar perangkat jaringan internal OPD yang harus dipenuhi untuk penggunaan jaringan intra pemerintah Belum terintegrasinya aplikasi pelayanan publik
	Layanan informasi dan komunikasi publik belum optimal	Kurang optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait update website pemerintah Kabupaten Pati dan website perangkat daerah Belum adanya standar informasi publik dalam website perangkat daerah

4.1.2.11. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi capaian kinerja dalam urusan koperasi dan UMKM belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kelembagaan koperasi yang masih memerlukan penataan serta pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Pati yang masih terhambat akibat rendahnya kapasitas SDM pelaku UMKM. Tantangan atau permasalahan kedepan yang dihadapi untuk memperbaiki sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Pati antara lain:

Tabel 4.16 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya daya saing koperasi	Belum optimalnya kualitas kelembagaan koperasi	Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
		Belum optimalnya penilaian kesehatan koperasi secara menyeluruh
		Belum optimalnya pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam
Masih lemahnya daya	Lemahnya kelembagaan UMKM	Data jumlah dan potensi usaha mikro belum lengkap dan akurat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
saing UMKM		Belum optimalnya usaha pemberdayaan usaha mikro Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro untuk berwirausaha

4.1.2.12. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal pada periode tahun 2017-2021 masih mengalami fluktuasi terkait realisasi investasi dan jumlah investor, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020 namun berhasil meningkat kembali di tahun 2021. Capaian yang menandai kualitas dan akuntabilitas sosial dalam hal perizinan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang cenderung stagnan, 3,504 pada tahun 2020 menjadi 3,502 pada tahun 2021. Urusan penanaman modal menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pati pada beberapa tahun ke depan, oleh karena itu masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diurai, yaitu:

Tabel 4.17 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya realisasi investasi dan jumlah investor	Belum optimalnya penciptaan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya informasi penyediaan ruang untuk investasi
		Belum optimalnya penyediaan dan akses peta potensi investasi
	Belum optimalnya pelayanan perijinan	Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah
		Belum optimalnya sistem informasi pelayanan perizinan
		Belum optimalnya promosi investasi

4.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Hal itu disebabkan oleh pembinaan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real. Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kabupaten Pati secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Beberapa permasalahan urusan pemuda dan olahraga dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya wirausaha pemuda	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	Belum optimalnya peningkatan kapasitas pemuda
		Belum optimalnya pengembangan organisasi kepemudaan
		Belum optimalnya pelibatan pemuda dalam organisasi kepramukaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya perolehan prestasi olahraga	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	Belum optimalnya sarana prasarana olahraga
		Belum optimalnya manajemen dan kapasitas SDM keolahragaan
		Belum optimalnya penyelenggaraan kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan

4.1.2.14. Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Pati masih belum optimal. Fungsi statistik melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti tercantum pada tabel di bawah ini, masalah terbesar pelaksanaan urusan Statistik adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi. Penyebab dari masalah pokok tersebut adalah belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral karena pemanfaatan portal satu data dan penerapan standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral belum optimal.

Tabel 4.20 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi	Penyediaan data statistik sektoral belum optimal	Portal satu data belum berjalan dengan optimal
		Belum optimalnya penerapan standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral

4.1.2.15. Persandian

Di Kabupaten Pati, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progress yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indeks keamanan informasi Kabupaten Pati masih rendah. Sama dengan Statistik, urusan Persandian juga melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur pengamanan informasi yang belum optimal.

Tabel 4.19 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan persandian (Indek Keamanan Informasi masih rendah)	Prosedur pengamanan informasi (persandian) belum optimal	Masih minimnya hardware dan software untuk keamanan informasi
		Belum disusunnya Rencana Strategis dan Arsitektur Pengamanan Informasi

4.1.2.16. Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan permasalahan pokok yang dihadapi yaitu belum optimalnya upaya dalam pelestarian warisan budaya daerah, hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengembangan objek pemajuan kebudayaan, belum optimalnya pembinaan sejarah di Kabupaten Pati, serta belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan kebudayaan di Kabupaten Pati:

Tabel 4.20 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Dan Cagar Budaya	Belum Optimalnya Pengembangan Kebudayaan	Kurang optimalnya Pengelolaan objek pemajuan Kebudayaan
		Kurang optimalnya Pelestarian Kesenian Tradisional
	Belum Optimalnya Pembinaan Sejarah Di Kabupaten Pati	Masih lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah
	Belum Optimalnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Belum optimalnya upaya penetapan cagar budaya peringkat kabupaten
		Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten

4.1.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Secara umum permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya layanan yang diberikan perpustakaan yang disebabkan karena belum maksimalnya pembinaan perpustakaan dan belum optimalnya upaya pelestarian koleksi dan naskah kuno. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Perpustakaan di Kabupaten Pati.

Tabel 4.21 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan yang diberikan perpustakaan	Belum maksimalnya pembinaan perpustakaan	Kurang optimalnya pengelolaan perpustakaan kabupaten dan sekolah
		Belum optimalnya upaya Pembudayaan Gemar Membaca di masyarakat
	Belum optimalnya upaya pelestarian koleksi dan naskah kuno	Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno
		Belum adanya pengalihmediaan Naskah Kuno untuk Dilestarikan dan didayagunakan

4.1.2.18. Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti terkait terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Secara umum permasalahan di bidang kearsipan yaitu belum optimalnya tata kelola arsip daerah, hal ini disebabkan karena belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan arsip serta belum optimalnya pengelolaan arsip statis kabupaten. Lebih jelasnya terkait rumusan permasalahan urusan kearsipan dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.22 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola arsip daerah	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip	Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah
		Belum terkelolanya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis secara optimal
	Belum optimalnya pengelolaan arsip statis Kabupaten	Belum optimalnya akuisisi arsip statis di Perangkat Daerah dan lembaga lainnya
		Belum optimalnya penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan daerah
		Belum terlaksananya pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun
	Belum optimalnya pelaksanaan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kab./kota	

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1. Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, baik untuk perikanan tangkap, budidaya, dan garam. Beberapa komoditas perikanan budidaya, seperti bandeng, lele dan nila salin merupakan komoditas unggulan dari Kabupaten Pati dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sektor perikanan adalah belum optimalnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, masih rendahnya konsumsi ikan, serta masih produksi perikanan yang masih cenderung fluktuatif.

Tabel 4.23 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perikanan dan Kelautan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya	Rendahnya produktivitas perikanan tangkap	Belum optimalnya layanan sarana prasarana nelayan perikanan tangkap
		Perlindungan terhadap nelayan kecil belum optimal
		Masih lemahnya pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap
	Belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya	Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perikanan budidaya
		Masih lemahnya kelembagaan pembudidaya ikan
		Belum optimalnya layanan kesehatan lingkungan budidaya

4.1.3.2. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kabupaten Pati, walaupun pengunjung wisata di Kabupaten Pati masih didominasi oleh wisatawan lokal. Permasalahannya adalah objek destinasi wisata potensial belum optimal serta kurang efektifnya promosi dan kerja sama antar daerah

untuk pengembangan pariwisata lokal. Beberapa permasalahan urusan pemuda dan olahraga dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.24 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya jumlah kunjungan wisata	Belum optimalnya manajemen pengembangan pariwisata	Belum efektifnya pengembangan destinasi wisata daerah didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan pariwisata
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata
		Belum optimalnya kompetensi SDM pariwisata
		Belum optimalnya pemasaran pariwisata

4.1.3.3. Pertanian

Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan peternakan. Beberapa keunggulan sektor pertanian dan peternakan adalah pada komoditas pertanian tanaman pangan, sapi potong, unggas, hortikultura sayuran dan buah-buahan. Sektor pertanian di Kabupaten Pati merupakan penyumbang PDRB kedua terbesar dengan capaian rata-rata 24,01% dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 3,13%. Optimalisasi serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang pertanian dan peternakan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah pemanfaatan sarana prasarana pertanian dan lemahnya kasitas kelembagaan petani.

Tabel 4.25 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Belum optimalnya pemanfaatan sarana pertanian	Belum optimalnya pengawasan penggunaan sarana pertanian
		Belum optimalnya pendampingan penggunaan sarana pertanian
	Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan sumber air pertanian
		Menurunnya luas lahan pertanian yang digunakan untuk usaha pertanian
	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani	Masih rendahnya kapasitas kelembagaan petani
Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian masih rendah		
Masih adanya kegagalan panen	Masih adanya kegagalan panen	Belum optimalnya pengendalian dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman
Belum optimalnya produksi peternakan	Belum optimalnya pemanfaatan sarana peternakan	Masih rendahnya pengawasan dan pengendalian peredaran bibit dan pakan ternak
		Masih rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan pakan ternak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya ketersediaan prasarana peternakan	Rendahnya ketersediaan bibit ternak yang berkualitas
		Belum optimalnya ketersediaan sumber air peternakan
	Kurangnya prasarana peternakan yang memadai	
	Masih tingginya angka kesakitan ternak	Terbatasnya jumlah petugas paramedik/medis veteriner
		Masih rendahnya pengetahuan peternak tentang penyakit hewan
		Masih kurang optimalnya pengendalian penyakit zoonosis

4.1.3.4. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Sektor perdagangan di Kabupaten Pati merupakan salah satu lapangan usaha kontributor utama PDRB yang pada tahun 2020 pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 3,58%, namun pada tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 7,12%. Permasalahan urusan perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.26 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kinerja perdagangan daerah	Belum optimalnya kualitas infrastruktur perdagangan dan pemasaran produk daerah	Belum optimalnya kinerja ekspor daerah
		Masih rendahnya sarana perdagangan tradisional yang memenuhi standar dan memenuhi daya tampung pelaku perdagangan skala kecil
		Belum optimalnya manajemen sarana perdagangan tradisional
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan
	Belum optimalnya distribusi bahan pangan pokok dan bahan penting lainnya	Belum optimalnya standarisasi UTTP secara berkala
		Belum optimalnya pengelolaan dan <i>updating</i> data/informasi terkait ketersediaan dan permintaan
		Belum tersedianya SDM pengelola data dan informasi harga bahan pangan pokok dan bahan penting lainnya
		Belum optimalnya peningkatan retribusi pasar

4.1.3.5. Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kabupaten Pati. Sebaran industri terbanyak di Kabupaten Pati

terdapat di Kecamatan Margorejo, Pati, Trangkil, Margoyoso dan Juwana. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya daya saing industri daerah	Belum optimalnya pembangunan industri daerah	Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan industri
		Belum optimalnya penyediaan data yang terintegrasi
		Belum optimalnya layanan perijinan industri karena belum terintegrasinya SIINas dengan Sistem Layanan Perijinan Berusaha secara elektronik

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.4.1. Sekretariat Daerah

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan perwujudan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai SAKIP. Sedangkan tingkat keberhasilan koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik digambarkan dengan IKM. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Sekretariat Daerah adalah:

Tabel 4.30 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya peran Setda sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Koordinasi dan evaluasi terkait kinerja urusan terkait Kesejahteraan Rakyat belum optimal	Bagian Kesejahteraan Rakyat belum memantau kinerja PD yang terkait secara berkala
	Fasilitasi Kerjasama daerah dalam mendukung pembangunan belum optimal	Kerjasama dengan Kampus dalam rangka KKN masih di Bappeda dan belum dikoordinasikan oleh Setda
		Peluang kerjasama daerah masih banyak yang belum diwujudkan
		Kerjasama daerah yang sudah ada belum berjalan secara optimal
	Koordinasi dan evaluasi terkait kinerja urusan terkait Perekonomian dan SDA belum optimal	Bagian Perekonomian dan SDA belum memantau kinerja PD yang terkait secara berkala
	Koordinasi dan evaluasi dalam mendukung pembangunan daerah belum optimal	Bagian pembangunan masih fokus pada pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik)
Tumpang tindih kegiatan	Masih ada kegiatan di luar	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dengan perangkat daerah lain	kegiatan pimpinan yang dipublikasikan yang seharusnya menjadi tugas Diskominfo
		Permasalahan batas desa dan konflik pertanahan masih ditangani oleh Bagian Tata Pemerintahan

4.1.4.2. Sekretariat DPRD

DPRD merupakan mitra Bupati dan Wakil Bupati yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Secara umum, kinerja capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Pati cukup baik, namun, dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Pati.

Tabel 4.28 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya Fungsi DPRD yang Optimal	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran DPRD	Belum optimalnya Fasilitasi Tugas DPRD;
		Belum optimalnya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		Belum optimalnya pengelolaan Aspirasi Masyarakat berbasis prioritas daerah
		Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas DPRD
		Belum optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4.1.5. Unsur Penunjang

4.1.5.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Pati. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan merupakan langkah awal dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal disebabkan belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan, perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan belum bisa direalisasikan dengan maksimal, pemanfaatan laporan pengendalian dan evaluasi yang belum maksimal, usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam Renja masih rendah, serta kurang berkualitasnya dokumen

perencanaan PD dibawah koordinasi masing-masing bidang. Permasalahan terkait perencanaan secara lebih detil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD dengan RKPD)	Kurang tajamnya analisis isu strategis	
		Kurang sinkronnya renja PD dengan RKPD	
		Kurang efektifnya pelaksanaan konsultasi publik	
	Perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan belum bisa direalisasikan dengan maksimal		Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perencanaan
			Kurangnya kualitas analisis data dan informasi perencanaan
			Kurangnya koordinasi dalam penyediaan dan analisis data antara OPD dengan Bappeda
			Kurang kompetensinya SDM PD di bidang perencanaan dan evaluasi
	Pemanfaatan laporan pengendalian dan evaluasi yang belum maksimal		Kurangnya koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Kurangnya koordinasi komunikasi dan sosialisasi antar pemangku kepentingan tentang permasalahan bidang IK, PPM dan PSDA
	Kurang berkualitasnya dokumen perencanaan PD dibawah koordinasi masing-masing bidang		Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan di Bappeda
Kurangnya kapasitas SDM Bappeda dalam memberikan asistensi penyusunan dokumen perencanaan PD			
Belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan monitoring perencanaan di masing-masing bidang			
Kurangnya koordinasi dalam perencanaan masing-masing bidang dengan PD terkait program kegiatan antara pusat dan daerah			

4.1.5.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 PAD di Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 4,32% per tahun.

Meskipun demikian, terdapat tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut khususnya yang bersumber dari pajak. Unsur penunjang pemerintahan keuangan juga memiliki isu atau permasalahan urgen berupa upaya mempertahankan capaian akuntabilitas keuangan yang telah mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 4.30 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah dan PDRB	Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah	Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pengelolaan pendapatan berbasis elektronik
		Belum adanya kesesuaian data objek pajak dengan NOP
		Belum optimalnya penetapan Wajib Pajak
		Belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi pelanggar pajak
	Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	Belum optimalnya inventarisasi aset
		Belum optimalnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah
		Belum efektifnya kebijakan pengelolaan barang milik daerah
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah
		Belum optimalnya administrasi pengelolaan keuangan daerah
		Belum optimalnya integrasi antara penganggaran dan perencanaan

4.1.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Di Kabupaten Pati, masalah pokok dari urusan kepegawaian, yaitu belum optimalnya penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan sistem merit yang disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan rekrutmen, mutasi, promosi ASN berdasarkan sistem merit dan belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Pati, yaitu:

Tabel 4.31 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan sistem merit	Belum optimalnya pelaksanaan rekrutmen, mutasi, promosi ASN berdasarkan sistem merit.	Belum efektifnya pelaksanaan pengadaan, pemberhentian pegawai
		Belum adanya integrasi sistem informasi kepegawaian
		Mutasi dan Promosi ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi ASN

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum diterapkannya metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai.
	Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai sistem merit.	Pengembangan Kompetensi Teknis belum berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi.
		Masih lemahnya peran dan fungsi Kelembagaan dalam Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

4.1.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan juga dibutuhkan inovasi daerah yang mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah yang lebih efektif dan efisien. Hingga saat ini inovasi yang dihasilkan di Kabupaten Pati masih perlu ditingkatkan. Adanya lomba kreasi dan inovasi belum sepenuhnya berhasil ditindaklanjuti ke tahapan yang lebih praktis. Inovasi oleh masyarakat juga belum sepenuhnya dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah. Permasalahan terkait urusan penelitian dan pengembangan secara lebih detil adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah dalam penyusunan kebijakan daerah	Belum optimalnya kualitas hasil penelitian	Kurangnya kapasitas SDM kelitbangan	
		Kurang efektifnya koordinasi antara bidang litbang dan fungsional peneliti	
		Kurangnya kesesuaian antara tema penelitian dengan isu strategis	
		Kurangnya tindak lanjut Rekomendasi dari hasil kajian/penelitian	
	Belum optimalnya tindak lanjut pengembangan, inovasi dan teknologi		Kurangnya koordinasi antara Bappeda dengan PD dalam pengembangan inovasi pelayanan publik
			Kurangnya koordinasi antara Bappeda dengan stakeholder terkait pengembangan inovasi peningkatan produk dan proses produksi
			Kurangnya tindak lanjut hasil lomba inovasi untuk mendapatkan fasilitasi lebih lanjut dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat

4.1.6. Unsur Pemerintahan Umum

4.1.6.1. Inspektorat Daerah

Dalam hal penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Pati terdapat permasalahan pokok yang dihadapi yaitu belum optimalnya sistem pengawasan internal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang disebabkan karena belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan internal, dan belum optimalnya penegakan integritas di Perangkat Daerah. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan pengawasan di Kabupaten Pati, yaitu:

Tabel 4.33 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan	Belum efektifnya penyelenggaraan pengawasan internal
		Belum adanya kesesuaian tindak lanjut sesuai ketepatan waktu dan rekomendasi pemeriksaan
	Belum optimalnya penegakan integritas di Perangkat Daerah	Adanya perubahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan
		Belum optimalnya Pendampingan dan asistensi

4.1.7. Unsur Kewilayahan

4.1.7.1. Kecamatan

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 4.34 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
	Belum optimalnya pelayanan kependudukan	Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana pelayanan
Masih perlunya penguatan fungsi	Belum optimalnya asistensi	Belum optimalnya pemutakhiran <i>database</i> pembangunan desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	pembangunan desa berpijak pada <i>evidence based</i>	Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

4.1.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum terkait pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik, sehingga terkait upaya membangun kohesivitas sosial dan peningkatan demokrasi dan kehidupan politik yang kondusif di daerah. permasalahan yang ada saat ini yaitu masih terdapat konflik di masyarakat yang disebabkan karena belum optimalnya upaya menanamkan karakter dan jiwa kebangsaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilpres dan pilkada, belum optimalnya pengawasan ormas, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masih lemah, dan belum optimalnya kerja sama Intelijen dalam pencegahan konflik sosial. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Pati, yaitu:

Tabel 4.35 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Masih terdapat konflik di masyarakat	Belum optimalnya upaya menanamkan karakter dan jiwa kebangsaan	Belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		Masih lemahnya koordinasi antar kelembagaan	
	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilpres dan Pilkada	Belum optimalnya pembinaan dan pendidikan politik	
		Belum optimalnya peran parpol dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik dan etika serta budaya politik	
	Belum optimalnya pengawasan ormas	Lemahnya regulasi dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan	
		Kurangnya pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masih lemah	Meningkatnya kerawanan sosial ekonomi (kasus narkoba)	
		Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama	
	Belum optimalnya kerjasama Intelijen dalam pencegahan konflik sosial	kurangnya partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum	Lemahnya koordinasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

4.2.1. Isu Internasional

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB. SDGs ini mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang terukur sampai dengan tahun 2030. Uraian 17 tujuan dari implementasi SDGs adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Sasaran dalam tujuan 7 ini tidak bisa dijabarkan lebih lanjut di Kabupaten Pati karena kewenangan ada di tingkat provinsi;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk

pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.2.2. Isu Nasional di dalam RPJMN 2020-2024

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahan Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan SDM: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Arahan Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan

cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Pengentasan kemiskinan; dan
 - Peningkatan produktivitas dan daya saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - Moderasi beragama; dan
 - Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar;
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:
- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 - Pembangunan rendah karbon; serta
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Secara khusus untuk wilayah Jawa Tengah berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo –

Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, Pemerintah Pusat merencanakan pengembangan poros utara-utara yang ditujukan untuk menjadi pendorong ekonomi dan pengembangan poros utara-selatan yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan. Dengan sektor unggulan yaitu Pertanian, Industri, Pariwisata, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan dan Pertambangan. Secara khusus, terdapat 5 usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pati dan beberapa program/kegiatan lintas kawasan. Usulan program/kegiatan tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.36 Program/Kegiatan Kawasan Wanarakuti dan Lintas Kawasan

No	Program/Kegiatan	Nilai Investasi (Rp Milyar)	Sumber Pendanaan
A.	Kawasan Wanarakuti		
1	Normalisasi Sungai Juwana, Kab. Pati	300	APBN
2	Pelebaran 4 lajur Jalan Kabupaten Pati, Batas Kabupaten Kudus/ Kabupaten Rembang, Kab. Pati	300	APBN
3	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Kab. Pati	100	APBD
4	Pembangunan Pabrik Garam, Kab. Pati	80	BUMD
5	Pengembangan Industri Garam Rakyat, Kab. Pati	50	BUMD/ Swasta
B.	Lintas Kawasan		
1	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Demak-Kudus-Pati- Rembang	15.000	KPBU
2	Pembangunan SPAM Regional Dadi Muria, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Jepara dan Kab. Grobogan	1.200	KPBU
3	Reaktivasi rel kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang	8.000	KPBU
4	Pengembangan SDM bidang IPTEK di Jawa Tengah, Seluruh Kabupaten/Kota	125	APBN
5	Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman), 21 kabupaten termasuk Kab. Pati	229	APBN

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMD 2018-2023

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMD 2018-2023, yaitu:

1. **Penanggulangan kemiskinan:** sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah didominasi wilayah pedesaan sebesar 12,8%, sedangkan di perkotaan 9,67%. Tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan, terutama dari kelompok petani (buruh petani, petani gurem, dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil). Adapun tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di 40% penduduk berpendapatan terbawah adalah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh, usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga, serta penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar;

- lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan; ketidakberdayaan, keterisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, dan munculnya gejala kultur komodifikasi data; adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan dan lokasi intervensi; serta dimensi politik dengan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum optimal.
2. **Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia:** capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sampai 2017 sebesar 70,52 yang masih berada di bawah capaian nasional sebesar 70,81. Beberapatantangan yang mendesak ditangani adalah sistem pendidikan yang dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah, serta memperkuat pendidikan budaya dan karakter; pemanfaatan bonus demografi untuk percepatan pembangunan daerah, serta sebagai angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing; angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah lebih baik dari daerah lain di Pulau Jawa dan nasional, namun angka kesakitan dan kematian masih cukup tinggi; ancaman yang bersifat nasional berupa melemahnya pemahaman budaya bangsa dan kebinekatunggalikaan, munculnya radikalisme dan terorisme, ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak, peredaran NAPZA, serta tantangan internalisasi nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat.
 3. **Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha:** ekonomi Jawa Tengah dalam konteks nasional dinilai baik dengan tiga sektor unggulan, yaitu industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam pengembangan tiga sektor tersebut, yakni: industri pengolahan didominasi oleh industri padat karya di tengah perkembangan menuju industri 4.0 dan ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor; sektor perdagangan dan jasa memiliki tren meningkat namun menghadapi masalah defisit neraca perdagangan; sektor produksi didominasi oleh UMKM yang menghadapi teknologi sederhana, lemahnya akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha; perlunya pengembangan sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi baru; sektor pertanian yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menghadapi persoalan kurangnya minat angkatan kerja dan semakin terbatasnya lahan pertanian di tengah meningkatnya peralihan fungsi lahan; serta realisasi investasi semakin meningkat, namun masih terdapat permasalahan berupa belum optimalnya kecepatan pelayanan perizinan, promosi investasi, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi, penggunaan teknologi, serta birokrasi yang belum efisien.
 4. Keberlanjutan **pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam:** beberapa tantangan pengelolaan lingkungan di Jawa Tengah adalah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih, pengelolaan hutan yang belum mampu memenuhi standar hutan lestari, peningkatan jumlah timbunan sampah karena peningkatan jumlah penduduk, maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin, kerusakan sumberdaya pesisir, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatnya kejadian bencana yang ditambah dengan belum optimalnya mitigasi dini bencana.
 5. **Kedaulatan pangan dan energi:** produksi beras mencukupi kebutuhan pangan utama dan berkontribusi pada kebutuhan pangan nasional, namun

tidak demikian halnya dengan produksi jagung dan kedelai, adanya arus impor tidak disertai dengan mekanisme pengamanan yang kuat, tantangan membangun sistem logistik daerah, masih perlunya peningkatan keragaman konsumsi dan mutu pangan; sedangkan terkait energi terdapat tantangan yang sama secara nasional yaitu ketergantungan kepada energi fosil, selain itu adanya tantangan penyediaan energi untuk industri, penguatan kehandalan sistem pasokan bagi pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mendorong investasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah.

6. Kesenjangan **wilayah**: terdapat kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan desa dengan kota. Meningkatkan akses antar wilayah menjadi isu penting dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa.
7. **Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah**: hal penting yang perlu diperhatikan terkait upaya peningkatan tata kelola pemerintahan adalah kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, dan pelayanan publik yang prima. Sedangkan upaya peningkatan kondusivitas wilayah dilaksanakan melalui kerjasama antar tingkat pemerintahan dan lintas sektor untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran.

4.2.4. Isu Strategis Daerah Sekitar Kabupaten Pati

Telaah perencanaan pembangunan daerah lain bertujuan untuk menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh antar daerah. Isu strategis daerah sekitar yang ditelaah adalah Kabupaten Blora, Rembang dan Grobogan yang sedang menjalankan proses pembangunan periode 2021-2026. Isu strategis ketiga daerah tersebut, yaitu:

1. Kabupaten Blora
 - a. Kualitas, daya saing sumberdaya manusia dan kesetaraan gender
 - b. Pemulihan ekonomi dan sosial
 - c. Infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah
 - d. Kelestarian lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - e. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
2. Kabupaten Rembang
 - a. Penguatan kualitas tata kelola pemerintahan
 - b. Kualitas sumber daya manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan
 - c. Pengendalian tata ruang dan perlunya pemantapan penyediaan infrastruktur dan ketersediaan air baku
 - d. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian
 - e. Masih tingginya angka kemiskinan
 - f. Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi)
 - g. Penguatan kemandirian desa
3. Kabupaten Grobogan
 - a. Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19
 - b. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri

- c. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan
- d. Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat
- e. Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern

4.2.5. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Pati di dalam RPJPD 2005-2025

Isu strategis jangka panjang Kabupaten Pati yang terdapat di dalam RPJPD 2005-2025 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
2. berkualitas.
3. Belum optimalnya pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berbasis kelestarian lingkungan hidup.
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
5. Kurangnya penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Kurangnya investasi dalam pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah
7. Kurangnya pengembangan pariwisata dan budaya.

4.2.6. Telaah RTRW Kabupaten Pati 2011-2031

Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Pati 2011-2031, yaitu terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki, meliputi:
 - a. membagi ruang wilayah pembangunan Daerah sesuai dengan perkembangan wilayah;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran; dan
 - c. mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian daerah.
2. Strategi pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk ekonomi lokal, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - b. mengembangkan prasarana energi yang mampu melayani seluruh wilayah Daerah;
 - c. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Daerah;
 - d. mengembangkan prasarana sumberdaya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.

3. Strategi pelestarian kawasan lindung, meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas perlindungan kawasan lindung;
 - b. menegaskan lokasi kawasan resapan air dan dapat digunakan sebagai kawasan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi resapan air;
 - c. memberikan fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dilindungi;
 - d. membatasi dan memindahkan secara bertahap permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan rawan bencana longsor; dan
 - e. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan proporsi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
4. Strategi pengembangan kawasan pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, meliputi:
 - a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan jaringan irigasi dan prasarana pendukung kegiatan pertanian; dan
 - c. mengembangkan pemasaran komoditas hasil pertanian.
5. Strategi pengembangan kawasan pesisir, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan pengembangan budidaya perikanan tambak;
 - b. melakukan perlindungan dan penanaman kawasan hutan mangrove pada lahan-lahan tepi pantai untuk melestarikan kelangsungan tambak, pantai, habitat perikanan, pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan wisata alam; dan
 - c. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan dan industrialisasi perikanan.
6. Strategi pemanfaatan potensi pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, meliputi:
 - a. menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin;
 - b. mengendalikan produksi pertambangan dalam rangka konservasi;
 - c. menerapkan dan meningkatkan recovery pertambangan;
 - d. menerapkan pemanfaatan kegiatan pertambangan yang memberikan kontribusi sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan; dan
 - e. mengelola kegiatan pertambangan dengan mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam menerapkan kegiatan pertambangan berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
7. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengaturan kegiatan industri yang berada diluar kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a. menyediakan lokasi kawasan peruntukan industri;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri termasuk sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan;
 - c. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri;
 - d. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan/atau rumah tangga;
 - e. mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan

- f. menerapkan sistem produksi bersih pada proses produksi industri.
- 8. Strategi pengembangan kawasan permukiman, meliputi:
 - a. menyediakan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas permukiman.
- 9. Strategi pengembangan kawasan strategis
 - a. mengembangkan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. mengembangkan kawasan pertanian (agropolitan).

Sementara itu, rencana struktur ruang Kabupaten Pati terdiri atas:

1. Rencana pengembangan sistem perkotaan yang terdiri atas:
 - a. Enam satuan wilayah pembangunan (SWP) dengan pusat pengembangan di kawasan perkotaan Pati, Tayu, Juwana, dan Kayen, serta Ibukota Kecamatan Trangkil dan Jakenan;
 - b. PKL yang berada di kawasan perkotaan Pati, Juwana, dan Tayu, serta ibukota Kecamatan Kayen diusulkan menjadi PKL;
 - c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten meliputi PPK di ibukota Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Gabus, Gembong, Jaken, Jakenan, Kayen, Margoyoso, Pucakwangi, Tambakromo, Trangkil, dan Winong, serta PPL di kawasan Desa Plaosan, Ngablak, Puncel, Karaban, Gunungwungkal, Ronggo, Margorejo, Sokopuluhan, Sukolilo, Prawoto, Maitan, Tlogorejo, Lahar, Wedarijaksa, dan Danyangmulyo.
2. Rencana sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
 - a. Sistem jaringan transportasi;
 - b. Sistem jaringan energi;
 - c. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana pola ruang Kabupaten Pati terdiri atas:

1. Kawasan lindung, yang meliputi:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya terdiri atas:
 - 1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dengan luas 1.180,97 (seribu seratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal dan Tlogowungu.
 - 2) Kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) hektar meliputi Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, Kayen, Margoyoso, Sukolilo, dan Tlogowungu.
 - b. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk.
 - c. Kawasan lindung geologi meliputi:
 - 1) Kawasan cagar alam geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo seluas kurang lebih 6.906 (enam ribu sembilan ratus enam) hektar meliputi Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.
 - 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar meliputi Sumber Air Sidomulyo/Klecung, Mburan, Gayam, Goboyo Ronggoboyo, Sonean/Bak Buntu, Sumber Kali Gede, Sumber Ringin, Mata Air Santi, Sumber Tambar, dan mata air lainnya.

2. Kawasan budidaya, yang meliputi:
- a. Kawasan hutan produksi terdiri atas:
 - 1) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 1.856,83 (seribu delapan ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) hektar tersebar di Kecamatan Cluwak, Gembong, Gunungwungkal, Kayen, Margorejo, Sukolilo, dan Tlogowungu.
 - 2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19.136,35 (sembilan belas ribu seratus tiga puluh enam koma tiga puluh lima) hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Cluwak, Dukuhseti, Gembong, Gunungwungkal, Jaken, Kayen, Margorejo, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, Wedarijaksa, dan Winong.
 - 3) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap selanjutnya disebut kawasan hutan produksi tetap/kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar di Kecamatan Tambakromo.
 - b. Kawasan pertanian terdiri atas:
 - 1) Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 54.216 (lima puluh empat ribu dua ratus enam belas) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah
 - 2) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 26.953 (dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar yang berada di wilayah Kecamatan Batangan, Cluwak, Dukuhseti, Gabus, Gembong, Gunungwungkal, Jaken, Jekenan, Juwana, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pati, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, dan Winong.
 - c. Kawasan perikanan
 - 1) Kawasan perikanan tangkap yang dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan yang berada di Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Juwana, dan Tayu.
 - 2) Kawasan perikanan budidaya air payau seluas kurang lebih 10.450 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh) hektar yang berada di Kecamatan Batangan, Dukuhseti, Juwana, Margoyoso, Tayu, Trangkil, dan Wedarijaksa.
 - 3) Kawasan perikanan budidaya air tawar seluas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar berada di Kecamatan Gabus, Kayen, Margorejo, dan kecamatan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas:
 - 1) Kawasan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
 - 2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berupa minyak dan gas bumi yang terdapat di Daerah.
 - e. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Batangan, Gabus, Gunungwungkal, Jaken, Jekenan, Juwana, Kayen, Margorejo, Margoyoso, Pati, Pucakwangi, Sukolilo, Tambakromo, Tayu, Tlogowungu, Trangkil, dan Wedarijaksa.

- f. Kawasan pariwisata meliputi pariwisata alam, budaya, dan buatan.
- g. Kawasan permukiman terdiri atas:
 - 1) Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 12.165 (dua belas ribu seratus enam puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.
 - 2) Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 23.295 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan wilayah Daerah.
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - 1) Komando Distrik Militer berada di Kecamatan Pati;
 - 2) Polisi Resort berada di Kecamatan Pati;
 - 3) Pos Angkatan Laut berada di Kecamatan Juwana;
 - 4) Komando Rayon Militer berada di seluruh Kecamatan;
 - 5) Polisi Sektor berada di seluruh Kecamatan;
 - 6) Batalyon Infanteri 410/Alugoro (Kompi senapan); dan
 - 7) kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

4.3 Penetapan Isu Strategis Kabupaten

4.3.1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan

Berdasarkan strukturnya, perekonomian Kabupaten Pati, ditopang oleh beberapa lapangan usaha, seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Sektor pertanian (secara luas) merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua dengan daya serap tenaga kerja tertinggi. Namun demikian, sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan negatif. Hanya di tahun 2019, saat pandemi Covid-19 gelombang pertama, sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan positif. Permasalahan utama pembangunan sektor pertanian adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Tenaga kerja di sektor ini, didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan usia lebih dari 40 tahun. Selain itu, minat generasi muda untuk bekerja di sektor ini juga rendah sehingga menyebabkan penerapan inovasi dan teknologi baru di sektor pertanian menjadi kurang optimal. Secara lebih spesifik, sektor perikanan merupakan subsektor pertanian dengan daya saing cukup tinggi, khususnya untuk perikanan budidaya dan garam. Namun demikian, ketersediaan sarana prasarana pendukung perlu ditingkatkan selain diversifikasi produk dan perluasan pemasaran.

Industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar serta serapan tenaga kerja yang tinggi. Beberapa tahun terakhir, serapan tenaga kerja perempuan di sektor ini mengalami peningkatan yang dapat dimaknai peningkatan peran perempuan dalam ekonomi. Sektor usaha industri pengolahan di Kabupaten Pati didominasi oleh industri berskala rumah tangga dan kecil dengan kualitas SDM dan kelembagaan yang masih lemah. Akibatnya, industri dengan skala ini cenderung memiliki kerentanan ketika terjadi pelemahan ekonomi serta kurang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Permasalahan lain pada sektor industri pengolahan adalah keterkaitan industri hulu dan hilir serta keterkaitan dengan sektor usaha lainnya. Pengembangan industri hulu belum bersinergi dengan sektor pertanian, sementara industri hilir belum secara optimal

bersinergi dengan sektor usaha perdagangan, khususnya untuk peningkatan ekspor.

Perdagangan menjadi salah satu sektor yang mengalami kontraksi cukup signifikan selama masa pandemi dan menjadi indikasi pondasi sektor ini kurang kuat dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Sebagaimana industri pengolahan, sektor perdagangan juga didominasi oleh usaha mikro dengan lingkup pasar lokal, dimana pengelolaan dan penataan pasar lokal belum optimal. Menilik pada perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, lingkup pasar menjadi lebih luas dan tanpa batas dengan bertumbuhnya *ecommerce*. Oleh karenanya kapasitas pelaku usaha perdagangan perlu ditingkatkan sehingga dapat memperluas pemasaran melalui pasar digital.

Dampak positif pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya dinikmati oleh kelompok penduduk tertentu, namun oleh seluruh masyarakat untuk mencapai pemerataan kesejahteraan. Secara umum pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Pati berada pada level sedang, namun terdapat potensi peningkatan kesenjangan ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi. Penurunan pengangguran juga menjadi tantangan pembangunan selama empat tahun mendatang. Tren peningkatan jumlah pengangguran sudah terjadi sebelum masa pandemi dan semakin meningkat selama masa pandemi. Pengangguran di Kabupaten Pati didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat. Oleh karenanya diperlukan upaya penciptaan lapangan kerja untuk kelompok tersebut. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan realisasi investasi. Selama dua tahun terakhir, realisasi investasi di Kabupaten Pati mengalami peningkatan yang cukup baik dengan masuknya beberapa investor asing. Industri yang ditawarkan bersifat padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini lah yang menyebabkan tingginya tingkat elastisitas tenaga kerja. Dalam jangka pendek, hal tersebut efektif untuk penurunan pengangguran, namun dapat berdampak negatif terhadap produktivitas sektor industri dalam jangka panjang.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu daya saing untuk menarik investasi. Sementara itu, kondisi tenaga kerja di Kabupaten Pati masih relatif rendah karena didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Oleh karenanya, perlu upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Selain SDM, ketersediaan infrastruktur juga perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan utama berkaitan infrastruktur adalah pengelolaan sumber daya air yang belum optimal, pemerataan pemenuhan kebutuhan air baku, dan penyediaan sarana persampahan yang belum optimal. Selanjutnya, kondisi wilayah yang kondusif juga dibutuhkan untuk mewujudkan iklim investasi. Kabupaten Pati yang terletak di wilayah pantura, wilayah yang luas, serta jumlah penduduk yang tinggi berpotensi memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindak kriminal di beberapa wilayah. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki kerentanan terhadap beberapa jenis bencana, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Akan tetapi, kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana belum optimal. Keberlanjutan merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan. Oleh karenanya, kelestarian lingkungan perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan setiap aktivitas ekonomi. Beberapa permasalahan lingkungan hidup antara lain penanganan sampah, penurunan kualitas air dan udara, serta keterbatasan kualitas ruang terbuka hijau.

4.3.2. Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Pati hingga 2026. Peningkatan jumlah penduduk miskin selama pandemi Covid-19 membuktikan bahwa penduduk miskin merupakan kelompok yang paling rentan terdampak ketika terjadi guncangan ekonomi, terlebih penduduk yang tergolong dalam kelompok sangat miskin. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berpotensi meningkatkan kesenjangan antar penduduk miskin dan membuat upaya penurunan kemiskinan menjadi lebih sulit terwujud.

Upaya menurunkan kemiskinan dapat dilakukan dengan membantu penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin antara lain kebutuhan akan jaminan kesehatan dan perumahan yang layak. Hingga tahun 2022, masih terdapat penduduk miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan serta perumahan yang layak. Lebih lanjut, upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin terhambat oleh ketersediaan data kemiskinan yang valid dan terbaru. Oleh karena perbaikan dan pembaruan data kemiskinan perlu menjadi agenda yang terus dilaksanakan.

Kemiskinan merupakan isu multidimensional dimana penyelesaiannya membutuhkan sinergi berbagai sektor dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Sebenarnya, perangkat daerah terkait telah melaksanakan program dan kegiatan pengurangan kemiskinan, namun bersifat parsial dan belum saling terintegrasi. Hal tersebut utamanya disebabkan Kabupaten Pati belum memiliki peta jalan penurunan kemiskinan untuk memberikan arah dan pedoman dalam upaya penurunan kemiskinan.

Selain itu, pemerintah daerah juga belum dapat mengoptimalkan peran swasta dan masyarakat dalam upaya penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan secara integratif membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karenanya, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan membantu pembiayaan kegiatan penurunan kemiskinan melalui CSR. Selanjutnya, upaya penurunan kemiskinan yang paling efektif sebenarnya adalah meningkatkan kapasitas penduduk miskin. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran desa sebagai pranata pemerintahan terendah.

4.3.3. Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Salah satu kelemahan dalam peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Pati adalah rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah. Penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata hanya memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dari 8 tahun. Kondisi ini lah yang selanjutnya menyebabkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pati relatif rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja selanjutnya berdampak terhadap rendahnya pendapatan yang dapat dilihat dari tingkat pengeluaran yang rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan patut menjadi prioritas pembangunan selama empat tahun mendatang. Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan.

Kualitas SDM Kabupaten Pati untuk aspek kesehatan menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). Namun demikian, peningkatan UHH berpotensi menjadi

tantangan pembangunan karena dapat meningkatkan angka ketergantungan dan meningkatnya biaya layanan kesehatan untuk lansia. Secara umum, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata merupakan tantangan pembanguna di Kabupaten Pati selama empat tahun mendatang. Pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir telah membuktikan bahwa layanan kesehatan di Kabupaten Pati belum siap dalam menghadapi endemi maupun pandemi. Ketidaksiapan tersebut menyebabkan menurunnya derajat kesehatan di Kabupaten Pati. Oleh karenanya transformasi layanan kesehatan dibutuhkan untuk menghadapi kejadian luar biasa di masa yang akan datang. Selain itu terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan pada makanan/minuman jadi dan tembakau yang dapat meningkatkan prevalensi berbagai jenis penyakit terutama degeneratif. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan sebagai upaya promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dapat berhasil apabila diantaranya pemerintah dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati selama beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan, namun jumlah pernikahan di bawah usia 19 tahun masih relatif tinggi. Kondisi ini selanjutnya dapat menghambat peningkatan kualitas manusia karena dapat meningkatkan kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat ditemukan di berbagai bidang, namun kesenjangan terbesar terjadi di bidang ekonomi. Secara ekonomi, pengeluaran perkapita perempuan relatif lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita laki-laki. Oleh karenanya pemberdayaan perempuan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Upaya ini dapat diantaranya dapat dicapai dengan meningkatkan peran perempuan dan kedudukan peran dalam politik dan kepemimpinan. Selain kesenjangan gender, kesenjangan kualitas manusia juga ditemukan pada sebagian wilayah. Kualitas manusia yang relatif lebih rendah seringkali ditemukan di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi atau ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang terbatas.

4.3.4. Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik

Birokrasi yang kuat merupakan elemen penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penyediaan layanan publik yang berkualitas. Selama beberapa tahun terakhir, reformasi birokrasi di Kabupaten Pati belum menunjukkan hasil yang optimal. Permasalahan pokok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas adalah belum terintegrasinya elemen perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi secara optimal.

Berkaitan dengan perencanaan, ketersediaan data yang akurat dan selalu terbaru menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas perencanaan. Selain itu, koordinasi antar-perangkat daerah belum terjalin secara optimal sehingga tumpang tindih kegiatan masih terjalin dan intergrasi pencapaian tujuan pembangunan belum optimal. Kondisi tersebut utamanya disebabkan belum optimalnya kualitas pengawasan internal di Kabupaten Pati. Di akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, tingkat kematangan pengawasan Kabupaten Pati berada pada level 2 atau berkembang, yang dapat diartikan evaluasi terhadap efektifitas pencapaian tujuan daerah. Selanjutnya, tantangan peningkatan tata kelola pemerintahan pada aspek penganggaran adalah kemandirian fiskal Kabupaten Pati yang relatif masih rendah. Hal

tersebut menyebabkan ketergantungan pemerintah terhadap pendanaan dari pusat masih tinggi, sehingga beberapa permasalahan daerah yang perlu segera ditangani tidak dapat terdani secara optimal. Oleh karena itu, optimalisasi potensi pendapatan daerah dan intensifikasi serta ekstensifikasi objek pajak perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan, peningkatan kualitas birokrasi juga membutuhkan SDM yang berkualitas dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi perlu dilakukan. ASN yang profesional, selain dapat meningkatkan kualitas birokrasi juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selama masa pandemi Covid-19, layanan publik di Kabupaten Pati mengalami hambatan dan selanjutnya sebagian pelayanan publik di Kabupaten Pati telah bertransformasi dengan menyediakan layanan digital. Perluasan penyediaan layanan digital masih perlu diupayakan selama periode empat tahun mendatang. Selain itu, kualitas layanan juga perlu mendapatkan perhatian diantaranya dengan meningkatkan integrasi layanan publik.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam pembahasan bab sebelumnya telah dirumuskan ada 4 (empat) isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat;
4. Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan isu strategis selanjutnya dirumuskan kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)
 - 1.2 Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat
 - 1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah
 - 1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
 - 1.5 Meningkatkan Kondusifitas wilayah
 - 1.6 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Menurunnya pengangguran, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu: Meningkatkan kesempatan atau peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja.
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
 - 3.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar
4. Meningkatkan kualitas hidup penduduk, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 4.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - 4.2 Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan
 - 4.3 Meningkatkan standar hidup masyarakat
5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu: Meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
 - 6.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik;
 - 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten;
 - 6.3 Meningkatkan Kemandirian fiskal daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran sebagai kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Merespon Isu Strategis RPD

Respon Isu Strategis RPD	Tujuan RPD	Sasaran RPD
Isu Strategis I : Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)
		1.2 Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat
		1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah
		1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
		1.5 Meningkatnya Kondusifitas wilayah
		1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	2. Menurunnya pengangguran	2.1 Meningkatnya kesempatan dan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja
Isu Strategis II : Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	3. Menurunnya tingkat kemiskinan	3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
		3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
Isu Strategis III : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat	4. Meningkatnya kualitas hidup penduduk	4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
		4.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat
	5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	5.1 Meningkatnya kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
Isu Strategis IV : Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik
		6.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
		6.2 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan tidak lepas dari amanat RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Pati tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat

Kabupaten Pati yang harus dapat diukur guna mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan yang ingin dicapai. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pati adalah **“Pati Bumi Mina Tani Sejahtera”**, Untuk mencapai visi pembangunan daerah sebagaimana tersebut diatas ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan.
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah.
6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal.

Sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pati tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Pati Bumi Mina Tani Sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai Kabupaten Pati Bumi Mina Tani Sejahtera dalam dua puluh tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok pada setiap tahapan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang diimplementasikan dalam beberapa sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berbudaya;
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Terwujudnya prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan;
5. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah;
6. Terwujudnya pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal.

Gambaran kesesuaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025 dengan Sasaran RPD 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Kesesuaian Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025 dengan Sasaran RPD 2023-2026

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025	Sasaran RPD 2023-2026
Sasaran Pokok 1 RPJP: Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berbudaya	1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
	3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
	3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025	Sasaran RPD 2023-2026
	4.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 4.2 Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan 5.1 Meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
Sasaran Pokok 2 RPJP: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	1.5 Meningkatkan Kondusifitas wilayah 1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan) 1.6 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Pokok 3 RPJP: Terwujudnya tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	1.5 Meningkatkan kondusivitas wilayah 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten 6.3 Meningkatkan Kemandirian fiskal daerah
Sasaran Pokok 4 RPJP: Terwujudnya prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan	1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan) 1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah 2.1 Meningkatkan kesempatan dan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja 3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin 3.2 Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar
Sasaran Pokok 5 RPJP: Terwujudnya iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah	1.5 Meningkatkan kondusivitas wilayah 2.1 Meningkatkan kesempatan dan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja 6.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik 6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
Sasaran Pokok 6 RPJP: Terwujudnya pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal	1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat 1.5 Meningkatkan kondusivitas wilayah

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 juga dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mewujudkan visi, terdapat juga 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan

- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
 - c. Pembangunan rendah karbon; serta
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Gambaran mengenai Keselarasan antara Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan Sasaran RPD Kabupaten Pati 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Keselarasan antara Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan Sasaran RPD Kabupaten Pati 2023-2026

Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kabupaten Pati 2023-2026
Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)
Agenda 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah
	1.5 Meningkatnya kondusivitas wilayah
	1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	2.1 Meningkatnya kesempatan dan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja
Agenda 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
	3.1 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
	4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
	5.1 Meningkatnya kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
	2.1 Meningkatnya kesempatan dan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja
Agenda 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1.5 Meningkatnya kondusivitas wilayah
	6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten

Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kabupaten Pati 2023-2026
Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar	1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah
	3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
	3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1.5 Meningkatnya kondusivitas wilayah
	1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1.5 Meningkatnya kondusivitas wilayah
	6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik
	6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
	6.3 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah

Selanjutnya dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 ini juga tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Tengah 2018-2023.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mengangkat visi **Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dengan misi yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Sedangkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Tengah 2018-2023 sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu terciptanya kohesi sosial masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
 - c. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.
3. Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah;

- b. Menurunnya pengangguran terbuka.
- 4. Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah
- 5. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender.
- 6. Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan;
 - b. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Gambaran Keselarasan antara Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Tengah 2018-2023 dengan Sasaran RPD Kabupaten Pati 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Keselarasan antara Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Tengah 2018-2023 dengan Sasaran RPD Kabupaten Pati 2023-2026

Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Tengah 2018-2023	Sasaran RPD Kabupaten Pati 2023-2026
Sasaran 1: Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1.5 Meningkatnya kondusivitas wilayah
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.5 Meningkatnya kondusivitas wilayah
	6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik
Sasaran 3: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
	6.3 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah
Sasaran 4: Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	6.2 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
Sasaran 5: Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat
	3.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin
	3.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
Sasaran 6: Menurunnya pengangguran terbuka	2.1 Meningkatnya kesempatan dan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja
Sasaran 7: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama
	1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah
Sasaran 8: Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
Sasaran 9:	4.1 Meningkatnya derajat kesehatan

Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Tengah 2018-2023	Sasaran RPD Kabupaten Pati 2023-2026
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	masyarakat
Sasaran 10: Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	5.1 Meningkatnya kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
Sasaran 11: Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 12: Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1.5 Meningkatnya kondusivitas wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebut sebagai pendekatan perencanaan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tidak kalah penting juga menggunakan pendekatan integratif, yakni menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1 Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas		Laju Pertumbuhan ekonomi	%	3,38*	3,65	4,25	4,72	5,34	5,80	5,80
	1.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama	Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian	%	-0,20	3,22	3,26	3,65	3,68	3,80	3,80
		Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan	%	3,42	4,85	5,07	5,43	5,58	5,80	5,80
		Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Perdagangan	%	7,12	1,6	2,15	3,49	4,42	5,79	5,79
	1.1.2 Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat	PDRB Perkapita ADHB	Rupiah (000)	34.159,08	36.379,93	41.761,15	45.014,27	48.510,69	52.328,31	52.328,31
		PDRB Perkapita ADHK	Rupiah (000)	23.404,89	23.784,28	24.648,32	25.644,22	26.828,88	28.209,66	28.209,66
	1.1.3 Menguatnya infrastruktur wilayah	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	%	75,00	75,50	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00
	1.1.4 Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Pendapatan (versi Word Bank)	Angka	18,69	18,90	19,03	20,14	20,64	21,48	21,48
	1.1.5 Meningkatkan kondusifitas	Angka Kriminalitas	Angka	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,39
		Persentase kerugian	%	0.065	0.063	0.060	0.055	0.050	0.048	0.048

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wilayah	ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB								
	1.1.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	Angka	52,35	52,47	52,61	52,87	53,13	53,39	53,39
1.2		TPT	%	4,60	4,27	3,84	3,49	3,33	3,19	3,19
Menurunnya	1.2.1 Meningkatnya kesempatan dan peluang kerja serta penyerapan tenaga kerja	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	Angka	2,67	2,00	1,70	1,40	1,15	0,90	0,90
pengangguran		TPAK	%	68,99	69,00	69,15	69,30	69,45	69,60	69,60
2.1		Angka Kemiskinan	%	10,21	10,07	9,82	9,65	9,54	9,42	9,42
Menurunnya	2.1.1 Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Angka	1,69	1,63	1,56	1,50	1,43	1,37	1,37
tingkat		Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,42	0,39	0,36	0,32	0,29	0,26	0,26
kemiskinan	2.1.2 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar	Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	%	81,29	81,79	82,29	82,79	83,29	83,79	83,79
		Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	%	85,15	85,65	86,15	87,15	88,15	89,15	89,15
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	94,26	94,56	94,87	95,48	96,09	96,70	96,70
3.1		IPM	Angka	72,28	72,68	73,08	73,48	73,88	74,28	74,28
Meningkatnya kualitas hidup penduduk	3.1.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	76,27	76,29	76,31	76,33	76,35	76,37	76,37
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	51,11	53,11	56,29	58,20	59,11	60,02	60,02
	3.1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,52	7,55	7,63	7,68	7,75	7,75
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94	13,00	13,08	13,13	13,20	13,23	13,23
	3.1.3	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah (000)	10.506,00	10.746,10	10.946,20	11.104,80	11.263,40	11.422,00	11.422,00
	Meningkatnya standar hidup masyarakat									
3.2		IPG	Angka	92,21	92,23	92,26	92,31	92,36	92,41	92,41

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	3.2.1 Meningkatnya kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan	Rasio Angka Harapan Hidup antara Perempuan dan Laki-laki	Angka	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
		Rasio Rata-rata Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki	Angka	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
		Rasio Harapan Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki	Angka	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
		Rasio Pengeluaran Per Kapita antara Perempuan dan Laki-laki	Angka	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	66,39	66,50	66,70	67,00	67,30	67,60	67,60
4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	62,02	62,05	62,10	62,20	62,40	62,50	62,50
	4.1.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	IKM	Angka	3,40	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60
	4.1.2 Terwujudnya	Nilai SAKIP	Angka	65,04	65,04	65,04	65,50	65,70	66,00	66,00

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	32,01	61,00	61,00	65,00	71,00	75,00	75,00
		Nilai Maturitas SPIP	Level	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,00
		MRI (Indeks Manajemen Resiko)	Level	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,00
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	-	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,00
		Indeks SPBE	Angka	2,75	2,75	2,75	2,78	2,78	2,80	2,80
		IPKD	Angka	60,15	62,45	64,75	67,05	69,35	71,65	71,65
	4.1.3 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah	Rasio Ketergantungan Fiskal	Angka	85,74	85,50	85,26	85,02	84,78	84,54	84,54
		Rasio Kemandirian Fiskal	Angka	16,63	17,38	17,59	17,78	17,85	17,92	17,92

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu tahun 2023-2026 dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah. Secara umum bab ini mencakup strategi dan arah kebijakan, arah kebijakan tahunan, dan program pembangunan Daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2023-2026 yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan dijabarkan pada Bab IV.

Strategi dan arah kebijakan dengan demikian sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Oleh karena itu, pilihan program dan indikator di dalam rencana pembangunan daerah (RPD) dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan. Uraian terkait dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6 . 1 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
	Isu Strategis I : Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;			
I.1	Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan,	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah penyelenggara urusan bidang sumber daya alam	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja urusan pertanian

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		dan Perdagangan)		
			Peningkatan produksi pertanian	Peningkatan Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan sarana pertanian
				Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan penyediaan bibit ternak
				Peningkatan ketersediaan prasarana pertanian
				Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
				Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
			Peningkatan produksi perikanan	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan
				Peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan
			Peningkatan pemasaran hasil pertanian	Peningkatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air terkait pengembangan sektor pertanian	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan jaringan irigasi
			Peningkatan Kapasitas kelembagaan UKM dan Koperasi	Peningkatan kapasitas pelaku UKM dan Koperasi
			Penguatan koordinasi antar perangkat daerah penyelenggara urusan perindustrian	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja urusan perindustrian
			Peningkatan kemudahan perizinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Optimalisasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	Optimalisasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Optimalisasi ketersediaan data dan analisis industri
			Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung industri	Peningkatan penyediaan air baku untuk mendukung kegiatan industri
				Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan air minum untuk mendukung kegiatan industri
				Penambahan sarana prasarana persampahan untuk mendukung kegiatan industri
				Peningkatan kualitas jaringan jalan terutama di sekitar kawasan peruntukan industri
				Pengoptimalan manajemen dan rekayasa lalu lintas terutama di sekitar kawasan peruntukan industri
				Peningkatan pengawasan terhadap rekomendasi Andalalin
			Peningkatan Kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi
			Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang perekonomian	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja urusan perdagangan
			Peningkatan Pengembangan ekspor	Peningkatan kapasitas pelaku ekspor
				Optimalisasi pameran dagang
			Peningkatan Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri
			Peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan	Peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Peningkatan Kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi
			Peningkatan kemudahan perizinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal
			Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung usaha perdagangan	Peningkatan penyediaan air baku untuk mendukung kegiatan industri
				Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan air minum untuk mendukung kegiatan industri
				Penambahan sarana prasarana persampahan untuk mendukung kegiatan perdagangan
				Peningkatan kualitas jaringan jalan terutama di sekitar pusat-pusat perdagangan
				Pengoptimalan manajemen dan rekayasa lalu lintas terutama di sekitar pusat-pusat perdagangan
				Peningkatan pengawasan terhadap rekomendasi Andalalin terhadap kegiatan perdagangan berskala besar
		Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat		Perluasan pemasaran dan penguatan jaringan perdagangan produk dalam negeri
			Peningkatan Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
				Peningkatan akses pemasaran produk dalam negeri
			Peningkatan kesejahteraan petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
			Pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Pemberdayaan Usaha kecil dan usaha mikro serta koperasi	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi
			Peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha kecil	Pendampingan pada perusahaan kecil
			Peningkatan produktivitas SDM tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja
			Peningkatan daya tarik pariwisata	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata
			Optimalisasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Penguatan tata kelola desa, optimalisasi potensi desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa
			Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Percepatan fasilitasi penyaluran bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan data fakir miskin
				Peningkatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan.
			Peningkatan kemudahan perizinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal
		Menguatnya infrastruktur wilayah	Penguatan koordinasi dengan perangkat daerah bidang urusan pekerjaan umum	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja urusan pekerjaan umum
			Peningkatan penyediaan air baku	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi bangunan penampung air baku
				Pembangunan dan pemeliharaan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				bangunan pelindung mata air
			Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi	Peningkatan kualitas dan cakupan layanan jaringan irigasi
			Peningkatan layanan air minum	Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan perpipaan dan non perpipaan untuk air minum
			Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah	Penyediaan dan optimalisasi sarana prasarana pendukung sistem air limbah domestik
				Penetapan peraturan daerah dalam mendukung kinerja sistem air limbah domestik
			Peningkatan dan pengembangan sistem drainase	Penyusunan masterplan drainase
				Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan drainase
			Peningkatan penyelenggaraan jalan kabupaten	Peningkatan kualitas jaringan jalan
		Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah Bidang perekonomian	Penguatan koordinasi dan evaluasi terkait distribusi perekonomian
			Peningkatan kesejahteraan petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
			Perluasan pemasaran dan penguatan jaringan perdagangan produk dalam negeri	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
				Peningkatan akses pemasaran produk dalam negeri
			Pemberdayaan Usaha kecil dan usaha mikro serta koperasi	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi
			Pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan
			Peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha kecil	Pendampingan pada perusahaan kecil

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Penguatan tata kelola desa, optimalisasi potensi desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa
		Meningkatnya kondusivitas wilayah	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah penyelenggara urusan ketentraman dan ketertiban umum	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum
			Peningkatan kondusivitas wilayah yang didukung dengan stabilitas wilayah, kenyamanan ketentraman dan ketertiban umum, serta penurunan konflik sosial	Peningkatan upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Peningkatan penegakan perda yang didukung dengan penguatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
				Peningkatan upaya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (terkait narkoba, toleransi antar kelompok masyarakat)
				Penguatan ideologi dan penanaman karakter kebangsaan
				Penguatan koordinasi kelembagaan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial.
				Penguatan fungsi koordinasi di kecamatan terkait Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Peningkatan pengendalian dan pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Penguatan koordinasi antar perangkat daerah penyelenggara urusan ketentraman dan ketertiban umum (penanggulangan bencana)	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja penanganan mitigasi bencana
			Penguatan upaya penanggulangan bencana	Peningkatan layanan informasi kebencanaan kepada masyarakat
				Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
				Peningkatan perlengkapan/peralatan dan SDM dalam penyelamatan dan evakuasi bencana,
				Pengoptimalan sistem dasar penanggulangan bencana dengan melengkapi dokumen dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan pasca bencana
			Pengoptimalan pengelolaan sumber daya air terkait penanggulangan banjir	Pembangunan bangunan pengendali banjir
			Pengoptimalan penanganan rumah korban bencana	Identifikasi, pendataan, dan pelaksanaan pembangunan serta rehabilitasi rumah korban bencana
			Penguatan kapasitas kelembagaan dan petugas serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran	Penguatan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas petugas penanganan kebakaran
				Penguatan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
			Pemberian perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menghadapi bencana	Peningkatan pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, serta penyiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang urusan lingkungan hidup	Penguatan koordinasi dan evaluasi urusan lingkungan hidup
			Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup	Penyusunan dan penetapan RPPLH
				Penyusunan KLHS RPJMD dan RDTR
			Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Pelaksanaan uji kualitas air dan udara yang memenuhi standar dengan melengkapi sarana pendukungnya
				Pemberian peringatan dan tindakan bagi kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
				Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau	Penambahan dan peningkatan kualitas RTH
			Pengendalian dan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan B3 dan limbah B3
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin PPLH yang diterbitkan	Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan yang sudah memiliki PPPLH
			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup	Pengembangan metode dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat agar lebih efektif
			Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup	Peningkatan mekanisme dan proses penyelesaian kasus lingkungan hidup di masyarakat
			Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah secara 3R di masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				Penambahan sarana prasarana persampahan untuk mendukung kelestarian lingkungan
				Penambahan sarana prasarana persampahan untuk mendukung kelestarian lingkungan
			Peningkatan upaya pengendalian dan pengawasan perizinan perusahaan dalam mendukung kelestarian lingkungan	Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di daerah
				Pengendalian dan pengawasan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
I.2	Menurunnya pengangguran	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang urusan perdagangan	Penguatan koordinasi dan evaluasi urusan ketenagakerjaan
			Peningkatan kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha	Penyediaan informasi pasar kerja yang
				Peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja
			Peningkatan mutu dan kualitas peserta pendidikan non formal (pendidikan kecakapan hidup)	Peningkatan upaya penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal dan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelolaan manajemen sekolah non formal.
			Optimalisasi pengembangan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mendukung perluasan kesempatan kerja	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan perikanan	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
				Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan
			Peningkatan Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
				Peningkatan akses pemasaran produk dalam negeri
		Meningkatnya Kesempatan dan peluang kerja	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang urusan ketenagakerjaan	Penguatan koordinasi dan evaluasi urusan ketenagakerjaan
			Peningkatan kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha	Penyediaan informasi pasar kerja
				Peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja
			Optimalisasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan dan pengembangan kapasitas petani dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian	Peningkatan Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan sarana pertanian
				Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan penyediaan bibit ternak
				Peningkatan ketersediaan prasarana pertanian
				Peningkatan kapasitas kelembagaan petani

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Peningkatan dan pengembangan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka peningkatan produktivitas perikanan	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan
				Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan
			Perluasan jaringan dan akses pemasaran produk-produk lokal	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
				Peningkatan akses pemasaran produk-produk lokal
			Penguatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Peningkatan kerja sama antar desa, optimalisasi potensi desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa
	Isu Strategis II : Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin			
II.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	Penguatan koordinasi dan evaluasi terkait kesejahteraan masyarakat
			Pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
				Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan
			Peningkatan produktivitas SDM tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja
			Perluasan jaringan perdagangan dan akses pemasaran produk lokal	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
				Peningkatan akses pemasaran produk dalam negeri
			Peningkatan Kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Percepatan fasilitasi penyaluran bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan data fakir miskin
				Peningkatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan.
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Penguatan tata kelola desa, optimalisasi potensi desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa
				Penguatan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberdayaan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam bidang penanganan kemiskinan	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam penanganan kemiskinan
			Peningkatan Akses layanan air minum	Perluasan dan peningkatan jaringan air minum dari sumber air yang layak
			Peningkatan Akses layanan sanitasi	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
			Peningkatan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Pengoptimalan pemanfaatan rumah susun
				Peningkatan kolaborasi antar sektor dalam penanganan permukiman kumuh
				Peningkatan kolaborasi antar sektor dalam rangka rehabilitasi rumah layak huni
				Peningkatan pengawasan penyelenggaraan PSU perumahan oleh pengembang

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				Peningkatan kualitas PSU perumahan yang telah diserahterimakan
			Peningkatan layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Peningkatan layanan pendidikan	Perluasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat
			Peningkatan upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
				Peningkatan layanan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
				Peningkatan upaya pemutakhiran, pengelolaan dan pemanfaatan data fakir miskin
Isu Strategis III : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat				
III.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang urusan kesehatan	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja urusan kesehatan
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan melalui Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
				Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan
				Peningkatan upaya pengendalian dan pengawasan peredaran obat dan makanan di masyarakat sesuai standar kesehatan
			Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya menjaga kesehatan dan pencegahan terhadap penyakit.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Peningkatan akses layanan kesehatan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Fasilitasi dan kemudahan Pemberian Akses ke Layanan Kesehatan dasar
			Menurunkan angka kelahiran melalui upaya pembinaan keluarga berencana (KB)	Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) melalui penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
				Mengoptimalkan peran tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
				Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di desa	Revitalisasi fungsi dan peran Posyandu
			Peningkatan ketersediaan pangan yang berkualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
				Peningkatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya
				Peningkatan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar
				Peningkatan sertifikasi keamanan pangan segar

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				Peningkatan Pengawasan dan Pendampingan Penggunaan sarana pertanian
				Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan penyediaan bibit ternak
				Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
				Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan
				Peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang urusan pendidikan	Penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja urusan pendidikan
			Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan
				Pemerataan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan peningkatan kompetensi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Peningkatan pengawasan dan pengendalian Izin Pendidikan serta Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			Peningkatan akses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Fasilitasi dan kemudahan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dasar

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Pengemis	
			Peningkatan literasi masyarakat	Peningkatan pelayanan dan tata kelola perpustakaan, serta pembudayaan gemar membaca di masyarakat
			Pengintegrasian pendidikan budaya dalam kurikulum pendidikan sekolah	Peningkatan upaya pengelolaan Kebudayaan dan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya
				Peningkatan upaya pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
		Meningkatnya standar hidup masyarakat	Peningkatan pemasaran hasil pertanian	Peningkatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Perluasan pemasaran dan penguatan jaringan perdagangan produk dalam negeri	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
			Peningkatan Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Optimalisasi sistem dan jaringan perdagangan
				Peningkatan akses pemasaran produk dalam negeri
			Peningkatan kesejahteraan petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
			Pemberdayaan pembudidaya ikan dan nelayan	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan nelayan
			Pemberdayaan Usaha kecil dan usaha mikro serta koperasi	Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Koperasi
			Peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha kecil	Pendampingan pada perusahaan kecil
			Peningkatan produktivitas SDM tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja
			Peningkatan daya tarik pariwisata	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola destinasi pariwisata

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Optimalisasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	Penguatan tata kelola desa, optimalisasi potensi desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di desa
			Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Percepatan fasilitasi penyaluran bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan data fakir miskin
				Peningkatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan.
			Peningkatan kemudahan perizinan	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal
III.2	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan	Penguatan koordinasi dan kelembagaan bidang kesejahteraan rakyat	Penguatan koordinasi dan evaluasi terkait kesetaraan gender
			Peningkatan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Peningkatan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan kepada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah
				Penguatan kedudukan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan,

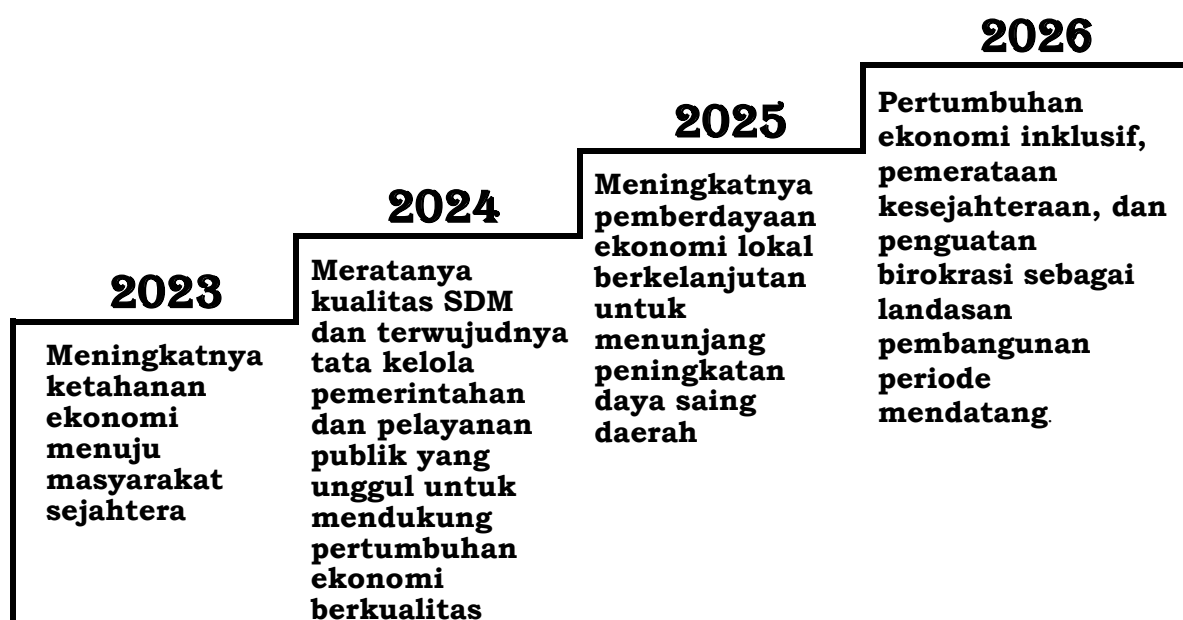
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				Penguatan peran dan fungsi lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan serta peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender
				Peningkatan upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak
				Peningkatan layanan pemberian advokasi dan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan anak Korban Kekerasan
				Penguatan peran dan fungsi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan anak
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Pelembagaan Pemenuhan hak anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha.
				Peningkatan upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap anak
				peningkatan layanan pemberian advokasi dan Rujukan Lanjutan bagi anak Korban Kekerasan
				Penguatan peran dan fungsi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Penguatan perencanaan responsif gender	Penguatan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan responsif gender

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Optimalisasi penyusunan anggaran responsif gender	Peningkatan kapasitas SDM dalam menyusun anggaran responsif gender
			Penguatan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan program kegiatan responsif gender, program perlindungan anak dan perempuan.	Penguatan fungsi pengawasan diarahkan kepada pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah terkait penyelenggaraan anggaran responsif gender dan anak
Isu Strategis IV : Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik;				
IV.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kemudahan perizinan pengembangan, perluasan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik	Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik
				Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal
				Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
				Peningkatan layanan Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Non Perizinan di kecamatan
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan koordinasi dan evaluasi terkait evaluasi kinerja masing-masing unsur pemerintah daerah
				Peningkatan kualitas perencanaan daerah
				Penguatan kapasitas perangkat daerah dan pendampingan Bappeda dalam rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan dan peningkatan upaya Pendampingan dan Asistensi pada perangkat daerah.
				Peningkatan tata kelola manajemen ASN berdasarkan sistem merit
				Peningkatan tata kelola arsip daerah
				Peningkatan layanan pemerintah berbasis teknologi informasi
		Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah	Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang perekonomian dan pendapatan daerah	Penguatan koordinasi dan evaluasi terkait kebijakan fiskal
			Perumusan kebijakan daerah yang memberikan prioritas kepada kemandirian fiskal daerah	Perumusan kebijakan daerah diarahkan kepada Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Kebijakan Anggaran serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
			Optimalisasi Pendapatan Daerah	Optimalisasi potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah
				Peninjauan kembali nilai objek pajak

6.2. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan

Arah kebijakan tahunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu/permasalahan pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap, serta dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di akhir periode pembangunan.



Tabel 6 . 2 Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
1	2	3
2023	Meningkatnya ketahanan ekonomi menuju masyarakat sejahtera;	Fokus pembangunan pada tahun tersebut adalah meningkatkan ketahanan ekonomi, khususnya sektor utama penopang perekonomian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Penguatan sektor utama penopang perekonomian diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan menjadi fondasi yang kuat untuk pelaksanaan pembangunan di periode selanjutnya;
2024	Meratanya kualitas SDM dan terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang unggul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kesejahteraan yang telah dicapai di periode pembangunan sebelumnya dapat menjadi landasan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kesenjangan kualitas manusia

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
1	2	3
	berkualitas;	berbasis gender maupun wilayah. Selain itu, pembangunan daerah juga diarahkan untuk transformasi tata kelola dan pelayanan publik. Kedua hal tersebut selanjutnya diharapkan menjadi landasan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penurunan angka kemiskinan;
2025	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi lokal berkelanjutan untuk menunjang peningkatan daya saing daerah;	Fokus pembangunan adalah penguatan ekonomi masyarakat dengan berbasis potensi lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat dengan peningkatan sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, khususnya di kawasan yang memiliki kesenjangan cukup tinggi;
2026	Pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan birokrasi sebagai landasan pembangunan periode mendatang;	Pembangunan difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat sehingga pemerataan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan dapat terwujud. Selain itu, penguatan birokrasi menjadi fokus untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan ketersediaan layanan publik sebagai fondasi untuk pelaksanaan pembangunan di periode selanjutnya.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan Daerah dalam dimensi teknokratik mengacu pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran, serta berdasarkan rumusan strategi yang telah dipilih yang berorientasi *outcome* dan *impact*.

Berikut adalah rincian seluruh program pembangunan daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan sasaran pembangunan daerah:

Tabel 6 . 3 Program Pembangunan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
	Isu Strategis I : Pertumbuhan Ekonomi berkualitas dengan menekankan pada pemerataan didukung penguatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;					
I.1	Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas		Pertumbuhan ekonomi			
		Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Utama (Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan)	Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian			
			Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan			
			Laju Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Perdagangan			
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	DPM PTSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan Ekspor	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	DPM PTSP
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Jalan (LLAJ)		
		Meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat	PDRB Perkapita ADHB			
			PDRB Perkapita ADHK			
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan daya tarik pariwisata	Pariwisata	Dinporapar
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinporapar
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	DPM PTSP
		Menguatnya infrastruktur wilayah	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
		Menurunnya Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Pendapatan (versi World Bank)			
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
		Meningkatnya kondusivitas wilayah	Angka Kriminalitas			
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Unsur Pendukung Setda	Setda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Rakyat		
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP Linmas
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bakesbang
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bakesbang
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bakesbang
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (kecamatan)	Bidang Urusan Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Kecamatan
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum	BPBD
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperkim
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
				Program Penanganan Bencana	Sosial	Dinsos P3AKB
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Hidup		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman Modal	DPMPTSP
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
I.2	Menurunnya pengangguran		TPT			
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja			
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pengelolaan Pendidikan; Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinporapar
				Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya Kesempatan dan peluang kerja	TPAK			
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinporapar
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Adat		
Isu Strategis II : Penurunan Kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin						
II.	Menurunnya tingkat kemiskinan		Angka Kemiskinan			
		Menurunnya kesenjangan antar penduduk miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan			
			Indeks Keparahan Kemiskinan			
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan	Kecamatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar	Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum			
			Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi			
			Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar			
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau			
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUTR
				Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperkim

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperkim
					Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperkim
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperkim
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperkim
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos P3AKB
	Isu Strategis III : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan menekankan Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Ekonomi Masyarakat					
III.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Dinsos P3AKB
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah			
			Harapan Lama Sekolah			
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Unsur Pendukung Setda	Setda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Rakyat		
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Rehabilitasi Sosial	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya standar hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita			
				Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan daya tarik pariwisata	Pariwisata	Dinporapar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata	Dinporapar
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dispermasdes
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sosial	Dinsos P3AKB
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	DPM PTSP
III.2	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia		IPG (Indeks Pembangunan Gender)			
		Meningkatnya kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan	Rasio Angka Harapan Hidup antara Perempuan dan Laki-laki			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
			Rasio Rata-rata Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki			
			Rasio Harapan Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki			
			Rasio Pengeluaran Per Kapita antara Perempuan dan Laki-laki			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)			
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Pemerintahan	Setda
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3AKB
				Program Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3AKB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3AKB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3AKB
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinsos P3AKB
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Perencanaan	Bappeda
				Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Keuangan	BPKAD
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Unsur Pengawasan	Inspektorat
Isu Strategis IV : Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada Penguatan Fungsi Birokrasi dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik;						
IV.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
				Program Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	DPM PTSP
				Program Pendaftaran Penduduk	Kependudukan dan pencatatan sipil	Disdukcapil

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Pencatatan Sipil	Kependudukan dan pencatatan sipil	Disdukcapil
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan	Kecamatan
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Nilai SAKIP			
			Indeks Profesionalisme ASN			
			Nilai Maturitas SPIP			
			MRI (Indeks Manajemen Resiko)			
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			
			Indeks SPBE			
			IPKD			
				Program Administrasi Umum	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Perencanaan	Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Perencanaan	Bappeda
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Keuangan Daerah	BPKAD
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan	Inspetorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Unsur Pengawasan	Inspetorat
				Program Kepegawaian Daerah	Unsur Penunjang Kepegawaian	BKPP
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Penunjang Diklat	BKPP
				Program pengelolaan arsip	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
				Program Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah	Desentralisasi Fiskal			
			Rasio Ketergantungan			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN	OPD
1	2	3	4	5	6	7
			Fiskal			
			Rasio Kemandirian Fiskal			
				Program Perekonomian dan pembangunan	Unsur Pendukung Setda	Setda
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Unsur Pendukung Setwan	Setwan
				Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang Keuangan Daerah	BPKAD

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikasi rencana program prioritas Pemerintah Daerah, baik program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah maupun untuk mendukung tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan konkuren untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatifnya. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada bab III (Tiga) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 ini terutama mengenai kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil kemampuan keuangan dan belanja Daerah.

Pendanaan dalam bentuk penganggaran, tidak dapat serta merta menjadi penjamin bahwa suatu tujuan atau sasaran dapat dengan mudah dicapai. Oleh karenanya, diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh / komprehensif, terpadu antar pemangku kepentingan, sinergitas dan aspek keberlanjutan yang ujung-ujungnya dapat membawa masyarakat dan daerah ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Jumlah dana indikatif yang dialokasikan dalam program prioritas tersebut, apabila dijabarkan dalam rincian belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis (Renstra), sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setiap Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa program urusan pemerintahan sesuai kewenangannya sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tiap tahunnya. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah riil dala Rencana Pembangunan Daerah ini akan didukung oleh sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, berupa Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Transfet Umum (DBH, DAU), Dana Tranfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Transfer Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

7.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah untuk kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam RPD Tahun 2023-2026 berasal dari Proyeksi Total penerimaan dikurangi Belanja wajib mengikat dan pengeluaran pembiayaan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7 . 1 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Untuk Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023– 2026

No.	Uraian	2023	2024	2025	2026	Rata2 Pertum- buan
1.	Pendapatan	2.755.057.062.757	2.802.001.590.832	2.852.589.838.363	2.907.960.433.964	1,96%
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	35.000.000.000	70.000.000.000	-	-	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran	60.000.000.000	57.000.000.000	50.000.000.000	45.000.000.000	-17,47%
	Total Penerimaan	2.850.057.062.757	2.929.001.590.832	2.902.589.838.363	2.952.960.433.964	1,45%
	Dikurangi :					
4.	Belanja Tidak Langsung (Belanja Wajib Mengikat)	1.591.863.372.000	1.597.818.985.000	1.621.555.346.000	1.632.479.186.000	0,46%
5.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-6,35%
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.188.193.690.757	1.331.182.605.832	1.276.034.492.363	1.315.481.247.964	2,80%

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati, 2022

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas baik prioritas pertama (P1) yang meliputi belanja mandatory untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, belanja program-program pendukung utama pencapaian tujuan dan sasaran daerah (indikator makro ekonomi dan indikator kinerja daerah lainnya), belanja program pendukung pencapaian SPM dan program-program lain yang selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi; maupun prioritas kedua (P2) terkait pendanaan program urusan pemerintahan lainnya di luar program Prioritas Pertama (P1). Program prioritas pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah kalau dijabarkan dalam belanja daerah dapat dilihat sebagaimana tabel 7.2 berikut.

Tabel 7 . 2 Proyeksi Belanja Daerah berdasarkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023– 2026

Akun	Uraian	Proyeksi			
		2023	2024	2025	2026
5.	BELANJA DAERAH	2.780.057.063.000	2.859.001.590.833	2.902.589.838.364	2.952.960.433.965
5.1.1	BELANJA OPERASI	1.760.531.636.788	1.810.524.977.087	1.838.128.183.436	1.870.026.459.302
5.1.2	Belanja Pegawai	1.091.861.206.113	1.122.866.493.206	1.139.985.680.131	1.159.768.619.121
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	609.344.831.792	626.648.232.025	636.202.091.086	647.242.534.288
5.1.4	Belanja Hibah	49.361.190.870	50.762.887.244	51.536.816.613	52.431.169.688
5.1..5	Belanja Bantuan Sosial	9.964.408.014	10.247.364.611	10.403.595.607	10.584.136.205
5.2.	BELANJA MODAL	359.122.150.171	369.320.044.652	374.950.686.333	381.457.458.024
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.905.987.699	21.499.649.372	21.827.432.344	22.206.218.473
5.4.	BELANJA TRANSFER	639.497.288.342	657.656.919.722	667.683.536.251	679.270.298.166
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	10.277.963.968	10.569.824.528	10.730.971.737	10.917.193.514
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	629.219.324.375	647.087.095.194	656.952.564.514	668.353.104.652

7.2. Program Pembangunan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran untuk belanja daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program prioritas yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah yang dimasukkan dalam bagian ini juga telah disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan, menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya disertai dengan besaran anggaran yang diperlukan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2023–2026 dijabarkan dalam urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak dengan berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur ketertiban umum.

7.2.1 Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada optimalisasi pengelolaan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan, peningkatan pelaksanaan SPM layanan dasar bidang pendidikan serta penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan.
2. Program Pengembangan Kurikulum
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyesuaian dan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, serta strukturisasi kompetensi dasar muatan lokal.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan.
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pengawasan dan pengendalian kepemilikan izin penyelenggaraan pendidikan bagi lembaga pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan kesetaraan.

b. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar, mengoptimalkan penyelenggaraan SPM layanan dasar bidang kesehatan, penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan sesuai standar, integrasi layanan sistem informasi kesehatan , serta peningkatan upaya pengendalian dan pengawasan perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada upaya pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan, pemenuhan ketersediaan dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan untuk UKM dan UKP, dan peningkatan mutu dan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan masih ada yang sesuai standar.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya pengendalian dan pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta peningkatan upaya pemeriksaan dan pengawasan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya Promotif dan Preventif serta peningkatan hidup sehat berbasis keluarga dan Masyarakat.

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, pembangunan dan rehabilitasi turap/talud/bronjong, dan pembangunan bangunan pengendali banjir, penyediaan tampungan dan sumber air baku, pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi, serta peningkatan jaringan irigasi yang sesuai standar.
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan sumber air minum di kawasan pesisir mengandung kadar garam yang tinggi, penyediaan jaringan perpipaan air minum dari sumber yang layak, peningkatan ketersediaan sumber air baku untuk air minum di wilayah yang rawan kekeringan.
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pembangunan dan penyediaan TPA yang layak di wilayah Pati Utara dan Selatan, perluasan ketersediaan bangunan TPS 3R/TPST.
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan kapasitas IPLT yang sudah Overload, penyusunan peraturan dan kebijakan daerah

terkait pengelolaan air limbah domestik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan air limbah.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan masterplan drainase, pembangunan saluran drainase di beberapa ruas jalan utama, dan rehabilitasi dan perbaikan saluran drainase yang rusak dan tersumbat.
6. Program Pengembangan Permukiman
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pembangunan dan perbaikan trotoar bagi pejalan kaki.
7. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan gedung pemerintah, peningkatan ketersediaan fasilitas bangunan gedung pemerintah yang sudah tidak memadai.
8. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan ruas jalan mengalami kerusakan, dan penyesuaian konstruksi jalan yang sesuai dengan kondisi tanah.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pengawasan dan pengendalian bangunan usaha yang belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi, sertifikasi dan peningkatan kapasitas tenaga konstruksi.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan peraturan terkait RDTR, dan penyelenggaraan Sinronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR).

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan dan updating data urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta peningkatan layanan terkait penanganan rumah korban bencana.
2. Program Kawasan Permukiman
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan akses bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni serta penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan penanganan kawasan kumuh serta melakukan sinergitas antar sektor dalam penanganan kawasan kumuh.
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada melakukan serah terima PSU perumahan yang belum diserahterimakan, pemantauan dan pengendalian ketersediaan PSU pada kawasan permukiman dan perumahan yang sesuai standar, dan penyusunan peraturan di daerah yang mengatur tentang kasiba/lisiba.
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi terkait penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil.

e. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan upaya penegakan peraturan daerah serta penguatan dan peningkatan peran dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

2. Program Penanggulangan Bencana

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait kebencanaan, Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, peningkatan tata kelola perencanaan dan penyediaan logistik bagi korban bencana, peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyusunan dokumen terkait penanggulangan bencana, sertifikasi relawan/TRC, sosialisasi dan edukasi kegiatan dan informasi kebencanaan kepada masyarakat, refleksi dan duplikasi desa/kawasan tangguh bencana terutama di daerah rawan bencana, penyediaan rambu jalur evakuasi dan petunjuk pada daerah rawan bencana.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan waktu tanggap (*response time*) pemadaman dan pengendalian kebakaran, peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran secara berkala, peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, serta peningkatan upaya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

f. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan dan pengembangan potensi pekerja sosial masyarakat, peningkatan keterlibatan dan kapasitas Keluarga dalam penanganan masalah sosial, penguatan kapasitas SDM dan peran lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pemulangan kembali warga negara migran korban tindak kekerasan dari debarkasi ke desa asalnya.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pelayanan pemeliharaan anak-anak terlantar, serta penguatan tata kelola dan pemanfaatan data fakir miskin cakupan daerah.

5. Program Penanganan Bencana

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan tata kelola dan penyediaan fasilitas Taman Makam Pahlawan.

7.2.2 Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja makro.

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan produktivitas dan kemampuan tenaga kerja melalui fasilitasi pelatihan tenaga kerja.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan, verifikasi dan validasi data tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja, peningkatan dan fasilitasi ketersediaan bursa kerja bagi pencari kerja.

4. Program Hubungan Industrial

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya deteksi dini perselisihan hubungan industrial, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian serta penegakan aturan bagi perusahaan yang melanggar.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan upaya pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah, penguatan kedudukan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, serta penguatan peran dan fungsi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah, pemberian advokasi dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban

kekerasan, serta penguatan peran dan fungsi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak di daerah.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada Peningkatan upaya pelebagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha, serta penguatan peran dan fungsi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, penguatan peran dan fungsi lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

c. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung ketersediaan pangan.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya promosi keanekaragaman pangan lokal kepada masyarakat, pengusaha warung makan dan lembaga umum, serta pelaksanaan verifikasi dan validasi data ketersediaan pangan serta peningkatan efektifitas rantai pasok dan jaringan distribusi pangan.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya penanganan rawan pangan, serta pemutakhiran peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan serta penyelenggaraan sertifikasi pangan segar.

d. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dalam deteksi dini dan resolusi konflik.

2. Program Penatagunaan Tanah

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan tata kelola tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Program Pengurusan Hak Atas Tanah

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada inventarisasi pengurusan administrasi aset tanah pemerintah, serta inventarisasi administrasi tanah milik masyarakat miskin.

4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)

e. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan, penetapan, pengendalian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan upaya pemeliharaan ruang terbuka hijau.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada fasilitasi pelayanan Lingkungan dan/atau Izin PPLH, pengawasan dan pengendalian izin lingkungan hidup usaha atau kegiatan, serta penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, serta Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penilaian kinerja masyarakat atau lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas TPA, serta memasyarakatkan pengolahan sampah secara 3R.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pelayanan penyelenggaraan penataan dan pendaftaran penduduk, serta peningkatan upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pelayanan penyelenggaraan dan pencatatan sipil.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan tata kelola Data, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, serta Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan data kependudukan, dan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya penyelenggaraan penataan desa, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penataan desa.
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya fasilitasi kerja sama antar desa, dan pengembangan tata kelola kawasan perdesaan.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, peningkatan

pengawasan dan pemanfaatan hasil evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa, serta upaya fasilitasi terhadap pemerintahan desa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta menyusun pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pemberian advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal, penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK, penguatan peran dan fungsi tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan pelayanan KB di daerah, penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan upaya pembangunan keluarga, serta penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga.

i. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pengurangan titik kemacetan dan hambatan dalam kelancaran lalu lintas, peningkatan kualitas dan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung layanan perhubungan darat, peningkatan tata kelola manajemen dan rekayasa lalu lintas, peningkatan pelayanan uji KIR serta perbaikan dan peningkatan pelayanan transportasi umum.

j. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pemerataan ketersediaan jaringan FO di seluruh wilayah kabupaten, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan jaringan intra pemerintah, peningkatan ketersediaan perangkat jaringan internal OPD yang harus dipenuhi untuk penggunaan jaringan intra pemerintah sesuai standar, integrasi aplikasi pelayanan publik.

2. Program Aplikasi Informatika

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait update website pemerintah Kabupaten Pati dan website perangkat daerah, serta standarisasi informasi publik dalam website perangkat daerah.

k. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pelayanan pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi, serta pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan data jumlah dan potensi usaha mikro secara lengkap dan akurat, peningkatan upaya pemberdayaan usaha mikro, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha mikro untuk berwirausaha.

1. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada Penetapan kebijakan daerah dan evaluasi mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyediaan ruang untuk investasi

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, penyediaan dan akses peta potensi investasi.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan strategi promosi penanaman modal, serta peningkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, serta penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan tata kelola dan pemanfaatan data informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda, kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada upaya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan kapasitas SDM dan organisasi kepramukaan, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah, serta partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan.

n. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektor. Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, serta membangun metadata statistik sektoral.

o. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah, penyusunan rencana strategis dan arsitektur pengamanan informasi, pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah, serta operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah.

p. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan Pengelolaan objek pemajuan Kebudayaan, dan peningkatan upaya Kesenian Tradisional.
2. Program Pembinaan Sejarah
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga sejarah.
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, dan peningkatan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten

q. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pengelolaan perpustakaan kabupaten dan sekolah, serta menggalakkan upaya pembudayaan gemar membaca di masyarakat
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno, serta pengalihmediaan Naskah Kuno untuk dilestarikan dan didayagunakan.

r. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah, serta pengelolaan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis secara optimal.
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan proses akuisisi arsip statis di perangkat daerah dan lembaga lainnya, penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan daerah, pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun, serta pelaksanaan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.

7.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, waduk, dan lainnya, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta peningkatan layanan pendaftaran dan perizinan kapal.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan layanan penerbitan izin usaha perikanan, layanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK), pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, serta peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan.
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, waduk, dan genangan air lainnya.
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan layanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan.

b. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata, serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri, fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata, serta peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif, penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, pengembangan sistem pemasaran, serta perlindungan hasil kreativitas.

c. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan ternak, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, serta penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan, pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian, pelestarian dan pemanfaatan serta pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak, serta identifikasi, penetapan dan pengelolaan lahan penggembalaan umum.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada fasilitasi pelayanan penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, dan rumah potong hewan, izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, serta pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa.

d. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada fasilitasi pelayanan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, serta pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, serta pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar, serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.

4. Program Pengembangan Ekspor

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, peningkatan citra produk ekspor serta pembinaan terhadap para pelaku usaha ekspor

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang, peningkatan pengawasan/penyuluhan dan penyidikan metrologi legal.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri

e. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri pembangunan sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada fasilitasi pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan

Industri (IPKI), serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI pada sistem informasi industri nasional.

7.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan pengelolaan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi pemberian bantuan hukum, pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, serta fasilitasi dan evaluasi kerja sama daerah.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, fasilitasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta penguatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.

3. Program Administrasi Umum

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretariat daerah, pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, serta fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan.

b. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD serta fasilitasi tugas DPRD.

7.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, serta implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), penguatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah

b. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan rencana anggaran daerah, pengelolaan perbendaharaan daerah, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penguatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah, penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada perencanaan pengelolaan pajak daerah analisis dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah..

c. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pengadaan, pemberhentian, mutasi, promosi, dan pengembangan kompetensi ASN berbasis *merit system*, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, serta peningkatan tata kelola dan pengembangan informasi kepegawaian ASN.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum, serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan.

e. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi.

7.2.6 Unsur Pengawasan

a. Inspektorat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penyelenggaraan pengawasan internal, serta penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, serta pendampingan dan asistensi

7.2.7 Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan upaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan, peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pencegahan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan serta penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada Penguatan peran dan fungsi serta pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada pembenahan administrasi melalui upaya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.

7.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penerapan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, serta penguatan koordinasi antar kelembagaan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada Peningkatan upaya pembinaan dan pendidikan politik masyarakat, serta penguatan peran parpol dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik dan etika serta budaya politik.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penguatan regulasi dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan upaya pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada penurunan kerawanan sosial ekonomi masyarakat (kasus narkoba), serta penguatan rasa tepo seliro dan toleransi antar umat beragama, khususnya wilayah yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini dilaksanakan dengan fokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum, penguatan koordinasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah, serta optimalisasi peran dan fungsi forum koordinasi pimpinan daerah.

Tabel berikut adalah rincian terkait rencana pendanaan terhadap program-program prioritas Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7 . 3 Rencana Program Prioritas Dan Pendanaan Tahun 2023-2026 Kabupaten Pati

Kode			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggungjawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	
							2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target			Rp.(000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
X																
X	X															
X	X	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	1.278.826.248	100	1.315.140.731	100	1.335.191.325	100	1.358.361.799	100	Semua PD

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan													
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD dengan akreditasi A	%	75,11	81,44	182.923.415	87,63	188.117.840	93,81	190.985.880	100	194.300.187	100	Disdikbud
				Persentase SMP dengan akreditasi A	%	58,16	69,39		79,59		89,8		100		100	
				Persentase PAUD dengan akreditasi	%	12,95	17,61		22,27		26,93		31,59		31,59	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			A													
			Persentase PKBM (nonformal) dengan akreditasi B	%	45,83	58,33		70,83		83,33		91,67		91,67		
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	1. persentase SD yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	35.000	100	36.004	100	36.553	100	37.187	100	Disdikbud
				2. persentase SMP yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100		100		100		100		100	
				3. persentase PAUD yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100		100		100		100		100	

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
				Persentase pendidikan nonformal yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100		100		100		100		100	
1	1	4	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase SD dengan rasio guru murid 1:20	%	25	27	13.494.872	30	13.878.081	33	14.089.666	35	14.334.174	35	Disdikbud
				Persentase PAUD dengan rasio guru murid 1:8	%	30	35		40		45		50		50	
				Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	%	45,45	46		48		49		50		50	
				Persentase guru SMP yang bersertifikat	%	57,37	58,5		60		62		65		65	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			at pendidik													
			Persentas e guru PAUD yang bersertifikat at pendidik	%	32,99	33		33,25		33,45		34		34		
			Persentas e guru Pendidika n Kesetaraa n dengan tingkat pendidika n S1	%	75,71	76,5		77		77,5		78		78		
			Persentas e guru PAUD dengan tingkat pendidika n S1	%	70,47	72		75		80		85		85		
1	1	5	Progra m Penge ndalian Perizina n Pendi kan	Persentas e pendidika n dasar yang memiliki izin	%	100	100	8.848	100	9.100	100	9.237	100	9.398	100	Disdikbud

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			Persentase PAUD yang memiliki izin	%	100	100		100		100		100		100		
			Persentase Pendidikan Nonformal yang memiliki izin	%	100	100		100		100		100		100		
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan													
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Paripurna	%	30	30	85.542.149	40	86.792.149	50	90.877.816	60	95.345.739	60	Dinkes

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			akad													
				IKM RSUD RAA Soewondo		81,19	81,19									
				IKM RSUD Kayen		76,75	76,75									
				IKM Puskesmas		78,75	78,75									
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter Spesialis	Angka	11	12	431.925	12	581.648	12	581.648	12	686.020	12	Dinkes
				Rasio Dokter Umum	Angka	46	50		50		50		50		50	
				Rasio Dokter Gigi	Angka	13	14		14		14		14		14	
				Rasio	Angka	186	200		200		200		200		200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
			Perawat	Angk a	122	130		130	130		130		130		
			Rasio Bidan	Angk a	18	21		21	21		21		21		
			Rasio Perawat Gigi	Angk a	13	15		15	15		15		15		
			Rasio Apoteker	Angk a	26	30		30	30		30		30		
			Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian	Angk a	16	18		18	18		18		18		
			Rasio SKM	Angk a	18	20		20	20		20		20		
			Rasio Sanitarian	Angk a	15	18		18	18		18		18		
			Rasio Tenaga Gizi	Angk a	5	6		6	6		6		6		
			Rasio Keterampilan Fisik	Angk a	16	18		18	18		18		18		
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makana	Cakupan ketersediaan obat & perbekalan kesehatan sesuai standart	%	95	95	361.736	95	361.736	95	361.736	95	387.339	Dinkes

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			n Minuman													
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	%	0,31	0,37	317.710	0,40	317.710	0,43	317.710	0,45	382.320	0,45	Dinkes
1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang													
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Prosentase jaringan irigasi dan air baku kewenangan Kabupaten/Kota yang dibangun,	%	1,794	4,476	22.093.449	5,43	22.720.900	6,506	23.066.500	7,584	23.467.857	7,584	DPUTR

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
				direhabilitasi, dipelihara dalam kondisi baik												
1	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	%	100	100	7.012.1 95	100	7.211. 340	100	7.322. 000	100	7.449. 402	100	DPUTR
1	3	4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rehabilitasi TPA	%	0	0	-	0	-	33,3	5.000. 000	0	-	33,3	DPUTR
1	3	5	Program Pengelolaan	Persentase warga negara yang	%	100	100	4.017.6 54	100	4.131. 750	100	4.195. 000	100	4.267. 993	100	

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
			Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik												
				Persentase warga yang mendapatkan akses sanitasi dasar dan layak untuk menuju sanitasi aman.	%	15,45	16,85		17,55		18,25		18,95		18,95	DPUTR
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pemenuhan Drainase pada Jalan Kabupaten/Kota	%	13,522	13,611	2.412.489	13,614	2.481.000	13,615	2.518.750	13,617	2.562.576	13,617	DPUTR
1	3	7	Program Pengembangan Permuk	Persentase Trotoar dalam kondisi baik	%	56,75	56,848	399.996	56,95	411.350	57,05	417.610	57,15	424.876	57,15	DPUTR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			iman													
1	3	8	Progra m Penataa n Bangun an Gedung	Persentas e Pembangu nan, Rehabilita si, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Pemerinta h	%	80,95	82,57	10.500. 000	84,22	10.798 .200	85,91	6.153. 186	87,63	11.153 .186	87,63	DPUTR
1	3	1 0	Progra m Penyele nggaraa n Jalan	Persentas e Panjang Jalan dan Jembatan kondisi Mantap	%	75,88	76,5	125.218 .784	77,15	128.77 4.900	77,55	130.73 8.490	77,95	133.00 3.720	77,95	DPUTR
1	3	1 1	Progra m Pengem bangan Jasa Konstru ksi	Rasio tenaga operator/t eknisi/an alis yang memiliki sertifikat kompeten si	%	26,8	27	100.000	28	102.84 0	29	104.41 0	30	106.22 6	30	DPUTR
1	3	1 2	Progra m Penyele nggaraa	Kesesuaia n Kegiatan Pemanfaat	%	85.73	85.83	708.000	85.93	728.10 0	86.03	739.20 0	86.13	752.06 2	86.13	DPUTR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
		n Penataan Ruang	an Ruang dengan Rencana Tata Ruangnya													
1	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasannya Permukiman														
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	200.000	100	230.000	100	240.000	100	250.000	100	Disperkim

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
				Persentas e warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerinta h Daerah kabupate n/kota yang memperol eh fasilitasi penyediaa n rumah yang layak huni	%	100	100	500.000	100	520.00 0	100	535.00 0	100	550.00 0	100	
1	4	3	Progra m Kawasa n Permuk iman	Persentas e kawasan permukim an kumuh di bawah 10 ha	%	24,92	16	3.200.0 00	11	3.300. 000	5	3.375. 300	0	3.440. 000	0	Disperkim
1	4	4	Progra m Peruma han Dan Kawasa n	Persentas e RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	%	15,98	20,98	750.000	25,98	760.00 0	30,98	774.40 0	35,98	800.00 0	35,98	Disperkim

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
			Permukiman Kumuh													
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang kondisinya baik	lokasi	33	37	1.073.000	39	1.130.000	41	1.120.300	43	1.150.000	43	Disperkim
1	4	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Peruma	Persentase Pengembangan Perumahan yang telah memiliki sertifikasi dan registrasi	%	36	50	100.000	64	95.000	81	98.800	100	98.500	100	Disperkim

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			han Dan Kawasa n Permuk iman													
1	5		Urusan Pemer intahan Bidang Ketent eraman Dan Keterti ban Umum Serta Perlind ungan Masyar akat													
1	5	2	Progra m Peningk atan Ketente raman Dan Ketertib an Umum	Persentas e Pelanggar an perda yang tertangani	%	96	97	420.730	98	440.02 3	99	470.00 0	100	490.00 0	100	Satpol PP
				Rasio Linmas	Angk a	62,2	63		64		65		66		66	

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	25.000	100	27.000	100	29.000	100	75.000	100	BPBD
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	275.000	100	297.000	100	308.000	100	277.000	100	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	%	100	100	220.000	100	244.000	100	257.000	100	272.000	100	BPBD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
			bencana												
			Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan	%	0	30	60.000	35	74.000	45	86.000	50	97.000	50	BPBD
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	80	82	1.415.970	84	1.477.645	86	1.485.095	88	1.517.095	88	Satpol PP
			Rasio SDM Pemadam Kebakaran	%	6	6,2		6,4		6,6		6,8		6,8	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			n													
			Persentase Bangunan Publik yang Memenuhi Standar Penanganan Kebakaran	%	20	21		22		23		24		24		
1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial													
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran data PMKS	%	100	100	585.000	100	630.000	100	628.000	100	655.000	100	Dinsos P3AKB
1	6	3	Program Penanganan Warga Negara	Persentase warga negara migran korban tindak	%		100	10.000	100	20.000	100	30.000	100	35.000	100	Dinsos P3AKB

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
			Migran Korban Tindak Kekerasan	kekerasan yang tertangani												
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	0,5	0,6	1.930.000	0,7	2.280.500	0,8	2.299.650	0,9	2.423.160	0,9	Dinsos P3AKB
1	6	5	Program Perlindungan dan	Cakupan anak terlantar yang tertangani	%	100	100	125.000	100	166.000	100	159.300	100	176.930	100	Dinsos P3AKB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			Jamian Sosial													
				Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100		Dinsos P3AKB		
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	49.000	100	155.000	100	187.000	100	197.000	100	Dinsos P3AKB
1	6	7	Program Pengelolaan	Persentase TMP yang terpelihar	%	100	100	89.000	100	110.000	100	131.100	100	129.000	100	Dinsos P3AKB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
		Taman Makam Pahlawan	a													
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja														
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK	Angka	n-a	0,94	-	0,94	40.000	0,94	40.000	0,94	42.000	0,94	Disnaker
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan	%	0	31	349.000	35	357.000	40	391.000	45	481.000	37,75	Disnaker

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	7	4	Produktivitas Tenaga Kerja	Kerja												
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	%	60,70 42004 9	65	248.500	70	309.00 0	75	324.00 0	82	339.00 0	73	Disnaker
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja	Angka	1	1	2.143.4 05	1	2.143. 800	1	2.151. 800	1	2.155. 800	1	Disnaker
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													
2	8	2	Program	Persentase OPD	%	20	25	115.000	50	124.00 0	75	124.00 0	100	131.00 0	100	Dinsos P3AKB

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan													
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	%	100	100	41.000	100	49.000	100	44.000	100	48.000	100	Dinsos P3AKB
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	%		100	19.000	100	20.000	100	20.000	100	21.000	100	Dinsos P3AKB
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan	Persentase keterisian data gender dan anak	%	70	80	20.000	80	25.000	90	20.000	90	21.000	90	Dinsos P3AKB

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	8	6	Anak Progra m Pemenu han Hak Anak (PHA)	Persentas e lembaga pemerinta h/ Non Pemerinta h dan Dunia usaha yang melaksan akan pemenuha n hak anak	%		30	57.000	50	75.000	60	57.000	75	57.000	75	Dinsos P3AKB
2	8	7	Progra m Perlind ungan Khusus Anak	Presentas e anak yang memerluk an perlindun gan khusus yang mendapat kan layanan komprehe nsif	%	100	100	120.000	100	150.00 0	100	98.000	100	105.00 0	100	Dinsos P3AKB
2	9		Urusan Pemer													

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	9	2	ntahan Bidang Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur dan pendudukan pangan sesuai kewenangan daerah	%	11,08	13,00	8.000.000	14,00	8.000.000	15,00	8.000.000	16,00	8.000.000	16,00	Dinketapang
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan, Jumlah tingkat konsumsi Energi	%	100	100	709.100	100	775.000	100	1.010.000	100	1.044.100	100	Dinketapang
					Kal Gram	2.133,2 65,70	2.150 66,00		2.175 66,50		2.200 67,00		2.225 67,50		2.225 67,50	

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	9	4	Progra m Penang anan Kerawa nan Pangan	dan Protein Persentas e desa rawan pangan	%	24,6	25	130.000	24,5	130.00 0	24	215.00 0	23,5	270.00 0	23,5	Dinketapang
2	9	5	Progra m Pengaw asan Keaman an Pangan	Persentas e pangan segar asal tumbuhan yang memenuh i persyarata n mutu dan keamanan pangan	%	15	25	65.000	50	314.47 3	75	225.20 9	100	267.08 9	100	Dinketapang
2	1	0	Urusan Pemer intahan Bidang Pertana han													
2	1	4	Progra m Penyele saian Sengket a Tanah	Persentas e penangan an permasala han	%	100	100	23.000	100	23.650	100	24.020	100	24.438	100	DPUTR

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	1	1	Garapan Program Penatag unaan Tanah	sengketa tanah garapan Persentas e kesiapan lahan yang digunaka n dalam proses pengusula n kegiatan	%	0	100	20.000	100	20.568	100	20.881	100	21.244	100	DPUTR
2	1	1	Progra m Pengur usan Hak Hak Atas Tanah	persentas e aset tanah yang dipetakan	%	100	100	30.000	100	30.852	100	31.321	100	31.866	100	DPUTR
2	1	1	Progra m Pengelol aan Sistem Informa si Pertana han	Persentas e pemetaan wilayah	%	17	38	30.000	49	30.852	60	31.321	71	31.866	71	DPUTR
2	1	1	Urusan Pemer intahan													

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 1	2	Bidang Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan Hidup yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup	dokumen	1	4	600.000	1	400.000	1	400.000	1	600.000	7	DLH
2	1 1	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	40	42	152.500	43	222.500	44	222.500	45	222.500	45	DLH
				Persentase	%	70	72	152.500	73	222.500	74	222.500	75	222.500	75	DLH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 1	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	paramater uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu Persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas kawasan perkotaan	%	5,08	5,09	1.710.000	5,09	2.045.000	5,1	2.010.000	5,1	2.010.000	5,1	DLH
2	1 1	5	Program Pengan dalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	Jumlah limbah B3 yang dikelola oleh perusahaan	ton	2500	3000	20.000	3000	40.000	3000	20.000	3000	20.000	12000	DLH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 1	6	n (Limbah B3) Progra m Pembin aan Dan Pengaw asan Terhada p Izin Lingku ngan Dan Izin Perlind ungan Dan Pengelol aan Lingku ngan Hidup (Pplh)	Persentas e Ketaatan penanggu ng jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkunga n, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitka n oleh Pemerinta h Daerah Kab/Kota	%	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	DLH
2	1 1	8	Progra m Peningk atan Pendidi kan, Pelatiha n Dan Penyulu	Persentas e kelompok peduli lingkunga n yang aktif	%	50	60	75.000	65	75.000	70	75.000	75	75.000	75	DLH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 1	9	han Lingku ngan Hidup Untuk Masyar akat Progra m Penghar gaan Lingku ngan Hidup Untuk Masyar akat	Persentas e kelompok masyarak at yang mendapat kan pengharga an lingkunga n hidup	%	20	22	20.000	23	20.000	24	20.000	25	20.000	25	DLH
2	1 1	1 0	Progra m Penang anan Pengad uan Lingku ngan Hidup	Persentas e pengadua n masyarak at yang terselesai kan	%	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	DLH
2	1 1	1 1	Progra m Pengelol aan Persam pahan	Persentas e penguran gan sampah	%	24	27	2.413.4 24	28	2.489. 455	30	2.691. 524	30	2.778. 811	30	DLH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 2	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase penanganan sampah	%	44	46	2.413.425	47	2.489.454	48	2.691.524	49	2.778.811	49		
2	1 2	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan KK yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	100	1.433.190	100	1.446.000	100	1.472.700	100	1.497.750	100	Disdukcapil
			Persentase layanan KTP yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	100		100		100		100		100	Disdukcapil	
			Persentase layanan	%	70	80		82		83		84		84	Disdukcapil	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 2	3	Progra m Pencata tan Sipil	KIA yang terselesaikan sesuai SOP												
				Persentase layanan akta lahir yang terlayani	%	78	91	35.230	91	43.000	92	44.500	92	46.600	92	Disdukcapil
				Persentase layanan akta kematian yang terlayani	%	79	90		90		91		92		92	
				Persentase layanan akta perkawinan yang terlayani	%	80	100		100		100		100		100	
2	1 2	4	Progra m Pengelol aan Informa si Adminis	Persentase layanan akta cerai yang terlayani	%	80	100		100		100		100			
				Penambahan lembaga yang telah memanfaatkan data kependud	angka	5	5	100.800	5	120.000	5	123.800	5	127.050	5	Disdukcapil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 2	5	trasi Kependudukan	ukan dan capil berdasarkan perjanjian kerjasama												
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil	%	40	40	-	100	5.000	100	6.000	100	7.000	100	Disdukcapil
2	1 3		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													
			Program Penataan Desa	Persentase Desa yang pengelolaannya kewilayahannya tertata dengan	%	33,42	74,81	750.000	79,8	772.500	84,79	795.675	89,78	819.545	89,78	Dispermades

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	1	3	Progra m Peningk atan Kerja Sama Desa	baik Prosentas e Desa Yang Melaksan akan Kerjasama	%	7,48	39,90	201.149	41,15	207.18 3	42,39	213.39 9	43,64	219.80 1	43,64	Dispermades
2	1	4	Progra m Adminis trasi Pemerin tahan Desa	Persentas e desa yang tertib administr asi	%	31,92	62,34	1.078.0 82	67,33	1.110. 424	72,32	1.143. 737	77,31	1.178. 049	77,31	Dispermades
				Persentas e BumDes berkempa ng (omzet/as et nya meningkat)	%	44,64	46,13		47,38		48,63		49,88		49,88	Dispermades
				Persentas e Desa yang memperba rui data sistem informasi desa (SID)	%	100	100		100		100		100,00		100,00	Dispermades
2	1	5	Progra m	Persentas e lembaga	%	85,71	100	734.809	100	756.85 3	100	779.55 9	100	802.94 6	100,00	Dispermades

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	1 4	<p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa</p> <p>Persentase desa yang meningkat PADesnya</p>	%	46,63	48,38		50,12		51,87		53,62		53,62	Dispermades

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	1	2	Progra m Pengen dalian Pendud uk	Persentas e cakupan penyediaa n informasi data keluarga Median usia kawin pertama perempua n (MUKP) seluruh wanita umur 25- 49 tahun Angka kelahiran remaja (umur 15- 19 tahun) per 1000 perempua n di kelompok umur yang sama	%	100	100	742.000	100	380.00 0	100	380.00 0	100	385.00 0	100	Dinsos P3AKB
				Median usia kawin pertama perempua n (MUKP) seluruh wanita umur 25- 49 tahun Angka kelahiran remaja (umur 15- 19 tahun) per 1000 perempua n di kelompok umur yang sama	angk a	35-39	35-39		35-39		35-39		35-39		35-39	Dinsos P3AKB
				Angka kelahiran remaja (umur 15- 19 tahun) per 1000 perempua n di kelompok umur yang sama	angk a	0,582	0,581		0,58		0,579		0,578		0,578	Dinsos P3AKB
2	1	3	Progra m Pembin aan Keluarg	Presentas e kebutuha n ber-KB yang tidak	%	11,99	10	5.640.8 00	9	5.849. 000	8	5.849. 000	7	5.861. 000	7	Dinsos P3AKB

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	1 4	4	a Berencana (KB) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	terpenuhi (unmet need) Persentase keluarga yang meningkatkan kesejahteraan keluarganya	%	59,66	59,66	5.127.700	60	5.168.000	60,25	5.173.000	60,5	5.184.000	60,5	Dinsos P3AKB
2	1 5		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan													
2	1 5	2	Program Penyelesaian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	%	87	90	21.993.328	94	22.519.759	98	22.874.991	100	23.330.572	100	Dishub

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
2	1 6	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	87,8	90	385.000	94	423.300	97	430.766	100	439.381	100	Dishub
			Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi	%	89,7	92	495.000	94	588.160	97	528.721	100	514.896	100	Dishub
			Persentase Trayek yang aktif	%	99,31	100	30.000	100	30.600	100	31.212	100	31.836	100	Dishub
			Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak	%	77,8	79	95.000	81	175.000	83	150.000	85	153.000	85	Dishub

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 6	2	Progra m Informa si Dan Komuni kasi Publik	Persentas e masyarak at yang mengetah ui kebijakan dan program prioritas pemerinta h dan pemerinta h daerah	%	75,96	76	575.000	76,5	616.59 6	76,75	634.80 7	77	664.33 2	77	Diskominfo
2	1 6	3	Progra m Aplikasi Informa tika	Persentas e layanan publik yang diselengga rakan secara online dan terintegra si	%	25	33,33	273.884	41,67	294.68 2	58,33	303.78 7	75	316.05 0	75	Diskominfo
				Persentas e Organisas i Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	%	75,51	81,64	1.050.0 00	87,77	1.060. 000	95,92	1.065. 000	100	1.070. 000	100	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
2	1 7	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	jaringan intra pemerintah daerah												
2	1 7	2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin	%	2,26	2,26	5.000	2,26	5.000	2,26	7.500	2,26	10.000	2,26	Dinkop UMKM
2	1 7	3 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-	%	0,79	1	75.000	1,5	75.000	2	80.000	2,5	81.500	2,5	Dinkop UMKM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 7	4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	undangan setiap tahunnya Persentase koperasi sehat	%	6,98	7	75.000	7,5	75.000	8	80.000	8,5	81.500	8,5	Dinkop UMKM
2	1 7	5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase kompetensi SDM koperasi	%	29,41	35	563.100	40	563.100	45	565.600	50	568.100	50	Dinkop UMKM
2	1 7	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan anggota koperasi	%	28,78	29,50	7.500	30	7.500	31	7.500	32	7.500	32	Dinkop UMKM
				Persentase peningkatan	%	1,73	1,73	44.716	1,73	44.716	1,73	45.716	1,73	50.716	1,73	Dinkop UMKM

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	1 7	7	Progra m Pember dayaan Usaha Meneng ah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	koperasi baru Jumlah usaha mikro yang difasilitasi yang mengalam i peningkat an omset	Angk a	20	20	163.500	20	200.00 0	20	254.00 0	20	300.00 0	80	Dinkop UMKM
2	1 8		Urusan Pemer intahan Bidang Penana man Modal													
2	1 8	2	Progra m Pengem bangan Iklim Penana man Modal	Peningkat an persentas e jumlah perusahaa n yang mendapat kan Insentif dan/atau kemudaha	%	2,659 57446 8	2,8	2.900	2,9	4.000	3	4.000	3,1	2.900	3,1	DPMPTSP

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	1	3	Program Promosi Penanaman Modal	n Investasi Nilai komitmen penanaman modal	Rp (Miliar)	20	22	2.000	25	3.000	30	3.000	35	2.000	112	DPMPTSP
2	1	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan penanaman modal	%	4	5	2.100	5	3.500	5	3.500	5	2.100	5	DPMPTSP
2	1	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	92,5	93	374.435	94	374.435	95	374.435	96	374.435	94,5	DPMPTSP
															Rata-rata	

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	1 8	6	Progra m Pengelol aan Data Dan Sistem Informa si Penana man Modal	Persentas e Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegra si Secara Elektronik	%	100	100	50.000	100	3.000	100	3.000	100	2.000	100	DPMPTSP
2	1 9		Urusan Pemer intahan Bidang Kepem udaan Dan Olahrag a													
2	1 9	2	Progra m Pengem bangan Kapasit as Daya	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	%	8,108 10810 8	9	200.000	10	220.00 0	11	242.00 0	12	266.20 0	10,5	Dinporapar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
		Saing Kepemu daan	mandiri													
			Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	%	4,6	5	130.000	6	143.000	7	157.300	8	173.030	Rata-rata 6,5	Dinporapar	
2	1 9	3	Progra m Pengem bangan Kapasit as Daya Saing Keolahr agaan	Persentas e cabor yang berprestasi tingkat nasional	%	10,81 08108 1	8,3	115.000	8,3	126.500	8,3	139.150	8,3	153.065	Rata-rata 8,3	Dinporapar
				Persentas e cabor yang berprestasi tingkat prov/regional	%	43,24 32432 4	33	6.315.000	33	6.326.500	33	6.339.150	35	6.353.065	35	Dinporapar

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	1	4	Progra m Pengem bangan Kapasit as Kepram ukaan	Persentas e jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramuk aan	%	20	66,6	250.000	63,6	250.00 0	72,7	250.00 0	90,9	250.00 0	73,45	Dinporapar
2	2	0	Urusan Pemer intahan Bidang Statisti k												Rata- Rata	
2	2	2	Progra m Penyele nggaraan Statisti k Sektora l	Persentas e data sektoral yang dikumpul kan dan disebarlua skan	%	100	100	160.000	100	180.00 0	100	190.00 0	100	195.00 0	100	Diskominfo
2	2	1	Urusan Pemer intahan Bidang Persan dian													

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	2	2	Progra m Penyele nggaraan Persand ian Untuk Pengam anan Informa si	Tingkat keamanan informasi pemerinta h	Angk a	52,94	56,86	178.000	60,78	208.79 8	64,71	222.90 3	68,63	240.16 6	68,63	Diskominfo
2	2	2	Urusan Pemer intahan Bidang Kebuda yaan													
2	2	2	Progra m Pengem bangan Kebuda yaan	Persentas e objek pemajuan kebudaya an yang dilindungi , dikemban gkan dan dimanfaat kan	%	7,77	8,48	826.764	9,18	850.24 0	9,89	863.20 4	10,6	878.18 4	10,6	Disdikbud
2	2	4	Progra m Pembin	Jumlah sejarah lokal yang	angk a	2	2	10.174	2	10.463	2	10.622	2	10.807	2	Disdikbud

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
2	2 4	5	aan Sejarah dilestarikan (diinformasikan, disebarluaskan, diajarkan)	%	9,71	16,57	915.235	23,43	941.225	30,29	955.575	37,14	972.157	37,14	Disdikbud
			1. Persentase Cagar budaya yang ditetapkan	%	100	100		100		100	100		100		
			3. Persentase Cagar Budaya yang dikelola	%	100	100		100		100	100		100		
2	2 3		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan												
2	2 3	2	Program Pembinaan Perpustakaan	%	26,04	28,15	73.200	29,3	83.358	30,85	89.400	31,25	113.000	31,25	Dinarpus

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
2	2 3	3	akaan													
			Progra m Pelestari an Koleksi Nasiona l Dan Naskah Kuno	Pertumbu han naskah kuno yang dilestarika n	%	39,82	39,85	19.950	39,89	22.450	39,91	22.750	39,97	25.500	39,97	Dinarpus
2	2 4		Urusan Pemerit ntahan Bidang Kearsip an													
2	2 4	2	Progra m Pengelol aan Arsip	Persentas e Perangkat Daerah dengan pengelolaa n arsip pada level baik	angk a	5	5	78.610	10	192.00 0	20	175.00 0	25	188.67 2	25	Dinarpus
2	2 4	3	Progra m Perlind	Persentas e arsip yang	angk a	5	5	34.580	8	35.500	10	32.500	12	43.580	12	Dinarpus

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
2	2	4	angan Dan Penyela matan Arsip	dilakukan pemulih n akibat bencana												
3			Urusan Pemer ntahan Pilihan Urusan Pemer ntahan Bidang Kelauta n Dan Perikan an													
3	2	3	Progra m Pengelol aan Perikan an Tangka p	Pertumbu han Produktivi tas perikanan tangkap	%	-17,36	2,41	1.852.1 24	2,84	1.999. 124	2,92	2.081. 124	3,01	2.157. 065	3,01	DKP
				Cakupan nelayan kecil yang terlindung i	%	100	100		100		100		100		100	

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
3	2	4	Progra m Pengelol aan Perikan an Budida ya	Pertumbu han Produktivi tas perikanan budidaya	%	0,5	0,57	3.114.7 83	0,61	3.189. 783	0,68	3.340. 785	0,73	3.393. 783	0,73	DKP
3	2	5	Progra m Pengaw asan Sumber Daya Kelauta n Dan Perikan an	Penyelesai an kasus pelanggar an sumberda ya perikanan	%	100	100	35.000	100	40.000	100	65.000	100	70.000	100	DKP
3	2	6	Progra m Pengola han Dan Pemasa ran Hasil Perikan an	Prosentas e pengolah ikan yang bersertifik at	%	4	5,02	50.000	5,06	60.000	6	80.000	6,06	97.000	6,06	DKP
3	2	6	Urusan Pemer intahan Bidang													

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
3	2 6	2	Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	DTW	1	4	165.000	4	189.750	4	218.213	4	250.945	4	Dinporapar
3	2 6	3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	%	53,57	82,14	140.000	89,29	161.000	92,86	185.150	100	212.923	100	Dinporapar
3	2 6	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	Peningkatan jumlah kemitraan	%	47,06	64,70	140.000	64,70	161.000	70,59	185.150	76,47	212.923	76,47	Dinporapar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
		Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	%	2,74	3,5	165.000	4	189.750	4,5	218.213	5	250.945	5	Dinporapar	
3	2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
3	2	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	%	51,06	51,71	957.430	52,04	1.070.000	52,37	1.180.000	52,71	1.230.000	52,71	Distan
3	2	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Persentase kenaikan indeks pertanaman	%	0,2	0,3	7.902.841	0,4	8.002.841	0,4	8.002.841	0,5	8.207.841	0,5	Distan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			bangan Prasara na Pertani an	Persentas e pemenuha n kebutuha n prasarana pertanian	%	11,99	12,48		12,73		12,98		13,24		13,24	Distan
3	2 7	4	Progra m Pengen dalian Kesehat an Hewan Dan Kesehat an Masyar akat Veterin er	Persentas e penuruna n angka morbidita s hewan	%	4,58	4,48	985.000	4,45	1.067. 500	4,41	1.077. 500	4,38	1.157. 500	4,38	Distan
3	2 7	5	Progra m Pengen dalian Dan Penang gulanga	Persentas e luasan terdampa k yang berhasil ditangani	%	65,74	67,41	800.000	68,26	829.06 3	69,13	829.06 3	70	829.06 3	70	Distan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
3	2 7	6	n Bencan a Pertani an Progra m Perizina n Usaha Pertani an	Persentas e jumlah usulan izin usaha pertanian	%	100	100	-	100	57.500	100	57.500	100	72.500	100	Distan
3	2 7	7	Progra m Penyulu han Pertani an	Persentas e kenaikan kelas kelompok lanjut	%	1,69	1,9	4.972.1 22	1,98	4.988. 473	2,05	4.978. 473	2,12	4.948. 266	2,12	Distan
3	3	0	Urusan Pemer intahan Bidang Perdag angan													
3	3 0	2	Progra m Perizina n Dan Pendaft aran Perusah aan	Persentas e pedagang yang telah memiliki ijin	%	26,55	27,880 41759	120.339	29,28	130.33 9	30,74	130.33 9	32,28	130.33 9	32,28	Disdagperin

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
3	3	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	%	80,95	100	7.058.081	100	7.151.153	100	7.161.153	100	7.171.153	100	Disdagperin
				Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan	%	35,85	37,63786765	40.000	39,57	95.000	41,59	105.000	43,72	110.000	43,72	Disdagperin
3	3	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	%	8,81	9,25	50.000	9,71	95.000	10,20	95.000	10,71	100.000	10,71	Disdagperin
3	3	5	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen	pelaku usaha	0	1	145.225	1	240.225	1	250.225	1	260.225	4	Disdagperin

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
3	30	6	Program Standar disasi Dan Perlindungan Konsumenten	ekspor Pertumbuhan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	-35,24	5	75.000	6	125.000	7	135.000	8	145.000	8	Disdagperin
3	30	7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan jumlah Produk UMKM difasilitasi yang terjual di dalam negeri	%	n/a	20	125.000	30	90.000	40	90.000	50	90.000	50	Disdagperin
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian													

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
3	3	2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	%	0	10	130.000	10	155.000	15	160.000	15	155.000	50	Disdagperin
3	3	3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang diawasi	%	n/a	40	10.000	40	20.000	40	20.000	40	20.000	40	Disdagperin
				Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang difasilitasi	%	n/a	60	20.000	60	30.000	60	30.000	60	30.000	60	Disdagperin
3	3	4	Program Pengelolaan Sistem Informa	Persentase Informasi Industri yang Dikelola	%	0,15	6	30.000	6	45.000	6	50.000	6	65.000	24	Disdagperin

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
4		si Industri Nasional	SIINas													
4	1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah														
4	1	2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	1.839.800	100	1.844.200	100	1.851.000	100	1.855.000	100	Setda
				Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksana	%	100	100	9.050.576	100	9.179.424	100	9.369.000	100	9.560.000	100	Setda

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
4	1	3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	kan sesuai ketentuan yang berlaku Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	943.500	100	963.000	100	993.500	100	1.040.000	100	Setda
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	931.363	100	948.339	100	958.000	100	967.298	100	Setda
				Persentase saluran informasi	%	100	100	2.722.878	100	2.797.122	100	2.880.000	100	3.000.000	100	Setda

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			publik terkait pimpinan yang aktif													
4	2	Sekretariat DPRD														
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD	%	100	100	25.886.700	100	27.751.800	100	28.695.634	100	29.803.254	100	Setwan
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan														
5	1															
5	1	2	Program Perencanaan, Pengan	Persentase Kesesuaian Strategi RKPD	%	100	100	1.300.000	100	1.310.134	100	1.317.270	100	1.322.858	100	Bappeda

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
		dalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	dengan Strategi RKPD Provinsi												
			Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKP	%	100	100			100		100		100		
			Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMN	%	100	100			100		100		100		
			Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMD Provinsi	%	100	100			100		100		100		
5	1	3	Program Koordinasi Dan	Persentase Sinkronisasi	%	100	100	1.868.039	100	1.916.987	100	1.948.667	100	1.969.127	Bappeda

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	%	100	100		100		100		100		100	
		Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100		100		100		100		100	
		Persentase Sinkronisasi												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
5	2	Keuangan	Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Infrastruk tur dan Kewilayah an													
5	2	2	Progra m Pengelol aan Keuang an Daerah	Proporsi perencanaan dan pengangg aran RAPBD terhadap perencanaan dan pengangg aran di RKPD	%	100	1.350.000	100	1.388.705	100	1.410.690	100	1.435.200	100	BPKAD	
				Proporsi kepatuha n pelaksana an	%	n/a	99,63	1.158.170	99,7	1.193.725	99,78	1.222.650	99,85	1.243.800	99,85	BPKAD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			kegiatan/ sub kegiatan terhadap peraturan PerUU													
			Cakupan layanan data dan informasi keuangan daerah yang telah terintegra si	%	78,57	82,14	1.137.0 00	85,71	1.169. 900	89,29	1.191. 700	92,86	1.212. 550	92,86	BPKAD	
5	2	3	Progra m Pengelol aan Barang Milik Daerah	Prosentas e peningkat an manajeme n pengelolaa n dan administr asi Barang Milik Daerah secara optimal dan akuntabel	%	29,05	33	1.005.0 00	35	941.34 0	37	1.455. 400	39	971.89 0	39	BPKAD
5	2	4	Progra m	Pertumbu han	%	7,5	5	714.500	5	735.29 0	5	745.80 0	5	758.77 0	5	BPKAD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah Objek Pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB	%	1,33	1	3.460.000	1	3.558.900	1	3.712.800	1	3.777.235	1	BPKAD	
5	3	Kepegawaian	jumlah Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB													
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	%	122,08	148,9	4.459.331	185,6	5.721.552	239	6.116.034	323	7.815.286	323	BKPP
				Rasio pegawai fungsional	%	10,53	12		13		14		15		15	BKPP
				Rasio jabatan fungsional bersertifikat	%	96,01	97		98		99		100		100	BKPP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
			at kompetensi	%	72	75			80		85		90		BKPP	
			Persentas e ASN yang memenuhi kualifikasi /kompetensi	%	14,28	6,6			7,1		7,7		8,3		BKPP	
			Penurunan pelanggaran disiplin													
5	4	Pendidikan Dan Pelatihan														
5	4	2	Progr am Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentas e ASN yang memiliki kesenjangan kompetensi minimal rendah	%	0	0	2.141.872	40	3.230.529	50	4.125.319	60	4.308.540	60	BKPP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
5	5	Penelitian Dan Pengembangan														
5	5	2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang berdasarkan isu strategis daerah	%	100	100	445.000	100	445.000	100	445.000	100	450.000	100	Bappeda
				Persentase hasil penelitian yang didiseminasikan	%	100	100		100	100	100	100	100	100		
				Persentase inovasi yang difasilitasi daerah	%	15	15		15	20	20	20	20	20		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
6																
6	1		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah													
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan	%	3	3	5.500.110	3	6.046.667	3	6.046.667	3	6.343.935	3	Inspektorat
				Persentase Rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	%	95	95		95		95		95		95	Inspektorat
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pemandangan Dan Asisten	Jumlah OPD yang berpredikat WBK	OPD	0	0	2.025.064	1	2.106.383	1	2.045.144	2	2.328.931	2	Inspektorat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7		si														
7	1	Unsur Kewilayahan Kecamatan														
7	1	2	Progra m Penyele nggaraa n Pemerin tahan Dan Pelayan an Publik	Persentas e pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	15.000. 000	100	25.000 .000	100	35.000 .000	100	44.500 .000	100	Kecamatan Pati
7	1	3	Progra m Pember dayaan Masyar akat Desa Dan Kelurah an	Persentas e desa dan/atau kelurahan yang melibatk an masyarak at dalam pembangu nan	%	100	100	48.412. 400	100	61.000 .000	100	80.000 .000	100	93.000 .000	100	Kecamatan Pati
7	1	4	Progra m Koordin	Persentas e konflik sosial dan	%	100	100	27.000. 000	100	35.000 .000	100	45.000 .000	100	49.000 .000	100	Kecamatan Pati

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	5	asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	100	100	27.000. 000	100	30.000 .000	100	36.000 .000	100	38.000 .000	100	Kecamatan Pati
7	1	6	Progra m Penyele nggaraa n Urusan Pemerin tahan Umum	Persentas e keikutsert aan Forkompi ncam dalam penyeleng garaan pemerinta han umum di Kecamata n	%	100		7.200.0 00	100	10.000 .000	100	15.000 .000	100	20.000 .000	100	Kecamatan Pati
			Progra m Pembin aan Dan Pengaw asan Pemerin tahan Desa	Persentas e desa yang menyusun dokumen perencana an, pengangg aran dan pelaporan sesuai												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	dengan ketentuan dan tepat waktu Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	17.925	100	17.925 .850	100	17.925 .850	100	17.925 .850	Kecamatan Margorejo
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	53.546	100	53.546 .950	100	53.546 .950	100	53.546 .950	Kecamatan Margorejo
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan	%	100	100	28.512	100	28.512 .700	100	28.512 .700	100	28.512 .700	Kecamatan Margorejo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	5	Dan Ketertiban Umum	ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	6.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	Kecamatan Margorejo
7	1	6	Program Penyelesaian Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	6.421	100	6.421.100	100	6.421.100	100	6.421.100	100	Kecamatan Margorejo
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	2	Progra m Penyele nggaraa n Pemerin tahan Dan Pelayan an Publik	waktu Persentas e pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	17.925	100	18.125 .850	100	18.525 .850	100	19.250 .000	100	Kecamatan Tlogowungu
7	1	3	Progra m Pember dayaan Masyar akat Desa Dan Kelurah an	Persentas e desa dan/atau kelurahan yang melibatk an masyarak at dalam pembangu nan	%	100	100	68.217	100	68.217 .950	100	72.967 .950	100	73.562 .950	100	Kecamatan Tlogowungu
7	1	4	Progra m Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib	Persentas e konflik sosial dan gangguan ketentram an dan ketertiban yang	%	100	100	28.512	100	28.512 .700	100	28.512 .700	100	30.512 .700	100	Kecamatan Tlogowungu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	5	an Umum	dikoordin asikan penangan annya	%	100	100	6.000	100	6.000. 000	100	6.000. 000	100	6.000. 000	100	Kecamatan Tlogowungu
7	1	6	Progra m Penyele nggaraan Urusan Pemerin tahan Umum	Persentas e keikutsert aan Forkompi ncam dalam penyeleng garaan pemerinta han umum di Kecamata n	%	100	100	49.946	100	49.946 .500	100	49.946 .500	100	50.946 .500	100	Kecamatan Tlogowungu
			Progra m Pembin aan Dan Pengaw asan Pemerin tahan Desa	Persentas e desa yang menyusun dokumen perencana an, pengangg aran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	55.751	100	56.501	100	56.751	100	57.751	100	Kecamatan Gembong
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	51.460	100	53.028	100	55.260	100	55.930	100	Kecamatan Gembong
7	1	4	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dikoordinasikan	%	100	100	40.565	100	44.565	100	47.565	100	49.565	100	Kecamatan Gembong

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	penanganannya Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	16.565	100	17.565	100	18.565	100	20.565	100	Kecamatan Gembong
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	30.263	100	32.263	100	32.763	100	33.263	100	Kecamatan Gembong

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	15.216	100	15.216.000	100	15.216.000	100	15.216.000	Kecamatan Wedarijaksa
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	57.000	100	54.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	Kecamatan Wedarijaksa
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	33.000	100	33.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	Kecamatan Wedarijaksa

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	5.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	Kecamatan Wedarijaksa
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	17.570	100	20.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	100	Kecamatan Wedarijaksa
7	1	2	Program Penyelenggaraan	Persentase pelayanan	%	100	100	35.000	100	40.000	100	40.000	100	45.000	100	Kecamatan Margoyoso

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	3	nggaraa n Pemerin tahan dan Pelayan an Publik Progra m Pember dayaan Masyar akat Desa Dan Kelurah an	perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	68.000	100	70.000	100	80.000	100	85.000	100	Kecamatan Margoyoso
7	1	4	Progra m Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	Persentas e konflik sosial dan gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	100	100	30.000	100	40.000	100	45.000	100	50.000	100	Kecamatan Margoyoso
7	1	5	Progra m Penyele	Persentas e keikutsert	%	100	100	15.000	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	Kecamatan Margoyoso

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	6	nggaraa n Urusan Pemerin tahan Umum	aan Forkompi ncam dalam penyeleng garaan pemerinta han umum di Kecamata n	%	100	100	10.000	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	Kecamatan Margoyoso
7	1	2	Progra m Pembin aan Dan Pengaw asan Pemerin tahan Desa	Persentas e desa yang menyusun dokumen perencana an, pengangg aran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	10.407	100	11.707 .900	100	14.407 .900	100	16.307 .900	100	Kecamatan Trangkil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	3	tahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilayani	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	48.000	100	52.500.000	100	56.000.000	100	60.500.000	100	Kecamatan Trangkil
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	30.000	100	30.000.000	100	31.000.000	100	30.000.000	100	Kecamatan Trangkil
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase keikutsertaan Forkompi ncam	%	100	100	6.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100	Kecamatan Trangkil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	6	Pemerintahan Umum	dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan												
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	26.218	100	26.218.000	100	27.218.000	100	26.218.000	100	Kecamatan Trangkil
7	1	2	Program Pelayanan Perizinan Pemerintahan Dan Pelayanan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	17.000	100	22.000	100	26.000	100	30.000	100	Kecamatan Tayu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	3	an Publik Progra m Pember dayaan Masyar akat Desa Dan Kelurah an	Persentas e desa dan/atau kelurahan yang melibatk an masyarak at dalam pembangu nan	%	100	100	37.000	100	44.000	100	53.000	100	63.000	100	Kecamatan Tayu
7	1	4	Progra m Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	Persentas e konflik sosial dan gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	100	100	29.000	100	32.000	100	34.000	100	36.000	100	Kecamatan Tayu
7	1	5	Progra m Penyele nggaraa n Urusan Pemerin tahan Umum	Persentas e keikutsert aan Forkompi ncam dalam penyeleng garaan	%	100	100	3.500	100	6.500	100	7.500	100	8.500	100	Kecamatan Tayu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pemerintahan umum di Kecamatan Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	6.000	100	11.000	100	15.000	100	18.000	100	Kecamatan Tayu
7	1	2	Program Pelayanan Perizinan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	12.216	100	12.216	100	12.216	100	12.216	100	Kecamatan Dukuhseti

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	38.000	100	38.000	100	38.000	100	38.000	100	Kecamatan Dukuhseti
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	33.000	100	33.000	100	33.000	100	33.000	100	Kecamatan Dukuhseti
7	1	5	Program Penyelesaian Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompi ncam dalam penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	Kecamatan Dukuhseti

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	umum di Kecamatan Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	12.000	100	Kecamatan Dukuhseti
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	18.650	100	20.151	100	21.983	100	23.815	100	Kecamatan Gunungwungkal
7	1	3	Progra	Persentas	%	100	100	51.170	100	56.287	100	61.404	100	66.521	100	Kecamatan Gunungwun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	4	m Pember dayaan Masyar akat Desa Dan Kelurah an	e desa dan/atau kelurahan yang melibatk an masyarak at dalam pembangu nan	%	100	100	26.000	100	28.600	100	31.200	100	33.800	100	Kecamatan Gunungwun gkal
7	1	5	Progra m Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	Persentas e konflik sosial dan gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	100	100	3.000	100	3.200	100	3.400	100	3.600	100	Kecamatan Gunungwun gkal
			Progra m Penyele nggaraa n Urusan Pemerin tahan Umum	Persentas e keikutsert aan Forkompi ncam dalam penyeleng garaan pemerinta												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	han umum di Kecamatan Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	48.860	100	53.746	100	58.632	100	63.518	100	Kecamatan Gunungwungkal
7	1	2	Program Pelayanan Perizinan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	14.600	100	16.432	100	18.264	100	20.096	100	Kecamatan Cluwak

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
7	1	3	Progra m Pember dayaan Masyar akat Desa Dan Kelurah an	Persentas e desa dan/atau kelurahan yang melibatk an masyarak at dalam pembangu nan	%	100	100	52.660	100	57.777	100	62.894	100	68.011	100	Kecamatan Cluwak
7	1	4	Progra m Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	Persentas e konflik sosial dan gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	100	100	34.015	100	36.615	100	39.215	100	41.815	100	Kecamatan Cluwak
7	1	5	Progra m Penyele nggaraa n Urusan Pemerin tahan	Persentas e keikutsert aan Forkompi ncam dalam penyeleng	%	100	100	3.500	100	3.800	100	4.000	100	4.300	100	Kecamatan Cluwak

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
7	1	6	Umum garaan pemerinta han umum di Kecamata n	%	100	100	44.560	100	49.446	100	54.332	100	59.218	100	Kecamatan Cluwak
			Progra m Pembin aan Dan Pengaw asan Pemerin tahan Desa												
			Persentas e desa yang menyusun dokumen perencana an, pengangg aran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu												
7	1	2	Progra m Penyele nggaraa n Pemerin tahan Dan Pelayan an	%	100	100	19.000	100	27.000	100	37.948	100	39.000	100	Kecamatan Juwana
			Persentas e pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani												

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	3	Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	66.000	100	73.000	100	85.500	100	89.239	100	Kecamatan Juwana
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	36.100	100	38.000	100	44.000	100	48.000	100	Kecamatan Juwana
7	1	5	Program Penyelesaian Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompi ncam dalam penyelenggaraan	%	100	100	32.100	100	35.000	100	40.000	100	43.000	100	Kecamatan Juwana

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pemerintahan umum di Kecamatan Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	29.000	100	31.000	100	35.000	100	40.000	100	Kecamatan Juwana
7	1	2	Program Pelayanan Perizinan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	25.000	100	27.500	100	28.875	100	30.319	100	Kecamatan Batangan

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
7	1	3	Progra m Pember dayaan Masyar akat Desa Dan Kelurah an	Persentas e desa dan/atau kelurahan yang melibatk an masyarak at dalam pembangu nan	%	100	100	97.500	100	107.25 0	100	112.61 3	100	118.24 3	100	Kecamatan Batangan
7	1	4	Progra m Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	Persentas e konflik sosial dan gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	45	50	38.468	52	42.315	55	44.431	57	46.652	57	Kecamatan Batangan
7	1	5	Progra m Penyele nggaraa n Urusan Pemerin tahan Umum	Persentas e keikutsert aan Forkompi ncam dalam penyeleng garaan pemerinta han	%	100	100	25.000	100	27.500	100	28.875		30.319	100	Kecamatan Batangan

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	umum di Kecamatan Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	75	78	10.808	80	11.890	82	12.485	85	13.109	85	Kecamatan Batangan
7	1	2	Program Pelayanan Perizinan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	17.216	100	17.216	100	17.216	100	17.216	100	Kecamatan Jakenan
7	1	03	Program Pember	Persentase desa dan/atau	%	100	100	48.000	100	48.000	100	48.000	100	48.000	100	Kecamatan Jakenan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	04	dayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	33.000	100	33.000	100	33.000	100	33.000	100	Kecamatan Jakenan
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya												
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompi ncam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	5.000	100	Kecamatan Jakenan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	Kecamatan Jakenan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	47.000	100	48.100	100	49.255	100	50.468	Kecamatan Jaken
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan	%	100	100	117.000	100	122.850	100	128.993	100	135.442	Kecamatan Jaken

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	4	Desa Dan Kelurahan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	n masyarakat dalam pembangunan Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	45.000	100	47.250	100	49.613	100	52.093	100	Kecamatan Jaken
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	25.000	100	26.250	100	27.563	100	28.941	100	Kecamatan Jaken
7	1	6	Program Pembinaan	Persentase desa yang	%	100	100	25.000	100	26.250	100	27.563	100	28.941	100	Kecamatan Jaken

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	4	an Progra m Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	pembangu nan Persentas e konflik sosial dan gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	100	100	35.285	100	37.049	100	38.900	100	40.844	100	Kecamatan Winong
7	1	5	Progra m Penyele nggaraa n Urusan Pemerin tahan Umum	Persentas e keikutsert aan Forkompi ncam dalam penyeleng garaan pemerinta han umum di Kecamata n	%	100	100	4.320	100	4.536	100	4.762	100	5.000	100	Kecamatan winong
7	1	6	Progra m Pembin aan Dan Pengaw	Persentas e desa yang menyusun dokumen perencana	%	100	100	8.503	100	8.928	100	9.374	100	9.842	100	Kecamatan winong

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	2	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Dilayani	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	35.815	100	37.355	100	38.022	100	38.718	100	Kecamatan Gabus
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	106321	100	110600	100	111800	100	113000	Kecamatan Gabus

(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	45	50	46.195	52	46.300	55	46.700	57	47.300	57	Kecamatan Gabus
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	10.000	100	10.500	100	11.025		11.576	100	Kecamatan Gabus
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, pengangg	%	75	79	9.090	80	11.000	82	12.000	85	13.000	85	Kecamatan Gabus

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	2	tahan Desa Program Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang dilayani	aran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	24.070	100	31.043	100	33.748	100	40.622	100	Kecamatan Pucakwangi
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	82	85	46.761	87	58.055	90	57.264	92	59.683	92	Kecamatan Pucakwangi
7	1	4	Program Koordinasi	Persentase konflik sosial dan	%	60	63	26.951	66	29.646	69	30.000	72	35.872	72	Kecamatan Pucakwangi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)			
7	1	5	asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	60	65	13.494	70	7.610	75	13.000	80	14.000	80	Kecamatan Pucakwangi	
7	1	6	Progra m Penyele nggaraa n Urusan Pemerin tahan Umum	Progra m Pembin aan Dan Pengaw asan Pemerin tahan Desa	Persentas e keikutsert aan Forkompi ncam dalam penyeleng garaan pemerinta han umum di Kecamata n	%	89	90	31.389	91	13.328	92	22.371	93	24.493	93	Kecamatan Pucakwangi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	dengan ketentuan dan tepat waktu Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	4.044	100	4.159	100	4.222	100	4.296	100	Kecamatan Tambakromo
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	39.355	100	40.472	100	41.089	100	41.802	100	Kecamatan Tambakromo
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan	%	100	100	10.000	100	10.284	100	10.441	100	10.622	100	Kecamatan Tambakromo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	5	Dan Ketertiban Umum	ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya												
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	24.321	100	25.012	100	25.393	100	25.834	100	Kecamatan Tambakromo
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	29.000	100	29.824	100	30.278	100	30.804	100	Kecamatan Tambakromo
7	1	2	Program Penyele	Persentase pelayanan	%	100	100	15.216	100	15.216.000	100	15.216.000	100	15.216.000	100	Kecamatan Kayen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	3	nggaraa n Pemerin tahan Dan Pelayan an Publik Progra m Pember dayaan Masyar akat Desa Dan Kelurah an	perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	57.000	100	54.000 .000	100	55.000 .000	100	55.000 .000	100	Kecamatan Kayen
7	1	4	Progra m Koordin asi Ketentr aman Dan Ketertib an Umum	Persentas e konflik sosial dan gangguan ketentram an dan ketertiban yang dikoordin asikan penangan annya	%	100	100	29.000	100	29.000 .000	100	29.000 .000	100	29.000 .000	100	Kecamatan Kayen
7	1	5	Progra m Penyele	Persentas e keikutsert	%	100	100	5.000	100	5.000. 000	100	5.000. 000	100	5.000. 000	100	Kecamatan Kayen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	50.571	100	58.571.500	100	60.096.500	100	60.000.000	100	Kecamatan Kayen
7	1	2	Program Pelayanan Pengurusan Perizinan Pemerintahan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan	%	100	100	8.919	100	9.365.160	100	9.833.418	100	10.325.089	100	Kecamatan Sukolilo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	3	tahan Dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilayani	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	30.130	100	31.636.500	100	33.218.325	100	34.879.241	100	Kecamatan Sukolilo
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	51.271	100	53.834.550	100	56.526.278	100	59.352.591	100	Kecamatan Sukolilo
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase keikutsertaan Forkompi ncam	%	100	100	6.000	100	6.300.000	100	6.615.000	100	6.945.750	100	Kecamatan Sukolilo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
7	1	6	Pemerintahan Umum	dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan												
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	%	100	100	13.766	100	14.454 .300	100	15.177 .015	100	15.935 .866	100	Kecamatan Sukolilo
8			Unsur Pemerintahan Umum													
8	1		Kesatuan Bangsa Dan Politik													

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila, bela negara dan wasbang dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari	%	0	100	31.000	100	40.000	100	47.000	100	54.000	100	Bakesbangpol
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkades serentak	%	79	0	2.278.000	79,5	2.287.000	0	2.296.000	0	2.305.000	79,5	Bakesbangpol

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)		
		kan Politik Dan Pengem- bangan Etika Serta Budaya Politik														
			Tingkat partisipasi masyarak- at dalam Pilkades serentak	%	79	0	79,5		0		0		79,5	Bakesbangp ol		
			Tingkat partisipasi masyarak- at dalam Pilkades serentak	%	85	85	86		87		88		88	Bakesbangp ol		
			Tingkat partisipasi masyarak- at dalam Pilkades serentak	%	60	60	60,5		61		61,5		61,5	Bakesbangp ol		
8	1	4	Progra- m Pember- dayaan Dan Pengaw- asan	Prosentas e ormas yang aktif	%	68	70	1.035.0 00	72	1.043. 000	74	1.050. 000	76	1.058. 000	76	Bakesbangp ol

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	
8	1	5	Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase sekolah atau ormas yang mendapatkan penyuluhan narkoba	%	0	30	43.000	32	45.000	34	53.000	36	55.000	36	Bakesbangpol
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penang	Persentase ketersediaan data intelijen	%	0	100	35.000	100	45.000	100	58.000	100	70.000	100	Bakesbangpol

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)
	anan Konflik Sosial													
	Jumlah					2.780.0 57.063		2.859. 001.5 91		2.902. 589.8 38		2.952. 960.4 33		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 4 (empat) tahun ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dan IKU masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Target IKU yang sudah ditetapkan pada setiap tahapan mulai dari tahun 2023 sampai tahun 2026 merupakan target yang ditetapkan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama menggunakan pendekatan proyeksi statistik, yang kedua pendekatan terhadap situasi dan kondisi riil yang dihadapi daerah saat ini.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun ke depan. Adapun IKU Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian					Kondisi Akhir (Tahun 2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	3,38	3,65	4,25	4,72	5,34	5,80	5,80
a	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian	%	- 0,20	3,22	3,26	3,65	3,68	3,80	3,80
b	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan	%	3,42	4,85	5,07	5,43	5,58	5,80	5,80
c	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Perdagangan	%	7,12	1,6	2,15	3,49	4,42	5,79	5,79
d	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. (000)	34.159,08	36.379,93	41.761,15	45.014,27	48.510,69	52.328,31	52.328,31
e	PDRB Per Kapita ADHK	Rp. (000)	23.404,89	23.784,28	24.648,32	25.644,22	26.828,88	28.209,66	28.209,66
f	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	%	75,00	75,50	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00
g	Indeks Ketimpangan Pendapatan (versi Word Bank)	Angka	18,69	18,90	19,03	20,14	20,64	21,48	21,48
h	Angka Kriminalitas	Angka	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39	1,39
i	Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	%	0,065	0,063	0,060	0,055	0,050	0,048	0,048
j	IKLH	Angka	52,35	52,47	52,61	52,87	53,13	53,39	53,39
									-
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,60	4,27	3,84	3,49	3,33	3,19	3,19
a	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	Angka	2,67	2,00	1,70	1,40	1,15	0,90	0,90
b	TPAK	%	68,99	69,00	69,15	69,30	69,45	69,60	69,60
3.	Angka Kemiskinan	%	10,21	10,07	9,82	9,65	9,54	9,42	9,42
a	P1 (Indeks kedalaman kemiskinan)	angka	1,69	1,63	1,56	1,50	1,43	1,37	1,37
b	P2 (Indeks keparahan kemiskinan)	angka	0,42	0,39	0,36	0,32	0,29	0,26	0,26
d	Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	%	81,29	81,79	82,29	82,79	83,29	83,79	84,29

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian					Kondisi Akhir (Tahun 2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
e	Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
f	Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	%	85,15	85,65	86,15	87,15	88,15	89,15	89,15
e	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	94,26	94,56	94,87	95,48	96,09	96,70	96,70
4	Indeks Pembangunan Manusia	%	72,28	72,68	73,08	73,48	73,88	74,28	74,28
a	Umur Harapan Hidup	Angka	76,27	76,29	76,31	76,33	76,35	76,37	76,37
b	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	51,11	53,11	56,29	58,20	59,11	60,02	60,02
c	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,52	7,55	7,63	7,68	7,75	7,75
d	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94	13,00	13,08	13,13	13,20	13,23	13,23
e	Pengeluaran Per Kapita	Rp (000)	10.506,00	10.746,10	10.946,20	11.104,80	11.263,40	11.422,00	11.422,00
5	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,21	92,23	92,26	92,31	92,36	92,41	92,41
a	Penurunan Kesenjangan Umur Harapan Hidup antara Perempuan dan Laki-laki	%	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
b	Penurunan Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki	%	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
c	Penurunan Kesenjangan Harapan Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki	%	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
d	Penurunan Kesenjangan Pengeluaran Per Kapita antara Perempuan dan Laki-laki	%	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
e	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	66,39	66,50	66,70	67,00	67,30	67,60	67,60

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian					Kondisi Akhir (Tahun 2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62,02	62,05	62,10	62,20	62,40	62,50	62,50
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,40	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60
b	Nilai SAKIP	Angka	65,04	65,04	65,24	65,50	65,70	66,00	66,00
c	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	32,01		61,00	65,00	71,00	75,00	75,00
d	<i>Nilai SPIP Terintegrasi</i>								
	- Maturitas SPIP	Level	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,00
	- Manajemen Risiko Instansi (MRI)	Level	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,00
	- IEPTK	Level	-	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,00
e	Indeks SPBE	Angka	2,75	2,75	2,75	2,78	2,78	2,80	2,80
f	IPKD	Angka	60,15	62,45	64,75	67,05	69,35	71,65	71,65
g	Desentralisasi Fiskal								
	- Rasio Ketergantungan Fiskal	Angka	85,74	85,50	85,26	85,02	84,78	84,54	84,54
	- Rasio Kemadirian Fiskal	Angka	16,63	17,38	17,59	17,78	17,85	17,92	17,92

8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat PD. IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU Daerah. Adapun IKU Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,48	7,55	7,63	7,68	7,75	7,75
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,94	13,08	13,13	13,2	13,23	13,23
		Indeks kompetensi numerik	Angka	n/a	23	24	25	26	26
		Indeks kompetensi literasi	Angka	n/a	54	55	56	57	57
		Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	53,89	54,24	54,59	54,95	55,3	55,3
2	Dinas Kesehatan	Umur Harapan Hidup	Tahun	76,27	76,32	76,37	76,42	76,47	76,47
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	%	75	76	77	78	80	80
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	98,87	98,87	98,87	98,87	98,87	98,87
									0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	94,33	94,61	94,89	95,17	95,45	95,45

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		Persentase kawasan permukiman yang layak huni	%	99,11	99,17	99,23	99,28	99,33	99,33
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Angka Kriminalitas	Angka	1,44	1,43	1,42	1,41	1,40	1,40
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana terhadap PDRB	%	0,065	0,064	0,063	0,062	0,061	0,061
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Persentase Penurunan PMKS	%	5,84	5,83	5,82	5,81	5,8	5,8
		Indeks pemberdayaan perempuan (IDG)	Angka	66,5	67,1	68	69,15	71,05	71,05
		Persentase tingkat pertumbuhan penduduk	%	1,06	1,12	1,15	1,18	1,21	1,21
8	Dinas Tenaga Kerja	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	Angka	3,00	1,00	0,90	0,80	0,80	0,80
		TPAK	%	68,99	67,41	68,35	69,38	70,15	70,15

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
9	Dinas Ketahanan Pangan	PPH Ketersediaan	Angka	60,8	61	61,5	62	62,5	62,5
		PPH Konsumsi	Angka	87	87,5	88	88,5	89	89
10	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	52,35	52,61	52,87	53,13	53,39	53,39
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan KTP	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase kepemilikan KK	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase kepemilikan KIA	%	70	80	82	83	84	84
		Persentase kepemilikan Akta lahir	%	78	91	91	92	92	92
		Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	79	90	90	91	92	92
		Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang dilaporkan	%	80	100	100	100	100	100

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan	%	80	100	100	100	100	100
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa membangun (IDM)	Angka	0,7105	0,7405	0,7555	0,7705	0,7855	0,7855
13	Dinas Perhubungan	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	7922	8423	8924	9425	9926	9926
		Rasio pelayanan ruas jalan	Angka	0,287	0,28	0,275	0,27	0,265	0,265
		Rasio Konektivitas angkutan umum	Angka	0,85	0,9	0,95	1	1	1
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Indeks SPBE	Angka	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,15
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persentase wirausaha menuju wirausaha mapan (atas wirausaha yang difasilitasi)	%	n/a	30	35	40	45	45
		Persentase wirausaha menuju wirausaha	%	n/a	0,043	0,05	0,05	0,065	0,065

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		mapan							
		Cakupan koperasi menuju modernisasi koperasi	Angka	0,07	0,09	0,1	0,12	0,14	0,14
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	0,48	0,16	0,19	0,22	0,25	0,25
		IKM atas pelayanan penanaman modal	Angka	92,05	92,1	92,2	92,3	92,4	92,4
									0
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Jumlah perolehan medali pada even olahraga provinsi dan nasional	Angka	155	160	165	170	175	670
		Persentase wirausaha muda yang bersaing di dunia usaha	%	0,011	0,013	0,014	0,016	0,018	0,018
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	%	0,018	0,608	1,198	1,788	2,378	2,378
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga	%	0,029	0,129	0,229	0,329	0,429	0,429

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		konstan							
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,14	3,10	4,06	5,02	5,98	5,98
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Tingkat ketersediaan arsip	%	22	24	26	28	30	30
		Tingkat Gemar Membaca	Angka	35,25	45,25	45,49	45,52	45,6	45,6
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	10,2	10,35	11,25	12,1	12,45	12,45
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan	%	-10,595	0,5	0,575	0,63	0,69	0,69
		Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	%	4,08	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
20	Dinas Pertanian	Pertumbuhan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	%	-2,25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	18,6	8	8	8	8	8

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
		Persentase perubahan harga pangan bergejolak (volatile food)	%	16,45	16,99	17,6	18,16	19,1	19,1
		Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Kecil	%	0	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5
22	Sekretariat Daerah	Persentase Tingkat capaian Indikator Kinerja Daerah (%)	%	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP	Angka	65,04 (2020)	65,04	65,5	65,7	66	66
		Nilai IKM	Angka	3,4	3,41	3,42	3,44	3,45	3,45
23	Sekretariat DPRD	Persentase Kinerja Fungsi DPRD	%	97	98	99	99	99	99
									0
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB	Angka	65,04 (2020)	67,04	68,04	69,04	70	70
		Persentase hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan	%	50	50	60	65	70	70
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah (PAD terhadap TPD)	%	14,6	15,28	15,52	15,76	0,16	0,16

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,23	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
		Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Angka	32,01	61	65	71	75	75
27	Inspektorat Daerah	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
		IEPTK	Level	0	2	2	3	3	3
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	4	4
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah konflik politik	Kejadian	0	0	0	0	0	0
		Jumlah konflik sosial budaya		0	0	0	0	0	0
		Jumlah konflik agama/ideologi		0	0	0	0	0	0
		Jumlah konflik ekonomi		0	0	0	0	0	0
29	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	3,38

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun IKK Kabupaten Pati yang ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 8.3 dan 8.4.

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak) Pemerintahan Kabupaten Pati Tahun 2023–2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (Tahun 2026)
				2023	2024	2025	2026	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	3,38	4,25	4,72	5,34	5,80	5,80
	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian	%	-0,2	3,26	3,65	3,68	3,80	3,80
	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan	%	3,42	5,07	5,43	5,58	5,80	5,80
	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Perdagangan	%	7,12	2,15	3,49	4,42	5,79	5,79
	Indeks Ketimpangan Pendapatan (versi Word Bank)	Angka	18,69	19,03	20,14	20,64	21,48	21,48
	TPAK	%	68,99	69,15	69,30	69,45	69,60	70,15
	Persentase penduduk yang bekerja	%	60,82	61,32	61,82	62,32	62,82	62,82
	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	Angka	2,67	1,7	1,4	1,15	0,9	0,9
	Angka Kemiskinan	%	10,21	9,82	9,65	9,54	9,42	9,42
	Persentase Penurunan PMKS	%	5,84	5,83	5,82	5,81	5,8	5,8
	Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	%	81,79	82,29	82,79	83,29	83,79	84,29
	Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	%	85,15	86,15	87,15	88,15	89,15	89,15
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	94,26	94,87	95,48	96,09	96,70	96,70
	Persentase rumah layak huni	%	94,33	94,61	94,89	95,17	95,45	95,45
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni	%	99,11	99,17	99,23	99,28	99,33	99,33
	Persentase kepemilikan KTP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (Tahun 2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Persentase kepemilikan KK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase kepemilikan KIA	%	70,00	80,00	82,00	83,00	84,00	84,00
	Persentase kepemilikan Akta lahir	%	78,00	91,00	91,00	92,00	92,00	92,00
	Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	79,00	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00
	Persentase kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan yang dilaporkan	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase kepemilikan Akta Cerai yang dilaporkan	%	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Umur Harapan Hidup	Angka	76,27	76,31	76,33	76,35	76,37	76,37
	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	51,11	56,29	58,2	59,11	60,02	60,02
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,55	7,63	7,68	7,75	7,75
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94	13,08	13,13	13,20	13,23	13,23
	Indeks kompetensi numerik	Angka	n/a	23,00	24,00	25,00	26,00	26,00
	Indeks kompetensi literasi	Angka	n/a	54,00	55,00	56,00	57,00	57,00
	Tingkat Gemar Membaca	Angka	35,25	45,25	45,49	45,52	45,60	45,60
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	10,20	10,35	11,25	12,10	12,45	12,45
	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,21	92,26	92,31	92,36	92,41	92,41
	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	66,39	66,70	67,00	67,30	67,60	67,60
	Penurunan Kesenjangan Umur Harapan Hidup antara Perempuan dan Laki-laki	%	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	Penurunan Kesenjangan Rata-rata Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki	%	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
	Penurunan Kesenjangan Harapan Lama Sekolah antara Perempuan dan Laki-laki	%	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
	Penurunan Kesenjangan Pengeluaran Per Kapita antara Perempuan dan Laki-laki	%	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (Tahun 2026)
				2023	2024	2025	2026	
	PPH Ketersediaan	Angka	60,80	61,00	61,50	62,00	62,50	62,50
	PPH Konsumsi	Angka	87	87,5	88	88,5	89	89
	Pertumbuhan produksi perikanan	%	-10,595	0,5	0,575	0,63	0,69	0,69
	Pertumbuhan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan)	%	-2,25	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Pertumbuhan nilai tambah industri kecil	%	0	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5
	Persentase wirausaha menuju wirausaha mapan (atas wirausaha yang difasilitasi)	%	n/a	30	35	40	45	45
	Persentase wirausaha menuju wirausaha mapan	%	n/a	0,043	0,05	0,05	0,065	0,065
	Cakupan koperasi menuju modernisasi koperasi	Angka	0,07	0,09	0,1	0,12	0,14	0,14
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	%	0,02	0,61	1,20	1,79	2,38	2,38
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga konstan	%	0,03	0,13	0,23	0,33	0,43	0,43
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,14	3,10	4,06	5,02	5,98	5,98
	Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah (PAD terhadap TPD)	%	14,6	15,28	15,52	15,76	0,16	0,16
	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,23	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,6
B	Aspek Daya Saing							
	Angka Kriminalitas	Angka	1,44	1,42	1,41	1,4	1,39	1,39
	Jumlah kejadian konflik sosial	%	0	0	0	0	0	0
	Persentase kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	%	0,065	0,064	0,063	0,062	0,061	0,061
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	52,35	52,61	52,87	53,13	53,39	53,39

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (Tahun 2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,6
	Nilai SAKIP	Angka	65,04	65,04	65,5	65,7	66	66
	Nilai Perencanaan Kinerja hasil Evaluasi SAKIP Menpan RB	Angka	65,04 (SAKIP) Tahun 2020	67,04	68,04	69,04	70	70
	Persentase hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan	%	50	50	60	65	70	70
	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	32,01	61	65	71	75	75
	Nilai SPIP Terintegrasi							
	- Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
	- Manajemen Risiko Instansi (MRI)	Level	2	2	3	3	3	3
	- IEPTK	Level	0	2	2	3	3	3
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	4	4
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	62,02	62,1	62,2	62,4	62,5	62,5
	Indeks SPBE	Angka	2,75	2,75	2,78	2,78	2,8	2,8
	Persentase Kinerja Fungsi DPRD	%	97	98	99	99	99	99
	Desentralisasi Fiskal							
	- Rasio Ketergantungan Fiskal	Angka	85,74	85,26	85,02	84,78	84,54	84,54
	- Rasio Kemandirian Fiskal	Angka	16,63	17,59	17,78	17,85	17,92	17,92
	Indeks Desa membangun (IDM)	Angka	0,7105	0,7405	0,7555	0,7705	0,7855	0,7855
	Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	%	75	76	77	78	79	79
	Indeks kinerja lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	7922	8423	8924	9425	9926	9926
	Rasio pelayanan ruas jalan	Angka	0,287	0,28	0,275	0,27	0,265	0,265
	Rasio Konektivitas angkutan umum	Angka	0,85	0,9	0,95	1	1	1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (Tahun 2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	18,6	8	8	8	8	8
	Pengeluaran Per Kapita	Rp (000)	10.506,00	10.946,20	11.104,80	11.263,40	11.422,00	11.422,00

Tabel 8.4 Penetapan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintahan Kabupaten Pati Tahun 2023–2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
C	Aspek Pelayanan Umum							
	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar							
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
	Persentase SD dengan akreditasi A	%	75,11	81,44	87,63	93,81	100	100
	Persentase SMP dengan akreditasi A	%	58,16	69,39	79,59	89,8	100	100
	Persentase PAUD dengan akreditasi A	%	12,95	17,61	22,27	26,93	31,59	31,59
	Persentase PKBM (nonformal) dengan akreditasi B	%	45,83	58,33	70,83	83,33	91,67	91,67
	Persentase SD yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase SMP yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase PAUD yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pendidikan nonformal yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase SD dengan rasio guru murid 1:20	%	25	27	30	33	35	35
	Persentase PAUD dengan rasio guru murid 1:8	%	30	35	40	45	50	50
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	%	45,45	46	48	49	50	50
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	%	57,37	58,5	60	62	65	65
	Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	%	32,99	33	33,25	33,45	34	34
	Persentase guru Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1	%	75,71	76,5	77	77,5	78	78
	Persentase guru PAUD dengan tingkat pendidikan S1	%	70,47	72	75	80	85	85
	Persentase pendidikan dasar yang memiliki izin	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase PAUD yang memiliki izin	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pendidikan Nonformal yang memiliki izin	%	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
	Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Paripurna	%	30	30	40	50	60	60
	IKM RSUD RAA Soewondo	Angka	81,19	85,3	86,3	87,3	88,31	88,31
	IKM RSUD Kayen	Angka	76,75	85,3	86,3	87,3	88,31	88,31
	IKM Puskesmas	Angka	78,75	85,3	86,3	87,3	88,31	88,31
	Rasio Dokter Spesialis	Angka	11	12	12	12	12	12

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Rasio Dokter Umum	Angka	46	50	50	50	50	50
	Rasio Dokter Gigi	Angka	13	14	14	14	14	14
	Rasio Perawat	Angka	186	200	200	200	200	200
	Rasio Bidan	Angka	122	130	130	130	130	130
	Rasio Perawat Gigi	Angka	18	21	21	21	21	21
	Rasio Apoteker	Angka	13	15	15	15	15	15
	Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian	Angka	26	30	30	30	30	30
	Rasio SKM	Angka	16	18	18	18	18	18
	Rasio Sanitarian	Angka	18	20	20	20	20	20
	Rasio Tenaga Gizi	Angka	15	18	18	18	18	18
	Rasio Keterampilan Fisik	Angka	5	6	6	6	6	6
	Rasio Keteknisian Medis	Angka	16	18	18	18	18	18
	Cakupan ketersediaan obat & perbekalan kesehatan sesuai standart	%	95	90	90	90	90	90
	Indeks Keluarga Sehat	%	0,31	0,37	0,4	0,43	0,45	0,45
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
	Persentase jaringan irigasi dan air baku kewenangan Kabupaten/Kota yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dalam kondisi baik	%	1,794	4,476	5,43	6,506	7,584	7,584
	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Rehabilitasi TPA	%	0	0	0	33,3	0	33,3
	Persentase warga yang mendapatkan akses sanitasi dasar dan layak untuk menuju sanitasi aman.	%	15,45	16,85	17,55	18,25	18,95	18,95
	Persentase Pemenuhan Drainase pada Jalan Kabupaten/Kota	%	13,522	13,611	13,614	13,615	13,617	13,617
	Persentase Trotoar dalam kondisi baik	%	56,75	56,848	56,95	57,05	57,15	57,15
	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	%	80,95	82,57	84,22	85,91	87,63	87,63
	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan kondisi Mantap	%	75,88	76,5	77,15	77,55	77,95	77,95
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	26,8	27	28	29	30	30
	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana	%	85,73	85,83	85,93	86,03	86,13	86,13

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Tata Ruangnya							
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	%	24,92	16	11	5	0	0
	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	%	15,98	20,98	25,98	30,98	35,98	35,98
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang kondisinya baik	lokasi	33	37	39	41	43	43
	Persentase Pengembang Perumahan yang telah memiliki sertifikasi dan registrasi	%	36	50	64	81	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
	Persentase Pelanggaran perda yang tertangani	%	96	97	98	99	100	100
	Rasio Linmas	Angka	62,2	63	64	65	66	66
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan	%	0	30	35	45	50	50
	Persentase Sarana Pemadam Kebakaran dalam kondisi baik	%	80	82	84	86	88	88
	Rasio SDM Pemadam Kebakaran	%	6	6,2	6,4	6,6	6,8	6,8
	Persentase Bangunan Publik yang Memenuhi Standar Penanganan Kebakaran	%	20	21	22	23	24	24
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
	Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	data PMKS							
	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	0	100	100	100	100	100
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
	Cakupan anak terlantar yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	%	0	100	100	100	100	0
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase TMP yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
	Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK	Angka	n-a	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	%	0	31	35	40	45	37,75
	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	%	60,7	65	70	75	82	73
	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja	Angka	1	1	1	1	1	1
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	%	20	25	50	75	100	100
	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	%	0	100	100	100	100	100
	Persentase keterisian data gender dan anak	%	70	80	80	90	90	90
	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	%	0	30	50	60	75	75
	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan							
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur dan	%	11,08	13	14	15	16	16

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah							
	Persentase cadangan pangan,	%	100	100	100	100	100	100
	Jumlah tingkat konsumsi Energi	Kal/kapita	2.133,20	2.150	2.175	2.200	2.225	2225
	Jumlah tingkat konsumsi Protein	Gram/ kapita	65,7	66	66,5	67	67,5	67,5
	Persentase desa rawan pangan	%	24,6	25	24,5	24	23,5	23,5
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	15	25	50	75	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							
	Persentase penanganan permasalahan sengketa tanah garapan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesiapan lahan yang digunakan dalam proses pengusulan kegiatan	%	0	100	100	100	100	100
	persentase aset tanah yang dipetakan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemetaan wilayah	%	17	38	49	60	71	71
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup	dokumen	1	4	1	1	1	7
	Persentase paramater uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	40	42	43	44	45	45
	Persentase paramater uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	70	72	73	74	75	75
	Persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas kawasan perkotaan	%	5,08	5,09	5,09	5,1	5,1	5,1
	Jumlah limbah B3 yang dikelola oleh perusahaan	ton	2500	3000	3000	3000	3000	12000
	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kelompok peduli lingkungan yang aktif	%	50	60	65	70	75	75
	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	%	20	22	23	24	25	25
	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengurangan sampah	%	24	27	28	30	30	30
	Persentase penanganan sampah	%	44	46	47	48	49	49

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
	Persentase layanan KK yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase layanan KTP yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase layanan KIA yang terselesaikan sesuai SOP	%	70	80	82	83	84	84
	Persentase layanan akta lahir yang terlayani	%	78	91	91	92	92	92
	Persentase layanan akta kematian yang terlayani	%	79	90	90	91	92	92
	Persentase layanan akta perkawinan yang terlayani	%	80	100	100	100	100	100
	Persentase layanan akta cerai yang terlayani	%	80	100	100	100	100	100
	Penambahan lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil berdasarkan perjanjian kerjasama	angka	5	5	5	5	5	5
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil	%	40	40	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							
	Persentase Desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik	%	33.42	74.81	79.80	84.79	89.78	89.78
	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Kerjasama	%	7.48	39.90	41.15	42.39	43.64	43.64
	Persentase desa yang tertib administrasi	%	31.92	62.34	67.33	72.32	77.31	77.31
	Persentase BumDes berkembang (omzet/aset nya meningkat)	%	44.64	46.13	47.38	48.63	49.88	49.88
	Persentase Desa yang memperbarui data sistem informasi desa (SID)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	%	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase desa yang meningkat PADes nya	%	46.63	48.38	50.12	51.87	53.62	53.62
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	%	100	100	100	100	100	100
	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	angka	35-39	35-39	35-39	35-39	35-39	35-39
	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	angka	0.582	0.581	0.580	0.579	0.578	0.578
	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet	%	11.99	10	9	8	7	7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	need)							
	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	%	59.66	59.66	60.00	60.25	60.50	60.50
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	%	87	90	94	98	100	100
	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	87,8	90	94	97	100	100
	Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi	%	89,7	92	94	97	100	100
	Persentase Trayek yang aktif	%	99,31	100	100	100	100	100
	Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak	%	77,8	79	81	83	85	85
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
	Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	75,96	76	76,5	76,75	77	77
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	25	33,33	41,67	58,33	75	75
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	%	75,51	81,64	87,77	95,92	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
	Persentase fasilitasi penerbitan izin	%	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	%	0,79	1	1,5	2	2,5	2,5
	Persentase koperasi sehat	%	6,98	7	7,5	8	8,5	8,5
	Persentase kompetensi SDM koperasi	%	29,41	35	40	45	50	50
	Persentase penambahan anggota koperasi	%	28,78	29,5	30	31	32	32
	Persentase peningkatan koperasi baru	%	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi yang mengalami peningkatan omset	Angka	20	20	20	20	20	80
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Peningkatan persentase jumlah perusahaan yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi	%	2,66	2,8	2,9	3	3,1	3,1
	Nilai komitmen penanaman modal	Rp (Miliar)	20	22	25	30	35	112
	Pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan penanaman modal	%	4	5	5	5	5	5
	Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	92,5	93	94	95	96	94,5
	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik	%	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	8,11	9	10	11	12	10,5
	Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	%	4,6	5	6	7	8	6,5
	Persentase cabor yang berprestasi tingkat nasional	%	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	Persentase cabor yang berprestasi tingkat prov/regional	%	33	33	33	33	35	35
	Persentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	%	20	66,6	63,6	72,7	90,9	73,45
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
	Persentase data sektoral yang dikumpulkan dan disebarluaskan	%	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	52,94	56,86	60,78	64,71	68,63	68,63
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	7,77	8,48	9,18	9,89	10,6	10,6
	Jumlah data dan informasi sejarah lokal yang dilestarikan (diinformasikan, disebarluaskan, diajarkan)	angka	2	2	2	2	2	2
	Persentase Cagar budaya yang dilindungi;	%	100	100	100	100	100	24
	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan;	%	11,85	14,81	17,78	20,74	23,7	23,7
	Persentase Cagar Budaya yang dimanfaatkan.	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
	Persentase perpustakaan yang dibina	%	23,54	26,18	29,3	30,85	31,25	31,25
	Pertumbuhan naskah kuno yang dilestarikan	%	23	39,85	39,89	39,91	39,97	39,97
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
	Persentase perangkat Daerah dengan pengelolaan arsip pada level Baik	angka	0	5	10	20	25	25
	Persentase arsip yang dilakukan pemulihan akibat bencana	angka	0	5	8	10	12	12
Urusan Pemerintahan Pilihan								
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan								
	Pertumbuhan Produktivitas perikanan tangkap	%	-17,36	2,41	2,84	2,92	3,01	3,01
	Cakupan nelayan kecil yang terlindungi	%	100	100	100	100	100	100
	Pertumbuhan Produktivitas perikanan budidaya	%	0,5	0,57	0,61	0,68	0,73	0,73
	Penyelesaian kasus pelanggaran sumberdaya perikanan	%	100	100	100	100	100	100
	Prosentase pengolah ikan yang bersertifikat	%	4	5,02	5,06	6	6,06	6,06
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	DTW	1	4	4	4	4	4
	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	%	53,57	82,14	89,29	92,86	100	100
	Peningkatan jumlah kemitraan	%	47,06	64,70	64,70	70,59	76,47	76,47
	Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	%	2,74	3,50	4,00	4,50	5,00	5,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
	Persentase peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Persentase peningkatan populasi ternak	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Persentase kenaikan indek pertanaman	%	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	11,99	12,48	12,73	12,98	13,24	13,24
	Persentase penurunan angka morbiditas hewan	%	4,58	4,48	4,45	4,41	4,38	4,38
	Persentase luasan terdampak yang berhasil ditangani	%	65,74	67,41	68,26	69,13	70	70
	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Persentase kenaikan kelas kelompok lanjut	%	1.69	1.9	1.98	2.05	2.12	2.12
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
	Persentase pedagang yang telah memiliki ijin	%	26,55	27,88	29,28	30,74	32,28	32,28
	Persentase sarana perdagangan yang dibangun/diperbaiki	%	80,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase pelaku perdagangan yang sesuai ketentuan	%	35,85	37,64	39,57	41,59	43,72	43,72
	Pertumbuhan stok komoditas penyumbang inflasi	%	8,81	9,25	9,71	10,2	10,71	10,71
	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen ekspor	pelaku usaha	0	1	1	1	1	4
	Pertumbuhan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	-35,24	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00
	Pertumbuhan jumlah Produk UMKM difasilitasi yang terjual di dalam negeri	%	n/a	20	30	40	50	50
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
	Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	%	0	10	10	15	15	50
	Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang diawasi	%	n/a	40	40	40	40	40
	Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang difasilitasi	%	n/a	60	60	60	60	60
	Persentase Informasi Industri yang Dikelola SIINas	%	0,15	6	6	6	6	24
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
	Sekretariat Daerah							
	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
	Sekretariat DPRD							

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Persentase pelaksanaan tugas DPRD	%	100	100	100	100	100	100
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
	Perencanaan							
	Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKPD Provinsi	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKP	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMN	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMD Provinsi	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100
	Keuangan							
	Proporsi perencanaan dan penganggaran RAPBD terhadap perencanaan dan penganggaran di RKPD	%	100	100	100	100	100	100
	Proporsi kepatuhan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan terhadap peraturan PerUU	%	masih proses audit	99,63	99,7	99,78	99,85	99,85
	Cakupan layanan data dan informasi keuangan daerah yang telah terintegrasi	%	78,57	82,14	85,71	89,29	92,86	92,86
	Prosentase peningkatan manajemen pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara optimal dan akuntabel	%	29,05	33	35	37	39	39
	Pertumbuhan jumlah Objek Pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB	%	7,5	5	5	5	5	5
	Pertumbuhan jumlah Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	%	1,33	1	1	1	1	1
	Kepegawaian							

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	%	122.08	148,9	185,6	239	323	323
	Rasio pegawai fungsional	%	10.53	12	13	14	15	15
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	%	96.01	97	98	99	100	100
	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi/kompetensi	%	72	75	80	85	90	90
	Penurunan pelanggaran disiplin	%	14.28	6,6	7,1	7,7	8,3	8,3
	Pendidikan Dan Pelatihan							
	Persentase ASN yang memiliki kesenjangan kompetensi minimal rendah	%	0	0	40	50	60	60
	Penelitian Dan Pengembangan							
	Persentase penelitian dan pengembangan yang berdasarkan isu strategis daerah	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase hasil penelitian yang didiseminasikan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase inovasi yang difasilitasi daerah	%	15	15	15	20	20	20
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
	Inspektorat Daerah							
	Persentase penurunan temuan	%	3	3	3	3	3	3
	Persentase Rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	%	95	95	95	95	95	95
	Jumlah OPD yang berpredikat WBK	OPD	0	0	1	1	2	2
	Kecamatan							
	Unsur Kewilayahan							
	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian				Kondisi Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	tepatwaktu							
	Unsur Pemerintahan Umum							
	Kesatuan Bangsa Dan Politik							
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila, bela negara dan wasbang dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari	%	-	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pileg dan Pilpres)	%	79	0	79,5	0	0	79,5
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak (Pilgub dan Pilbup)	%	79	0	79,5	0	0	79,5
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkadaes serentak	%	85	85	86	87	88	88
	Persentase ormas yang aktif	%	68	70	72	74	76	76
	persentase sekolah/ormas yang mendapat penyuluhan narkoba	%	0	30	32	34	36	36
	Persentase ketersediaan data intelijen	%	0	100	100	100	100	100

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Daerah akibat dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, sehingga Kabupaten Pati tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum dimana masa jabatan Bupati Pati berakhir pada Tahun 2022. RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
3. RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program pembangunan.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001